

Pedoman CSDP

Kebijakan Umum Keamanan dan Pertahanan
(CSDP) Uni Eropa



PEDOMAN CSDP
KEBIJAKAN UMUM KEAMANAN DAN PERTAHANAN (CSDP) UNI EROPA
Edisi Indo-Pasifik

disunting oleh

Jochen Rehr dan Philip Shetler-Jones

dengan kata pengantar oleh

Josep Borrell

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan
dan Wakil Presiden Komisi Eropa

Klaudia Tanner

Menteri Pertahanan Federal Republik Austria



Dokumen ini dibuat dengan dukungan dari
Uni Eropa dan bantuan finansial dari proyek
“Meningkatkan Kerja Sama Keamanan di dan dengan Asia (ESIWA)”
didirikan bersama-sama oleh Uni Eropa dan Republik Federal Jerman,
dengan kontribusi serupa dari Prancis.

Pernyataan Penyangkalan:

Segala pandangan atau opini yang tertulis di pedoman ini adalah hanya dari
pandangan atau opini penulis dan tidak mewakili pandangan atau opini Uni Eropa
dan Kementerian Pertahanan Federal Republik Austria.

Publikasi dari Kementerian Pertahanan Federal Republik Austria

Penyunting: Jochen Rehrl

Ide dan konsep: Jochen Rehrl

Tata letak: Axel Scala, Andreas Penkler, Armed Forces Printing Centre, Vienna

Dipublikasikan oleh: Direktorat Kebijakan Keamanan Kementerian Pertahanan Federal Republik Austria

Kredit gambar untuk halaman depan: EUTM Mail, EUMM Georgia, EULEX Kosovo, Dati Bendo, Johan Lundahl

Dicetak dan dijilid oleh: Armed Forces Printing Centre, Wina/Austria, 2021 21-00677

© Kementerian Pertahanan Federal Republik Austria Jochen Rehrl

ISBN: 978-3-902275-51-6



AT/028/048



Dicetak berdasarkan Ecolabel
Austria untuk percetakan,
UW-Nr. 943

DAFTAR ISI

1 KEBIJAKAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN BERSAMA

1.1.	Sejarah dan Perkembangan CSDP (Gustav Lindstrom)	16
1.2.	Strategi Global Uni Eropa.....	21
	<i>Gambar: Perdamaian dan Keamanan</i>	26
	<i>Lembar Fakta: Rencana Tindakan Pertahanan Eropa</i>	28
1.3.	Menganalisis Strategi Global Uni Eropa Terkait Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan (Sven Biscop).....	29
1.4.	CSDP – Keadaan Saat ini (Jochen Rehr)	37

2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

2.1.	Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa (Luis Amorim dan Georg Klein).....	44
2.1.1.	Dewan Eropa	44
2.1.2.	Dewan Uni Eropa	48
2.2.	Peran Komisi Eropa dalam CSDP (Diego de Ojeda).....	53
2.3.	Peran Parlemen Eropa dalam CSDP (Jérôme Legrand)	57
2.4.	EEAS dan CSDP (Arnold Kammel dan Jochen Rehr)	65
2.5.	Mekanisme Tanggap Krisis EEAS (Pedro Serrano)*.....	73
2.6.	Kapasitas Analisis Intelijen Tunggal (SIAC) (Jose Morgado dan Radoslaw Jezewski)	76

3 MISI DAN OPERASI CSDP

3.1.	Cara merencanakan dan meluncurkan Misi atau Operasi CSDP (Fernando Moreno)...	80
3.2.	Tantangan Operasi dan Misi Militer (Georgios Tsitsikostas)*	86
3.3.	Tantangan bagi Misi Sipil CSDP (Kate Fearon dan Sophie Picavet)*	92
3.4.	Perjanjian Sipil CSDP (Crista Huisman dan Deirdre Clarke Lyster)	100
3.5.	Fasilitas Perdamaian Eropa (Sebastian Puig Soler)	103

4 TANTANGAN KEAMANAN YANG BERKEMBANG

4.1.	Migrasi dan CSDP (Jochen Rehr)*.....	110
	<i>Lembar Fakta: Perbatasan Eropa dan Pertahanan Laut</i>	118
4.2.	Kontraterorisme dan CSDP (Birgit Löser)*.....	120
4.3.	Keamanan/Pertahanan Siber dan CSDP (Jan Peter Giesecke)*	125
4.4.	Ancaman Hibrida dan CSDP (John Maas)*	131

* Artikel ini adalah cetak ulang dari PEDOMAN CSDP, edisi ke-3, 2017.

5 ISU-ISU PENTING DALAM CSDP

5.1. Gender dan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dalam CSDP (Taina Järvinen)*	138
5.2. Hak Asasi Manusia dan CSDP (Taina Järvinen)*	141
5.3. Aturan Hukum dan CSDP (Daphne Lodder)*	144
5.4. Kerangka Kerja Strategis untuk Mendukung SSR (Karin Gatt Rutter dan Gianmarco Scuppa)*	150

6 KERJA SAMA DAN KOLABORASI

6.1. Kontribusi Baru (Garbriel Visentin)	154
6.2. Kemitraan dalam Keamanan dan Pertahanan (Alison Weston dan Frédéric Maduraud)	158
6.3. Pelatihan untuk Kemitraan (Jochen Rehr)	166
6.4. Hubungan Keamanan Internal dan Eksternal: Kerja Sama CSDP-JHA (Crista Huisman)	173
6.5. Hubungan Keamanan dan Pembangunan (Clément Boutillier)*	178
6.6. Dampak Positif dari Pelatihan Dimensi Kebijakan Keamanan (Jochen Rehr)	187

7 PERKEMBANGAN KEMAMPUAN

7.1. Pembangunan Kapabilitas Sipil dan Militer (Klaus Schadenbauer)	194
7.2. Studi Kasus: Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Keamanan (Luiza-Iulia Pufu)	208
7.3. Studi Kasus: Digitalisasi Pertahanan (Daniel Fiott)	213
7.4. Studi Kasus: Disinformasi (Vicente Diaz de Villegas Roig)	224

Daftar Penulis	231
----------------	-----

* Artikel ini adalah cetak ulang dari PEDOMAN CSDP, edisi ke-3, 2017.

DAFTAR SINGKATAN

A	
AF	Angkatan Bersenjata
AFET	Komite Urusan Luar Negeri (EP)
AIES	Institut Austria untuk Keamanan Eropa
AKU	Unit Pengetahuan Otonom
AMIS	Misi Uni Afrika di Sudan
AMISOM	Misi Uni Afrika di Somalia
APF	Fasilitas Perdamaian Afrika
ARF	Forum Regional ASEAN
ARGUS	Sistem Siaga Umum Cepat dan Aman
ASEAN	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
ASEM	Pertemuan Asia-Eropa
AU	Uni Afrika
B	
BBC	British Broadcasting Corporation
BENELUX	Belgia, Belanda, Luksemburg
BG	Battle Group
BIS	Pernyataan Dampak Pendanaan
C	
C-IED	Perlawanan Alat Peledak Improvisasi
C2	Perintah dan kendali
C3	Perintah, Kendali & Komunikasi
C3I	Perintah, Kendali, Komunikasi & Kecerdasan
CA	Pendekatan Komprehensif
CAR	Republik Afrika Tengah
CARD	Tinjauan Tahunan Terkoordinasi Tentang Pertahanan
CBM	Tindakan Pembangunan Kepercayaan
CBRN	Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir
CBSD	Pembangunan Kapasitas dalam mendukung Keamanan dan Pembangunan
CCC	CSDP Masyarakat Sipil
CCDP	Rencana Pembangunan Kapabilitas Sipil
CD	Destruksi Kreatif
CD	Pertahanan Siber
CDM	Mekanisme Pembangunan Kapabilitas
CDP	Rencana Pembangunan Kapabilitas
CDPF	Kerangka Kerja Kebijakan Pertahanan Siber
CDPF	Kerangka Kerja Kebijakan Pertahanan Siber
CEDC	Kerja Sama Pertahanan Eropa Tengah
CERT	Tim Tanggap Darurat Komputer
CF SEDSS	Forum Konsultasi untuk Energi Berkelanjutan di Bidang Pertahanan dan Keamanan
CHG	Tujuan Utama Sipil
CIP	Perlindungan Infrastruktur Penting
CivCom	Komite untuk Aspek Sipil Manajemen Krisis
CMC	Konsep Manajemen Krisis
CMP	Prosedur Manajemen Krisis
CMPD	Direktorat Perencanaan dan Manajemen Krisis
CoE	Majelis Eropa
COM	Komandan
CONOPS	Konsep Operasi
COPPS	Kantor Koordinasi Dukungan Polisi Palestina (EUPOL)
COREPER	Komite Perwakilan Tetap Pemerintah Negara Anggota
COSI	Komite Tetap untuk Kerja Sama Operasi Tentang Keamanan Internal
COVID	Penyakit virus corona
CPPC	Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil
CPPB	Pencegahan Konflik dan Usaha Perdamaian
CRM	Mekanisme Tanggap Krisis (EEAS)
CS	Keamanan Siber
CSDP	Kebijakan Umum Keamanan dan Pertahanan
CSO	Opsi Strategis Sipil
CT/P-CVE	Kontraterorisme/Pencegahan dan Melawan Ekstrimisme Berbasis Kekeerasan
CT	Kontraterorisme

CVE	Melawan Ekstremisme Berbasis Keke- rasan	EGS	Strategi Global Eropa
	D	EIDHR	Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
DCI	Instrumen Kerja Sama Pembangunan	EIGE	Institut Kesetaraan Gender Eropa
DDoS	Penolakan Layanan secara Terdistri- busi (serangan siber)	eLCIP	eLearning, Keamanan Siber dan Per- forma Internet
DDR	Pelucutan Senjata, Demobilisasi, dan Reintegrasi	ENP	Kebijakan Daerah Sekitar Eropa
DG DEVCO	Direktorat Jenderal untuk Kerja Sama dan Pembangunan Internasional	ENPI	Instrumen Daerah Sekitar dan Kemit- raan Eropa
DG NEAR	Direktorat Jenderal untuk Daerah Sekitar dan Negosiasi Perluasan	EP	Parlemen Eropa
DIF	Pabrik Industri Pertahanan	EPC	Kerja Sama Politik Eropa
		EPF	Fasilitas Perdamaian Eropa
DOTMLPF-I	Doktrin, organisasi, pelatihan/penyu- luhan, materi, kepemimpinan, perso- nalia, fasilitas, dan interoperabilitas	EPRS	Dinas Penelitian Parlemen Eropa
Dr	Doktor	ERDF	Dana Pembangunan Regional Eropa
DSG	Deputi Sekretaris Jenderal	ERGA	Grup Regulator Eropa untuk Layanan Media Audiovisual
	E	ESA	Badan Luar Angkasa Eropa
EAB	Dewan Akademik Eksekutif	ESDC	Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa
EATs	Tim Penasihat Tertanam	ESDI	Identitas Keamanan dan Pertahanan Eropa (NATO)
EBCG	Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (dahulu FRONTEX)	ESDP	Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa
EC	Komisi Eropa	ESF	Dana Sosial Eropa
EC	Masyarakat Eropa	ESS	Strategi Keamanan Eropa
EC	Dewan Eropa	EUBAM	Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa
ECOMIB	ECOWAS Misi di Guinea- Bissau	EUCAP	Misi Pembangunan Kapasitas Uni Eropa
ECOWAS	Masyarakat Ekonomi Negara Bagian Afrika Barat	EUCO	Keputusan Dewan Eropa
ECTS	Transfer Kredit dan Sistem Akumulasi Eropa	EUDEL	Delegasi Uni Eropa
EDA	Badan Pertahanan Eropa	EU	Uni Eropa
EDAP	Rencana Tindakan Pertahanan Eropa	EUFOR	Angkatan Bersenjata Uni Eropa
EDF	Dana Pembangunan Eropa	EUGS	Strategi Global Uni Eropa mengenai Kebijakan Luar Negeri dan Kea- manan
EDIDP	Program Pembangunan Industri Pertahanan Eropa	EU INTCEN	Pusat Intelijen dan Situasi Uni Eropa
EDT	Kemunculan Teknologi Disruptif	EUISS	Institut Uni Eropa untuk Studi Kea- manan
EDTIB	Basis Industri dan Teknologi Perta- hanan Eropa	EUJUST	Aturan Misi Hukum Uni Eropa
EEAS	Layanan Tindakan Eksternal Eropa	EULEX	Aturan Misi Hukum Uni Eropa
EEC	Masyarakat Ekonomi Eropa	EUMAM	Misi Bimbingan Militer Uni Eropa
EGF	Angkatan Bersenjata Gendarmerie Eropa	EUMC	Komite Militer Uni Eropa
		EUMCWG	Kelompok Kerja Komite Militer Uni Eropa
		EUMM	Misi Pengawasan Uni Eropa
		EU MS	Negara Anggota Uni Eropa

EUMS	Staf Militer Uni Eropa
EUNAVFOR	Angkatan Laut Uni Eropa
EUPOL	Misi Kebijakan Uni Eropa
EUR	Euro (mata uang)
EUROJUST	Badan Kerja Sama Peradilan Kriminal Uni Eropa
EUROPOL	Badan Kerja Sama Penegakan Hukum Uni Eropa
EUROSUR	Sistem Pengawasan Perbatasan Eropa
EUSR	Perwakilan Khusus Uni Eropa
EUTM	Misi Pelatihan Uni Eropa

F

FAC	Dewan Urusan Luar Negeri
FCAS	Negara Lemah dan Terdampak Konflik
FHQ	Markas Besar Angkatan Bersenjata
FPA	Perjanjian Partisipasi Kerangka Kerja Perjanjian Kemitraan Kerangka Kerja
FRONTEX	Badan Uni Eropa untuk Manajemen Kerja Sama Operasional di Perbatasan Luar Negara Anggota Uni Eropa (lihat EBCG)
FSJ	Kebebasan, Keamanan, dan Keadilan
FTA	Perjanjian Perdagangan Bebas
FTF	Teroris Asing

G

G20	Kelompok Dua Puluh
G7	Kelompok Tujuh
GAC	Dewan Urusan Umum
GAP	Rencana Tindakan Kesetaraan Gender (Uni Eropa)
GCC	Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Teluk
GCTF	Forum Kontraterorisme Global
GEOINT	Kecerdasan Geospasial
GFAP	Perjanjian Kerangka Kerja Umum untuk Perdamaian
GII	Indeks Ketidaksetaraan Gender
GNI	Pendapatan Nasional Bruto
GNSS	Sistem Satelit Navigasi Global
GPS	Sistem Pemosisian Global
GSC	Sekretariat Jenderal Dewan (Uni Eropa)

H

H.E.	Yang Terhormat
HG	Tujuan Utama
HICGs	Tujuan Kapabilitas Berdampak Besar Berjangka Waktu Pendek dan Menengah
HLGP	Proses Tujuan Utama Uni Eropa
HoA	Tanduk Afrika
HQ	Kantor Pusat/Markas Besar
HR/VP atau HR	Perwakilan Tinggi dan Perwakilan Tinggi (untuk Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan)
HRVP	Wakil Presiden
HTF	Pasukan Tugas Tujuan Utama

I

IA	Pendekatan Terintegrasi
ICS	Sistem Kendali Industri
IcSP	Instrumen berkontribusi untuk Stabilitas dan Perdamaian
ICT	Teknologi Informasi dan Komunikasi
IMD	Rumusan Perintah Militer
IMINT	Kecerdasan Citra
INI	Laporan Inisiatif Mandiri
INSC	Instrumen untuk Kerja Sama Keselamatan Nuklir
IntCen	Pusat Intelijen
INTEL	Intelijen
INTERPOL	Organisasi Polisi Kriminal Internasional
IoT	Internet untuk Segala
IPA	Instrumen untuk Bantuan Pra-Penambahan
IPCR	Tanggap Krisis Politik Terintegrasi
ISAA	Kesadaran dan Analisis Situasi Terintegrasi
ISBN	Nomor Buku Standar Internasional
ISP	Pendekatan Terintegrasi untuk Keamanan dan Perdamaian
ISR	Intelijen, pengawasan, dan pengintaian
ISS	Strategi Keamanan Internal (Uni Eropa)
ITPs	Petunjuk kepada Pihak

J	
JCM	Pertemuan Konsultasi Bersama
JCPOA	Rencana Tindakan Komprehensif Bersama
JHA	Keadilan dan Urusan Dalam Negeri
JSCC	Dukungan Bersama dan Sel Koordinasi
JSSR	Reformasi Bidang Keadilan dan Keamanan

L	
LCC	Pusat Koordinasi LOT
LegAd	Penasihat Hukum
LL	Pelajaran yang didapatkan
LoA	Level Ambisi
LOT	Tim Naradamping dan Observasi
LtGen	Letnan Jenderal
LU	Unit Pembelajaran

M	
MajGen	Mayor Jenderal
MA	Penjinakan Ranjau
MDG	Tujuan Pembangunan Milenium
MD	Direktur Manajemen (EEAS)
MENA	Timur Tengah dan Afrika Utara
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MERS	Sindrom Pernapasan Timur Tengah
MFA	Kementerian Luar Negeri
MFF	Kerangka Kerja Keuangan Multi-Tahunan
MIA	Kementerian Dalam Negeri
MISCA	Misi Dukungan Internasional yang Dipimpin Afrika di Republik Afrika Tengah
MMA	Pengawasan, Pembelajaran, dan Pemanduan
MOD	Kementerian Pertahanan
MOJ	Kementerian Peradilan
MPCC	Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Militer
MQ	Markas Besar Misi
MRE	Edukasi Risiko Ranjau
MSC	Konferensi Keamanan Munich
MS	Negara Anggota
MSO	Opsi Strategis Militer

N	
NATO	Pakta Pertahanan Atlantik Utara
NHQ	Kantor Pusat NATO
NIP	Rencana Implementasi Nasional
NORDEFECO	Kerja Sama Pertahanan Nordik
NRF	Pasukan Tanggap NATO

O	
OC	Kejahatan Terorganisasi
OCCAR	Organisasi Kerja Sama Persenjataan Bersama
ODA	Bantuan Pembangunan Resmi
OECD	Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
OHQ	Markas Besar Operasi
OpCdr	Komandan Operasi
OPLAN	Rencana Operasi
OSCE	Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa
OSINT	Kecerdasan Sumber Terbuka

P	
PA	Tindakan Persiapan
PARP	Tindakan Persiapan untuk Penelitian Pertahanan
PARSEC	Program dukungan untuk meningkatkan keamanan di wilayah Mopti dan Gao untuk manajemen area perbatasan
Mopti-Gao	
PDT	Pelatihan Pra-Penempatan
PESCO	Kerja Sama Terstruktur Tetap
PFCA	Kerangka Kerja Politik untuk Pendekatan Krisis
PfP	Kemitraan untuk Perdamaian (NATO)
PI	Instrumen Kemitraan
PMG	Kelompok Politik-Militer
PMS	Negara Anggota yang Berpartisipasi-PolAd Penasihat Politik
PRISM	Pencegahan konflik, Aturan Reformasi sektor hukum/keamanan, pendekatan terintegrasi, Stabilisasi dan Mediasi
Prof	Profesor
PSC	Komite Politik dan Keamanan

Q	
QMV	Pemungutan Suara Mayoritas yang Memenuhi Syarat
R	
R&D	Riset dan Pembangunan
R&T	Riset dan Teknologi
RC	Katalog Persyaratan
REACT-EU	Bantuan Pemulihan untuk Kohesi dan Wilayah Eropa
RELEX	Pihak Pelaksana Konsuler Hubungan Luar Negeri
REV	Revisi
RMA	Revolusi di Urusan Militer
RoL	Supremasi Hukum
RPAS	Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh
RRF	Fasilitas Pemulihan dan Ketahanan
RTDI	Riset, Pembangunan Teknologi, dan Inovasi
S	
SARS	Sindrom Pernapasan Akut Berat
SASE	Lingkungan Aman dan Terlindungi
SA	Kesadaran Situasional
SatCen	Pusat Satelit
SCADA	Kendali Pengawasan dan Perolehan Data
SCC	Kasus Konteks Strategis
SC	Komite Pengarah
SC	Kompas Strategis
SECDEFPOL	Direktorat Kebijakan Keamanan dan Pertahanan (EEAS)
SECPOL	Direktorat Kebijakan Keamanan dan Pencegahan Konflik
SEDE	Subkomite Keamanan dan Pertahanan (EP)
SESAR	Riset Manajemen Lalu Lintas Udara Eropa Tunggal
SG	Sekretaris Jenderal
SHA	Dukungan Bantuan Kemanusiaan
SIAC	Kapasitas Analisis Intelijen Tunggal
SITCEN	Pusat Situasi Bersama Uni Eropa
SMEs	Usaha Kecil dan Menengah
SOC	Pusat Operasi Keamanan
SOFA	Status Perjanjian Angkatan Bersenjata
SOMA	Status Perjanjian Misi

SOP	Prosedur Operasi Standar
SOR	Pernyataan Persyaratan
SR	Tinjauan Strategis
SSR	Reformasi Sektor Keamanan
SST	Pengawasan dan Pelacakan Luar Angkasa
STRATCOM	Komunikasi Strategis
T	
TCN	Negara Pengirim Pasukan
TEU	Perjanjian Uni Eropa
TFEU	Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa
TWP	Pihak Pelaksana Bidang Terorisme
U	
UK	Inggris Raya
UN	Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
UNGA	Majelis Umum PBB
UNMIK	Misi Pemerintahan Sementara PBB di Kosovo
UNSC(R)	Dewan Keamanan PBB (Resolusi)
US(A)	Amerika Serikat
V	
V4	Grup Visegrad
VP	Wakil Presiden (Komisi Eropa)
VUCA	Volatilitas, Ketidakpastian, Kompleksitas dan Ambiguitas
W	
WB	Balkan Barat
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia
WPS	Perempuan, perdamaian, dan keamanan
Y	
YES	Buku Tahunan Keamanan Eropa (EUISS)

KATA PENGANTAR

Situasi dunia terkini dapat menjadi ‘perubahan besar’, walaupun bukan hal yang positif. Kita menghadapi berbagai risiko dan ancaman global baru seperti perubahan iklim, pandemi global, atau ancaman hibrida termasuk disinformasi, serangan siber, dan terorisme.

Uni Eropa kesulitan membentuk ‘organisasi politik’, yang mampu bertindak sebagai ‘pemain global’, jika EU tidak memiliki kekuatan otonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, otonomi strategis menjadi tujuan utama karena hal tersebut menandakan ‘kapasitas untuk bertindak secara otonomi di saat dan di tempat yang diperlukan dan dengan rekan yang memungkinkan’. Otonomi strategis bukan hal yang mewah, bahkan tidak lebih baik dari ilusi. Jika kita tidak bertindak secara bersama-sama sekarang, kita tidak akan menjadi seperti yang sudah dikemukakan. Otonomi strategis tidak dapat diwujudkan dalam sekejap tetapi merupakan proses jangka panjang guna memastikan Eropa mampu mengelola negaranya masing-masing. Tidak ada yang mampu atau tidak ada yang ingin bertanggung jawab atas masa depan kita kecuali diri kita sendiri.

Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) adalah ‘kartu nama’ global Organisasi kami terkait manajemen krisis. CSDP dengan misi dan operasi yang berfungsi baik sangat penting guna menerapkan prioritas kami berdasarkan strategi global, yaitu keamanan dan pertahanan, membangun negara dan ketahanan sosial, menempuh pendekatan terintegrasi terhadap konflik dan krisis, menguatkan keteraturan regional kooperatif dan membangun sistem berbasis peraturan tata kelola global. Upaya Eropa ini tidak ditanamkan dalam kerja sama dengan rekan di seluruh dunia. Selain itu, memulihkan multilateralisme yang efektif menjadi prioritas utama bagi EU di tahun 2022 ini.

Untuk Uni Eropa sendiri, kami ingin bekerja dengan banyak rekan untuk mempromosikan nilai fundamental dan prinsip yang kami bagikan. Saat ini, Indo-Pasifik telah menjadi ekonomi dunia dan pusat strategi. Bahkan hal ini sudah terbentuk sebelum pandemi dan menjadi semakin kuat sekarang. Pertemuan Samudra India dan Pasifik, terbentang dari Afrika Utara ke Pasifik Barat mewakili wilayah strategis yang terintegrasi. Eropa memegang peranan penting karena kami terhubung

dengan wilayah tersebut baik melalui perdagangan, investasi, dan koneksi keamanan. Hal ini juga menjadi Kompas Strategi yang baru dikembangkan.

Pada Mei 2018, Menteri Luar Negeri Uni Eropa berkomitmen untuk memperluas perjanjian keamanan Uni Eropa di dan dengan negara Asia. Kami sudah membuat proyek “Meningkatkan Kerja Sama Keamanan di dan dengan Asia” (Enhancing Security Cooperation In And With Asia) disingkat ESIWA, untuk menerapkan ambisi ini, dan kami sudah bekerja secara konkret dengan berbagai negara seperti India, Indonesia, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Vietnam pada bidang maritim dan keamanan siber, penanganan terorisme dan ekstremis kekerasan, atau melakukan pelatihan dalam menjaga perdamaian.

Dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa, kami menghabiskan banyak waktu untuk manajemen krisis: Belarus, Ukraina, Ethiopia, Sudan, dll. ditambah hubungan kami dengan kekuatan besar seperti: AS, Rusia, Tiongkok, dll. Hal tersebut adalah hal yang wajar, tetapi menggunakan waktu dan energi yang cukup juga penting untuk wilayah lain dengan tingkat pengembalian per jam atau tarif euro yang dihabiskan lebih besar dibanding wilayah lain. Hal ini termasuk Asia.

Selama 10 tahun, Pedoman CSDP telah menjadi dokumen rujukan bagi pejabat yang bekerja pada bidang Keamanan Umum dan Kebijakan Pertahanan. Diterbitkan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Austria, yang memungkinkan para ahli dari negara anggota Uni Eropa dan masyarakat madani serta akademisi untuk berbagi pandangan, pemikiran, dan penilaian. Saya ingin berterima kasih kepada para ahli atas komitmen dan kontribusinya. Pedoman CSDP adalah bukti kesuksesan yang patut untuk dilanjutkan dan saat ini sudah tersedia dalam beberapa bahasa di negara Asia.

Josep Borrell

Perwakilan Tinggi Uni untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dan Wakil Presiden Komisi Eropa



Dati Bendo

KATA PENGANTAR

Dunia penuh dengan risiko dan ancaman. Saat kami mempersiapkan diri untuk risiko ini, terkadang risiko tersebut datang secara tiba-tiba. Contohnya beragam, ancaman teroris ekstrimis, aliran migrasi ke Eropa tahun 2015, masalah yang disebabkan oleh situasi di Suriah yang semakin memburuk, ancaman siber yang dilakukan oleh kriminal, organisasi non-negara atau negara, dan saat ini krisis Covid. Selain itu, masih ada kemungkinan dampak dari perubahan iklim yang perlu dipertimbangkan. Dunia sudah berubah sedemikian rupa yang tidak bisa kita bayangkan beberapa tahun sebelumnya.

Austria sudah menghadapi ancaman ini dan belajar dari hal tersebut: proses transformasi angkatan bersenjata kami sudah diinisiasi dan saat ini kami sudah mempersiapkan lebih matang untuk menghadapi ancaman tersebut, berkontribusi dalam komitmen internasional kami dan membantu –pada tahap nasional – institusi dan badan lain di dalam pemerintahan kami dalam menangani situasi krisis tertentu. Singkatnya, Angkatan Bersenjata Austria menjadi aktor utama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Meskipun begitu, seperti yang sudah dijelaskan dalam Strategi Keamanan Eropa tahun 2003, tidak ada satu negara pun di Eropa yang mampu menghadapi tantangan tersebut sendirian. Oleh karena itu, kami anggota Uni Eropa menyadari bahwa kerja sama adalah kunci dalam keamanan dan pertahanan untuk menghadapi risiko dan ancaman mendatang. Jika negara anggota Uni Eropa bertindak sendirian, kekuatannya kecil dibanding kekuatan global. Jika bersatu, Uni Eropa memiliki kekuatan dan pengaruh untuk bertindak sebagai pemain global. Bersama dengan para rekan, kami bisa membuat perubahan besar.

Masa depan Uni Eropa dan Indo-Pasifik tidak terpisahkan karena kami saling bergantung pada bidang ekonomi dan memiliki tantangan global yang serupa. Kami mempromosikan arsitektur keamanan regional yang terbuka dan didasarkan aturan, termasuk mengamankan jalur komunikasi laut, pengembangan kapasitas, dan menguatkan angkatan laut di Indo-Pasifik. Kompetisi geopolitik di Indo-Pasifik sangat tinggi teru-

tama pada bidang perdagangan dan rantai pasok serta di bidang teknologi, politik dan wilayah keamanan – yang juga berdampak pada Uni Eropa.

Uni Eropa menerapkan kerangka tindakan dan kegiatan untuk menangani konflik dan krisis eksternal agar lebih koheren dan terpadu dengan cara mempromosikan keamanan manusia dan meningkatkan keamanan di EU dan rekannya. Keamanan dan pertahanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan yang komprehensif. Didukung oleh diplomasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi, semua elemen tersebut memiliki kontribusi penting dan hampir setara untuk menjaga kestabilan.

Pendekatan terintegrasi dan komprehensif dari Uni Eropa dalam manajemen krisis adalah keputusan yang tepat. Kami harus menjamin peran semua aktor yang terlibat agar berjalan mulus dan efisien. Untuk itu, Uni Eropa membutuhkan kemampuan dan pasukan militer dan sipil yang mumpuni, dapat dikerahkan, dapat dioperasikan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran ini, pelatihan dan pendidikan memegang peranan penting. Austria sudah menerbitkan serangkaian pedoman guna membagikan pengetahuan, praktik terbaik, dan membangun diskusi mengenai CSDP. Saya senang bahwa edisi ke-4 panduan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa di Asia yang dapat membantu mempromosikan nilai kerja sama kami dan untuk mencapai sasaran umum.

Klaudia Tanner
Menteri Federal Pertahanan Republik Austria



Andy Wenzel

KATA PENGANTAR

Uni Eropa selama bertahun-tahun telah membangun reputasi sebagai mitra bagi negara-negara di Indo-Pasifik.

Kini, pada masa awal presidensi Indonesia di G20, kawasan tersebut semakin strategis dan penting bagi Eropa, perlu dipahami bahwa Uni Eropa dalam hal ini dipandang bukan hanya sebagai mitra kerja sama pembangunan, mitra perdagangan atau investasi, tetapi juga pelaku politik dan keamanan. Dalam konteks ini, pada tanggal 19 April 2021 Dewan mengadopsi pelaksanaan, ditindaklanjuti dengan Komunikasi Bersama pada Parlemen Uni Eropa dan Dewan pada bulan September 2021 mengenai Strategi Uni Eropa untuk kerja sama di Indo-Pasifik.

Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) adalah 'kartu nama' global Uni kami terkait manajemen krisis. CSDP dengan misi dan operasi yang berfungsi baik sangat penting guna menerapkan prioritas kami berdasarkan Strategi Global, yaitu keamanan dan pertahanan, membangun negara dan ketahanan sosial, menempuh pendekatan terintegrasi terhadap konflik dan krisis, menguatkan keteraturan regional kooperatif dan membangun sistem berbasis peraturan tata kelola global. Mitra Indo-Pasifik mungkin telah berkontribusi terhadap misi dan operasi SCDP Uni Eropa, dan Uni Eropa telah melaksanakan Perjanjian Partisipasi Kerangka Kerja dengan Australia, Republik Korea, Selandia Baru, dan Vietnam.

Selama 10 tahun, Pedoman CSDP telah menjadi dokumen rujukan bagi pejabat yang bekerja di bidang Keamanan Umum dan Kebijakan Pertahanan. Diterbitkan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Austria, yang memungkinkan para ahli dari Negara Anggota Uni Eropa dan masyarakat madani serta akademisi untuk berbagi pandangan, pemikiran, dan penilaian, edisi spesial Indo-Pasifik untuk pedoman CSDP bertujuan untuk menjangkau audiens baru, yang mendukung tujuan Uni Eropa yaitu mendorong partisipasi lebih besar dari mitra Indo-Pasifik pada misi dan operasi CSDP, melaksanakan Perjanjian Partisipasi Kerangka Kerja dengan mitra Indo-Pasifik lainnya, dan mendukung upaya mitra Indo-Pasifik untuk mengembangkan kapasitas pemelihan

raan perdamaian mereka.

Kegiatan CSDP Uni Eropa memiliki riwayat sukses di Indonesia. Lima belas tahun

lalu, Uni Eropa memimpin Misi Pemantauan Aceh yang berhasil mendukung proses perdamaian di provinsi Aceh Indonesia. Uni Eropa dan Indonesia terlibat dalam Dialog Kebijakan Keamanan yang menjadi bukti semakin berkembangnya keterlibatan bilateral dalam perang melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan, mengatasi narkoba, keamanan maritim, keamanan siber, non-proliferasi dan manajemen bencana.

Indonesia adalah pilar keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut dan secara global dan Uni Eropa menjadi pendukung setia hukum internasional dan struktur keamanan kawasan tersebut. Uni Eropa dan Indonesia mendukung multilateralisme dan keteraturan internasional berbasis peraturan. Kecenderungan tersebut memberikan pupuk yang baik guna memperluas kerja sama bilateral untuk beberapa tahun mendatang, khususnya untuk mempromosikan peran wanita dalam operasi perdamaian, pembangunan kapasitas pemeliharaan perdamaian, dan pertukaran antara institusi pendidikan tinggi keamanan dan pertahanan.

Kami berharap bahwa pedoman CSDP ini akan memungkinkan pembaca di Indonesia mempelajari tentang perkembangan terakhir dan serangkaian tindakan CSDP EU dan oleh karena itu akan merangsang gagasan baru untuk kerja sama bilateral lebih lanjut antara Indonesia dan Uni Eropa untuk beberapa tahun mendatang.



Vincent Piket
Duta Besar EU untuk Indonesia &
Brunei Darussalam

PENDAHULUAN



Strategi Global Uni Eropa dari Juni 2016 dan Keputusan Dewan Eropa dari Mei 2018 mengenai “Meningkatkan Kerja Sama Keamanan Uni Eropa di dan dengan Asia” menggarisbawahi komitmen Uni Eropa untuk memperluas kerja sama keamanan di dan dengan Asia dalam membantu jangkauan ekonominya. Kerja sama keamanan Uni Eropa akan menjadi lebih konkret dan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan nilainya sebagai rekan keamanan terpercaya di Asia.

Proyek ini mendukung Dialog Keamanan dan Pertahanan Uni Eropa dengan negara sasaran di Asia melalui kerja sama praktis, pertukaran para ahli dan pengembangan kapasitas, yang dapat membantu membuat dan/atau mempererat hubungan pada tingkat kerja, meningkatkan jaringan dan memberikan informasi hingga masukan mengenai proses politik. Upaya ini bertujuan untuk memperluas dan menyempurnakan hal yang sudah direalisasikan Uni Eropa melalui tindakan politis yang sedang berlangsung.

Pedoman CSDP edisi Asia terbaru ini disesuaikan dengan edisi ke-4 yang diterbitkan pada musim panas 2021 yang membahas topik terkini dan terbaru seperti pandemi, digitalisasi, disinformasi, dan masalah lingkungan serta topik CSDP klasik seperti pengembangan kapabilitas, Perjanjian Sipil CSDP dan Fasilitas Sipil Perdamaian Eropa. Meski begitu, kami sudah berusaha untuk fokus pada topik yang diminati pembaca dan kerangka kerja utama proyek ESIWA. Oleh karena itu, kami sudah merangkum topik terpilih dan informasi lainnya.

Kami ingin berterima kasih kepada para ahli yang berkontribusi untuk publikasi ini; tanpa dedikasi waktu dan pikiran mereka, proyek ini tidak akan terlaksana. Memberikan kredit kepada mereka semua pada akhir pedoman ini hanyalah salah satu bentuk apresiasi atas kerja keras mereka untuk proyek ini. Secara khusus, kami ingin berterima kasih kepada Dr. Arnold Kammel, Kepala Kabinet dan Direktur Kebijakan Pertahanan Kementerian Pertahanan Austria, untuk dukungannya dalam pedoman ini.

Akhir kata, kami harap semua penerima mendapatkan pengalaman membaca yang tak terlupakan, menyenangkan dan membuka cakrawala serta memberikan keyakinan bahwa kerja sama yang didasarkan nilai akan membuat dunia menjadi lebih baik.

Jochen Rehl
Philip Shetler-Jones
ESIWA

1 KEBIJAKAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN BERSAMA (CSDP)

1.1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN CSDP

oleh Gustav Lindstrom



Kisah keberhasilan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa Bersama dimulai di Dewan Eropa di Pörschach pada bulan Oktober 1998 saat Dewan Presidensi Austria: Di foto, baris ke-1: António Guterres (PT), Tony Blair (UK), Jacques Santer (EU), Martti Ahtisaari (FI), Viktor Klima (AT), Jacques Chirac (FR), Gerhard Schröder (DE), Paavo Lipponen (FI), Lionel Jospin (FR); baris ke-2: Jean-Claude Juncker (LU), Bertie Ahern (IE), Costas Simitis (GR), José Maria Aznar (ES), Göran Persson (SE), Jean-Luc Dehaene (BE), Poul Nyrup Rasmussen (DK), Massimo D'Alema (IT), Wim Kok (NL).

Asal usul struktur keamanan dan pertahanan Eropa berasal dari beberapa tahun setelah Perang dunia II. Dimulai pada akhir 1940-an, beberapa inisiatif menjadi pendorong berkembangnya kerja sama di seluruh Eropa. Salah satu contohnya adalah penandatanganan Perjanjian Brussel (1948), yang menabur benih untuk Uni Eropa Barat, dan pembentukan Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa pada tahun 1951, yang menempatkan sumber daya strategis di bawah wewenang supranasional.

Pada akhir 1960-an, Masyarakat Eropa (EC) mulai mencari cara untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri negara anggota. Di Konferensi Tingkat Tinggi Den Haag, yang diadakan pada bulan Desember 1969, para pemimpin Eropa menginstruksikan menteri luar negeri mereka untuk memeriksa kelayakan integrasi yang lebih dekat dalam domain politik. Sebagai tanggapan, konsep Kerja

Sama Politik Eropa (EPC) diperkenalkan dalam Laporan Davignon pada bulan Oktober 1970. Laporan tersebut menjelaskan tujuan EPC, termasuk harmonisasi posisi, konsultasi dan, bila perlu, tindakan bersama. Laporan tersebut juga mencantumkan proses khusus, seperti pertemuan dua tahunan para Menteri Luar Negeri, serta pertemuan kuartal untuk Direktur Politik yang membentuk Komite Politik. Secara keseluruhan, EPC bertujuan untuk memfasilitasi proses konsultasi di antara Negara-Negara Anggota EC.

EPC berfungsi sebagai dasar untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama yang diperkenalkan di Perjanjian Maastricht. Pada saat mulai berlaku yaitu pada tanggal 1 November 1993, perjanjian tersebut menciptakan kerangka kelembagaan tunggal, yaitu Uni Eropa, berdasarkan tiga pilar – yang kedua adalah Kebijakan

Luar Negeri dan Keamanan Bersama. CFSP melampaui EPC. Ini membuat terobosan baru melalui Pasal J(4), yang menyatakan bahwa CFSP mencakup “*semua pertanyaan yang berkaitan dengan keamanan Organisasi, termasuk kemungkinan adanya penyusunan kebijakan pertahanan bersama, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pertahanan bersama.*”

Sementara Uni Eropa mempunyai tujuan ambisius di bidang keamanan dan pertahanan eksternal melalui Perjanjian Maastricht, tidak ada hasil nyata sampai akhir tahun 1990-an, setelah perang pemisahan diri di Balkan – dan perubahan kebijakan di Inggris – yang akhirnya ketentuan konkret diperkenalkan untuk Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa bersama yang dilengkapi dengan kemampuan manajemen krisis yang nyata. Posisi Inggris yang berkembang terlihat selama Dewan Eropa tidak resmi yang diadakan di Pörtschach (24-25 Oktober 1998) di bawah naungan Uni Eropa Presidensi Austria. Seminggu kemudian, para menteri pertahanan Uni Eropa mengadakan pertemuan tidak resmi di Wina, memperkuat seruan untuk Eropa yang lebih proaktif. Peristiwa ini membuka jalan bagi pertemuan bilateral antara Prancis dan Inggris yang diadakan di Saint-Malo, yang dianggap oleh banyak orang sebagai faktor pendorong terwujudnya Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP).

Setelah Deklarasi Saint-Malo pada tahun 1998, banyak konferensi tingkat tinggi Dewan Eropa membahas kemampuan militer dan sipil yang diperlukan untuk memenuhi tugas Petersberg, yang terdiri dari tugas kemanusiaan dan penyelamatan, tugas penjaga perdamaian, dan tugas pasukan tempur dalam manajemen krisis, termasuk perwujudan perdamaian. Beberapa contohnya yaitu Rapat Dewan Eropa di Köln (1999), Rapat Dewan Eropa di Hel-



Javier Solana adalah Perwakilan Tinggi pertama di Uni Eropa dan menjabat di posisi tersebut selama 10 tahun (1999–2009).

sinki (1999), yang memperkenalkan Tujuan Utama 2003, dan Rapat Dewan Eropa di Santa Maria da Feira (2000) yang mengemukakan empat bidang prioritas untuk manajemen krisis warga sipil.

Pada tahun 2003, ESDP mulai beroperasi melalui misi dan operasi ESDP pertama. Sejak tahun 2003, EU telah memulai lebih dari tiga puluh lima misi dan operasi manajemen krisis. Selain itu, EU membawa Strategi Keamanan Eropa pertamanya pada bulan Desember 2003, yang menguraikan ancaman dan tantangan utama yang dihadapi Eropa. Strategi tersebut tetap berlaku sampai presentasi Strategi Global Uni Eropa lanjutan pada bulan Juni 2016.

Dengan berlakunya Perjanjian Lisboa pada 1 Desember 2009, ESDP diubah menjadi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP). Perjanjian Lisboa juga menetapkan jabatan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, menggabungkan dua posisi Perwakilan Tinggi untuk CFSP dan



Langkah pertama menuju Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa



Uni Eropa

Pada tahun 2017, 60 tahun setelah Perjanjian Roma, mitra Uni Eropa melihat Eropa sebagai ‘kekuatan yang diperlukan’ untuk membangun tatanan dunia yang lebih kooperatif. Keamanan Eropa hanya dapat dijamin dengan usaha bersama.

Komisaris Hubungan Eksternal – yang melambangkan perpindahan dari struktur pilar EU.

Perjanjian Lisboa secara resmi mendukung perluasan ‘tugas Petersberg’, yang sekarang mencakup ‘operasi pelucutan senjata bersama, tugas kemanusiaan dan penyelamatan, bimbingan militer dan tugas bantuan, tugas pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian, tugas pasukan tempur dalam manajemen krisis, termasuk perdamaian dan stabilisasi pasca-konflik’ (Pasal 43(1) TEU). Selain itu, tugas-tugas ini dapat membantu perang melawan terorisme, termasuk dengan ‘mendukung negara ketiga dalam memerangi terorisme di wilayah mereka’.

Tugas Petersberg yang diperluas dan hal-hal terkait saat ini dikandung dalam versi konsolidasi Perjanjian Uni Eropa dan Perjanjian Fungsi Uni Eropa. Di antaranya adalah tujuan solidaritas politik dan militer di antara Negara-Negara Anggota EU melalui pencantuman klausul bantuan bersama (Pasal 42(7) TEU) dan klausul solidaritas (Pasal 222 TFEU).

Melalui Strategi Global Uni Eropa tahun 2016, ada momen baru untuk lebih mengembangkan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama. Pada November 2016, misalnya, Dewan Eropa mengadopsi kesimpulan tentang

penerapan Strategi Global Uni Eropa di bidang keamanan dan pertahanan. Kesimpulan tersebut menjelaskan tiga prioritas strategis: menanggapi konflik dan krisis eksternal, membangun kapasitas mitra, dan melindungi Uni Eropa dan warganya. Kesimpulan Dewan November 2018, juga dalam konteks Strategi Global Uni Eropa, memberikan panduan untuk pekerjaan selanjutnya, yang mencakup beberapa bidang seperti CSDP Masyarakat Sipil, kapabilitas perencanaan dan pelaksanaan Militer (MPCC), Kerja Sama Terstruktur Tetap (PESCO), tinjauan tahunan terkoordinasi tentang pertahanan (CARD), Dana Pertahanan Eropa (EDF), Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF), mobilitas militer, dan kerja sama EU-NATO.

Dari inisiatif pertahanan dan keamanan yang disebutkan di atas, Dana Pertahanan Eropa mewakili sebuah inovasi khusus. Untuk pertama kalinya, hal tersebut memungkinkan penggunaan jatah anggaran EU– kerangka keuangan multi-tahunan 2021-2027 – untuk mendanai upaya yang berkaitan dengan inovasi, penelitian, dan pengembangan di sektor pertahanan Eropa. Dalam perkembangan terkait, Komisi Eropa membentuk Direktorat Jenderal Industri Pertahanan dan Luar Angkasa (DEFIS) pada Januari 2020. Tanggung jawab ini sebelumnya dila-

kukan oleh Direktorat Jenderal Pasar Internal, Industri, Kewirausahaan, dan UKM (DG GROW). Melalui perubahan struktural ini, terdapat penekanan dan demarkasi yang lebih jelas dari departemen Komisi yang bertanggung jawab atas kebijakan Uni Eropa tentang industri pertahanan dan luar angkasa.

Membangun Strategi Global Uni Eropa, sebuah inisiatif untuk Kompas Strategis Uni Eropa diluncurkan pada tahun 2020. Ini bertujuan untuk memberikan panduan politik-militer tambahan untuk keamanan dan pertahanan Uni Eropa. Kompas Strategis, yang akan selesai pada sekitar tahun 2022, mencakup analisis ancaman umum yang menggabungkan pandangan negara-negara anggota Uni Eropa tentang ancaman dan tantangan. Selain mempromosikan keselarasan yang lebih besar, Kompas Strategis Enhancing Security Cooperation In And With Asia akan

menetapkan tujuan yang lebih tepat bersama empat pilar utama: manajemen krisis, ketahanan, pengembangan kemampuan, dan kemitraan.

Dari perspektif sejarah, referendum keanggotaan Uni Eropa (Brexit) Inggris Raya yang diadakan pada Juni 2016 juga membuka jalan baru. Dengan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa, perlu waktu untuk sepenuhnya mengukur implikasi terkait keamanan dan pertahanan dari Brexit terhadap CSDP, termasuk dampak yang lebih luas pada kerja sama keamanan dan pertahanan.

LINIMASA SEDERHANA

Tahun	Peristiwa
1945	- Berakhirnya Perang Dunia II
1946	- Pidato Churchill di University of Zurich menyerukan Eropa Serikat
1947	- Peluncuran Program Pemulihan Eropa (Marshall Plan)
1948	- Penandatanganan Perjanjian Brussels (Maret), mendorong gagasan kebijakan pertahanan bersama untuk Eropa
1949	- Penandatanganan Perjanjian Atlantika Utara (April)
1950	- Pembukaan Schuman Plan (Mei)
1951	- Penandatanganan Perjanjian Paris mendirikan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (April, berlaku Juli 1952)
1954	- Kegagalan Masyarakat Pertahanan Eropa (EDC) (Agustus) - Penandatanganan Perjanjian Brussels Modifikasi secara resmi membentuk WEU (Oktober)
1955	- Pembentukan Pakta Warsawa
1956	- Krisis Kanal Suez (Oktober 1956 - Maret 1957)
1957	- Penandatanganan Perjanjian Roma (Maret, berlaku Januari 1958)
1961	- Presentasi Rencana Fouchet (tidak diterapkan)
1970	- Laporan Davignon memperkenalkan gagasan Kerja Sama Politik Eropa (diadopsi Oktober 1970)
1975	- Adopsi Undang-Undang Final Helsinki (Agustus)
1983	- Deklarasi Stuttgart ('Deklarasi Khidmat') (Juni)
1986	- Penandatanganan Undang-Undang Eropa Tunggal (Februari, berlaku Juli 1987)
1989	- Runtuhnya Tembok Berlin (November)

1990	- Penandatanganan Perjanjian Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (November)
1992	- Penandatanganan Undang-Undang Uni Eropa (Februari, <i>berlaku November 1993</i>)
1993	- Pembentukan resmi EUROCORPS (Oktober)
1996	- Pelaksanaan ESDI di dalam NATO di Konferensi Tingkat Tinggi Berlin
1997	- Penandatanganan Perjanjian Amsterdam (Oktober, <i>berlaku Mei 1999</i>)
1998	- Dewan Eropa diadakan di Pörtschach, Austria (Oktober) - Deklarasi Bergabungnya Franco-British di Pertahanan Eropa (Saint-Malo) (Desember)
1999	- Rapat Dewan Eropa Köln dan Helsinki membuat dasar untuk ESDP
2000	- Dewan Eropa Santa Maria da Feira (Juni)
2001	- Penandatanganan Perjanjian Nice (Februari, <i>berlaku Februari 2003</i>) - Pendirian Institut Uni Eropa untuk Studi Keamanan (EUISS) - Pendirian Pusat Satelit Uni Eropa (EUSC)
2002	- Penandatanganan Perjanjian Berlin + (kerja sama EU-NATO) (Desember)
2003	- Operasi dan misi CSDP pertama - Adopsi Strategi Keamanan Eropa (Desember) - Adopsi Perjanjian Berlin Plus
2004	- Tujuan Utama 2010/Tujuan Utama Sipil 2008 (diperbarui pada tahun 2007 hingga CHG 2010) - Pendirian Badan Pertahanan Eropa (EDA)
2005	- Pendirian Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDC)
2007	- Penandatanganan Perjanjian Lisboa di Uni Eropa (Desember, <i>berlaku Desember 2009</i>); institusi, cakupan kegiatan, dan pengambilan keputusan baru di CFSP/CSDP - Pasukan Tempur Uni Eropa mencapai kemampuan operasional secara penuh - Pendirian Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil (CPCC) (Agustus)
2010	- Penandatanganan Perjanjian Pertahanan dan Keamanan antara Inggris Raya dan Prancis (Perjanjian Lancaster House) (November) - Pendirian Layanan Tindakan Eksternal Eropa (EEAS)
2011	- WEU mulai terwujud sebagai organisasi internasional berbasis perjanjian (Juni)
2013	- Dewan Eropa menyelenggarakan debat tematik pertamanya tentang pertahanan sejak berlakunya Perjanjian Lisboa (Desember)
2015	- Pemberlakuan Pasal 42 (7) TEU (Pasal Bantuan Bersama) (November)
2016	- Presentasi Strategi Global Uni Eropa (Juni) - Referendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa (Brexit) (Juni) - Deklarasi Bersama Pertama tentang Kerja Sama EU-NATO (Juli)
2017	- Laporan tentang masa depan Eropa dan seterusnya (Komisi Eropa, Maret) - Metode untuk mengembangkan Tinjauan Tahunan Terkoordinasi Tentang Pertahanan (CARD) (Juni) - Peluncuran Dana Pertahanan Eropa (Juni; diumumkan pada bulan September 2016) - Pendirian Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Militer (MPCC) (Juni) - Keputusan membentuk Kerja Sama Terstruktur Tetap (PESCO) (Desember)
2018	- Peluncuran Inisiatif Intervensi Eropa oleh Prancis (Inisiatif otonom di luar struktur yang ada) (Maret) - Deklarasi Bersama Kedua tentang Kerja Sama EU-NATO (Juli) - Pembentukan kumpulan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) sipil (November)
2020	- Pendirian Industri Pertahanan dan Luar Angkasa (DEFIS) DG di Komisi Eropa (Januari) - Seruan untuk Kompas Strategis (Maret) - Presentasi Tinjauan Tahunan Terkoordinasi Tentang Pertahanan (CARD) pertama (November)
2021	- Akhir dari periode transisi Brexit Inggris Raya - Berlakunya Dana Pertahanan Eropa (EDF)

1.2. STRATEGI GLOBAL UNI EROPA

kompilasi dari situ web EEAS

*Kita butuh Eropa yang lebih kuat.
Ini yang layak didapatkan oleh masyarakat kita,
ini yang seluruh dunia harapkan.*

Strategi Global Uni Eropa: rencana penerapan di bidang keamanan dan pertahanan

Tingkat ambisi



menanggapi konflik dan krisis eksternal



mengembangkan kapasitas mitra



melindungi Uni Eropa dan warganya

Saran tindakan



menetapkan prioritas pembangunan kapasitas



memperdalam kerja sama di antara negara anggota



menyesuaikan struktur, slot, dan instrumen



memajukan kemitraan

Contoh hasil kerja nyata



pembelangan di bidang pertahanan menjadi lebih efisien



tanggapan yang lebih cepat dan lebih baik



perencanaan bersama dan pelaksanaan misi tanpa peperangan



peluang kerja sama terstruktur tetap yang baru

timur, tatanan keamanan Eropa telah dilanggar, sementara terorisme dan kekerasan melanda Afrika Utara dan Timur Tengah, serta Eropa sendiri. Pertumbuhan ekonomi belum melampaui demografi di beberapa bagian Afrika, ketegangan keamanan di Asia meningkat, sementara perubahan iklim menyebabkan masalah lebih lanjut. Namun, ini juga merupakan kesempatan yang luar biasa. Pertumbuhan global, mobilitas, dan kemajuan teknologi – di samping hubungan yang semakin erat – memungkinkan kita untuk berkembang, dan memungkinkan lebih banyak orang untuk keluar dari kemiskinan dan hidup lebih lama dan lebih bebas. Kita akan menjalankan dunia yang sulit, lebih terhubung, bersaing, dan kompleks ini dengan dipandu oleh minat, prinsip, dan prioritas bersama kita. Berdasarkan nilai-nilai yang tertulis di Perjanjian dan peningkatan atas banyaknya kekuatan dan pencapaian bersejarah kita, kita akan bersatu dalam membangun Organisasi yang lebih kuat, memainkan peran bersama di dunia.

KEPENTINGAN DAN PRINSIP BERSAMA KAMI

Uni Eropa akan mempromosikan perdamaian dan menjamin keamanan warga dan wilayahnya. Keamanan internal dan eksternal semakin terjalin: keamanan di dalam negeri bergantung pada perdamaian di luar perbatasan kita.

Uni Eropa akan mendorong kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan harus dirasakan oleh semua dan perlu memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk di Eropa. Kesejahteraan Organisasi juga bergantung pada sistem ekonomi internasional yang terbuka dan adil serta akses berkelanjutan ke kepentingan bersama global. Uni Eropa akan mendorong ketahanan demokrasi. Secara konsisten menjunjung nilai-nilai kita akan menentukan kredibilitas dan pengaruh eksternal.

Kita hidup di masa krisis eksistensial, di dalam dan di luar Uni Eropa. Organisasi kita berada di bawah ancaman. Proyek Eropa kita, yang telah membawa perdamaian, kesejahteraan, dan demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedang dipertanyakan. Di sisi



Uni Eropa akan mempromosikan tatanan global berbasis aturan. Kami berkepentingan untuk mempromosikan aturan yang disepakati guna menyediakan barang umum global dan membantu terwujudnya dunia yang damai dan berkelanjutan. Uni Eropa akan mempromosikan tatanan global berbasis aturan dengan multilateralisme sebagai prinsip utamanya dan PBB sebagai intinya.

Kami akan dipandu oleh prinsip yang jelas. Prinsip tersebut berasal dari penilaian realistis terhadap lingkungan strategis saat ini dan juga dari aspirasi idealis untuk mempromosikan dunia yang lebih baik. Pragmatisme berprinsip akan memandu tindakan eksternal kami di masa mendatang.

Di dunia yang semakin kompleks, kita harus bersatu. Hanya persatuan uni yang kokoh yang memiliki potensi untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, dan demokrasi kepada warganya dan membuat perbedaan positif untuk dunia.

Di dunia yang lebih terhubung, Uni Eropa akan menjalin hubungan dengan pihak lain. Organisasi tidak dapat memutus jembatan guna menangkal ancaman eksternal. Untuk mempromosikan keamanan dan kesejahteraan warga negara kami dan untuk menjaga demokrasi kami, kami akan mengelola sikap saling bergantung, dengan semua peluang, tantangan, dan ketakutan yang ditimbulkannya, dengan melibatkan dunia yang lebih luas.

Di dunia yang penuh persaingan, Uni Eropa akan berjalan berdasarkan rasa tanggung jawab yang kuat.

Kami akan terlibat secara bertanggung jawab di seluruh Eropa dan wilayah sekitarnya di timur dan selatan. Kami akan bertindak secara global untuk mengatasi akar penyebab konflik dan kemiskinan, serta menggalakkan hak asasi manusia.

Uni Eropa akan menjadi pemangku kepentingan global yang bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab harus dibagi. Tanggung jawab berjalan seiring dengan pembenahan hubungan eksternal kami. Dalam menggapai tujuan, kami akan menjangkau negara, badan regional, dan organisasi internasional. Kami akan bekerja dengan mitra inti, negara-negara dan kelompok regional yang berpikiran sama. Kami akan memperdalam kemitraan kami dengan masyarakat sipil dan sektor swasta sebagai pemain kunci di dunia dalam jaringan.

PRIORITAS TINDAKAN EKSTERNAL KAMI

Untuk mempromosikan kepentingan bersama kami, berpegang pada prinsip yang jelas, Uni Eropa akan menargetkan lima prioritas.

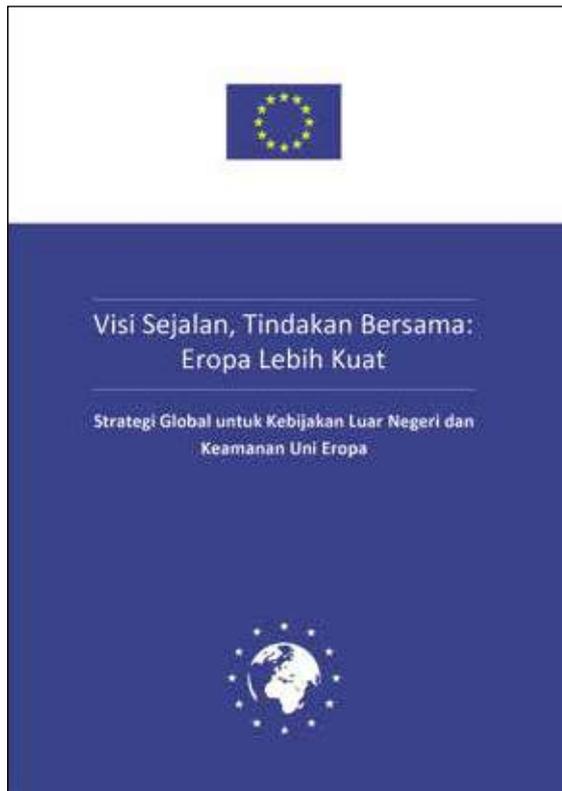
Keamanan Uni Eropa

Strategi Global Uni Eropa dimulai dari rumah. Uni Eropa telah memungkinkan warga untuk menikmati keamanan, demokrasi, dan kesejahteraan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun saat ini terorisme, ancaman hibrida, volatilitas ekonomi, perubahan iklim, dan ketidakamanan energi membahayakan rakyat dan wilayah kami.

Tingkat ambisi dan otonomi strategis yang tepat penting bagi kemampuan Eropa untuk menggalakkan perdamaian dan keamanan di dalam dan di luar perbatasannya.

Oleh karena itu, kami akan meningkatkan upaya pada bidang pertahanan, keamanan siber, kontraterorisme, energi, dan komunikasi strategis.

Negara Anggota harus menjadikan komitmen mereka terhadap sikap saling membantu dan solidaritas yang tertulis di Perjanjian menjadi tindakan nyata. Uni Eropa akan meningkatkan kontribusinya terhadap keamanan kolektif Eropa, bekerja sama dengan mitranya, dimulai dengan NATO.



Ketahanan Negara dan Masyarakat untuk Timur dan Selatan

Masyarakat kami mempunyai keinginan untuk berinvestasi dalam ketahanan negara dan masyarakat di wilayah timur yang membentang hingga Asia Tengah, dan ke selatan hingga Afrika Tengah.

Di bawah kebijakan perluasan Uni Eropa saat ini, proses perluasan yang masuk akal dan berdasarkan pada persyaratan yang ketat dan adil sangat penting untuk meningkatkan ketahanan negara-negara di Balkan Barat dan Turki.

Di bawah Kebijakan Daerah Sekitar Eropa (ENP), banyak orang ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa: daya tarik abadi kita dapat mendorong transformasi di negara-negara ini.

Tetapi ketahanan juga menjadi prioritas di negara-negara lain di dalam dan di luar ENP. Uni Eropa akan mendukung berbagai jalan menuju ketahanan, fokus pada kasus paling akut dari kelemahan pemerintah, ekonomi, sosial dan iklim/energi, serta mengembangkan kebijakan migrasi yang lebih efektif untuk Eropa dan mitranya.

Pendekatan Terintegrasi terhadap Konflik

Ketika konflik kekerasan terjadi, kepentingan bersama kita akan terancam. Uni Eropa akan terlibat secara praktis dan memegang prinsip dalam perwujudan perdamaian, dan mendorong keamanan manusia melalui pendekatan terintegrasi. Menerapkan 'pendekatan komprehensif untuk konflik dan krisis' melalui penggunaan yang tepat dari semua kebijakan yang dimiliki Uni Eropa adalah hal yang sangat penting. Namun, makna dan ruang lingkup 'pendekatan komprehensif' akan diperluas. Uni Eropa akan bertindak di semua tahap siklus konflik, bertindak cepat dalam pencegahan, menanggapi secara bertanggung jawab dan tegas terhadap krisis, berkomitmen dalam stabilisasi, dan menghindari pengunduran dini ketika krisis baru terjadi. Uni Eropa akan bertindak di tingkat pemerintahan yang berbeda: konflik seperti yang terjadi di Suriah dan Libya memiliki dimensi lokal, nasional, regional, dan global yang harus ditangani. Pada akhirnya, tidak satu pun dari konflik tersebut yang dapat diselesaikan oleh kami sendiri. Perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui perjanjian komprehensif yang berakar pada kemitraan regional dan internasional yang jangkauannya luas dan jauh, serta tahan lama, yang akan dibimbing dan didukung oleh Uni Eropa.

Tatanan Regional yang Kooperatif

Di dunia yang terjebak di antara tekanan global dan tekanan lokal, dinamika regional muncul ke permukaan.

Bentuk-bentuk pemerintahan regional yang sengaja dibentuk menawarkan kesempatan kepada negara dan masyarakat untuk mengelola masalah keamanan dengan lebih baik, menuai keuntungan ekonomi dari globalisasi, mengekspresikan budaya dan identitas secara sepenuhnya, dan memproyeksikan pengaruh dalam urusan global. Ini adalah alasan mendasar bagi perdamaian dan pembangunan Uni Eropa pada abad ke-21, dan inilah mengapa kami akan mendukung tatanan regional yang kooperatif di seluruh dunia. Di berbagai wilayah – di Eropa; di Mediterania, Timur Tengah, dan Afrika; sampai Atlantik, baik utara maupun selatan; di Asia; dan di Kutub Utara – Uni Eropa akan bergerak dengan tujuan khusus.

Pemerintahan Global untuk Abad ke-21

Uni Eropa berkomitmen kepada tatanan global berdasarkan hukum internasional, yang menjamin hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan akses abadi terhadap kekayaan global. Komitmen ini diartikan menjadi aspirasi untuk mengubah daripada sekadar melestarikan sistem yang sudah ada. Uni Eropa akan berjuang agar PBB menjadi kuat sebagai landasan tatanan berbasis aturan multilateral, dan mengembangkan tanggapan yang terkoordinasi secara global dengan organisasi internasional dan regional, pelaksana negara dan non-negara.

DARI VISI MENJADI AKSI

Kami akan mewujudkan prioritas kami dengan menggerakkan jaringan khusus kami, kekuatan ekonomi kami, dan semua alat yang kami miliki dengan cara yang saling terhubung. Untuk mencapai tujuan, kami harus secara kolektif berkomitmen dalam Organisasi yang dapat dipercaya, responsif, dan bersatu.

Organisasi *yang Dapat Dipercaya*

Untuk terlibat di dunia secara bertanggung jawab, kredibilitas yang terpenting. Kredibilitas Uni Eropa bergantung pada persatuan, banyaknya pencapaian, daya tarik yang bertahan lama, efektivitas, dan konsistensi kebijakan kami, dan kepatuhan pada nilai-nilai kami. Organisasi yang lebih kuat juga mengharuskan kami memberikan usaha di semua dimensi kebijakan luar negeri. Secara khusus, investasi di bidang keamanan dan pertahanan merupakan sesuatu yang mendesak. Kapabilitas pertahanan yang berkesinambungan diperlukan untuk menanggapi krisis eksternal, membangun kapasitas mitra kami, dan untuk menjamin keamanan Eropa. Negara Anggota tetap berdaulat dalam keputusan pertahanan mereka: walaupun demikian, untuk memperoleh dan mempertahankan banyaknya kemampuan ini, kerja sama pertahanan harus menjadi sebuah norma. Uni Eropa akan secara sistematis mendorong kerja sama pertahanan dan berusaha untuk menciptakan industri pertahanan Eropa yang kuat, yang sangat penting bagi ekonomi Eropa terhadap sebuah keputusan dan tindakan.

Organisasi *yang Responsif*

Tindakan diplomatik kami harus sepenuhnya didasarkan pada Perjanjian Lisboa. Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama harus menjadi lebih responsif. Peningkatan kerja sama antara Negara Anggota harus dijabarkan, dan ini mungkin dapat menciptakan bentuk kerja sama yang lebih terstruktur, memanfaatkan sepenuhnya potensi Perjanjian Lisboa. Kebijakan pembangunan juga perlu lebih fleksibel dan selaras dengan prioritas strategis kami.

Organisasi *yang Terpadu*

Kami harus menjadi lebih terpadu di seluruh kebijakan eksternal kami, antara Negara Anggota dan institusi Organisasi Eropa, dan antara dimensi internal dan eksternal dari kebijakan kami. Hal ini sangat relevan dengan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, migrasi, dan keamanan, terutama kontraterorisme. Kami juga harus secara sistematis mengutamakan isu-isu hak asasi manusia dan gender di seluruh sektor dan institusi kebijakan.

UNI EROPA AKAN DIPANDU OLEH PRINSIP YANG JELAS

Di dunia yang menjadi lebih *kompleks*, kita harus bersatu. Hanya persatuan uni yang kokoh yang memiliki potensi untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, dan demokrasi kepada warganya dan membuat perbedaan positif untuk dunia.

Di dunia yang lebih *terhubung*, Uni Eropa akan menjalin hubungan dengan yang lain. Organisasi tidak dapat memutus jembatan guna menangkalkan ancaman eksternal. Untuk mempromosikan keamanan dan kesejahteraan warga negara kami dan untuk menjaga demokrasi kami, kami akan mengelola sikap saling bergantung, dengan semua peluang, tantangan, dan ketakutan yang ditimbulkannya, dengan melibatkan dunia yang lebih luas.

Di dunia yang penuh dengan *persaingan*, Uni Eropa akan berjalan berdasarkan rasa tanggung jawab yang kuat. Kami akan terlibat secara bertanggung jawab di seluruh Eropa dan wilayah sekitarnya di timur dan selatan. Kami akan bertindak secara global untuk

mengatasi akar penyebab konflik dan kemiskinan, serta menggalakkan hak asasi manusia.

IMPLEMENTASI STRATEGI

Untuk menerapkan Strategi Global Uni Eropa, langkah-langkah tegas telah diambil mengenai keamanan dan pertahanan. Langkah tersebut terdiri dari tiga pilar utama: tujuan politik dan ambisi baru bagi Eropa untuk lebih bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan mereka sendiri; alat keuangan baru untuk membantu Negara Anggota dan industri pertahanan Eropa mengembangkan kemampuan pertahanan ('Rencana Tindakan Pertahanan Eropa') dan serangkaian tindakan nyata sebagai tindak lanjut Deklarasi Bersama EU-NATO yang mengemukakan bidang-bidang kerja sama. Semua ketiga elemen tersebut merupakan kesatuan yang komprehensif untuk meningkatkan keamanan Organisasi dan masyarakatnya.

Terorisme, perdagangan manusia dan penyelundupan, ancaman hibrida yang dilakukan pelaku negara dan non-negara serta ancaman dan tantangan lainnya secara langsung memengaruhi keamanan internal kami dan sering kali memicu krisis dan ketidakstabilan di kawasan sekitar Eropa. *'Bagi sebagian besar orang Eropa, saat ini keamanan adalah prioritas utama'* kata Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Federica Mogherini. Uni Eropa telah mengambil tindakan untuk menanggapi. Uni Eropa akan menjadi aktor yang lebih kuat di kancah internasional untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di wilayah sekitarnya dan lebih jauh lagi. HR/VP Mogherini telah menetapkan cara mencapainya dengan sebuah strategi ('Strategi Global untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa') yang diadopsi pada bulan Juni 2016. Tiga keputusan yang saling terhubung di bidang keamanan dan pertahanan mengubah visi ini menjadi tindakan nyata.

Para menteri pada 14 November 2016 menyepakati **tingkat ambisi baru di bidang keamanan dan pertahanan**. Hal ini berfokus pada tiga prioritas: memungkinkannya Uni Eropa untuk menanggapi secara lebih komprehensif, cepat, dan efektif terhadap krisis, khususnya di lingkungan kami; membantu membuat mitra kami lebih kuat dalam hal keamanan dan pertahanan mereka; dan memperkuat kapasitas Uni Eropa untuk melindungi masyarakat Eropa, dengan bekerja sama lebih erat dalam

hal keamanan. Untuk memenuhi tujuan ini, para Menteri juga menyetujui berbagai tindakan untuk memperkuat kemampuan sipil dan militer, serta struktur dan alat keamanan dan pertahanan Uni Eropa.

Rencana Tindakan Pertahanan Eropa diadopsi oleh Komisi Eropa pada tanggal 30 November 2016. Rencana ini terdiri dari Dana Pertahanan Eropa dan tindakan lain untuk membantu Negara Anggota mendorong penelitian dan lebih efisien dalam membelanjakan di sektor kemampuan pertahanan bersama, sehingga mendorong basis industri yang kompetitif dan inovatif untuk pertahanan dan berkontribusi untuk meningkatkan keamanan masyarakat Eropa.

Dewan Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri NATO pada tanggal 6 Desember 2016 mengadopsi secara paralel seperangkat proposal untuk **kerja sama EU-NATO**. Tindakan ini mengikuti Deklarasi Bersama yang ditandatangani oleh para pemimpin Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal NATO pada Juli 2016. Serangkaian tindakan tersebut terdiri dari 42 proposal nyata untuk pelaksanaan di tujuh bidang kerja sama. Kerja sama EU-NATO dengan demikian dibawa ke tingkat yang baru, pada saat menghadapi tantangan bersama menjadi lebih penting dari biasanya.

KESIMPULAN

Uni Eropa akan menjadi pemangku kepentingan global yang bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab harus dibagi. Tanggung jawab berjalan seiring dengan pembenahan hubungan eksternal kami. Dalam mencapai tujuan, kami akan menjangkau negara, badan regional, dan organisasi internasional. Uni Eropa akan bekerja dengan mitra inti, negara-negara yang berpikiran sama, dan kelompok regional. Kami akan memperdalam kemitraan kami dengan masyarakat sipil dan sektor swasta sebagai pemain kunci di dunia dalam jaringan.

Strategi ini ditopang oleh visi dan ambisi untuk Uni yang lebih kuat, mau dan mampu membuat perubahan positif di dunia. Masyarakat kami berhak memiliki Uni sejati, yang mempromosikan kepentingan bersama dengan terlibat secara bertanggung jawab dan dalam kemitraan dengan pihak lain. Kini pilihan ada di tangan kita untuk mewujudkan konsep tersebut ke dalam tindakan.

ORANG TERLANTAR

Negara teratas

85%

orang terlantar di seluruh dunia ada di negara berkembang



68,5 juta orang terlantar secara paksa

44 400 orang setiap hari dipaksa untuk meninggalkan rumahnya karena konflik dan persekusi

102 800 pengungsi diberikan tempat tinggal



25,4 juta pengungsi, lebih dari setengahnya berusia di bawah 18 tahun

10 juta orang tidak memiliki kewarganegaraan

57% pengungsi di seluruh dunia berasal dari 3

NEGARA GAGAL

Negara Gagal adalah negara yang tidak dapat melaksanakan dua fungsi dasar negara berdaulat: negara tidak dapat menegakkan wewenang di wilayahnya dan negara tidak dapat melindungi batas negaranya.

IKLIM

+1,1°C



Rata-rata suhu global pada 2018 adalah sekitar 1TC di atas rata-rata untuk era pra-industri.

Bencana alam akibat cuaca menyumbang 97% dari semua pemindahan paksa terbaru
46% persen dari itu disebabkan oleh banjir



Pada 2017, ada 18,8 juta pemindahan paksa yang baru terjadi dikarenakan bencana alam



Peningkatan kelangkaan air berdampak pada lebih dari 40% populasi global

KONFLIK AKTIF/BEKU

lebih dari 87 000

orang menjadi korban jiwa akibat konflik negara

131 000



Korban jiwa di kejahatan terorganisasi

90 000

2014

2017



Dari 84 krisis di dunia yang dimonitor oleh International Crisis Group 18 ada di negara yang sedang bernegosiasi untuk bergabung di Uni Eropa atau punya pandangan Eropa (Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Makedonia Utara, Turki) atau di negara yang berada di bawah Kebijakan Daerah Sekitar Eropa - ENP (Algeria, Armenia, Azerbaijan, Mesir, Georgia, Israel, Yordania, Lebanon, Libya, Moldova, Otoritas Palestina, Ukraina, Suriah, Tunisia).

International Crisis Group menaruh perhatian pada risiko eskalasi untuk Ukraina dan Libya.



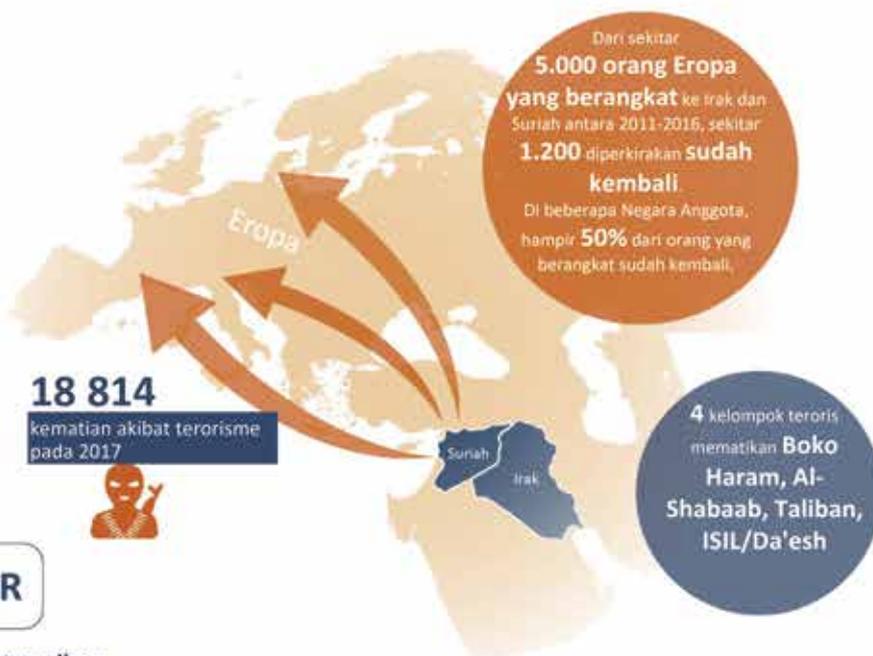
49 konflik negara pada 2017

82 konflik non-negara pada 2017

61% dari ini terjadi di Afrika

TERORISME

Total angka kematian akibat terorisme **berkurang** pada tahun ke-3 berturut-turut, turun sebesar **27%**



KEAMANAN SIBER

Upaya untuk memerangi kejahatan siber **meningkat**, dengan pembelanjaan di bidang keamanan di kerja sama internasional terus meningkat.

Uni Eropa mengadakan dialog siber dengan Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat



> US\$124

pembelanjaan di bidang keamanan informasi di seluruh dunia pada 2019

2% dari emisi CO₂ berasal dari Pusat Data



PROLIFERASI NUKLIR

Penangguhan Perjanjian INF menimbulkan ancaman perlombaan senjata nuklir baru di Eropa

Amerika Serikat akan meningkatkan pembelanjaan hingga **US\$500 miliar** selama dekade berikutnya untuk **mempertahankan** dan **memodernisasi kekuatan nuklirnya**

Iran, Tiongkok, dan DPRK kapasitas kinetik dan kinetik Iran, Tiongkok, dan DPRK telah tumbuh





Rencana Tindakan Pertahanan Eropa

|| *Eropa tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan militer dari pihak lain. Kita harus bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kita dan hidup orang Eropa. Hanya dengan bekerja sama, Eropa akan bisa mempertahankan diri di dalam dan luar negeri.*

Jean-Claude Juncker Negara Uni Eropa - Parlemen Eropa, Strasbourg - 14 September 2016

PERSOALAN BISNIS UNTUK PEMBELANJAAN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KERJA SAMA YANG LEBIH BESAR DALAM PERTAHANANA



Kurangnya kerja sama antara Negara-negara Anggota di bidang pertahanan dan keamanan diperkirakan menelan biaya tahunan antara EUR 25 miliar dan EUR 100 miliar. Ini karena pemborosan, kurangnya persaingan, dan kurangnya skala ekonomi untuk industri dan produksi



Sekitar 80% dari pengadaan di bidang pertahanan murni dijalankan secara nasional, sehingga duplikasi kapabilitas militer menjadi mahal.



Pada tahun 2015, AS menginvestasikan lebih dari dua kali lipat total pengeluaran Negara-negara Anggota Uni Eropa di bi bidang pertahanan. Tiongkok telah meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 150% selama dekade terakhir.



Keterlibatan Eropa yang lebih banyak di bidang pertahanan akan menimbulkan efek spill-over positif pada ekonomi Eropa. **Industri pertahanan Eropa menghasilkan total omzet sebesar EUR 100 miliar per tahun dan 1,4 juta orang yang berketerampilan tinggi secara langsung atau tidak langsung dipekerjakan di Eropa.** Setiap euro yang diinvestasikan di bidang pertahanan menghasilkan untung 1,6, khususnya dalam pekerjaan terampil, penelitian dan teknologi, dan ekspor.

DANA PERTAHANAN EUROPA



1.3. MENGANALISIS STRATEGI GLOBAL UNI EROPA MENGENAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KEAMANAN

oleh Sven Biscop

Uni Eropa, seperti yang kita ketahui, dibentuk pada tahun 1993, ketika Perjanjian Maastricht mulai berlaku dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) yang lama dibentuk menjadi Uni politik yang lebih terbuka yang selanjutnya lahirlah Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP). Pada tahun 1999, angkatan politik-militer ditambahkan ke CFSP; dahulu adalah Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP), sekarang dikenal sebagai Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP).

KETIADAAN STRATEGI

Namun, strategi pertama Uni Eropa, yaitu Strategi Keamanan Eropa (ESS), baru diadopsi empat tahun kemudian, pada tahun 2003. Sebelum masa itu, Negara Anggota sengaja menghindari segala debat strategis karena pandangan mereka yang sangat berbeda tentang tingkat otonomi Kebijakan Uni Eropa terhadap ibu kota dan terhadap Amerika Serikat. Itu tidak menghentikan kemajuan di dimensi lain dari kebijakan luar negeri dan keamanan, namun: sampai hari ini, Negara Anggota sering secara pragmatis setuju untuk tidak setuju di satu aspek, yang memungkinkan mereka untuk bergerak maju di isu-isu yang mereka setuju. Dengan cara inilah mereka dapat membentuk CFSP dan CSDP.

AKAR STRATEGIS

Tidak adanya strategi formal bukan berarti semua tindakan tidak strategis. Selama dekade pertama CFSP, 'cara Eropa' yang tersirat dalam melakukan sesuatu muncul dari praktik pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa, yang ditandai dengan kerja sama dengan negara-negara mitra, penekanan pencegahan konflik, dan pendekatan luas untuk bantuan, perdagangan, dan diplomasi. Pendekatan ini berakar pada hubungan eksternal EEC. Meskipun tidak

memiliki kompetensi formal dalam kebijakan luar negeri, EEC telah mengembangkan hubungan perdagangan yang kokoh di seluruh dunia dan membangun jaringan delegasi yang lebih besar daripada jaringan kedutaan Negara Anggota mana pun.

Strategi tersirat ini menggerakkan pengembangan kemitraan Uni Eropa dan kebijakan jangka panjang, seperti kebijakan pembangunan. Tetapi ini terbukti sepenuhnya tidak cukup saat Uni Eropa dihadapkan pada krisis. Kegagalan Uni Eropa untuk mengatasi perang di Bosnia dan Herzegovina pada awal 1990-an, dan di Kosovo pada 1999, yang mendorong pengembangan kelembagaan CFSP dan CSDP.

MENUJU ESS

Bahkan lembaga yang sempurna juga tidak bisa, bagaimana pun, melaksanakan, jika tidak ada strategi untuk menjalankannya – dan Negara Anggota akhirnya memahami hal ini pada tahun 2003. Pada tahun tersebut, invasi Amerika Serikat ke Irak menciptakan kesenjangan yang besar di Eropa, antara pihak yang ingin mendukung sekutu terpenting mereka, apa pun yang terjadi, dan pihak yang merasa bahwa bahkan sekutu tidak dapat diikuti saat itu jelas melanggar prinsipnya sendiri dan, seperti yang akan segera terungkap, bertindak melawan kepentingannya sendiri. Tetapi apa pun yang dipikirkan Eropa, itu tidak masalah. Ini adalah pelajaran besar dari krisis Irak: saat Eropa terpecah, Eropa tidak memiliki pengaruh.

Ini adalah hal yang mempercepat dorongan tak terduga untuk akhirnya mengadakan debat strategis formal di Uni Eropa dan menghasilkan dokumen rencana strategis. Negara Anggota Uni Eropa perlu menyembuhkan luka yang ditimbulkan dari debat yang sangat emosional tentang Irak dan sekali lagi memproyeksikan citra persatuan ke dunia luar. Mereka juga perlu mengirim pesan ke Amerika Serikat. Mereka yang mendukung invasi ke Irak



Pada tanggal 22 April 2016, HR Mogherini mengemukakan dan membahas idenya untuk strategi global Uni Eropa di konferensi tahunan EUISS di Paris.

ingin memberi sinyal bahwa Eropa masih menjadi sekutu dan peduli terhadap ancaman dan tantangan yang sama seperti Amerika Serikat. Mereka yang menentanginya ingin memperjelas bahwa peduli terhadap ancaman dan tantangan yang sama bukan berarti ingin menyikapinya dengan cara yang sama.

MENYUSUN ESS

Jendela kesempatan ini tidak diabaikan begitu saja. Javier Solana, yang saat itu menjabat sebagai Perwakilan Tinggi, ditugaskan untuk membuat draf pertama, yang disusun oleh tim kecil yang membantunya dan diajukan ke Dewan Eropa pada Juni 2003. Kemudian, alih-alih membahas hal kecil dan melanjutkannya melalui tingkat wewenang badan CFSP, yang merupakan prosedur normal saat merancang teks resmi kebijakan luar negeri Uni Eropa, Solana mengadakan tiga seminar di situ para pejabat yang sama dapat memberikan masukan mereka tentang rancangan tersebut, tetapi bersama perwakilan dari parlemen nasional, dari sekutu dan mitra penting, dan dari

akademisi dan masyarakat sipil. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki yang jauh lebih besar dan menghasilkan teks yang sangat mudah dibaca – ringkas dan tanpa kosakata khusus.

Dokumen final secara resmi diadopsi oleh Dewan Eropa sebagai Strategi Keamanan Eropa pada bulan Desember 2003. Sebuah strategi telah lahir.

DAMPAK ESS

ESS tentu saja bekerja sebagai sebuah narasi. Pada tahun 2003, banyak yang mengira ESS akan cepat terlupakan – tersimpan rapi di laci terkunci, yang kuncinya diberikan kepada NATO. Yang terjadi justru sebaliknya: Keputusan kebijakan luar negeri Uni Eropa terus menggunakan ESS sebagai kerangka keseluruhan, dan para pejabat Uni Eropa dan nasional terus merujuknya saat menjelaskan peran Eropa di dunia, karena ESS mengungkapkannya dengan sangat rapi dan ringkas. Ini penting – dan terus menjadi penting hingga saat ini, karena dalam organisasi yang banyak perbedaan seperti Uni Eropa, yang terdiri dari dua

puluh tujuh Negara Anggota dengan budaya strategisnya masing-masing, kesamaan harus selaku ditekankan.

Tetapi apakah ESS mendorong kebijakan luar negeri Uni Eropa yang proaktif, dan apakah itu membantu Uni Eropa membuat keputusan yang tepat di saat-saat krisis? Di sini gambarannya lebih beragam, karena alasan sederhana yaitu ESS sama sekali bukan strategi yang lengkap. Dalam ESS, Uni Eropa sangat jelas menearangkan nilai-nilainya, dan mewujudkan nilai-nilai itu ke dalam metode yang sangat spesifik: Eropa berusaha menangani berbagai hal dengan cara yang preventif, komprehensif, dan multilateral. Namun, ESS tidak banyak membicarakan cara Uni Eropa – terlepas dari pengakuan umum bahwa, khususnya di bidang militer, lebih banyak sumber daya diperlukan – atau, yang lebih penting, tujuannya. Keputusan untuk memprioritaskan asumsi kepemimpinan dalam menstabilkan wilayah Eropa adalah keputusan yang penting; memilih pendekatan yang lebih tidak langsung di tingkat global adalah konsekuensi logis, karena tidak mungkin untuk memprioritaskan semuanya secara bersamaan. Namun, dalam ESS itu sendiri, tidak ada tujuan umum yang dipecah menjadi prioritas yang lebih spesifik yang dapat mendorong pengambilan keputusan secara rutin. ESS menetapkan *bagaimana* melakukan sesuatu – tetapi tidak benar-benar memberi tahu Eropa *apa* yang harus dilakukan terlebih dahulu.

SERUAN UNTUK REVISI

Penerapan ESS merupakan titik balik, tetapi setelah beberapa tahun, seruan untuk tinjauan strategis mulai terdengar. Pada musim gugur tahun 2007, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt memasukkan revisi ESS ke dalam agenda sebagai tujuan untuk Kepresidenan mereka yang akan datang. Ide ini tidak disambut dengan antusiasme secara universal. Tidak semua yakin bahwa ESS perlu diperbarui, dan beberapa juga khawatir bahwa itu akan memicu perdebatan yang memecah belah, terutama di Rusia, dan Uni Eropa pada akhirnya mendapatkan dokumen yang lebih buruk alih-alih yang lebih baik. Oleh karena itu, mandat yang diungkapkan dengan sedikit hati-hati diberikan kepada Perwakilan Tinggi Javier Solana oleh Dewan Eropa

Desember 2007: *‘untuk memeriksa implementasi Strategi dengan pandangan untuk mengusulkan cara meningkatkan implementasi dan, jika sesuai, cara melengkapinya.’*

Perdebatan diakhiri dengan diterapkannya ‘Laporan Implementasi Strategi Keamanan Eropa – Memberikan Keamanan di Dunia yang Kian Berubah’ oleh Dewan Eropa pada bulan Desember 2008, yang memutuskan untuk membiarkan teks ESS tidak diubah. Laporan tersebut *‘tidak menggantikan ESS, tetapi memperkuat’*, dan ESS tetap berlaku, sementara Laporan akan cepat terlupakan.

MENUJU STRATEGI GLOBAL?

Setelah Perjanjian Lisboa mulai berlaku pada tahun 2009, sejumlah Negara Anggota kembali berupaya untuk memasukkan agenda revisi ESS. Namun, tidak mencapai kesepakatan. Untuk melanjutkan perdebatan, Swedia, Polandia, Italia, dan Spanyol meluncurkan proses *think-tank*, yang pada Mei 2013 menghasilkan laporan tentang Strategi Global Eropa (EGS). Namun, suara para Negara Anggota tetap terpecah mengenai perlunya strategi baru, dan penerus Solana sebagai Perwakilan Tinggi, Catherine Ashton, menentang gagasan tersebut.

Akhirnya, Dewan Eropa Desember 2013, dalam konteks perdebatan tentang pertahanan, hanya bisa menyepakati mandat terselubung bagi Perwakilan Tinggi untuk menilai dampak perubahan lingkungan geopolitik. Dalam istilah awam: menulis strategi?

Saat Perwakilan Tinggi berikutnya, Federica Mogherini, menjabat pada tahun 2014, beliau memberikan dorongan baru untuk debat strategis. Saat beliau menyerahkan penilaiannya tentang lingkungan global Uni Eropa ke Dewan Eropa pada Juni 2015, beliau akhirnya menerima mandat untuk menghasilkan strategi seutuhnya baru.

Meski dengan berat hati dalam banyak kasus, Negara Anggota tidak dapat lagi menyangkal bahwa berbagai krisis di dalam dan sekitar Eropa, ‘poros’ Amerika Serikat ke Asia, dan kebangkitan Tiongkok membutuhkan strategi baru. ‘Strategi Global Uni Eropa tentang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan’ (EUGS) ini disajikan kepada Dewan Eropa oleh HR Mogherini pada tanggal 28 Juni 2016. Banyak pakar menggambarkannya sebagai ilustrasi betapa jauhnya Brussel dari kenyataan – meng-

ajukan strategi eksternal hanya beberapa hari setelah Inggris membuat tantangan internal yang besar dengan memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Tetapi apakah ini akan memberikan gambaran kenyataan dengan lebih baik untuk berpura-pura bahwa, karena keputusan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, dunia di sekitar Eropa juga akan berakhir? Uni Eropa membutuhkan EUGS dan itu *'semakin tepat setelah referendum Inggris'*, seperti yang dinyatakan HR Mogherini dengan jelas dalam kata pengantarnya.

POLITIK PRAKTIS DENGAN KARAKTERISTIK EROPA

EUGS memperkenalkan pendekatan baru yang menyeluruh terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan, yang dapat diartikan sebagai *corrigendum*/ralat untuk ESS. Pada tahun 2003, EU telah menyatakan bahwa, *'Perlindungan terbaik untuk keamanan kita adalah dunia dengan negara-negara demokratis yang diatur dengan baik'*. Sayangnya, menyebarkan konsep pemerintahan yang baik dan demokrasi ternyata lebih sulit dari yang diharapkan, dan ketika ketidakhadiran mereka memicu krisis, Uni Eropa tidak selalu mengerahkan kemauan dan sumber daya untuk menanggapi. Saat ESS terbukti terlalu optimis (dan optimisme adalah kewajiban moral, seperti yang dikatakan Karl Popper), EUGS lebih sadar akan batasan yang diberlakukan oleh kemampuan Uni Eropa sendiri dan oleh kekakuan pihak lain, dan sehingga lebih rendah hati. Ini memetakan jalan antara isolasionisme dan intervensionisme, di bawah judul baru yang oleh EUGS sekarang disebut *'pragmatisme berprinsip'*.

Ini mewakili kembalinya realpolitik. Bukan realpolitik seperti yang sebelumnya sudah dipahami, sebagai tujuan yang diraih dengan segala cara, tetapi politik praktis dalam pengertian asli dari liberal Jerman Ludwig von Rochau sebagaimana dikatakan pada tahun 1853: penolakan terhadap utopianisme liberal, tetapi bukan terhadap cita-cita liberal itu sendiri. Hal ini tentang bagaimana mencapai tujuan dengan cara yang realistis. Seperti yang EUGS katakan, *'keterlibatan yang bertanggung jawab dapat membawa perubahan positif'*.

KEPENTINGAN UNI EROPA

Fakta bahwa, untuk pertama kalinya, sebuah dokumen Uni Eropa mencantumkan kepentingan vital Uni Eropa (yang merupakan terobosan tersendiri) merupakan cerminan dari pendekatan baru ini. Kebijakan adalah tentang kepentingan; jika tidak, tidak ada yang akan terlibat di dalamnya. Itu berlaku untuk Uni Eropa dan juga untuk setiap negara, dan *'tidak ada bentrokan antara kepentingan nasional dan Eropa'*. Kepentingan vital yang dijelaskan oleh EUGS sangat penting bagi semua Negara Anggota: keamanan rakyat dan wilayah Uni Eropa; kesejahteraan (yang, disampaikan oleh EUGS, menyiratkan kesetaraan – jika tidak, kita tidak akan berbicara tentang kesejahteraan *semua* rakyat); demokrasi; dan tatanan global berbasis aturan untuk mewisuda politik kekuasaan.

Menetapkan kepentingan ini terhadap analisis lingkungan global yang telah disampaikan HR Mogherini kepada Dewan Eropa pada Juni 2015, EUGS mengenalkan lima prioritas: (1) keamanan Uni Eropa; (2) wilayah sekitar; (3) cara menghadapi perang dan krisis; (4) tatanan regional yang stabil di seluruh dunia; dan (5) tata kelola global yang efektif. Tiga prioritas pertama secara khusus mencerminkan kesederhanaan atau realisme yang ditegaskan oleh *'pragmatisme berprinsip'*, dengan menekankan keamanan, wilayah sekitar, dan kekuatan besar kita, dan dengan tidak lagi menekankan demokratisasi.

KEAMANAN UNI EROPA

EUGS berfokus pada keamanan Eropa sendiri (yang tidak terlalu dibahas di ESS) dan di wilayah sekitar: *'Kami akan bertanggung jawab terutama di Eropa dan kawasan sekitarnya, sambil mengejar target keterlibatan yang lebih jauh lagi'*. Menyusul serangan teroris di Paris dan Brussel pada tahun 2015 dan 2016, dan krisis pengungsi setelah perang di Libya dan Suriah, menangani keamanan internal dan perbatasan sangat diperlukan agar EUGS dapat dipercaya oleh rakyat dan Negara Anggota.

Fokus pada wilayah sekitar juga dibenarkan oleh batas kemampuan Uni Eropa. Namun, hal itu diartikan dengan sangat luas, melampaui apa yang Brussel sekarang sering menyebut *'tetangganya'* tetangga kita: *'ke timur membentang ke Asia Tengah, dan selatan ke Afrika Tengah'*. Mensta-

bilkan bagian dunia ini bukanlah tugas yang berarti, tetapi EUGS mencapai keseimbangan yang tepat, karena tidak mengabaikan tantangan di Asia (*'ada hubungan langsung antara kesejahteraan di Eropa dan keamanan di Asia'*), serta tantangan di tingkat global (seperti kebebasan global bersama).

WILAYAH SEKITAR

EUGS kurang menekankan tentang demokrasi. Dikatakan bahwa Uni Eropa akan mendukung demokrasi di tempat demokrasi tersebut muncul, karena *'keberhasilan mereka [...] akan bergema di seluruh wilayah masing-masing'* – tetapi di wilayah kami yang luas, EUGS hanya menyebutkan Tunisia dan Georgia sebagai contoh positif. Karena banyak negara lain tidak ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa, EUGS menekankan tentang pengurangan kelemahan negara-negara ini alih-alih mengubah rezim mereka, yang sebenarnya kita miliki tetapi pengaruhnya terbatas. Namun, karena banyak dari negara tetangga kami adalah *'negara represif [yang] secara inheren rapuh dalam jangka panjang'*, sehingga masyarakat sipil yang menjadi sasaran Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan orang dan masyarakat, terutama dengan memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, sehingga seiring waktu, perubahan positif yang tumbuh di dalam negeri akan muncul. Akan tetapi, hal ini membutuhkan dana yang cukup besar.

Menurunkan tingkat ambisi EUGS dalam hal demokratisasi sesungguhnya hanya sebuah penerimaan kenyataan. Hal yang terpenting adalah jujur dengan diri kita sendiri. Uni Eropa tidak dapat mendemokratisasikan Mesir, misalnya, jadi tidak seharusnya berpura-pura bahwa hal itu bisa dilakukan. Pada saat yang sama, seharusnya juga tidak merasa berkewajiban untuk berpura-pura bahwa rezim tersebut adalah teman baik – bukan. Tetapi Uni Eropa memelihara hubungan diplomatik dengan (hampir) setiap negara, tidak hanya dengan teman-temannya, dan bekerja dengan (hampir) setiap negara yang kepentingannya selaras dengan kepentingannya sendiri. Selama rezim otoriter ada, mungkin memang *wajib* untuk bekerja dengan mereka untuk mengatasi masalah yang mendesak; koalisi anti-ISIS adalah contohnya. EUGS tidak banyak bicara tentang dimensi ini: bagaimana kita bisa bekerja

dengan rezim seperti itu, sejalan dengan *'pragmatisme berprinsip'*, tanpa makin memperkuat kekuasaan mereka?

Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ketahanan adalah konsep yang bermasalah. Meningkatkan ketahanan suatu negara terhadap ancaman eksternal dapat dengan mudah mengarah pada peningkatan ketahanan rezim represif. Sementara Uni Eropa harus bersikap tidak menonjol terkait kemampuannya untuk mengubah rezim, tetapi juga tidak boleh mendukung mereka. Oleh karena itu, masuk akal bagi EUGS untuk secara bersamaan mengadvokasi pembangunan kapasitas dan reformasi keadilan, di satu sisi keamanan dan pertahanan, dan di sisi lain perlindungan hak asasi manusia. Penitikberatan pada hak asasi manusia (yang memang harus dibedakan dari demokratisasi) sangat diperlukan, karena seringkali ketahanan dibutuhkan masyarakat saat harus melawan pemerintah mereka sendiri. Tetapi bisakah Uni Eropa memenuhi janji itu? Mungkin *'memerangi ketidaksetaraan'* akan menjadi tujuan yang lebih baik untuk strategi baru terhadap negara tetangga kami di timur dan selatan daripada *'ketahanan'*.

Sebagai catatan, jika Uni Eropa ingin lebih jujur dengan dirinya sendiri, maka (dengan mengecualikan Balkan) *'kebijakan perluasan yang kredibel'* tidak benar-benar ada di bagian wilayah, karena perluasan bukan lagi proyek yang kredibel, terlebih untuk Turki.

PERANG DAN KRISIS

EUGS menunjukkan kesadaran yang jauh lebih besar akan pentingnya instrumen militer yang kredibel. *'Kekuatan lunak dan kekuatan keras berjalan beriringan'*, seperti yang dikemukakan oleh HR Mogherini dengan tepat dalam kata pengantarnya. EUGS tidak menemukan kembali geopolitik itu sendiri – ESS telah menyatakan bahwa *'bahkan di era globalisasi, geografi masih penting'* – tetapi EUGS dapat melihat lebih jauh daripada ESS bahwa beberapa kekuasaan tidak akan ragu untuk menggunakan pemerasan dan kekerasan dalam hal yang mereka anggap sebagai kompetisi geopolitik. Oleh karena itu, ambisi EUGS adalah *'untuk melindungi Eropa, menanggapi krisis eksternal, dan membantu mengembangkan kapasitas keamanan dan pertahanan mitra kami'*. Selanjutnya, upaya kami *'harus memungkinkan Uni Eropa untuk bertindak secara mandiri sembari berkontribusi dan melakukan tin-*

dakan dalam kerja sama dengan NATO. Ini dapat dibaca sebagai Uni Eropa adalah pilar Eropa yang memungkinkan Negara Anggotanya untuk bertindak dengan Amerika Serikat bila memungkinkan, dan tanpa aset Amerika Serikat bila diperlukan.

Kesimpulan bahwa Uni Eropa harus menerapkan *'otonomi strategis'* (seperti yang disebutkan oleh Mogherini) ini disebutkan di seluruh EUGS Pertama, *'ini artinya memenuhi komitmen kita untuk saling membantu dan solidaritas bersama'*, yaitu Pasal 42(7) TEU dan Pasal 222 TFEU. Kedua, di tempat konflik sedang berlangsung, Uni Eropa harus *'melindungi manusia, terutama warga sipil'* dan *'siapa mendukung dan membantu mengkonsolidasikan gencatan senjata lokal'*, kiranya di lingkungan yang luas sebagai prioritas. Ini tetap menjadi usaha yang ambisius, karena perlu pengerahan pasukan angkatan darat yang memiliki kemampuan perang yang mumpuni, didukung oleh dukungan udara dan pasukan cadangan yang memadai, dan di sana tidak hanya untuk mencari dan menghancurkan lawan, tetapi akan bertempur ketika warga sipil di bawah tanggung jawab mereka terancam. Ketiga, Uni Eropa *'berusaha untuk memberikan kontribusi praktis yang lebih besar terhadap keamanan Asia'*, termasuk di wilayah maritim. Yang terakhir, Uni Eropa *'dapat membantu lebih jauh dan menyempurnakan usaha pemeliharaan perdamaian PBB'* sebagai wujud keyakinannya kepada PBB sebagai *'dasar tatanan berbasis aturan multilateral'*.

TATANAN REGIONAL

Fokus pada *'tatanan regional yang kooperatif'* juga mencerminkan kesadaran akan persaingan geopolitik yang sedang berlangsung antara kekuatan global dan regional yang berbeda, termasuk niat untuk memastikan tanggapan yang koheren terhadap inisiatif 'Sabuk dan Jalan' Tiongkok. Senada dengan itu, tujuan memperdalam dialog dengan Iran dan negara-negara GCC tampaknya menjadi awal dari visi baru tatanan regional masa depan di Timur Tengah. Lagi pula, dahulu (dan sekarang) bukan hanya ada satu tetapi beberapa perang yang sedang berlangsung di area yang jelas-jelas berada dalam wilayah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Uni Eropa. Di Rusia, EUGS pada dasarnya menganjurkan kesabaran strategis, sembari membuat *'perubahan substansial dalam hubungan'*

yang bergantung pada penghormatan Rusia terhadap hukum internasional.

MULTILATERALISME YANG EFEKTIF

Prioritas kelima menempatkan dengan tegas tata kelola global kembali ke agenda Uni Eropa, setelah *'multilateralisme yang efektif'* (seperti yang diungkapkan ESS) telah sedikit banyak menghilang dari radar. EUGS secara ambisius menetapkan *'untuk mengubah, alih-alih sekadar melestarikan sistem yang sudah ada'*, untuk mencegah *'munculnya pengelompokan alternatif yang merugikan semuanya'*. Selain itu, di bawah judul ini, program ambisius tentang perdagangan bebas (membayangkan FTA dengan Amerika Serikat, Jepang, Mercosur, India, ASEAN, dan lainnya) dan tentang kebebasan bersama global seolah menjadi tanda akan adanya inisiatif diplomatik yang kreatif – dan penggunaan kebijakan perdagangan Uni Eropa yang lebih strategis, berdasarkan pandangan bahwa itu harus tertanam di strategi secara keseluruhan seperti di Amerika Serikat.

MENCIPTAKAN SEBUAH PROSES

Layaknya semua strategi, EUGS harus diartikan menjadi sub-strategi, kebijakan, dan tindakan untuk mencapai tujuan. Di beberapa bidang, Uni Eropa sangat aktif, terutama di bidang CSDP, dengan pemberlakuan Kerja Sama Terstruktur Tetap (PESCO) dan pembentukan Tinjauan Tahunan Terkoordinasi Tentang Pertahanan (CARD) dan Dana Pertahanan Eropa (EDF). Beberapa dari lima prioritas – misalnya tata kelola global – kurang mendapat perhatian.

TEUGS menyatakan bahwa sebuah *'proses baru dari refleksi strategis akan diluncurkan kapan pun saat Uni Eropa dan Negara Anggotanya menganggapnya perlu'*. Idealnya, EUGS harus ditinjau secara sistematis dan edisi baru diadopsi setelah setiap pemilihan Eropa; EUGS 2016 harus diikuti oleh EUGS 2020, dan seterusnya. Tinjauan strategis adalah cara memaksa diri untuk memikirkan strategi besar setidaknya setiap lima tahun sekali. Terkadang, EUGS mungkin ditinjau dan kesimpulannya bisa saja tidak banyak yang perlu diubah – tetapi dalam kasus itu, semuanya tetap sama karena perubahan dianggap tidak perlu, bukan karena perubahan tidak dipertimbangkan



Uni Eropa, 2016

Strategi Global Uni Eropa dikemukakan di Dewan Eropa pada bulan Juni 2016, tetapi tertutup oleh referendum Brexit (di foto adalah HR Mogherini dan PM Cameron)

sama sekali. Selanjutnya, tinjauan strategis pada awal jangka waktu akan menjadi cara bagi setiap Perwakilan Tinggi untuk menyusun mandatnya sendiri.

Pada tahun 2019, Perwakilan Tinggi yang baru, Josep Borrell, memutuskan untuk melanjutkan EUGS 2016.

SUB-STRATEGI POLITIK-MILITER ATAU 'KOMPAS STRATEGIS'

Berbagai sub-strategi berjalan satu tingkat di bawah EUGS (tentang terorisme, keamanan siber, Sahel, dll.), tetapi tidak ada strategi khusus untuk domain politik-militer.

Perjanjian itu sendiri mencantumkan tugas ekspedisi CSDP, yaitu EUGS menambahkan perlindungan Eropa, meskipun Perjanjian tidak mengatur operasi CSDP di dalam Uni Eropa. Berdasarkan EUGS, Rencana Implementasi Keamanan dan Pertahanan November 2016 mencantumkan tiga tugas (tanggap krisis, pengembangan kapasitas, dan perlindungan Eropa), tetapi EUGS juga menitikberatkan untuk mempertahankan akses bebas ke kekayaan milik bersama sebagai tugas militer. Dalam tugas tanggap krisis, EUGS memprioritaskan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, tetapi dalam kenyataannya, Negara Anggota melakukan operasi militer dengan

tujuan utama untuk menjaga keamanan dan kepentingan ekonomi mereka. Daftar tugas militer Uni Eropa membingungkan dan bertentangan secara inheren.

Selain itu, tidak jelas pada skala apa Uni Eropa akan bersedia melakukan tugas-tugas ini, karena Negara Anggota telah menolak untuk membuka debat mengenai Tujuan Utama. Namun, jelas bahwa tujuan yang dinyatakan (sejak 1999) untuk mengerahkan dan mempertahankan hingga terbentuk pasukan (50 hingga 60.000 tentara) tidak cukup untuk melaksanakan semua tugas secara bersamaan. EUGS juga telah memperkenalkan otonomi strategis sebagai tujuan, tetapi perdebatan tentang apa artinya di bidang pertahanan sejauh ini belum ada titik terang. Sementara itu, di bidang pengembangan kapasitas, PESCO sebenarnya melihat lebih jauh dari CSDP, yaitu mengarahkan seluruh partisipan angkatan bersenjata Negara Anggota dengan tujuan mencapai target nasional, NATO, dan Uni Eropa.

Pada tahun 2019, Jerman mengusulkan penyusunan 'Kompas Strategis'. Idealnya, dokumen semacam itu akan memberikan ungkapan yang jelas tentang tanggung jawab keamanan dan pertahanan yang harus siap dipikul oleh Uni Eropa (melalui CSDP dan kebijakan lainnya), untuk tujuan apa, melalui jenis operasi apa (intensitas tinggi dan rendah) dan pada skala apa, dan sejauh mana ia dapat memikul tanggung jawab tersebut secara bersamaan. Artinya, menjawab beberapa pertanyaan politik sensitif dan (sehubungan dengan CSDP) mewujudkan jawaban tersebut menjadi sebuah tujuan militer yang tepat. Oleh karena itu, Kompas Strategis politik-militer semacam itu harus disusun bersama oleh pihak sipil dan militer EEAS secara bersama-sama.

Untuk memberikan dampak yang sesungguhnya pada CSDP, Kompas Strategis selanjutnya harus membawa ke Tujuan Utama yang baru. Tidak ada gunanya memperjelas tugas jika akhirnya tidak ada keinginan untuk meninjau kembali. Sasaran Utama baru ini kemudian dapat membantu kami memutuskan apa '*kumpulan kekuatan spektrum yang koheren*' (istilah yang digunakan di Pemberitahuan PESCO November 2017) yang kami bangun – sebuah kumpulan yang memungkinkan Negara Anggota Uni Eropa memainkan perannya di NATO dan bertindak secara otonom jika diperlukan.

PILIHAN STRATEGIS UNTUK TAHUN 2020-an

Sejak EUGS digunakan, Uni Eropa telah mengambil keputusan strategis yang penting. Pada bulan Maret 2019, misalnya, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka melihat Tiongkok sebagai mitra strategis, pesaing ekonomi, dan lawan sistemik, semuanya pada saat yang bersamaan. Beijing dengan benar memahami ini sebagai tanda diusahakannya pendekatan Uni Eropa yang lebih transaksional. Uni Eropa tidak lagi mengatakan kepada Tiongkok, 'Bukankah lebih baik jika kau membuka pasar kepada kami saat kami membuka pasar kami untukmu?' Pesan barunya adalah: 'Semuanya akan adil, dan jika kau tidak melakukannya, kami harus membatasi aksesmu. Sehingga, oleh karena itu, mari kita capai timbal balik positif dengan meningkatkan keterbukaan dan transparansi di kedua sisi'. Washington juga mencatat, karena ini adalah pesan untuk Amerika Serikat juga: Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah dan akan tetap menjadi mitra strategis (dan, untuk sebagian besar Negara Anggota Uni Eropa, adalah sekutu formal), tetapi tidak berarti bahwa kekuatan lain adalah musuh Eropa, bahkan jika Amerika Serikat memperlakukan mereka seperti itu. Bagaimana Uni Eropa berurusan dengan kekuatan lain akan bergantung pada penilaian Brussel atas perilaku mereka terhadap Eropa, bukan hanya di Washington.

Pendekatan ke Tiongkok dapat dirangkum sebagai berikut: bekerja sama ketika kau bisa, tetapi tolaklah jika memang harus. Ketika kedua pihak bersedia, kerja sama menjadi mudah. Tindakan menolak lebih sulit, karena tampaknya selalu ada setidaknya satu Negara Anggota Uni Eropa yang menghalangi konsensus. Tetapi tindakan menolak sangat penting untuk memberi sinyal kepada Tiongkok bahwa penggunaan kekuatan yang lebih agresif tidak akan berhasil, serta untuk menegaskan posisi Uni Eropa tentang hak asasi manusia. Jika dalam praktiknya Uni Eropa akhirnya bekerja sama dengan Tiongkok tanpa menolak, itu akan mendorong semacam ketegasan dari Tiongkok bahwa keterlibatan Uni Eropa ingin menghindar.

Penerapan Strategi Hubungan Uni Eropa-Asia (September 2018) dan pembentukan kemitraan hubungan dengan Jepang (September 2019) bersama-sama mewakili keputusan penting Uni Eropa lainnya. Seperti semua strategi yang baik, ide dasarnya sederhana: jika Uni Eropa

merasa bahwa Tiongkok, melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (atau di beberapa tempat, Rusia melalui Uni Ekonomi Eurasia), mendapatkan terlalu banyak pengaruh di negara tempat kepentingan Eropa berada dipertaruhkan, Eropa harus memberikan tawaran yang lebih baik. Oleh karena itu, Uni Eropa berupaya menciptakan hubungan melalui persetujuan, meyakinkan negara-negara bahwa itu adalah kepentingan mereka untuk menciptakan lapangan permainan ekonomi yang setara dan transparan dan terlibat dengan berbagai kekuatan secara bersamaan alih-alih meletakkan semua telur mereka di keranjang Tiongkok atau Rusia. Namun, memindahkan sarana publik dan swasta yang memadai, dan membuat proyek investasi yang layak agar cukup meyakinkan, akan menjadi tantangan besar. Kemitraan dengan Jepang tentu akan membantu Uni Eropa mencapai skala yang dibutuhkan. Harapan telah ditingkatkan, dan Uni Eropa melakukan upaya bersama – tetapi dampak strategis yang nyata tidak akan mudah dicapai.

Semua itu, ini, dan keputusan Uni Eropa baru-baru ini sama dengan reposisi yang hati-hati dalam politik internasional. Kita harus jelas dan menyebutnya sebagai secercah Strategi Besar: sebuah gagasan tentang pergeseran tempat Uni dalam hubungan kekuatan besar yang menentukan politik internasional. Namun, Strategi Besar yang baru lahir itu tidak dimiliki secara merata oleh semua Negara Anggota Uni Eropa atau bahkan oleh semua lembaga Uni Eropa, juga belum dimasukkan ke dalam semua rangkaian kebijakan Uni Eropa yang relevan. Jika implikasinya tidak sepenuhnya dipikirkan dan reposisi berhenti di sini, Uni Eropa dan Negara Anggota berisiko berakhir di posisi ambivalen secara permanen: lebih dari sekadar satelit AS, tetapi juga bukan kekuatan yang benar-benar independen. Sikap setengah-setengah seperti itu akan menjauhkan sekutu dan mitra kita, sekaligus menarik musuh kita. Untuk saat ini, Uni Eropa telah cukup banyak mengganggu Amerika Serikat tetapi tidak cukup untuk mendapatkan keuntungan yang dicari: untuk memajukan kepentingan Eropa dan untuk memainkan peran dalam menstabilkan hubungan kekuatan besar.

MARET 2022
#EUDefence
#StrategicCompass



KOMPAS STRATEGIS UNTUK KEAMANAN DAN PERTAHANAN

Uni Eropa perlu menjadi aktor yang lebih kuat dan mampu di bidang keamanan dan pertahanan: baik untuk melindungi keamanan warganya atau bertindak dalam situasi krisis yang memengaruhi nilai dan Kepentingan Uni Eropa. Dengan Kompas Strategis, Negara-negara Anggota menyetujui visi strategis bersama untuk peran Uni Eropa di bidang keamanan dan pertahanan dan berkomitmen pada serangkaian tujuan konkret dan luas untuk mencapai tujuan ini dalam 5-10 tahun mendatang.



“Eropa harus belajar berbicara bahasa kekuasaan. Selama dekade berikutnya, kita akan membuat gebrakan untuk menjadi penyedia keamanan yang lebih tegas dan kuat, lebih siap untuk mengatasi ancaman dan tantangan saat ini dan di masa depan.”

JOSEP BORRELL

Perwakilan Tinggi Uni untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan/
Wakil Presiden Komisi Eropa

Dunia yang kita hadapi

Visi strategis bersama membutuhkan pemahaman bersama mengenai ancaman dan tantangan yang akan dihadapi Uni Eropa di masa mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan Kompas Strategis dimulai pada November 2020 dengan analisis ancaman komprehensif pertama Uni Eropa. Singkatnya, ini menggambarkan lanskap keamanan Eropa dan global yang lebih rentan, kompleks, dan terfragmentasi dari sebelumnya karena adanya ancaman berlapis. Analisis ancaman ini akan diperbarui secara berkala dan perkembangan sejak penyelesaiannya, khususnya agresi militer Rusia terhadap Ukraina, telah diperhitungkan dalam Kompas Strategis final.



Tingkat global

Melambatnya globalisasi, meningkatnya persaingan ekonomi dan politik antara kekuatan global, perubahan iklim, persaingan untuk sumber daya, instrumentalisasi migrasi tidak teratur, dan ancaman terhadap sistem multilateral.



Tingkat regional

Ancaman militer tradisional dan agresi bersenjata, gangguan/tindakan destabilisasi oleh aktor negara dan non-negara, konflik, kerentanan negara, dan ketegangan antar-negara dan pengaruh eksternal.



Ancaman terhadap Uni Eropa

Aktor negara dan non-negara yang menargetkan Uni Eropa dengan alat hibrida, termasuk penyalahgunaan teknologi yang mengganggu, serangan siber, disinformasi, dan sumber pengaruh nonmiliter merugikan lainnya, dan terorisme.



UNI EROPA SEBAGAI PENYEDIA KEAMANAN, AKTOR GLOBAL, DAN MITRA DI BIDANG KEAMANAN DAN PERTAHANAN

Komitmen Eropa bersatu untuk menjadi Uni Eropa yang kuat di bidang keamanan dan pertahanan sama pentingnya seperti sebelumnya. Membangun tujuan dan tanggung jawab bersama, Kompas Strategis menetapkan target dan pencapaian yang jelas dalam empat alur kerja:

BERTINDAK

- Kapasitas Pengerahan Cepat Uni Eropa yang kuat hingga 5.000 kapasitas
- Latihan langsung di darat dan laut
- Meningkatkan Mobilitas Militer
- Memperkuat misi dan operasi CSDP sipil dan militer
- Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel

MENGAMANKAN

- Toolbox Hibrida dan Tim Tanggap Darurat
- Toolbox Diplomatik Siber dan Kebijakan Pertahanan Siber
- Toolbox Manipulasi dan Interferensi Informasi Asing
- Strategi Luar Angkasa Uni Eropa untuk Keamanan dan Pertahanan
- Kehadiran Maritim Terkoordinasi di seluruh dunia



- Menggunakan anggaran dengan lebih banyak dan lebih baik - pembelanjaan dan insentif di bidang pertahanan untuk kerja sama
- Pemberdaya strategis dan kemampuan generasi berikutnya
- Meningkatkan inovasi teknologi pertahanan untuk mengurangi ketergantungan strategis

- Memperkuat kemitraan strategis dengan NATO dan PBB
- Kerja sama dengan mitra regional (OSCE, AU, ASEAN)
- Kemitraan bilateral yang kuat
- Bantuan militer kepada mitra melalui Fasilitas Perdamaian Eropa

MENGINVESTASIKAN

MITRA

1.4. CSDP – KEADAAN

oleh Jochen Rehr

Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama Uni Eropa merayakan 20 tahun berdirinya pada tahun 2018, setelah peluncuran politiknya pada tahun 1998 di Dewan Eropa informal di Pörtschach, Austria. Misi sipil dan operasi militer pertama diluncurkan pada tahun 2003. Seiring waktu, strukturnya disederhanakan dengan pembentukan ‘Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil’ dan ‘Direktorat Perencanaan dan Manajemen Krisis’. Perjanjian Lisboa membuat ‘Layanan Tindakan Eksternal Eropa’, yang telah menampung struktur CSDP sejak saat itu. ‘Strategi Global Uni Eropa’ memberikan dorongan baru dan panduan strategis untuk pelaksanaan pencegahan, intervensi, dan stabilisasi krisis. Saat ini kita menghadapi tantangan besar sebagai akibat dari pandemi Covid-19, yang telah menghantam Negara Anggota Uni Eropa dengan sebuah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan konsekuensinya, yang akan mengubah pilihan ekonomi dan anggaran untuk beberapa dekade mendatang.

KETIDAKPASTIAN DALAM SKALA GLOBAL

Pandemi bagaimana pun juga bukanlah satu-satunya tantangan. Kita harus bisa mengira akan terjadinya resesi global di beberapa tahun mendatang, ditambah situasi lainnya yaitu ‘perubahan iklim’ yang akan merusak jika tidak segera mengambil tindakan. Selain tantangan tersebut, tantangan lama belum hilang: terorisme, migrasi tidak teratur, serangan siber, disinformasi, dan ancaman hibrida. Selain itu, persaingan antara negara-negara yang lebih besar saat ini (misalnya Amerika Serikat vs Tiongkok vs Rusia) akan meningkat karena tekanan ekonomi memicu perbedaan dan gesekan di antara mereka. Secara keseluruhan, ketidakpastian global tidak pernah lebih besar dari yang terjadi saat ini.

Struktur ancaman

Bagaimana peringkat isu keamanan dalam strategi nasional



Data di sini menunjukkan berapa kali masalah keamanan tertentu digambarkan sebagai ancaman, risiko, tantangan, betegangan, masalah, tekanan atau kerentanan di setiap dari 25 strategi nasional yang dianalisis. Misalnya, perubahan iklim digambarkan sebagai ancaman sebanyak 25 kali di seluruh strategi dan sebagai betegangan sebanyak 8 kali. Beberapa masalah keamanan digambarkan menggunakan beberapa kata sifat.

EU/ISS 2020 / Daniel Ffott

CSDP – BATUAN DI OMBAK YANG MEMECAH

Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama didasarkan pada pelajaran dan pengalaman Eropa yang berasal dari disintegrasi Yugoslavia (1991 – 1999). Akar ini kini menjadi tidak terlihat jejaknya akibat dari perkembangan selama dua dekade terakhir. Uni Eropa telah melakukan beberapa operasi militer, termasuk tiga operasi maritim, beberapa misi pelatihan militer, dan sebagian besar misi sipil, mulai dari supremasi hukum hingga bimbingan tentang perbatasan di tiga benua yang berbeda. Struktur dan prosedur telah disesuaikan dengan kebutuhan, tugas, dan misi saat ini, meskipun struktur inti terdiri dari Komite Keamanan Politik (PSC), Kelompok Politik-Militer (PMG), Komite Militer Uni Eropa (EUMC) dan Komite Aspek Sipil Manajemen Krisis (CIVCOM) tetap tidak berubah.

CSDP – BAGIAN DARI SESUATU YANG LEBIH BESAR

Saat CSDP dibuat, ada beberapa ungkapan yang digunakan seperti ‘paksaan masuk’ atau ‘yang pertama masuk/ yang pertama keluar’. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan pemikiran di balik alat manajemen krisis Uni Eropa, yaitu untuk diintegrasikan ke dalam sesuatu yang lebih besar dari CSDP. Operasi militer dirancang sebagai pembuka pintu, pasukan reaksi cepat, dan sebagai alat pencegahan. Ambisi ini baru terwujud dua kali, di DRC Kongo 2003 dan Chad 2008-2009, ketika Uni Eropa terlibat dahulu dan setelah jangka waktu tertentu menyerahkan operasinya ke PBB. Di banyak tempat lain, Uni Eropa mengambil alih misi dari organisasi lain (misalnya PBB, NATO) dan tidak dalam posisi untuk mempertahankan tujuan masuk/keluar 6 bulan yang awalnya direncanakan. Operasi CSDP tertua adalah EUFOR ALTHEA di Bosnia-Herzegovina, yang diluncurkan pada tahun 2004.

Namun, perkembangan ini juga menunjukkan bahwa CSDP diciptakan untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar, yang pertama kali digambarkan sebagai ‘pendekatan komprehensif’ dan tera-



NATO 2019

Di minggu pertamanya di kantor, Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell bertemu Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di kantor pusat Dinas Tindakan Eksternal Eropa di Brussel pada hari Senin, 9 Desember 2019.

akhir disebut dalam Strategi Global Uni Eropa sebagai ‘pendekatan terintegrasi’, yang artinya sepenuhnya terlibat dalam semua tahap konflik, mulai dari tindakan dini dan pencegahan, jika memungkinkan, hingga tetap di lapangan cukup lama sampai perdamaian dapat tercipta. Penekanan secara khusus fokus pada peringatan dini dan penilaian risiko.

Segera setelah Uni Eropa mengambil keputusan untuk menggunakan CSDP untuk menanggapi situasi tertentu, kebijakan ini menjadi penting bagi keberhasilan ambisi strategis yang lebih luas, yaitu membuat Eropa lebih kuat: aktor yang lebih bersatu dan berpengaruh di dunia yang membuat rakyat merasa aman, mempertahankan kepentingan kita, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kita. Ambisi strategis ini membutuhkan kerja sama dan koordinasi semua alat dan instrumen yang ada di Uni Eropa, dengan tetap memperhatikan organisasi mitra seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, OSCE atau NATO.

STRUKTUR KOHEREN

Alat tanggap krisis Uni Eropa disederhanakan dan sebuah struktur baru dibentuk di dalam Dinas Tindakan Eksternal Eropa. Salah satu dari tiga Deputi Direktur Jenderal ditugaskan untuk CSDP dan tanggap krisis saja dan memimpin ‘Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil’ (CPCC) dan ‘Kapabili-

tas Perencanaan dan Pelaksanaan Militer' (MPCC), termasuk 'Dukungan Bersama dan Sel Koordinasi' (JSCC). Di bawahnya, seorang direktur pelaksana yang bertanggung jawab atas CSDP dan tanggap krisis memimpin dua direktorat, satu bertanggung jawab atas 'Pendekatan Terintegrasi untuk Keamanan dan Perdamaian' dan yang lainnya bertanggung jawab atas 'Kebijakan Keamanan dan Pertahanan'. Keahlian di bidang militer datang dari Staf Militer Uni Eropa, yang melekat pada struktur CSDP dari EEAS dan terintegrasi dengan MPCC. Peran ini akan berkembang lebih lanjut segera setelah MPCC berkembang menjadi Markas Besar Operasi (OHQ) yang sepenuhnya matang dalam waktu dekat.

KETERLIBATAN OPERASIONAL

CSDP lebih dari sekadar kebijakan. CSDP adalah manajemen krisis yang aktif bergerak; oleh karena itu, CSDP juga dapat dilihat sebagai tanda pengenal Uni Eropa di area krisis atau sebagai puncak gunung es sehubungan dengan tindakan eksternal Uni Eropa. Meski begitu, CSDP adalah alat antarpemerintah dan Negara Anggota berada di kursi kemudi. Hanya sarana dan aset yang disediakan oleh Negara Anggota Uni Eropa dan mitranya yang dapat digunakan untuk misi (dengan beberapa pengecualian di pihak sipil). Sebagai prasyarat, misi dan operasi CSDP hanya dapat diluncurkan jika sudah ada keputusan bulat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Jerman, yang memegang Presidensi Uni Eropa di Dewan Uni Eropa pada paruh kedua tahun 2020, menulis dalam programnya:

'Terlampau sering, setiap Negara Anggota memblokir konsensus luas di antara sebagian besar negara – dan itu merusak Organisasi kita. Itulah sebabnya kita akan meminta lebih banyak kesediaan untuk terlibat dalam kerja sama dan kompromi serta untuk menemukan keseimbangan kepentingan dan juga akan melanjutkan upaya kita untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama selama Presidensi Dewan kami, mendukung Perwakilan Tinggi.'

PEMBANGUNAN KAPABILITAS

Salah satu pencapaian besar CSDP adalah kesediaan Negara Anggota Uni Eropa untuk menyediakan kapabilitas yang diperlukan untuk misi dan operasi. Semua paham bahwa kerja sama yang erat di bidang pengembangan kapabilitas tidak hanya akan menghindari duplikasi, tetapi juga akan membantu mengidentifikasi sinergi dan upaya gabungan. Perjanjian CSDP Sipil menyatukan ambisi politik, arah strategis, dan target pengembangan kapabilitas yang diperlukan. Perjanjian tersebut menjadi sebuah peristiwa penting dalam pengembangan CSDP sipil yang akan meningkatkan peran Uni Eropa sebagai penyedia keamanan yang komprehensif.

Di sisi militer, fase baru pengembangan kapabilitas diluncurkan dengan beberapa proses yang saling terkait seperti 'Kerja Sama Terstruktur Tetap' (PESCO), Tinjauan Tahunan Komprehensif tentang Pertahanan (CARD) dan 'Dana Pertahanan Eropa' (EDF), yang didirikan dalam sebuah Direktorat Jenderal Komisi Eropa yang baru dibentuk, yaitu badan supranasional Uni Eropa.

Terlepas dari niat baik, pada akhirnya kerangka keuangan multi-tahunan untuk tahun 2021-2027 akan menunjukkan apakah akan ada pos anggaran yang memadai untuk sektor keamanan dan pertahanan. Dilema serupa dihadapi Fasilitas Perdamaian Eropa di masa mendatang, yang seharusnya menyediakan peralatan yang diperlukan (militer) untuk negara-negara mitra. Alasan dari upaya ini jelas: saat Anda melatih orang dan mengharapkan mereka berkontribusi pada pembentukan masyarakat dan negara berbasis nilai, Anda juga harus melengkapi mereka secara memadai untuk mendukung keberhasilan misi.

KERJA SAMA EU-NATO

Kerja sama yang saling memperkuat dan bermanfaat antara Uni Eropa dan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara harus diharapkan, khususnya mengingat bahwa kedua kantor pusat berada di Brussel, terdapat tumpang tindih yang besar antara negara ang-



Kemitraan adalah inti dari keberhasilan CSDP (foto: konferensi tingkat tinggi informal Balkan Barat di Brussel pada bulan Februari 2020).

gota Uni Eropa dan NATO, hanya ada satu kumpulan pasukan, dan nilai/kepentingan kedua organisasi sebagian besar dimiliki bersama. Namun, pelaksanaan kerja sama tidak semudah yang diharapkan. Berdasarkan perjanjian Berlin plus yang ditandatangani pada akhir tahun 2002 dan deklarasi politik tahun 2016 dan 2018, kedua organisasi telah meningkatkan kerja sama dan secara teratur mengadakan pertemuan bersama dalam berbagai format (misalnya Komite Politik dan Keamanan bersama dengan Dewan Atlantik Utara), telah mempunyai berbagai bidang kerja sama dan telah mengatur kontak dari staf ke staf secara teratur. Namun, belum ada terobosan praktis.

Inisiatif pertahanan baru dari Uni Eropa (CARD, PESCO) memiliki potensi untuk mencairkan suasana, tetapi akar penyebab dari gesekan (politik) tetap ada. Latihan bersama dan pengarahan bersama dapat membantu mengatasi kesulitan tertentu, tetapi

selama tidak ada konsensus politik yang dicapai, kemajuannya akan terbatas. Namun, upaya 'mobilitas militer' tampaknya akan menciptakan ruang untuk penyempurnaan yang semoga akan mengarah pada pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan kedua organisasi, dengan sepenuhnya menghormati otonomi dan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, timbal balik, dan inklusivitas.

KOMPAS STRATEGIS

Selama dua tahun ke depan, dokumen kebijakan keamanan akan disusun untuk lebih merinci tujuan strategis Uni Eropa di sektor keamanan dan pertahanan serta membuat kegiatan Uni Eropa lebih responsif, efektif, dan dapat direncanakan, dalam

kerangka Strategi Global 2016 untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa dan berdasarkan analisis ancaman bersama. Analisis ancaman bersama juga akan menjadi karakteristik yang membedakannya dari proyek-proyek sebelumnya. Ini akan bersifat berbasis intelijen dan harus mengarah ke pemahaman strategis bersama. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ancaman ini harus memfasilitasi usaha lebih lanjut di tingkat ambisi, penetapan prioritas dalam proses pengembangan kapabilitas dan pemilihan area misi.

BREXIT

Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa telah berdampak nyata pada CSDP. Markas Besar Operasional untuk Operasi Atalanta untuk EUNAVFOR Somalia telah dipindahkan dari Northwood, Inggris ke Rota, Spanyol. Kontribusi Inggris untuk operasi CSDP pada dasarnya sederhana, tetapi yang akan hilang adalah keahlian (dan, terkadang, perbedaan pendapat) dari pejabat dan petugas Inggris di badan-badan Uni Eropa terkait CSDP, termasuk staf militer Uni Eropa.

Namun, BREXIT juga menawarkan peluang untuk lebih banyak integrasi Uni Eropa di bidang pengembangan kapabilitas (misalnya PESCO) dan rantai komando Eropa (misalnya MPCC dan potensi OHQ Uni Eropa). Inggris adalah salah satu pengawas yang fokus menjaga keseimbangan 'duplikasi yang tidak perlu' vs membangun aset/sarana Uni Eropa dalam konteks kerja sama EU-NATO.

CSDP – KEMITRAAN ADALAH SEBUAH INTI

Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) telah menjadi proyek terbuka sejak awal. Pendekatan terintegrasi artinya tidak hanya memanfaatkan semua kekuatan Uni Eropa, tetapi juga bekerja dengan organisasi internasional dan regional, seperti PBB, OSCE, NATO dan Uni Afrika, serta dengan negara-negara non-Uni Eropa. Uni Eropa dan mitra ini dapat saling memanfaatkan pengetahuan, keah-

lian, dan kemampuan khusus milik satu sama lain, sehingga membuat mereka menjadi lebih dekat.

Dua wilayah yang paling banyak berkontribusi di misi dan operasi CSDP sebagai pihak ketiga adalah Balkan Barat dan Kemitraan Timur. Sebagian besar negara-negara ini memiliki Perjanjian Kemitraan Kerangka Kerja (FPA), yang memfasilitasi potensi kontribusi mereka untuk misi dan operasi secara praktis. Sampai saat ini, 20 perjanjian tersebut telah ditandatangani, dan saat ini sepuluh mitra berpartisipasi dalam 12 dari 17 misi dan operasi CSDP yang telah dibuat. Hal ini juga menciptakan pengalaman bersama di lapangan dan membawa para mitra lebih dekat dengan Uni Eropa.

KESIMPULAN

CSDP telah menjadi bidang kebijakan yang berkembang pesat. Momentum ini akan menjadi lebih berarti karena tidak jelasnya batas antara keamanan internal dan eksternal, antarmuka antara perubahan iklim dan keamanan, dan hubungan antara pembangunan dan keamanan. CSDP sekarang perlu beradaptasi dengan tantangan baru; berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun keterlibatannya, CSDP dapat membuat perbedaan di konflik dan krisis di seluruh dunia, dan memberikan nilai tambah yang diperlukan agar Eropa menjadi lebih aman di dunia yang lebih baik, yang sudah menjadi ambisi strategis Uni Eropa di 2003.

2 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. DEWAN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA (PERAN DALAM KONTEKS CFSP DAN CSDP)

oleh Luis Amorim dan Georg Klein

2.1.1. DEWAN EROPA

Dewan Eropa memberikan dorongan yang diperlukan Organisasi untuk berkembang dan menentukan arah dan prioritas politik umum Organisasi, termasuk di bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP)¹.

Berdasarkan Pasal 22 dan 26 Perjanjian tentang Uni Eropa (TEU), Dewan Eropa menyatakan kepentingan dan tujuan strategis Organisasi di bidang CFSP dan di bidang lain dari tindakan eksternal Organisasi. Dalam melaksanakannya, Dewan Eropa bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 21 TEU: demokrasi, supremasi hukum, keuniversalan dan tidak dapat dipisahkannya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan dan solidaritas, dan penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Dewan Eropa adalah salah satu dari tujuh lembaga Organisasi, sejak berlakunya Perjanjian Lisboa pada tanggal 1 Desember 2009.² Dewan ini terdiri dari Kepala Negara atau Pemerintah Negara Anggota (yaitu Presiden atau Perdana Menteri), bersama dengan Pre-



Charles Michel, Presiden Dewan Eropa

siden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Perwakilan Tinggi Organisasi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (Perwakilan Tinggi) juga berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Eropa tempat dibahasnya urusan luar negeri.

Dewan Eropa memilih Presidennya sendiri dengan pemungutan suara mayoritas bersyarat, untuk masa jabatan dua setengah tahun, dapat diperpanjang satu kali. Sifat pos yang 'tetap' ini adalah salah satu inovasi utama yang diperkenalkan oleh Traktat Lisboa³. Selain menyelenggarakan dan memimpin pertemuan dan mendorong kerja Dewan Eropa, serta memastikan

1 CSDP merupakan bagian integral dari CFSP dan bertujuan untuk menyediakan Organisasi penyusunan kapasitas operasional aset sipil dan militer, bahwa Organisasi dapat menggunakan misi dan operasi CSDP di luar Organisasi untuk pemeliharaan perdamaian, pencegahan konflik, dan penguatan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. Kinerja tugas-tugas tersebut dilakukan dengan menggunakan kapabilitas yang disediakan oleh Negara Anggota. CSDP juga diharapkan mencakup pembangkitan progresif dari kebijakan bersama pertahanan Organisasi, yang akan membawa ke pertahanan bersama, saat Dewan Eropa, bertindak dengan suara bulat memutuskan, sepenuhnya sesuai dengan persyaratan konstitusional Negara Anggota (Pasal 42 TEU)

2 Dewan Eropa dibentuk pada tahun 1974 dan diresmikan oleh Undang-Undang Eropa Tunggal pada tahun 1986. Antara tahun 1961 dan 1974, tujuh pertemuan tingkat tinggi para Kepala Negara atau Pemerintah telah diselenggarakan untuk menilai titik balik yang berbeda dari sejarah Komunitas Eropa.

3 Ungkapan 'permanen' harus dibaca bertentangan dengan mandat Presidensi Dewan Uni Eropa, yang dipegang oleh setiap Negara Anggota untuk periode enam bulan dalam satu waktu, secara bergilir.



Gedung Eropa adalah kediaman pusat dari Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa.

persiapan dan kelangsungan kerjanya dalam kerja sama dengan Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa juga memastikan, sesuai jabatan dan wewenangnya, perwakilan eksternal Organisasi tentang isu mengenai CFSP, tanpa mengurangi kekuasaan Perwakilan Tinggi. Perlu dicatat bahwa Perwakilan Tinggi dinominasikan oleh Dewan Eropa dan diharapkan untuk memastikan, antara lain, pelaksanaan keputusan Dewan Eropa di bidang CFSP dan CSDP.

Sejak berlakunya Perjanjian Lisboa, Dewan Eropa memiliki tiga Presiden 'tetap': mantan Perdana Menteri Belgia Herman Van Rompuy (2009-2014), mantan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk (2014-2019), dan mantan Perdana Menteri Charles Michel, yang menjabat pada Desember 2019.

Dewan Eropa tidak menjalankan fungsi legislatif dan, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, mengambil keputusannya melalui konsensus. Di bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, Dewan Eropa biasanya bertindak berdasarkan suara bulat. Jika diadakan pemungutan suara, baik Presiden Dewan Eropa maupun Presiden Komisi tidak ambil bagian. Sekretariat Jenderal Dewan membantu Dewan Eropa.

Dewan Eropa bertemu setidaknya dua kali setiap enam bulan. Presiden dapat memutuskan untuk meng-

adakan pertemuan khusus Dewan Eropa jika situasinya mengharuskan. Ini telah terjadi selama krisis migrasi, di bawah Presidensi Herman Van Rompuy, tetapi juga dalam konteks perkembangan yang berhubungan dengan CFSP di lingkungan terdekat Uni Eropa, seperti Mediterania Timur atau Eropa Tengah, di bawah Presidensi Charles Michel.

Dewan Eropa selalu sangat memperhatikan masalah CFSP, termasuk CSDP. Berikut adalah peristiwa penting politik dalam konteks spesifik CSDP yang patut disoroti:

Kesimpulan Presidensi Dewan Eropa 12-13 Desember 2003 (dok. 5381/04): Dewan Eropa menggunakan Strategi Keamanan Eropa (ESS), yang memberikan konsep kerangka kerja untuk CFSP, termasuk yang nantinya menjadi CSDP.

Kesimpulan Dewan Eropa 11-12 Desember 2008 (dok.17271/1/08 REV 1, Lampiran 2): Deklarasi Dewan Eropa tentang peningkatan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP).

Kesimpulan Dewan Eropa 19-20 Desember 2013 (EUCO 217/13): Untuk pertama kalinya sejak berlakunya Perjanjian Lisboa, Dewan Eropa mengadakan debat tematik tentang pertahanan, yang didahului dengan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dewan Eropa di



Uni Eropa, 2017

Kepala Negara atau Pemerintah Uni Eropa bertemu secara informal pada 10 Maret 2017 untuk menyiapkan peringatan 60 tahun Perjanjian Roma.

pertemuan ini menyatakan tindakan prioritas untuk kerja sama yang lebih kuat di bawah tiga bidang utama: (1) meningkatkan efektivitas, visibilitas, dan dampak CSDP; (2) meningkatkan pengembangan kapabilitas, dan (3) memperkuat industri pertahanan Eropa.

Kesimpulan Dewan Eropa 25-26 Juni 2015 (EUCO 22/15): Dewan Eropa menugaskan Perwakilan Tinggi untuk melanjutkan proses refleksi strategis dengan maksud mempersiapkan strategi global Uni Eropa mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan dalam kerja sama erat dengan Negara Anggota, untuk diserahkan ke Dewan Eropa paling lambat Juni 2016.

Kesimpulan Dewan Eropa 28 Juni 2016 (EUCO 26/16): Dewan Eropa menyambut baik presentasi Strategi Global untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa yang dibawakan oleh Perwakilan Tinggi dan mengundangnya, Komisi, dan Dewan untuk melanjutkan pekerjaan. Dewan Eropa juga membahas kerja sama EU-NATO di depan Sekretaris Jenderal NATO dan menyerukan peningkatan hubungan lebih lanjut, mengingat tujuan dan nilai bersama mereka dan adanya tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Selatan dan Timur. Di pertemuan ini juga diumumkan

bahwa Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa akan mengeluarkan deklarasi bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO, di pertemuan tingkat menteri NATO di Warsawa pada tanggal 8 Juli 2016.

Kesimpulan Dewan Eropa 15 Desember 2016 (EUCO 34/16): Dewan Eropa menekankan bahwa Eropa harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanan mereka. Untuk memperkuat keamanan dan pertahanan Eropa dalam lingkungan geopolitik yang menantang dan untuk melindungi rakyatnya dengan lebih baik, dan menegaskan komitmen sebelumnya dalam hal ini, Dewan Eropa menekankan perlunya berbuat lebih banyak, termasuk dengan menyediakan sumber daya tambahan yang memadai, sambil memperhatikan keadaan nasional dan komitmen hukum. Dewan Eropa juga mendesak tindakan cepat untuk menindaklanjuti kesimpulan Dewan tanggal 14 November 2016 tentang penerapan Strategi Global Uni Eropa di bidang Keamanan dan Pertahanan dan kesimpulan Dewan tanggal 6 Desember 2016 tentang penerapan Deklarasi Bersama yang ditandatangani di Warsawa oleh para pemimpin Uni Eropa dan NATO.



Pertemuan Dewan Eropa di Brussel pada bulan Desember 2019

Kesimpulan Dewan Eropa 22-23 Juni 2017 (EUCO 8/17): Mengingat terjadinya sejumlah serangan teroris di Inggris pada tahun itu, Dewan Eropa menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kerja sama Uni Eropa di bidang keamanan dan pertahanan eksternal guna melindungi Organisasi rakyatnya dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di wilayah sekitar dan di mana saja. Menyoroti pentingnya pengembangan kapabilitas bersama di dalam Organisasi Dewan Eropa menyambut baik proposal Dana Pertahanan Eropa dan Program Pembangunan Industri Pertahanan Eropa, dan menyepakati perlunya meluncurkan Kerja Sama Terstruktur Tetap yang inklusif dan ambisius (PESCO).

Kesimpulan Dewan Eropa 14 Desember 2017 (EUCO 19/17): Dewan Eropa menyambut baik pembentukan PESCO dan menekankan pentingnya melaksanakan proyek pertama dengan segera. Selanjutnya juga menyerukan diterapkannya Program Pembangunan Industri Pertahanan Eropa secara tepat waktu agar pendanaan proyek dapat dilakukan untuk proyek kapabilitas pertama pada tahun 2019. Dewan Eropa juga meminta agar Dewan mengadopsi rekomendasi tentang instrumen khusus baru yang mencakup semua

persyaratan untuk Pembangunan Kapasitas dalam mendukung Keamanan dan Pembangunan (CBSD) setelah tahun 2020. Akhirnya, Dewan Eropa meminta untuk tetap melaksanakan implementasi kumpulan proposal bersama yang disepakati dalam kerangka kerja dua Deklarasi Bersama EU-NATO.

Kesimpulan Dewan Eropa 28 Juni 2018 (EUCO 9/18): Dewan Eropa menegaskan kembali bahwa Eropa harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanannya sendiri dan mendukung perannya sebagai aktor dan mitra yang dapat dipercaya dan diandalkan di bidang keamanan dan pertahanan. Dengan mengacu pada gagasan otonomi strategis, Dewan Eropa merinci tentang bagaimana Organisasi mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pertahanan Eropa dengan meningkatkan investasi pertahanan, pengembangan kapabilitas, dan kesiapan operasional. Ini juga meminta Dewan untuk menyelesaikan kerangka kerja kelembagaan PESCO, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi negara ketiga, dan meminta untuk melanjutkan pekerjaan implementasi kumpulan proposal bersama dalam konteks kerja sama EU-NATO.

(EUCO 9/19): Dewan Eropa menyoroti, dengan judul “Agenda Strategis baru 2019-2024” bahwa CFSP dan CSDP Uni Eropa harus menjadi lebih responsif dan aktif dan sebaiknya terhubung dengan rangkaian hubungan eksternal lainnya. Uni Eropa juga perlu mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanan dan pertahanannya sendiri, khususnya dengan meningkatkan investasi pertahanan, pengembangan kapabilitas, dan kesiapan operasional; Uni Eropa akan bekerja sama erat dengan NATO, dengan sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian dan oleh Dewan Eropa, termasuk prinsip-prinsip inklusivitas, timbal balik, dan otonomi pengambilan keputusan Uni Eropa.

Hubungan dengan mitra strategis, termasuk mitra transatlantik kami, dan kekuatan baru harus menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri yang kuat. Untuk itu, perlu ada lebih banyak sinergi antara Uni Eropa dan tingkat bilateral. Uni Eropa hanya dapat terlibat dengan kekuatan global lainnya di pijakan yang sama jika menghindari pendekatan satu demi satu dan menghadirkan gerakan persatuan, didukung oleh sumber daya Uni Eropa dan Negara Anggota.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pekerjaan Dewan Eropa dan Presidennya, kunjungi:

<http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/>
<http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/>

2.1.2. DEWAN UNI EROPA

Dewan Uni Eropa (“Dewan”), bersama dengan Parlemen Eropa, adalah lembaga Organisasi yang menjalankan fungsi legislatif dan penganggaran. Dewan menjalankan fungsi pembuatan kebijakan dan koordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. Dewan terdiri dari perwakilan dari setiap Negara Anggota di tingkat menteri, yang dapat menjalankan pemerintahan Negara Anggota yang bersangkutan dan memberikan suaranya. Dewan bertindak berdasarkan suara mayoritas yang memenuhi syarat⁴ kecuali jika Perjanjian menentukan lain. Di bidang CFSP/CSDP, Dewan biasanya bertindak berdasarkan konsensus dan suara bulat⁵. Penerapan tindakan legislatif tidak termasuk (Pasal 24 TEU)⁶.

Saat ini, Dewan Uni Eropa bertemu dengan 10 konfigurasi berikut:

1. Urusan Umum
2. Urusan Luar Negeri
3. Urusan Ekonomi dan Keuangan
4. Urusan Keadilan dan Dalam Negeri
5. Urusan Ketenagakerjaan, Kebijakan Sosial, Kesehatan, dan Konsumen
6. Persaingan (Pasar Internal, Industri, Riset, dan Luar Angkasa)
7. Transportasi, Telekomunikasi, dan Energi
8. Pertanian dan Perikanan
9. Lingkungan
10. Pendidikan, Pemuda, Budaya, dan Olahraga

Sekretariat Jenderal Dewan (GSC) membantu pekerjaan Dewan. Bagian ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang ditunjuk oleh Dewan. Sekretaris Jenderal memikul tanggung jawab organisasi dan pelaksanaan layanan yang diberikan oleh GSC kepada presidensi

⁴ Suara mayoritas bersyarat tercapai jika 55% dari Negara Anggota mewakili setidaknya 65% dari total populasi Uni Eropa memberikan suara.

⁵ Tindakan tidak biasa tanpa dasar hukum khusus dalam Perjanjian, seperti kesimpulan Dewan, dalam praktiknya disetujui oleh konsensus, sementara tindakan hukum di bidang CFSP/CSDP sebagian besar diadopsi dengan suara bulat. Dalam bidang kebijakan ini, Dewan dapat bertindak dengan suara mayoritas bersyarat saat mengadopsi keputusan yang menentukan tindakan atau posisi Organisasi berdasarkan keputusan atau mengikuti permintaan khusus Dewan Eropa kepada Perwakilan Tinggi, saat mengadopsi keputusan apa pun yang menerapkan keputusan yang menetapkan tindakan atau posisi Organisasi, dan saat menunjuk perwakilan khusus Uni Eropa (Pasal 31.2 TEU). Selain itu, beberapa keputusan sehubungan dengan Kerja Sama Terstruktur Tetap (PESCO) di CSDP dapat diambil dengan suara mayoritas bersyarat (Pasal 46.2 dan 46.3 TEU).

⁶ Pengecualian adopsi tindakan legislatif tidak menghilangkan Keputusan CFSP dari sifat mengikatnya, yang ditegaskan oleh Pasal 28.2 TEU. Pengecualian tindakan legislatif sebagian besar terkait dengan pengecualian prosedur legislatif dari area CFSP, dan sehingga dengan tidak dapat diterapkannya peran Komisi dan Parlemen Eropa dalam prosedur ini.



Gedung Justus Lipsius adalah kediaman utama dari Sekretariat Jenderal Dewan.

Dewan yang bergilir dan ‘tetap’ serta badan persiapan, dan kepada Presiden Dewan Eropa, termasuk manajemen administratif GSC dalam hal sumber daya manusia dan keuangan. Sekretaris Jenderal mengambil bagian di pertemuan Dewan sebagaimana mestinya. Sekretaris Jenderal Dewan juga merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, menghadiri pertemuan Dewan Eropa dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengatur jalannya pertemuan. Sekretaris Jenderal saat ini adalah Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Beliau diangkat pada tanggal 21 April 2015 untuk periode dari 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2020. Tranholm-Mikkelsen diangkat untuk masa jabatan kedua pada 29 April 2020. Masa jabatan lima tahun yang baru akan berlangsung dari 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2025.

Terlepas dari kondisi Dewan yang terdiri dari konfigurasi yang berbeda, Dewan Uni Eropa adalah badan hukum tunggal. Dewan memiliki tiga konsekuensi penting untuk pekerjaannya:

- (1) Setiap tindakan hukum mengenai subjek apa pun yang termasuk dalam kompetensi Organisasi dapat secara resmi diadopsi oleh segala konfigurasi Dewan, terlepas dari apakah itu berada di bawah kewenangannya atau tidak.
- (2) Tidak ada hierarki di antara konfigurasi Dewan yang berbeda, meskipun Dewan Urusan Umum

memiliki peran koordinasi dan bertanggung jawab atas masalah kelembagaan, administrasi, dan horizontal.

- (3) Kantor Presidensi Dewan juga berbentuk kantor tunggal. Artinya, dalam praktiknya, aturan yang berlaku untuk Presidensi berlaku untuk setiap orang yang menjadi ketua di salah satu konfigurasi Dewan, termasuk ketua ‘tetap’ Dewan Luar Negeri, atau, jika sesuai, setiap orang yang menjadi ketua di salah satu badan persiapan Dewan.

Bukan hal yang aneh bagi para anggota Dewan untuk melanjutkan diskusi mereka di jamuan makan yang diselenggarakan di acara pertemuan Dewan. Namun, acara tersebut tidak menjadi bagian dari pertemuan resmi Dewan dan setiap keputusan yang diambil atau kesimpulan yang didapatkan harus secara resmi diadopsi di pertemuan resmi.

Para menteri juga bertemu untuk memikirkan dan bertukar pandangan secara bebas tentang topik-topik lingkup umum. Pertemuan informal ini ada di luar kerangka kerja dan aturan prosedural yang ditetapkan oleh Perjanjian, dan diskusinya tidak dapat menghasilkan dokumen, sebelum atau sesudah pertemuan, atau untuk penyusunan kesimpulan atau keputusan resmi. Di bidang urusan luar negeri, para menteri biasanya bertemu secara informal sekali per enam bulan, di ‘per-

temuan Gymnich', yang disebut setelah pertemuan pertama semacam ini diadakan di kota dengan nama yang sama di Jerman pada tahun 1974. Menteri Pertahanan juga bertemu secara informal sekali per enam bulan.

Hanya konfigurasi Urusan Umum dan Luar Negeri yang disebutkan secara khusus di Pasal 16 TEU.

Dewan Urusan Umum memastikan konsistensi dalam pekerjaan konfigurasi Dewan yang berbeda. Dewan Urusan Umum mempersiapkan dan memastikan tindak lanjut pertemuan Dewan Eropa, bekerja sama dengan Presiden Dewan Eropa dan Komisi Eropa.

Dewan Urusan Luar Negeri menguraikan tindakan eksternal Organisasi berdasarkan pedoman strategis yang ditetapkan oleh Dewan Eropa dan memastikan bahwa tindakan Organisasi di bidang ini sudah konsisten. Hal ini termasuk kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan, perdagangan, serta kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Dewan ini dapat meluncurkan misi dan operasi CSDP, baik sipil maupun militer, sebagai bagian dari pendekatan terpadu Uni Eropa terhadap konflik dan krisis eksternal. Mereka juga dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa, termasuk kemungkinan ditetapkannya sanksi.

Dewan Urusan Luar Negeri biasanya terdiri dari menteri luar negeri dari semua Negara Anggota Uni Eropa. Tergantung pada agendanya, Dewan juga mengumpulkan menteri pertahanan (CSDP), menteri pembangunan (kerja sama pembangunan), dan menteri perdagangan (kebijakan komersial bersama). Menteri dari bidang kebijakan ini biasanya bertemu dua kali setahun di bawah konfigurasi Dewan Urusan Luar Negeri. Untuk menteri pertahanan, mereka terkadang bertemu beberapa kali dengan menteri luar negeri.

Perwakilan Tinggi memimpin Dewan Urusan Luar Negeri dalam formasi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan pembangunan⁷. Perwakilan dari Negara



Uni Eropa

HR Josep Borrell menjadi ketua Dewan Urusan Luar Negeri, salah satu dari 10 konfigurasi dewan

Anggota yang memegang jabatan Presidensi dengan rotasi enam bulanan memimpin Dewan Urusan Luar Negeri dalam formasi perdagangan serta semua konfigurasi Dewan lainnya. Dewan Urusan Luar Negeri bertemu sebulan sekali, selain bulan Agustus dan September, kecuali situasinya mengharuskan diadakan pertemuan di salah satu dari dua bulan itu.

Komite Perwakilan Tetap Pemerintah Negara Anggota (Coreper⁸) menyiapkan pekerjaan Dewan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan. Selain itu, Coreper memastikan konsistensi kebijakan dan tindakan Organisasi. Peran utama Coreper adalah mengoordinasikan dan mempersiapkan pekerjaan konfigurasi Dewan yang berbeda, termasuk Urusan Luar Negeri, dan mencoba menemukan, berdasarkan tingkatnya, kesepakatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan untuk diputuskan atau diadopsi⁹. Peran inti Coreper bisa digambarkan dengan fakta bahwa semua hal dalam agenda Dewan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Coreper kecuali, karena alasan mendesak, Dewan memutuskan sebaliknya. Coreper dibagi menjadi dua bagian, 1 (deputi Perwakilan Tetap) dan 2 (Perwakilan Tetap). Coreper 2 mempersiapkan, inter alia, pekerjaan Dewan Urusan Luar Negeri¹⁰.

Komite Politik dan Keamanan (PSC), yang diatur dalam Pasal 38 TEU, memainkan peran utama di

7 Harus dicatat bahwa Perwakilan Tinggi tidak memimpin pertemuan menteri yang berada di bawah kewenangan Dewan Urusan Luar Negeri yang menangani masalah kebijakan komersial umum; pertemuan ini diketuai oleh Presidensi Dewan yang berotasi enam bulan sekali. Karena ini merupakan kompetensi eksklusif Uni Eropa, Dewan mengadopsi langkah-langkah yang menerapkan kebijakan komersial bersama Uni Eropa dengan Parlemen Eropa.

8 Singkatan ini berasal dari singkatan dalam bahasa Prancis yaitu 'Comité des représentants permanents'.

9 Perlu dicatat bahwa setiap kesepakatan yang dibuat oleh Coreper selalu dapat dipertanyakan oleh Dewan, yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan.

bidang CFSP dan CSDP. Komite ini melakukan dua fungsi utama: (1) memantau situasi internasional di bidang yang berkaitan dengan CFSP dan berkontribusi di penentuan kebijakan, menyampaikan pendapat di dalam Dewan, tanpa mengurangi pekerjaan Coreper; (2) di bawah tanggung jawab Dewan dan Perwakilan Tinggi, Komite menjalankan kendali politik dan arahan strategis misi dan operasi CSDP sipil dan militer dan dapat, bila perlu dan jika ditugaskan oleh Dewan, mengambil keputusan di bidang ini. Seorang wakil dari Perwakilan Tinggi memimpin PSC¹¹.

Di luar Coreper dan PSC, lebih dari 150 badan persiapan yang berbeda, dalam bentuk komite atau kelompok kerja, mendukung pekerjaan Dewan¹². Sekitar 35 badan persiapan tematik dan geografis Dewan mendukung pekerjaan Dewan Urusan Luar Negeri. Di bawahnya adalah beberapa dari mereka lebih dekat hubungannya dengan area CSDP.

Komite Militer Uni Eropa (EUMC) adalah badan militer tertinggi yang dibentuk di dalam Dewan (Keputusan Dewan 2001/79/CFSP tanggal 22 Januari 2001). Komite ini mengarahkan semua kegiatan militer dalam kerangka Uni Eropa, khususnya perencanaan dan pelaksanaan misi dan operasi militer di bawah CSDP dan pengembangan kemampuan militer.



Duta Besar Finlandia Sofie From-Emmersberg adalah ketua tetap Komite Politik dan Keamanan (PSC)



Ketua Komite Militer Uni Eropa yang segera berakhir masa jabatannya (Jenderal Claudio Graziano, Italia) dan yang segera menjabat (Jenderal Robert Brieger, Austria) selama peluncuran buku pedoman CSDP.

Komite ini memberikan nasihat militer kepada PSC dan membuat rekomendasi tentang masalah militer. EUMC terdiri dari kepala pertahanan (CHOD) dari Negara Anggota, yang secara teratur diwakili oleh perwakilan militer tetap mereka (MilReps). Komite ini memiliki ketua tetap, yang dipilih melalui pertemuan EUMC di tingkat kepala pertahanan, dan ditunjuk oleh Dewan. Ketua EUMC juga merupakan penasihat militer untuk Perwakilan Tinggi.

Kelompok Kerja Komite Militer Uni Eropa (EUMCWG) mendukung dan membantu EUMC dalam pekerjaannya di bidang militer dalam kerangka kerja Uni Eropa. Bagian ini melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh EUMC, seperti penyusunan nasihat militer dan konsep militer, dan laporan kepada EUMC. EUMCWG mempunyai ketua tetap, yang dipilih melalui pertemuan EUMC di tingkat perwakilan militer, dan ditunjuk oleh Coreper.

Kelompok Kerja Komite Militer Uni Eropa/ Pasukan Tugas Tujuan Utama (EUMCWG/HTF) adalah sekelompok ahli yang menangani pengembangan kemampuan militer. Ini adalah badan kerja EUMC yang berkaitan dengan semua aspek pengem-

10 Coreper 2 dibantu oleh anggota 'Kelompok Antici', yang namanya berasal dari nama ketua pertamanya. Itu didirikan pada tahun 1975 untuk meninjau agenda Coreper 2 dan menyelesaikan rincian teknis dan organisasi. Tahap persiapan ini memungkinkan Presidensi untuk memiliki gagasan awal tentang posisi Negara Anggota, kemungkinan akan diambil ketika Coreper 2 bertemu.

11 Pekerjaan PSC disiapkan oleh 'kelompok Nicolaidis', yang namanya berasal dari nama ketua pertamanya.

12 Untuk daftar lengkap badan persiapan Dewan, lihat dokumen berikut: Daftar badan persiapan Dewan, dok. 9199/20.



Tiga presiden di Jean-Monnet-House; David Sassoli (Parlemen Eropa), Ursula von der Leyen (Komisi Eropa) dan Charles Michel (Dewan Eropa)

bangan kapabilitas yang berada di bawah tanggung jawabnya. Di luar itu, badan ini telah diberikan tugas yang mencakup lebih banyak masalah terkait kapabilitas dalam persiapan keputusan EUMC. EUMCWG/HTF mempunyai ketua tetap, yang dipilih melalui pertemuan EUMC di tingkat perwakilan militer.

Kelompok Politik-Militer (PMG) melakukan pekerjaan persiapan di bidang CSDP untuk PSC. PMG mencakup aspek politik militer Uni Eropa dan isu-isu sipil-militer, termasuk konsep, kapabilitas, serta operasi dan misi. PMG menyiapkan kesimpulan Dewan dan memberikan rekomendasi untuk PSC, memantau penerapannya yang efektif, berkontribusi pada pengembangan kebijakan horizontal dan memfasilitasi pertukaran informasi. Kelompok ini memiliki tanggung jawab khusus mengenai kemitraan dengan negara-negara non-Uni Eropa dan organisasi lain, termasuk NATO, serta latihan pelatihan. Kelompok ini diketuai oleh wakil Perwakilan Tinggi dan terdiri dari delegasi Negara Anggota.

Komite untuk Aspek Sipil Manajemen Krisis (CivCom) memberikan informasi, merumuskan rekomendasi, dan memberikan saran kepada PSC tentang

aspek sipil dari manajemen krisis (Keputusan Dewan 2000/354/CFSP tanggal 22 Mei 2000). CivCom mempersiapkan dokumen perencanaan untuk misi CSDP sipil dan berurusan dengan pengembangan strategi untuk manajemen krisis sipil dan kemampuan sipil. Kelompok ini diketuai oleh wakil Perwakilan Tinggi dan terdiri dari delegasi Negara Anggota.

Pihak Pelaksana Konsuler Hubungan Luar Negeri (RELEX) menangani masalah hukum, keuangan, dan kelembagaan CFSP. Prioritasnya meliputi sanksi, misi dan operasi CSDP, perwakilan khusus Uni Eropa, pembiayaan kegiatan eksternal, masalah non-proliferasi, dan masalah lintas sektor lainnya di bidang CFSP/CSDP. Pada tahun 2004, sebuah formasi baru yang disebut 'Sanksi' dibuat di dalam pihak pelaksana. Tugas utamanya adalah berbagi praktik terbaik, dan merevisi dan menerapkan pedoman umum untuk memastikan penerapan yang efektif dan seragam dari rezim sanksi Uni Eropa. RELEX diketuai oleh seorang wakil dari rotasi Presidensi Dewan.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pekerjaan Dewan Uni Eropa di bidang CFSP/CSDP, kunjungi

<http://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/>

2.2. PERAN KOMISI EROPA DI CSDP

oleh Diego de Ojeda



Foto bersama Komisi Ursula von der Leyen: Ursula von der Leyen, Frans Timmermans, Valdis Dombrovskis, Margrethe Vestager, Josep Borrell, Věra Jourová, Margaritis Schinás, Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica, Johannes Hahn, Didier Reynders, Mariya Gabriel, Stélla Kyriakídou, Kadri Simson, Jutta Urpilainen, Thierry Breton, Phil Hogan, Olivér Várhelyi, Paolo Gentiloni, Virginijus Sinkevičius, Helena Dalli, Janusz Wojciechowski, Elisa Ferreira, Adina Vălean, Janez Lenarčič, Ylva Johansson

Meskipun – bertentangan dengan sebagian besar bidang kebijakan Uni Eropa lainnya – peran Komisi Eropa di CSDP bersifat sekunder terhadap Perwakilan Tinggi dan Negara Anggota, Komisi tetap menjadi aktor penting dalam mencapai tujuan CSDP sepenuhnya. Memang, Pasal 21(3) Perjanjian Lisboa mendorong Dewan dan Komisi, dibantu oleh Perwakilan Tinggi, untuk bekerja sama memastikan konsistensi antara berbagai bidang tindakan eksternal Organisasi, dan antara bidang-bidang tersebut dan kebijakan lainnya. Hal ini tanpa mengurangi kompetensi khusus dari setiap lembaga dan prosedur pengambilan keputusan CFSP dan non-CFSP, sesuai Pasal 40.

Prinsip ‘konsistensi’ ditetapkan dalam Komunikasi Bersama Desember 2013 tentang Pendekatan Komprehensif Uni Eropa dan diikuti dengan Kesimpulan Dewan Mei 2014 dan dikembangkan lebih lanjut dalam Strategi Global Juni 2016 untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa. Gagasannya sederhana: CSDP tidak bertindak secara terpisah dari tindakan dan instrumen eksternal Uni Eropa lainnya. Sebaliknya, penggunaan alat dan instrumen Uni Eropa yang koheren secara strategis mengharuskannya bertindak selaras dengan instrumen non-CFSP yang dikelola oleh Komisi sebagai akibat dari tanggung jawabnya untuk menerapkan anggaran Uni Eropa (Pasal 317 dan 318 dari Perjanjian Fungsi Uni Eropa).



Gedung Berlaymont menjadi markas utama Komisi Eropa.

Selama siklus anggaran 2014-2020, instrumen eksternal Uni Eropa non-CFSP termasuk Instrumen geografis untuk Bantuan Pra-penambahan (IPA), Instrumen Wilayah dan Kemitraan Eropa (ENPI), dan Instrumen Kerja Sama Pembangunan (DCI), serta Instrumen Dana Pembangunan Eropa (EDF) anggaran tambahan. Instrumen tematik yang berkontribusi pada Stabilitas dan Perdamaian (IcSP), Instrumen Kemitraan (PI), Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (EIDHR), Instrumen untuk Kerja Sama Keselamatan Nuklir (INSC), dan program tematik DCI juga ada di kategori ini.

Selain itu, di bawah wewenang Perwakilan Tinggi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presi-

den, Komisi juga menggunakan anggaran CFSP, yang mendanai misi sipil CSDP, Perwakilan Khusus Uni Eropa, dan proyek non-proliferasi dan perlucutan senjata.

Selanjutnya, Komisi mengelola kebijakan tindakan eksternal lainnya yang masih berhubungan seperti bantuan perdagangan dan kemanusiaan internasional, serta kebijakan internal dengan dimensi eksternal yang substansial dan terus berkembang – keamanan, migrasi, iklim, energi, transportasi, ruang angkasa, pasar internal pertahanan, dll. – yang relevan dengan kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan Organisasi.

Maka, Komisi sepenuhnya berpartisipasi dalam PSC dan semua badan Dewan – termasuk CivCom, PMG, dan EUMC – membahas dan mempersiapkan keputusan Dewan Urusan Luar Negeri dalam konfigurasi yang berbeda: FAC, Pertahanan FAC, Pembangunan FAC, dan Perdagangan FAC.

Melalui sejumlah mekanisme, layanan Komisi semakin mampu memberikan masukan kepada EEAS saat mempersiapkan intervensi CSDP. Contohnya antara lain Platform Krisis yang diketuai oleh EEAS, yang menyatukan semua layanan terkait jika diperlukan, dan Kerangka Kerja Politik untuk Pendekatan Krisis (PFCA), yang sekarang merupakan langkah wajib dalam proses yang dapat menghasilkan keputusan untuk menetapkan Misi CSDP setelah semua langkah perencanaan lainnya selesai, Komisi juga ikut berkontribusi.

Singkatnya, Komisi tidak hanya merupakan aktor penting dalam pelaksanaan CSDP, secara langsung – mengelola anggaran – dan secara tidak langsung –

memastikan koordinasi dengan instrumen non-CSDP – tetapi juga merupakan kontributor substansial bagi proses antardepartemen menuju persiapan intervensi CSDP dan diskusi mereka di Dewan.

Tentu saja, masih banyak yang harus dilakukan untuk bisa sepenuhnya memberikan pendekatan Uni Eropa yang benar-benar komprehensif. Peran ganda HR/VP dan pembentukan EEAS oleh Perjanjian Lisboa adalah langkah revolusioner yang, dengan melihat ke belakang, pasti membutuhkan beberapa waktu untuk mendapatkan peningkatan yang diinginkan. Selain aspek manusia, logistik, dan organisasi yang tidak dapat diabaikan, asimilasi dan penyesuaian maksimal terhadap perubahan peran dan kompetensi tidak dapat terjadi dalam semalam. Namun, dapat dikatakan bahwa masa transisi selesai pada musim gugur 2014, saat Jean-Claude Juncker menjabat sebagai Presiden Komisi Eropa dan memasukkan tujuan untuk membuat EU sebagai pelaku global yang lebih kuat sebagai salah satu dari sepuluh prioritas politik Komisi. Secara paralel, beliau memutuskan untuk membentuk Kelompok Komisararis untuk Tindakan Eksternal, yang diketuai oleh HR/VP Federica Mogherini, guna membahas semua masalah tindakan eksternal Uni Eropa dengan Wakil Presiden dan Komisararis Komisi terkait lain sebagaimana mestinya, tanpa mengurangi kompetensi pengambilan keputusan badan Komisararis.

Baru-baru ini, Presiden Von der Leyen menjadikan Eropa yang lebih kuat di dunia sebagai salah satu dari enam ambisi utama Komisi baru dengan tujuan memastikan pendekatan yang terkoordinasi untuk semua tindakan eksternal Uni Eropa, mulai dari bantuan pengembangan hingga Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, bekerja bersama dengan HR/VP Borrell untuk tujuan ini, termasuk – dikutip dari beliau – “pendekatan terpadu dan komprehensif untuk keamanan kita” dan “langkah berani yang lebih jauh dalam lima tahun ke depan menuju Organisasi Pertahanan Eropa sejati.

Memang, konsistensi yang lebih besar yang dicapai di tingkat politik kini juga menjangkau ke bawah seperti layanan serta strategi umum regional, nasional, dan tematik yang dibahas dan disiapkan oleh Perwakilan Tinggi dan Komisi dengan tujuan untuk pengesahan ke Dewan dan Parlemen dan yang semakin memandu tindakan eksternal Uni Eropa, termasuk CSDP.



Asosiasi anggota komisi yang terdiri dari 27 Anggota Komisi, melakukan pertemuan minimal satu kali per minggu. (biasanya pada hari Rabu pagi).

Namun, tidak boleh ada ruang untuk merasa puas, setidaknya tidak di tahap ini saat Perjanjian Lisboa baru saja ada (dalam konteks sejarah). Dasar substansial telah dilakukan: sekarang, tangan kiri dan kanan tindakan eksternal Uni Eropa menyadari apa yang dilakukan oleh pihak lain. Tetapi tujuannya adalah agar mereka maju bersama-sama, tidak hanya secara paralel, dan kemajemukan krisis internasional yang intens, khususnya di lingkungan Organisasi, menunjukkan bahwa Pendekatan Terintegrasi harus diperdalam lebih lanjut untuk menuai sinergi yang tetap akan dicapai.

Dimensi militer sangat penting dalam hal ini. Di satu sisi, Komisi tidak memiliki kompetensi di bidang pertahanan atau sumber daya militer. Selain itu, Pasal 41.2 TEU secara eksplisit melarang pendanaan anggaran Uni Eropa dari setiap pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung timbul dalam konteks operasi militer.

Meskipun demikian, pada bulan Desember 2017 Dewan dan Parlemen mengadopsi proposal Komisi untuk mengubah peraturan IcSP (lihat di atas) sehingga memungkinkan pendanaan intervensi “Peningkatan Kapasitas dalam mendukung Keamanan dan Pembangunan” sebagai upaya terakhir pada kondisi yang sangat khusus (misalnya negara ‘gagal’), saat satu-satunya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pengembangan adalah pelaku militer, sesuai dengan pengembangan kebijakan terbaru dalam konteks kebijakan pengembangan OECD.

6 prioritas Komisi untuk 2019-24

Kesepakatan Hijau Eropa
Eropa bertujuan untuk menjadi benua ramah iklim pertama dengan menjadi ekonomi yang modern dan hemat sumber daya

Kecocokan Eropa dengan era digital
Strategi digital Uni Eropa akan memberdayakan masyarakat dengan teknologi generasi baru.

Ekonomi yang bekerja untuk rakyat
Uni Eropa harus menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik, dan pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, terutama bagi anak muda dan usaha kecil

Eropa yang lebih kuat di dunia
Uni Eropa akan memperkuat suaranya di hadapan dunia dengan memperjuangkan multilateralisme dan tatanan global berbasis aturan.

Mempromosikan cara hidup rakyat Eropa
Eropa harus melindungi supremasi hukum jika ingin membela keadilan dan nilai-nilai inti Uni Eropa.

Dorongan baru untuk demokrasi Eropa
Kita perlu memberi orang Eropa suara yang lebih besar dan melindungi demokrasi kita dari campur tangan eksternal seperti disinformasi dan pesan kebencian melalui online.

Sumber: https://ec.europa.eu/info/strength/priorities-2019-2024_en

Selain itu, Dewan sedang membahas proposal Perwakilan Tinggi, yang didukung oleh Komisi, untuk membuat Fasilitas Perdamaian Eropa di luar anggaran yang secara substansial akan memperluas cakupan bantuan militer yang dapat diberikan Uni Eropa kepada mitra eksternalnya, bagian dari yang akan dilaksanakan oleh layanan Komisi. Secara paralel, layanan Komisi akan terus berkontribusi secara aktif untuk memajukan implementasi Deklarasi Bersama EU-NATO 2016 dan 2018 dan Kumpulan Proposal Umum termasuk tentang Melawan Ancaman Hibrida, keamanan siber atau disinformasi, dan masih banyak lagi.

Pada akhirnya, Komisi secara aktif melaksanakan dua program percontohan dalam penelitian pertahanan dan pengembangan kemampuan – Tindakan Persiapan Penelitian Pertahanan dan Program Pembangunan Industri Pertahanan Eropa – yang akan

membuat Dana Pertahanan Eropa lebih ambisius mulai tahun 2021. Program-program ini sudah meningkatkan kerja sama di antara industri pertahanan Negara Anggota dan mempromosikan penyatuan yang lebih besar dari sumber daya pertahanan nasional untuk pengembangan bersama di bidang kemampuan pertahanan.

Hubungan langsung dengan CSDP dari semua inisiatif di atas cukup jelas, seperti peran Komisi Eropa dalam mengembangkannya atau berkontribusi pada pelaksanaannya di bidang kompetensinya. Keamanan Organisasi dan warganya juga jelas menjadi prioritas utama Komisi Eropa, baik secara eksternal, termasuk melalui instrumen CSDP dan non-CFSP, dan secara internal, dengan meningkatkan sinergi dengan dimensi eksternal kebijakan internal Organisasi dengan kebijakan lain yang relevan. Dalam konteks ini dan dengan sepenuhnya memperhatikan kompetensi yang diberikan kepada setiap lembaga, Komisi berperan, dan akan terus

berperan, sepenuhnya secara aktif di bidang ini demi kepentingan terbaik Uni Eropa dan warganya.

2.3. CSDP DAN PERAN PARLEMEN EROPA

oleh Jérôme Legrand

Terdapat pandangan yang diterima secara umum bahwa Parlemen Eropa mempunyai sedikit kekuatan sejauh menyangkut Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP), dan bahkan lebih sedikit lagi jika berkaitan dengan komponen pertahanannya, yaitu Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP). Namun, analisis terperinci tentang evolusi CSDP selama dekade terakhir menunjukkan kenyataan yang berbeda dan lebih kompleks.

DASAR HUKUM DAN KERANGKA KERJA KELEMBAGAAN

Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) Uni Eropa,¹ sebagaimana digambarkan di Perjanjian tentang Uni Eropa (TEU). Faktanya, dalam pembukaannya, TEU menggarisbawahi tekad Negara Anggota untuk ‘menerapkan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama termasuk perumusan progresif dari kebijakan pertahanan bersama, yang mungkin menghasilkan pertahanan bersama (...)’. Sementara Pasal 41 TEU menguraikan pendanaan CFSP dan CSDP, kebijakan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 42 hingga 46, dalam Bab 2, Bagian 2 Judul V (‘Ketentuan tentang Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama’), dan dalam Protokol 1, 10 dan 11 serta Deklarasi 13 dan 14.

Keputusan yang berkaitan dengan CSDP diambil oleh Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa (Pasal 42

TEU). Keputusan diambil dengan suara bulat, dengan beberapa pengecualian tertentu yang berkaitan dengan Badan Pertahanan Eropa (EDA, Pasal 45 TEU) dan kerja sama terstruktur tetap (PESCO, Pasal 46 TEU), di situ pemungutan suara mayoritas berlaku. Permohonan untuk keputusan biasanya dibuat oleh Perwakilan Tinggi Organisasi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, yang juga bertindak sebagai Wakil Presiden Komisi Eropa (‘HR/VP’).

Perjanjian Lisboa memperkenalkan gagasan tentang kemampuan dan kebijakan persenjataan Eropa (Pasal 42(3) TEU), yang akan menjadi inti dari Rencana Tindakan Pertahanan Eropa (EDAP). Yang terakhir, dikemukakan pada tahun 2016, didasarkan pada empat pilar²: mendukung penelitian pertahanan dengan peluncuran tindakan persiapan penelitian pertahanan pada tahun 2017; menyediakan alat Uni Eropa untuk berinvestasi di seluruh rantai pasokan pertahanan Eropa (terutama UKM); bekerja untuk mencapai Dana Pertahanan Eropa yang memungkinkan; dan meningkatkan fungsi pasar tunggal untuk pertahanan.

Perjanjian Lisboa juga menetapkan hubungan antara CSDP dan kebijakan Organisasi lainnya dengan mengharuskan EDA dan Komisi bekerja sama bila diperlukan (Pasal 45(2) TEU). Ini khususnya menyangkut penelitian, industri, dan kebijakan luar angkasa Uni Eropa. Hubungan ini telah menciptakan peluang bagi Parlemen Eropa (EP) untuk mencari dan mengembangkan pengaruh yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya terhadap CSDP.

1 Lihat Judul V (‘Ketentuan Umum mengenai Tindakan Eksternal Uni Eropa dan Ketentuan Tertentu mengenai Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum (CFSP)’) dari Perjanjian Uni Eropa (TEU); lihat juga → 6.1.1 mengenai kebijakan luar negeri Uni Eropa.

2 <https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2016/11/10/commissioner-bie%C5%84kowska-outlines-upcoming-european-defence-action-plan-at-eda-annual-conference>



Jochen Rehr

Bangunan kompleks parlemen di Brussels tempat bagi Parlemen Eropa, kamar legislatif Uni Eropa.

PARLEMEN EROPA DAN CSDP

Peran khusus Parlemen Eropa dalam CFSP dan CSDP dijelaskan dalam Pasal 36 TEU. Parlemen Eropa berhak untuk **mencermati** kebijakan dan mengambil inisiatif dalam **berbicara dengan HR/VP dan Dewan** di sana (Article 36 TEU). Parlemen Eropa juga menjalankan wewenang atas **anggaran kebijakan** (Pasal 41 TEU). Dua kali setahun, Parlemen Eropa mengadakan **debat** tentang kemajuan dalam penerapan CFSP dan CSDP, serta mengadopsi **laporan**: satu tentang CFSP, yang dirancang oleh Komite Urusan Luar Negeri (AFET) dan termasuk elemen yang berkaitan dengan CSDP jika diperlukan; dan satu di CSDP, dirancang oleh Subkomite Keamanan dan Pertahanan (SEDE).

Sejak tahun 2012, Parlemen Eropa dan parlemen nasional Negara Anggota telah menyelenggarakan dua **konferensi antarparlemen** setiap tahun untuk memperdebatkan masalah kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. **Kerja sama antarparlemen** di

bidang-bidang ini diketahui lebih dulu oleh Protokol 1 Perjanjian Lisboa, yang menggambarkan peran parlemen nasional dalam kerangka kerja Uni Eropa.

Inovasi dalam Perjanjian Lisboa telah memberikan kesempatan untuk meningkatkan koherensi politik CSDP. HR/VP menempati peran kelembagaan pusat, memimpin Dewan Urusan Luar Negeri dalam 'konfigurasi Menteri Pertahanan' (badan pembuat keputusan CSDP Uni Eropa) dan mengarahkan EDA. Kerangka kerja politik untuk konsultasi dan dialog dengan Parlemen Eropa sedang berkembang agar Parlemen dapat **sepenuhnya berperan dalam pengembangan CSDP**. Di bawah Perjanjian Lisboa, Parlemen Eropa adalah mitra yang **membentuk** hubungan eksternal Organisasi dan bertanggung jawab menangani tantangan dalam memastikan **dukungan rakyat kepada CSDP**, seperti yang dijelaskan dalam Laporan 2008 tentang Implementasi Strategi Keamanan Eropa.³ secara khusus, Parlemen Eropa memeriksa **perkembangan** di bawah CSDP dalam hal institusi, kemampuan, dan

³ 'Menjaga dukungan publik terhadap keterlibatan global kita adalah fundamental. Dalam demokrasi modern, ketika media dan opini publik penting dalam membuat kebijakan, maka komitmen populer penting untuk menjadi komitmen kita di luar negeri. Kita mengarahkan polisi, ahli yudisial dan tentara di zona tidak stabil di seluruh dunia. Ada tanggung jawab bagi pemerintah, parlemen dan institusi Uni Eropa untuk mengomunikasikan kontribusi ini terhadap keamanan di rumah'.



Sebelum Parlemen Eropa dapat memilih Komisi Eropa baru yang dipimpin oleh Ursula von der Leyen, komite parlemen akan menilai kecocokan komisioner terpilih (dalam gambar HR/VP Borrell selama sidang).

operasi, serta memastikan bahwa masalah keamanan dan pertahanan menjawab **kekhawatiran** yang dikemukakan oleh warga Uni Eropa. Perundingan, dengar pendapat, dan lokakarya diadakan secara rutin, yang membahas topik-topik antara lain:

- 17 misi CSDP sipil dan militer saat ini (Juni 2020) di Wilayah Timur dan Selatan Uni Eropa (Kosovo, Ukraina, Georgia, Bosnia & Herzegovina, Moldova, Libya, Mediterania), di Afrika (terutama Sahel), dan di Timur Tengah;
- krisis internasional dengan implikasi keamanan dan pertahanan, dan reformasi sektor keamanan setelah krisis;
- kerja sama dan struktur keamanan dan pertahanan multilateral non-Uni Eropa, khususnya mengenai NATO atau PBB;
- perkembangan Uni Eropa dan internasional terkait dengan kontrol senjata dan non-proliferasi senjata pemusnah massal;
- memerangi terorisme internasional, pembajakan, kejahatan terorganisir, dan perdagangan manusia;
- memperkuat peran Parlemen Eropa dalam CSDP melalui kebijakan Uni Eropa yang berimplikasi pada keamanan dan pertahanan (seperti keamanan

internal dan perbatasan, pengembangan infrastruktur, penelitian, serta kebijakan industri dan luar angkasa);

- praktik yang baik untuk meningkatkan efektivitas investasi keamanan dan pertahanan serta untuk memperkuat basis teknologi dan industri di Uni Eropa, 'pertahanan cerdas', dan 'mengumpulkan dan berbagi';
- pengembangan kelembagaan terkait dengan: struktur manajemen krisis Uni Eropa, termasuk struktur militer; kerja sama keamanan dan pertahanan di dalam Organisasi; peran Komisi baru dan Direktorat Jenderal Industri Pertahanan dan Luar Angkasa (Ditjen DEFIS); EDA; serta badan dan struktur Uni Eropa lainnya di bidang keamanan dan pertahanan⁴;
- legislasi dan resolusi politik yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, khususnya yang berkaitan dengan topik yang disebutkan di atas.

Parlemen Eropa mengadakan **Pertemuan Konsultasi Bersama (JCM)** secara rutin dengan Dewan, Badan Tindakan Eksternal Eropa (EEAS) dan Komisi. Pertemuan ini memungkinkan adanya **pertukaran informasi** tentang misi dan operasi CSDP, penggunaan anggaran CSFP, dan bidang kepentingan dan perhatian. Pertemuan tersebut adalah bagian dari konsultasi antara Parlemen dan lembaga-lembaga Uni Eropa lainnya yang terlibat dalam CFSP dan CSDP yang telah berlangsung sejak **deklarasi HR/VP tentang akuntabilitas politik** pada tahun 2010. Parlemen Eropa telah menyimpulkan serangkaian **perjanjian antarlembagaan** tentang CSDP: yaitu Perjanjian Antarlembagaan tanggal 20 November 2002, yang membuat Parlemen Eropa memiliki akses ke **informasi sensitif** Dewan di bidang kebijakan keamanan dan pertahanan dan saat ini sedang direvisi, dan perjanjian tentang Disiplin Anggaran dan Manajemen Keuangan yang Sehat tahun 2013, yang berujung pada dialog politik rutin dengan ketua Komite Politik dan Keamanan (PSC).

⁴ *Inter alia*, Pusat Satelit Uni Eropa (EU SatCen), Institut Uni Eropa untuk Penelitian Keamanan (EUISS), Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDC) dan Organisasi Kerja Sama Persenjataan Bersama (OCCAR).



Parlemen Eropa

Rapat Pleno di Parlemen Eropa..

Mengingat peran kunci yang dimainkan oleh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam menjamin keamanan Eropa, Parlemen Eropa berpartisipasi dalam **Majelis Parlemen NATO** dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan EU-NATO dengan memperhatikan sifat independen dari kedua organisasi. Hal ini sangat penting dalam medan operasi yang melibatkan Uni Eropa dan NATO, seperti Irak, Kosovo, dan memerangi pembajakan di Tanduk Afrika dan perdagangan manusia di Mediterania. Namun, ini juga berlaku untuk bidang kerja sama baru, seperti ancaman hibrida dan khususnya keamanan siber.

IMPLEMENTASI CSDP

Perjanjian Uni Eropa (TEU) menyatakan dalam Pasal 42: “2. *Kebijakan keamanan dan pertahanan bersama harus mencakup perencanaan progresif dari kebi-*

jakan pertahanan bersama Organisasi.. *Ini akan membawa kita ke pertahanan bersama, saat Dewan Eropa, bertindak dengan suara bulat, memutuskan demikian.”*

Setelah berlakunya **Perjanjian Lisboa** pada tahun 2019 dan khususnya sejak **usulan Presiden Komisi Juncker** berkaitan dengan pertahanan, dan Strategi Global Uni Eropa oleh HR/VP Mogherini, pada tahun 2016, beberapa inisiatif telah terwujud dan membawa **kemajuan besar** dalam bidang CSDP (EDIDP, usulan untuk Dana Pertahanan Eropa, aktivasi PESCO, proyek mobilitas militer, Tinjauan Tahunan Terkoordinasi untuk Pertahanan, dll...).

Parlemen Eropa telah **menyambut** dan **mendorong** proses ini melalui resolusi, seperti resolusi tahun 2016 tentang Organisasi **Pertahanan Eropa**⁵, atau resolusi bulan Desember 2018 tentang laporan tahunan **implementasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama**⁶.

Dengan banyaknya prioritas yang didukung oleh Parlemen Eropa yang disorot dalam dokumen HR/

SIAPA SAJA MEREKA

KURSI KOMITE

Komite

 <p>AFET URUSAN LUAR NEGERI David McAllister (EPP)</p>	 <p>TRAN TRANSPORTASI DAN PARAWISATA Karima DELLI (Greens/EFA)</p>
 <p>DEVE PEMBANGUNAN Tomas TOBE (EPP)</p>	 <p>REGI PEMBANGUNAN REGIONAL Younous OUMARÉE (GUE/NGL)</p>
 <p>INTA PERDAGANGAN INTERNASIONAL Bernd LANGE (S&D)</p>	 <p>ARGI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN DESA Norbert LINS (EPP)</p>
 <p>BIJG ANGGARAN Johan VAN OVERTVELDT (ECR)</p>	 <p>PECH PERIKANAN Chris DAVIES (Renew Europe)</p>
 <p>CONT KONTROL ANGGARAN Monika HOHLMEIER (EPP)</p>	 <p>CULT BUDAYA DAN PENDIDIKAN Sabine VERHEYEN (EPP)</p>
 <p>ECON EKONOMI DAN MONETER Irene TINAGLI (S&D)</p>	 <p>JURI HUKUM Lucy NETHLINGHA (Renew Europe)</p>
 <p>EMPL KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL Lucie ČURIS NICHOLSOVÁ (ECR)</p>	 <p>LIBE KEBEBASAN SIPIL, KEADILAN, DAN URUSAN DALAM NEGERI Juan Fernando LOPEZ AGUIAR (S&D)</p>
 <p>ENVI LINGKUNGAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEAMANAN PANGAN Pascal CAMIN (Renew Europe)</p>	 <p>AFCO URUSAN KONSTITUSI Antonio TAJANI (EPP)</p>
 <p>ITRE PERINDUSTRIAN, RISET, DAN ENERGI Cristian-Silviu BUȘOI (EPP)</p>	 <p>FEMM HAK PEREMPUAN DAN KESTARAAN GENDER Evelyn REGER (S&D)</p>
 <p>IMCO PASAR INTERNAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Petra DE SUTTER (Greens/EFA)</p>	 <p>PETI PETISI Delors MONTSERRAT (EPP)</p>

Subkomite

 <p>DIRDI HAK ASASI MANUSIA Maria ARENA (S&D)</p>	 <p>SEDE KEAMANAN DAN PERTAHANAN Nathalie LOISEAU (Renew Europe)</p>
---	--



Sumber: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/staff/2018071510568647/meet-the-new-chairs-of-the-parliamentary-committees>

VP 2015-2016 (misalnya otonomi yang lebih strategis untuk Uni Eropa, tingkat kerja sama yang tinggi di antara Negara Anggota, penggunaan yang lebih baik atas alat CSDP dan kerja sama EU-NATO), Parlemen ditujukan untuk ikut andil dalam tahap tindak lanjut.

Walau demikian, terlepas dari banyaknya niat baik, sejumlah peluang untuk memajukan CSDP terlewatkan pada tahun-tahun itu: upaya peluncuran operasi akhirnya gagal, seperti di Lebanon dan Libya, atau tertinggal, seperti di Mali. Akibatnya, Pasukan Tempur Uni Eropa⁷ belum dikerahkan, dan markas tetap untuk operasi Uni Eropa, meskipun dibuat dengan MPCC yang diperkuat, belum didirikan secara matang.

Dari perspektif yang lebih luas, dan jika ingin mengkategorikan isu-isu utama yang dipertaruhkan, CSDP dapat dikembangkan lebih lanjut, kerangka kerja kelembagaan terkait dikembangkan, dan kerja sama di antara Negara Anggota dan dengan struktur Organisasi ditingkatkan dengan sejumlah **orientasi**, yang mana telah dianjurkan oleh EP dalam laporannya dan ingin melihatnya menjadi kenyataan:

- Mempertahankan tingkat **ambisi** yang ditetapkan dalam Strategi Global Uni Eropa, termasuk peran Uni Eropa sebagai **penyedia keamanan global**, dan rasa **urgensi** untuk **berinvestasi dalam keamanan dan pertahanan** di tingkat Uni Eropa dan Negara Anggota;
- Memelihara dan lebih meningkatkan **prinsip kerja sama, koordinasi, dan solidaritas** di antara Negara Anggota Uni Eropa sejauh menyangkut perkembangan keamanan dan pertahanan; dan ini di secara **mendalam, berkelanjutan, dan jangka panjang**;

5 OJ C 224, 27.06.2018, p18.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:224:FULL&from=EN>

6 2018 /2099(INI).
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html

7 Konsep Satuan Tugas Uni Eropa memberikan instrumen CSDP untuk respons militer atas krisis yang lebih awal dan cepat. Satuan Tugas merupakan kelompok tempur - yang terdiri dari sekitar 1500 (biasanya multinasional) personel (minimum untuk menjaga efektivitas militer) - yang mampu melakukan operasi tersendiri atau melakukan fase awal operasi yang lebih besar. Satuan Tugas Uni Eropa telah beroperasi sejak Januari 2005.

Komite bertanggung jawab untuk menyusun posisi Parlemen atas proposal dari legislatif. Mereka juga menyiapkan laporan sendiri, menunjuk tim negosiasi untuk melakukan perbincangan dengan Dewan, mengadakan pertemuan dengan ahli dan meneliti institusi dan badan Uni Eropa lainnya.

- **Implementasi yang cepat** dari keputusan yang diambil, di bidang CSDP, dengan **sarana** (pendanaan) yang tersedia, dan menghormati prinsip-prinsip **kohesi** di tingkat pengambilan keputusan, **dan koherensi** dalam tindakan;
- **Pelajaran** dari langkah pertama, untuk **dipertimbangkan** dalam keputusan di masa mendatang (misalnya EDIDP untuk EDF);
- **Kerangka kerja/pendekatan strategis** yang akan digunakan untuk menaungi semua perkembangan CSDP dalam bentuk yang memungkinkan dari **'Buku Putih' Keamanan dan Pertahanan Uni Eropa**; ini akan memungkinkan dibuatnya konsep kepentingan keamanan bersama Uni Eropa;
- **Kerja sama antara Uni Eropa dan NATO**, untuk saling **melengkapi** dan menghormati kekhususan dan peran masing-masing; karena **kemitraan strategis** di antara Uni Eropa dan NATO adalah **hal mendasar** untuk mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi Uni Eropa dan wilayah sekitarnya; dan **Uni Eropa dan NATO yang lebih kuat** akan **memperkuat** satu sama lain;
- **Memaksimalkan sinergi** di antara dimensi dan aset **warga sipil dan keamanan dan pertahanan/militer**, khususnya yang berhubungan dengan **industri luar angkasa**;
- **Pembangunan kelembagaan** agar sesuai dengan perkembangan kebijakan: konfigurasi permanen **"Dewan Menteri Pertahanan"** Dewan (**dipimpin oleh HRVP**), **Direktorat Jenderal Pertahanan** di Komisi (kini dibentuk oleh von der Leyen), dan **Komite Keamanan dan Pertahanan** yang berdiri di EP;
- **Dimensi Parlemen yang lebih kuat** di semua bidang keamanan dan pertahanan, termasuk **pengawasan**; **kerja sama** yang diperkuat di antara EP dan Parlemen Negara Anggota Nasional, sebagai salah satu cara untuk memastikan **akuntabilitas demokratis yang tepat** atas keputusan yang diambil di bidang pertahanan; – Definisi hubungan antara berbagai elemen CSDP: kebijakan kemampuan dan persenjataan (Pasal 42(3) TEU), kerja sama

terstruktur tetap (Pasal 46 TEU), klausul 'saling membantu' (Pasal 42(7) TEU, yang berbunyi seperti klausul pertahanan bersama), klausul solidaritas bersama (Pasal 222 TFEU), komitmen Organisasi untuk secara progresif merangkai kebijakan pertahanan bersama Uni Eropa (Pasal 42(2) TEU), dan hubungan EU-NATO⁸.

DAYA PENGGERAK PARLEMEN EUROPA

Perkembangan saat ini telah bergerak sesuai dengan arah yang didukung oleh Parlemen Eropa, kehendak politik dan inisiatif yang koheren dan berkelanjutan akan terus diperlukan untuk membahas beberapa peningkatan pada Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum untuk jangka panjang. Parlemen Eropa, atas perannya, menunjukkan **kehendak untuk bertindak dan mengejar inisiatif** dalam bidang ini.

Sebagai hasil konkret pertama, Parlemen mengajukan untuk mendanai **proyek percontohan untuk penelitian CSDP** menggunakan anggaran EU tahun 2015. Proyek percontohan ini, yang disetujui oleh Parlemen dan Dewan pada Desember 2014, yang kemudian diikuti oleh Tindakan Persiapan pada Penelitian Pertahanan (PADR, 2017-2019), yang berarti bahwa untuk pertama kalinya dana milik Uni Eropa akan dipindahkan ke EDA untuk melakukan penelitian atas keperluan militer. Beberapa proyek penelitian dipilih dan dengan sukses diterapkan (mis. 'Platform Sensor Kerumunan Heterogen Tanpa Awak', untuk Proyek Percontohan, dan "Kerja Sama Terbuka untuk Kesadaran Maritim Eropa" OCEAN 2020, dan proyek "Arsitektur Referensi Sistem Pasukan Terbuka Generik" untuk PADR). Pentingnya penelitian telah ditekankan dalam CSDP dalam banyak kesempatan, misalnya dalam resolusi Parlemen Eropa 'mengenai implementasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum' yang disetujui pada Mei 2015, yang pada saat itu Parlemen meminta Negara Anggota 'untuk mencapai target kolektif sebesar 2% dari pengeluaran pertahanan pada pendanaan penelitian'⁹.

⁸ Lihat laporan inisiatif tersendiri (2012/2223(INI)) mengenai 'Klausul pertahanan mutual dan solidaritas Uni Eropa: dimensi politik dan operasional'.

Parlemen Eropa telah memimpin **penelitian** mengenai kemajuan CSDP dan menganalisis kekurangan kebijakan. Sejak berlakunya Perjanjian Lisboa, yang telah dilibatkan dalam lebih dari dua puluh resolusi bagi implementasi efektif CSDP. Salah satu dari contoh peran proaktifnya adalah laporan inisiatif mandiri ‘tentang **Persatuan Pertahanan Eropa**’, yang telah menjadi hal penting dalam menentukan panduan bagi CSDP yang lebih koheren. Laporan tersebut mendorong Dewan Eropa untuk memimpin penyusunan Persatuan Pertahanan Eropa dan menyerukan kerja sama pertahanan Eropa yang lebih besar dan lebih sistematis di antara Negara Anggota. Di antara bermacam rekomendasinya, hal ini juga menyarankan pembentukan kekuatan multinasional di bawah kerangka kerja PESCO, dan peran yang ditingkatkan bagi EDA.

Parlemen juga telah bertindak sebagai **motivator** dengan menstimulasi debat dan mempertanyakan tindakan Negara Anggota. Dalam hal ini, **peran informalnya** telah menjadi sepenting yang formal yang diawasi oleh perjanjian. Tidak dapat disangkal bahwa **pertukaran yang saling menguntungkan antara Parlemen dan wadah pemikir internasional yang penting** telah menghasilkan ‘bahan pertimbangan’ dalam debat terbaru di CSDP.

Salah satu contoh dari debat terkini adalah lokakarya yang diadakan oleh SEDE mengenai **penelitian:**

‘Jalan menuju Persatuan Pertahanan Eropa - Buku Putih sebagai tahap pertama’, yang dikoordinasikan oleh mantan Sekretaris Jenderal NATO dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk CFSP Javier Solana, dan diterbitkan pada April 2016. Laporan ini menunjukkan proposal yang konkret bagi Buku Putih Uni Eropa mengenai pertahanan dan secara spesifik menyarankan agar Parlemen Eropa meningkatkan Sub-komite Keamanan dan Pertahanan menjadi Komite tersendiri dan memperkuat kerja sama dengan parlemen-parlemen nasional. Dengan demikian, Parlemen Eropa dapat memanfaatkan ketentuan **kerja sama antar parlemen** yang ditentukan dalam Protokol 1 dari Perjanjian Lisboa¹⁰.

Baru-baru ini, Parlemen telah memeriksa dan mendiskusikan situasi misi CSDP, terutama di Sahel, mengingat krisis Covid-19 dan atas dasar keahlian eksternal (“Bagaimana krisis COVID-19 memengaruhi aspek yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan bagi Uni Eropa”)¹¹.

Masalah “Otonomi Strategis” tentunya juga menjadi hal yang didiskusikan di Parlemen Eropa, dalam semua dimensinya. Penelitian terbaru yang diminta SEDE (akan diterbitkan pada Desember 2020) berjudul: “Sektor Ruang Eropa sebagai hal yang memungkinkan Otonomi Strategis Uni Eropa”.

Parlemen Eropa juga berperan penting dalam **diplomasi parlemen** dan baru-baru ini kapasitasnya dikembangkan lebih jauh bagi **mediasi**. Presidennya diundang untuk berbicara atau berpartisipasi dalam acara besar, baik itu internal Uni Eropa (seperti rapat Dewan Eropa) atau bersifat internasional; di tingkat global atau regional; dan dalam format institusional atau informal (Rapat Umum PBB, G7 dan G20, rapat NATO, Konferensi Keamanan Munich, dll.). Dialog antar parlemen dengan rekan strategis Uni Eropa, seperti Dialog Legislatur Transatlantik dengan Amerika Serikat, atau dalam kerangka kerja hubungan Uni Eropa-NATO¹², juga memungkinkan Parlemen Eropa untuk terlibat dalam diskusi terbuka akan pengembangan fundamental akan



Sumber: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190612ST054311/parliament-s-seven-political-groups>

Seiring terjadinya Brexit anggota Parlemen Eropa menjadi 705 anggota. Baca lebih lanjut untuk mencari tahu mana MEP Anda di antara tujuh kelompok politik. Salah satu kursi yang dialokasikan bagi Spanyol belum terisi, sehingga saat ini ada 704 kursi di MEP.

9 <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//EN>

10 ‘Akankah CSDP mengalami ‘peningkatan kolateral’ dari invokasi Prancis atas ‘klausul pertahanan mutual’ Uni Eropa?’, analisis mendalam oleh Jérôme Legrand, Parlemen Eropa, Desember 2015.

11 [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603510/EXPO_BRI\(2020\)603510_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603510/EXPO_BRI(2020)603510_EN.pdf)

keamanan dan lingkungan pertahanan barat. Ini juga merupakan cara lain bagi Parlemen Eropa untuk melaksanakan pemeriksaan legislatif dan peran penganggaran juga berkontribusi untuk membentuk kebijakan Uni Eropa di bidang keamanan dan pertahanan.

CELAH PELUANG? KOMISI GEOPOLITIS 2019 DAN HR/VP BORRELL

Dalam kedua Panduan Politiknya untuk Komisi tahun 2019-2024 (yang dia sendiri juluki ‘Geopolitis’), dan surat misinya bagi HRVP Borrell, **Ny. Von der Leyen** menyatakan bahwa ‘Kita harus melakukan langkah lebih jauh yang keras dalam lima tahun ke depan untuk **Persatuan Pertahanan Eropa** yang nyata’. Dirinya juga menekankan **lebih banyak transparansi dan komunikasi** terhadap Parlemen Eropa (terutama sejauh mana dipertimbangkannya proses negosiasi perjanjian internasional antara Uni Eropa dan negara-negara lain), dan mendukung **hak inisiatif** tertentu bagi Parlemen.

Untuk bagiannya, **Josep Borrell**, politisi berpengalaman, mantan Menteri Urusan Luar Negeri Spanyol dan mantan Presiden Parlemen Eropa, adalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan ketiga, dan paling **‘paham akan Parlemen Eropa’**, sejak pemberlakuan Perjanjian Lisboa. Selain mengakui pentingnya peran Parlemen Eropa dalam ‘membentuk kebijakan luar negeri Persatuan’, juga ‘potensi diplomasi parlemen’, beliau membuat **komitmen penting** terhadap Keamanan dan Pertahanan selama Sidang Parlemen Eropa pada Oktober 2019:

- ‘Kita harus melakukan lebih banyak **kemajuan** menuju **budaya strategis umum**, terutama dengan memperkuat pendekatan strategis yang **koheren** bagi tindakan kita yang berbeda, juga **mengoperasikan** tingkat ambisi Uni Eropa yang disasar untuk diberikan kontribusi.
- **Pasal 42.7 TEU** (mis. Klausul Pertahanan Mutual) harus dijadikan **operasional**. Harus “diprotokolisasi” guna menentukan **bagaimana** hal tersebut harus diterapkan;

- Kita harus **lebih aktif di lapangan** dan **menurunkan kekuatan**, mis. di lingkungan sekitar kita;
- Kita harus **memainkan peran kita** untuk **memperpanjang Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir**.
- Posisi Umum tahun 2008 tentang **Kontrol Ekspor Senjata** harus dinegosiasikan ulang guna **meningkatkan transparansi** ekspor, dan **mengharmoniskan kontrol** atas senjata yang diekspor;
- Kita harus membuat **kemajuan** lebih lanjut atas pertahanan Uni Eropa dari **ancaman campuran**, terutama untuk melawan **serangan siber** dan **disinformasi**.¹²

Tidaklah mengejutkan bahwa dalam konteks ini, Parlemen tidak hanya mengharapkan bahwa kemajuan lebih lanjut dibuat pada CSDP, dalam lima tahun ke depan, tapi juga suara dan kontribusinya sendiri agar lebih didengar dan dipertimbangkan dalam Komisi, EEAS, dan bahkan di Dewan.

KESIMPULAN

Sebagaimana dipaparkan di atas, pada kenyataannya, Parlemen Eropa memberikan **lebih banyak pengaruh** terhadap CSDP daripada yang diketahui secara umum. Kelanjutan atas deklarasi bersama Uni Eropa-NATO tahun 2016 dan 2018 mengenai kerja sama misalnya, adalah perkembangan yang penting yang akan diawasi dengan saksama oleh Parlemen Eropa. Pada tahun 2020, meskipun adanya pandemi Covid-19, Parlemen terus bekerja dalam kompetensinya untuk mencapai tujuan Uni Eropa sebagai **penyedia keamanan** secara efektif dan kentara. Dengan mengandalkan keahliannya, termasuk pandangan ke depan dan pemikiran strategis, Parlemen meningkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengawasan kebijakan, tapi juga untuk **secara konkret membentuk CSDP**. Ini merupakan peran kunci saat rakyat kita meminta keamanan yang ditingkatkan juga merupakan salah satu permintaan yang tidak bisa dibantah bagi Eropa.

12 Anggota AFET dan SEDE berpartisipasi dalam delegasi permanen Parlemen Eropa untuk Dewan Parlemen NATO.

2.4. JASA AKSI EKSTERNAL EROPA DAN CSDP

oleh Arnold Kammel dan Jochen Rehr

Pemikiran mengenai diadakannya jasa diplomatis Eropa sudah ada sejak Perjanjian yang tidak disetujui guna membentuk Konstitusi untuk Eropa tahun 2004, yang memungkinkan pembentukan Jasa Tindakan Eksternal Eropa (EEAS) guna membantu Menteri Uni urusan Luar Negeri. Berdasarkan Perjanjian Lisboa, yang berlaku pada tahun 2009, dan Perjanjian Uni Eropa (TEU) yang diamandemen, maka posisi Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, pemegangnya yang juga Wakil Presiden dari Komisi Eropa, dibentuk, menggantikan posisi Menteri Uni urusan Luar Negeri. Hal ini penting utamanya karena walau ada satu jasa yang secara khusus diperuntukkan untuk tindakan eksternal, EEAS, beragam direktorat jenderal Komisi Eropa juga terlibat dalam implementasi kebijakan eksternal Uni Eropa.

MANDAT EEAS

Kompetensi EEAS tetap tidak berubah, sedangkan Pasal 27(3) TEU menentukan:

Dalam memenuhi mandat ini, Perwakilan Tinggi harus dibantu oleh Jasa Tindakan Eksternal Eropa. Jasa ini harus bekerja sama dengan jasa diplomatis dari Negara Anggota dan harus terdiri dari petugas departemen terkait dari Sekretariat Jenderal Dewan dan Komisi juga staf yang ditunjuk dari jasa diplomatis nasional Negara Anggota. Organisasi dan fungsi Jasa Tindakan Eksternal Eropa akan ditentukan oleh keputusan Dewan. Dewan akan bertindak atas pengajuan dari Perwakilan Tinggi setelah berkonsultasi ke Parlemen Eropa dan setelah mendapatkan izin dari Komisi.

Pada Maret 2010, Perwakilan Tinggi memberikan pengajuan kepada Dewan atas draf keputusan Dewan untuk membangun organisasi dan pengaktifan fungsi

EEAS. Setelah negosiasi dengan Parlemen Eropa, Keputusan EEAS pada akhirnya diterima pada 26 Juli 2010. EEAS didirikan sebagai ‘badan yang secara fungsi bersifat otonomi dari Uni Eropa, terpisah dari Sekretariat Jenderal Dewan dan dari Komisi dengan kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuannya’ (Pasal 1(2) dari Keputusan EEAS).

TUGAS DAN STRUKTUR

Secara umum, tugas dari EEAS termasuk: memastikan konsistensi dan koordinasi tindakan eksternal Uni Eropa, mempersiapkan pengajuan kebijakan, dan menerapkan kebijakan saat pengajuan sudah disetujui oleh Dewan. Tugas dari EEAS cukup rumit sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, EEAS diharuskan untuk ‘mendukung Perwakilan tinggi untuk memenuhi mandatnya’ (Pasal 2(1) Keputusan EEAS).. Mandat ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2(1), mencerminkan Pasal 18 dan 27 dari TEU, dan termasuk melakukan CFSP dan CSDP (Pasal 18(2) TEU), memastikan konsistensi tindakan eksternal Uni Eropa (Pasal 18(4) TEU), memimpin Dewan Urusan Luar Negeri (Pasal 18(3) TEU), dan bertindak sebagai Wakil Presiden dari Komisi. Sebagai Wakil Presiden, Perwakilan Tinggi bertanggung jawab dalam Komisi tidak hanya untuk ‘kewajiban pejabat saat ini di [Komisi] dalam hal hubungan eksternal’ tapi juga untuk ‘melakukan koordinasi aspek lain dari tindakan eksternal Persatuan’ (Pasal 18(4) TEU).

Kedua, EEAS harus ‘membantu Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi, dan Komisi dalam melaksanakan fungsi terkait di wilayah hubungan eksternal’ (Pasal 2(2) dari Keputusan EEAS).



Jochen Rehr

Markas EEAS terletak di bundaran Schuman, pusat wilayah Eropa di Brussel.

Ketiga, EEAS diwajibkan untuk ‘mendukung, dan bekerja sama dengan, jasa diplomatis dari Negara Anggota juga dengan Sekretariat Jenderal Dewan juga jasa dari Komisi, guna memastikan konsistensi antara wilayah yang berbeda dari tindakan eksternal Persatuan juga antara area tersebut dengan kebijakan lainnya’ (Pasal 3(1) Keputusan EEAS, juga dicerminkan dalam Pasal 21(3), paragraf kedua TEU). Dirinya juga harus ‘memberikan dukungan dan kerja sama yang layak kepada institusi dan badan lain dari Persatuan, terutama Parlemen Eropa’ (Pasal 3(4) Keputusan EEAS).

EEAS diorganisir menjadi bagian geografis dan tematik tersendiri juga termasuk delegasi Uni Eropa yang tunduk pada otoritas Perwakilan Tinggi. Selanjutnya, Uni Eropa yang saat ini memiliki 140 delegasi Uni Eropa dan kantor di seluruh dunia, yang memastikan keberadaan Uni Eropa di luar batas wilayahnya. Utamanya, delegasi dan kantor yang bertanggung jawab untuk mewakili, menjelaskan dan menerapkan kebijakan, menganalisis dan melaporkan kebijakan dan perkembangan di negara tempatnya berada, juga

melakukan negosiasi sesuai dengan mandat yang diberikan. Perwakilan Khusus Uni Eropa (EUSR) juga berada di bawah kantor Perwakilan tinggi, karena mereka mempromosikan kebijakan dan kepentingan Uni Eropa di wilayah bermasalah.

Selain itu EEAS, beragam direktorat jenderal Komisi Eropa juga terlibat dalam penerapan kebijakan eksternal Uni Eropa, misalnya kebijakan perdagangan dan pengembangan tetap menjadi tanggung jawab Komisioner terkait. Dengan demikian penting bahwa Perwakilan Tinggi yang juga Wakil Presiden dari Komisi Eropa, untuk memastikan konsistensi dan koherensi antara bermacam jasa yang terlibat dalam bidang tindakan eksternal.

EEAS DAN STRUKTUR MANAJEMEN KRISIS

Charles Fries, Deputi Sekretaris Jenderal EEAS, bertanggung jawab atas Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum dan untuk tanggapan krisis. Area ini termasuk, utamanya, Direktorat Utama untuk CSDP



Konferensi duta besar Uni Eropa: menggabungkan pemikiran semua Kepala Delegasi Uni Eropa di seluruh dunia.

Perwakilan Tinggi dari Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa



1999 – 2009

Javier SOLANA SPA

Perwakilan tinggi
dan Sekretaris Jenderal



2009 – 2014

Catherine ASHTON BR

Perwakilan Tinggi dan
Wakil Presiden Komisi



2014 – 2019

Federica MOGHERINI ITA

Perwakilan Tinggi dan
Wakil Presiden Komisi



2019 –

Josep BORRELL FONTELLES ESP

Perwakilan Tinggi
Kebijakan Urusan Luar Negeri dan
Keamanan dan Wakil Presiden
Komisi Eropa yang bertugas untuk
Eropa yang lebih kuat di Dunia

dan respons krisis (MD-CSDP-CR), Direktorat pendekatan terintegrasi untuk Keamanan dan Perdamaian (ISP), Direktorat Kebijakan Keamanan dan Pertahanan (SECDEFPOL), Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil (CPCC), Staf Militer Uni Eropa (EUMS),

Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Militer (MPCC), dan Pusat Intelijen dan Situasi Uni Eropa (EU INTCEN), yang menjadi bawahan langsung dari HR/VP Josep Borrell.

BADAN TINDAKAN EKSTERNAL EROPA
 Bagan Organisasi Markas Besar
 per 3 Januari 2022

HR/VP
 J. BORRELL FONTELLES

Sekretaris Jenderal
 S. SANNINO

SG.OFFICE
 Kantor Sekretaris Jenderal
 F. FONTAN

SG.COORD
 Koordinasi Kebijakan
 M. SANTORO

FPI
 Badan Instrumen Kebijakan Luar Negeri
 (Badan Komisi)
 H. HARDEMAN

SG.AFFGEN
 Direktur Urusan Umum dan Kepala Penasihat Hukum
 F. HOFFMEISTER

SG.STRAT
 Komunikasi Strategis dan Tinjauan Masa Depan
 O. RENTSCHLER
 Direktur

SG.AFFGEN.1
 Hukum
 S. MARQUARDT

SG.AFFGEN.2
 Masalah Hukum Administrasi
 K. KOURI

SG.AFFGEN.3
 Badan inspeksi
 T. KOZLOWSKI

SG.AFFGEN.4
 Audit Internal
 L. PROMELLE

SG.AFFGEN.DPO
 Petugas Perlindungan Data
 E. SAVOIA-KELETI

SG.STRAT.1
 Kebijakan Komunikasi dan Diplomasi Publik
 D. MELLADO

SG.STRAT.2
 Komunikasi Strategis, Gagasan Tugas, dan Analisis Informasi
 L. GUELLNER

SG.STRAT.3
 Perencanaan Kebijakan dan Tinjauan Strategi Masa Depan
 H.DELPHIN

EU ISS
 EU ISS
 G. LINDSTROM

DSG-ECO
 Wakil Sekretaris Jenderal Ekonomi dan Isu Global
 H. KONIG

DSG-POL
 Wakil Sekretaris Jenderal Politik, Direktur Politik
 E. MORA

ECO.FIC
 Instrumen Keuangan dan Kerja Sama Internasional
 M. CERVONE D'URSO

ECO.CONNECTIVITY
 Utusan Khusus untuk Hubungan
 R. VLAHUTIN

POL-1
 Sanksi
 S. DE WAELE

POL-DPD
 Ketua Komite Politik dan Keamanan, Wakil Direktur Politik
 D. PRONK

POL-2
 Iran
 B. SCHOLL

DG-RM
 Manajemen Sumber Daya
 G. DI VITA
 Direktur Jenderal

MD-GLOBAL
 Agenda Global dan Hubungan Multilateral
 B. MARTINEZ CARBONELL
 Direktur Utama

MD-AFRICA
 Afrika
 R. LARANJINHA
 Direktur Utama

MD-AMERICAS
 Amerika
 B. GLYNN
 Direktur Utama

MD-ASIAPAC
 Asia dan Pasifik
 G. WIEGAND
 Direktur Utama

MD-EUROPE
 Eropa
 A. EICHHORN
 Direktur Utama

RM.D1
 Koordinasi
 H. CAMPBELL

RM.BS
 Anggaran dan Dukungan
 P. RUYIS
 Direktur

RM.NR
 Sumber Daya Manusia
 K. DE PEYRON
 Direktur

RM.SECRE
 Keamanan dan Real Estat
 B. LARSSON
 Direktur

GLOBAL.VMR.DMD
 Nilai dan Hubungan Multilateral
 C. KOKKINAKIS
 Direktur, Wakil Direktur Utama

GLOBAL.GI.DMD
 Isu Global
 O. BAILLY
 Direktur, Wakil Direktur Utama

AFRICA.DMD
 Afrika
 R. LARANJINHA
 Direktur, Wakil Direktur Utama

AMERICAS.DMD
 Amerika
 J. NINO PEREZ
 Direktur, Wakil Direktur Utama

ASIAPAC.DMD
 Asia dan Pasifik
 P. PAMPALONI
 Direktur, Wakil Direktur Utama

EUROPE.DMD
 Eropa
 M. MARKOVIĆ
 Direktur, Wakil Direktur Utama

RM.BS.1
 Anggaran
 P. BATTISTA

RM.NR.1
 Kebijakan SDM
 O. BENEDIKT

RM.SECRE.1
 Keamanan Lapangan
 I. ROCA I CORTES

GLOBAL.VMR.1
 Hubungan Multilateral
 E. MATHEWS

GLOBAL.GI.1
 Isu Ekonomi dan Kesehatan Global
 D. TRAMACERE

AFRICA.1
 Urusan Pan-Afrika
 J. JONSSON

AMERICAS.1
 Urusan Regional
 C. GINTERSDOERFER

ASIAPAC.1
 Urusan Regional, ASEM, dan Indo-Pasifik
 R. TEERINK

EUROPE.1
 Eropa Barat/Afrika/Rusia
 C. GANSLAND

RM.BS.2
 Pengadaan Publik, Kontrak, dan Keuangan
 C. SALUSTRI

RM.NR.2
 Seleksi dan Perekrutan SDM
 C. VÉRON-REVILLE

RM.SECRE.2
 Keamanan Markas Besar dan Kebijakan Keamanan EEAS
 K. SINNO

GLOBAL.VMR.2
 Demokrasi dan Observasi Elektoral
 P. COSTELLO

GLOBAL.GI.2
 Konektivitas dan Transisi Digital
 D. RINGROSE

AFRICA.2
 Afrika Selatan dan Samudra Hindia
 A. MARIANI

AMERICAS.2
 Meksiko, Amerika Tengah, dan Karibia
 J. HATWELL

ASIAPAC.2
 Afghanistan dan Pakistan
 T. NIKLASSON

EUROPE.2
 Eropa Tengah
 E. FENEY

RM.BS.3
 Solusi Digital
 H. BRAND

RM.NR.3
 Hak, Kewajiban, dan Medis
 F. CALEPRICO

RM.SECRE.3
 Pengamanan Komunikasi
 J.-G. HOTTIAUX

GLOBAL.VMR.3
 Hak Asasi Manusia
 L. RAGHER

GLOBAL.GI.3
 Transisi Hijau
 A. STRZASKA

AFRICA.3
 Afrika Barat
 R. YOUNG

AMERICAS.3
 Amerika Selatan
 V. LORENZO

ASIAPAC.3
 Asia Tenggara
 B. PLUNKERT

EUROPE.3
 Turki/Mediterrania Timur
 T. FRELLESEN

RM.BS.4
 Dukungan untuk Delegasi
 K. STASIAK

RM.NR.4
 Karier, Pembelajaran, dan Pembangunan
 U. HAUER

RM.SECRE.4
 Real Estat di Delegasi
 A. VAZQUEZ GARRIDO

GLOBAL.VMR.4
 Migrasi dan Keamanan Manusia
 C. GRAU

GLOBAL.GI.4
 Migrasi dan Keamanan Manusia
 C. GRAU

AFRICA.4
 Afrika Tengah
 A. MAIO-COLUJHE

AMERICAS.4
 Amerika Serikat dan Kanada
 R. BAJADA

ASIAPAC.4
 Tiongkok, Hong Kong, Maku, Taiwan, dan Mongolia
 D. PORTER

EUROPE.4
 Inggris
 T. SALDMONSON

RM.BS.5
 Manajemen Informasi dan Dokumen
 A. PETROWSKI (f.f.)

RM.NR.5
 Agen Lokal
 F. RIDDY-O'DOWD

RM.SECRE.5
 Real Estat, Keamanan, dan Penghijauan Markas Besar
 F. FINI

GLOBAL.VMR.5
 Hak Asasi Manusia EUSR
 E. GILMORE

GLOBAL.GI.5
 Hak Asasi Manusia EUSR
 E. GILMORE

AFRICA.5
 Tanduk Afrika
 J.M. PISANI

AMERICAS.5
 Utusan Khusus untuk Proses Perdamaian di Kolombia
 E. GILMORE

ASIAPAC.5
 Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik
 R. BRENDER

EUROPE.5
 Utusan Khusus untuk Afrika
 M. MARINI

EU.SR
 EUSR Tanduk Afrika
 A. WEBER

EU.SR
 EUSR Sahel
 E. C. DEL RE

EU.SR
 EUSR Tanduk Afrika
 A. WEBER

EU.SR
 EUSR Sahel
 E. C. DEL RE

EU.SR
 EUSR Tanduk Afrika
 A. WEBER

EU.SR
 EUSR Sahel
 E. C. DEL RE

EU.SR
 EUSR Tanduk Afrika
 A. WEBER

EU.SR
 EUSR Sahel
 E. C. DEL RE

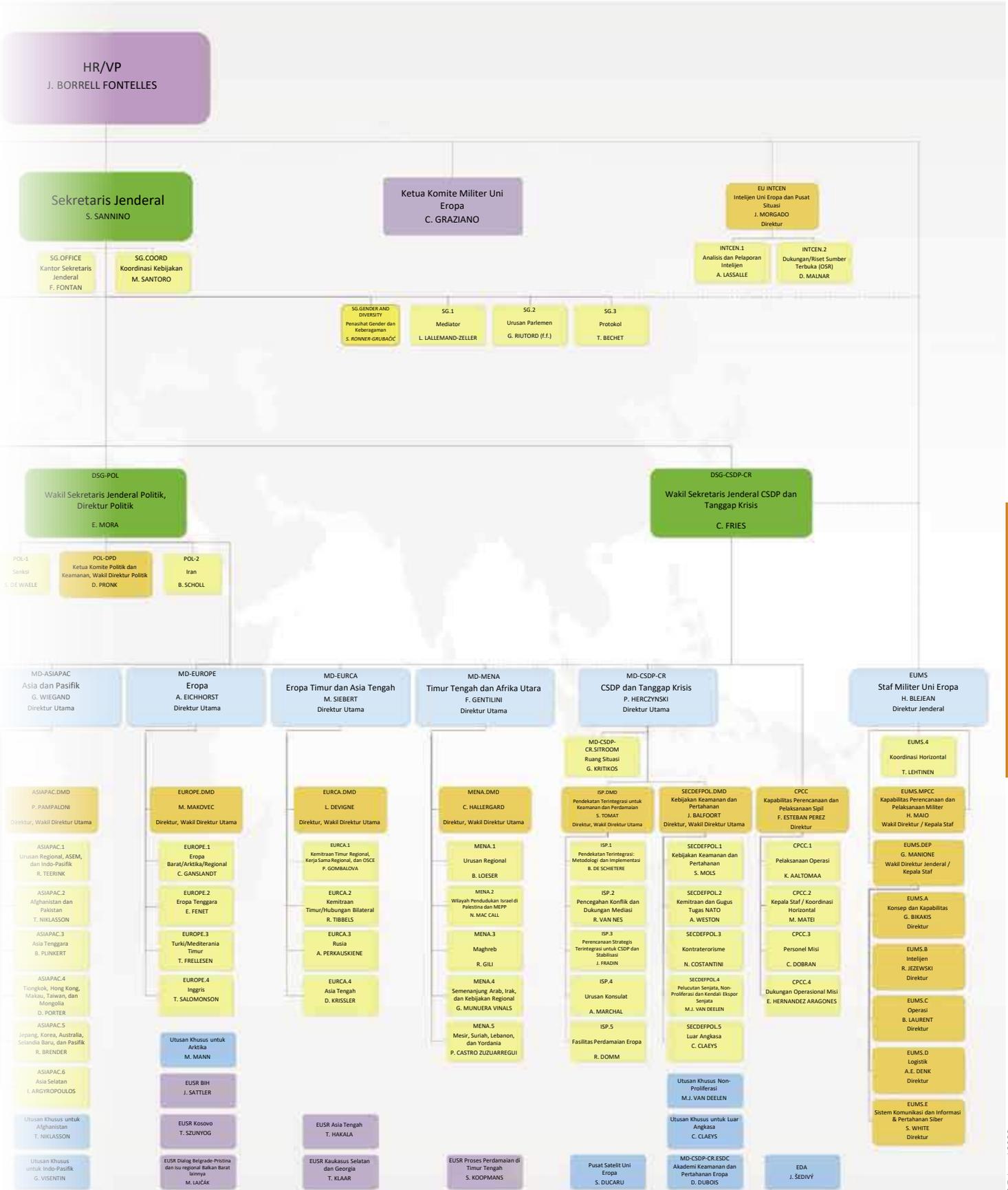
EU.SR
 EUSR Tanduk Afrika
 A. WEBER

EU.SR
 EUSR Sahel
 E. C. DEL RE

EU.SR
 EUSR Tanduk Afrika
 A. WEBER

Laporan EUSR untuk HR/VP

Dewan Kelompok Kerja bekerja di bawah wewenang Direktur Utan



Laporan EUSR untuk HR/VP
Timbop Kerja bekerja di bawah wewenang Direktur Utama mereka

Struktur CSDP dan tanggap krisis EEAS



DIREKTORAT UTAMA UNTUK CSDP DAN TANGGAPAN KRISIS

Direktorat utama baru dibuat sebagai bagian dari restrukturisasi yang terjadi pada tahun 2019 Direktorat tersebut memimpin kerja dari dua direktorat yang baru dibuat:

1. ISP - Pendekatan Terintegrasi untuk Keamanan dan Perdamaian
2. SECDEFPOL - Direktorat Kebijakan Keamanan dan Pertahanan

Direktorat Utama didukung oleh Ruang Situasi Uni Eropa. Ini merupakan divisi EEAS, secara langsung menempel ke Direktorat Utama yang mendukung tindakan eksternal Uni Eropa dengan memberikan kesadaran situasional yang global, komprehensif, juga tepat waktu. Ruang Situasi Uni Eropa merupakan badan siaga permanen yang memberikan pengawasan dan kesadaran situasi saat ini 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, setahun penuh. Ini bertindak sebagai hub informasi situasi tentang semua peme-

gang kepentingan terkait dari institusi Eropa. Berooperasi bersama dengan papan alih EEAS (yang utamanya mengatur panggilan telepon HR/VP dengan para pemimpin dunia) dan berkontribusi pada laporan situasi juga laporan kilat dengan menggabungkan semua informasi terkait krisis yang disediakan oleh sumber daya terbuka, juga oleh delegasi, Negara Anggota, misi dan operasi CSDP Uni Eropa, tim Perwakilan Khusus Uni Eropa dan organisasi Internasional. Ruang Situasi Uni Eropa merupakan titik kontak pertama mengenai semua informasi tentang situasi krisis.

PENDEKATAN TERINTEGRASI UNTUK KEAMANAN DAN PERDAMAIAN (ISP)

Direktorat Pendekatan Terintegrasi untuk Keamanan dan Perdamaian (ISP) bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengatur keseluruhan kontribusi EEAS terhadap Pendekatan Terintegrasi Uni Eropa, sebagaimana didirikan oleh Strategi Global Uni Eropa, menggabungkan tindakan keamanan,

pengembangan dan diplomatis dalam mendukung tujuan yang disetujui bersama.

Dalam hal ini, dan dalam hal kerja sama baik dengan jasa EEAS geografis dan tematik juga institusi Uni Eropa lain, seperti Komisi Eropa, yaitu ISP:

- memastikan koordinasi yang efektif dari tanggapan Uni Eropa di seluruh siklus konflik, mulai dari peringatan awal dan pengawasan cakrawala hingga perencanaan strategis-politis untuk manajemen krisis dan stabilisasi, termasuk mengenai keamanan warga Uni Eropa di area krisis, jika diperlukan;
- memastikan bahwa respons Uni Eropa bersifat sensitif konflik dan berdasarkan analisis akurat dengan fokus pada menciptakan stabilisasi dan perdamaian.

ISP terdiri dari empat divisi, yaitu:

1. Manajemen konsep, pengetahuan dan program
2. Pencegahan konflik dan dukungan mediasi
3. Perencanaan strategis terintegrasi untuk CSDP dan stabilisasi
4. Urusan konsulat

DIREKTORAT KEBIJAKAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN (SECDEFPOL)

Direktorat Kebijakan Keamanan dan Pertahanan (SECDEFPOL) bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengatur keseluruhan kontribusi EEAS dalam menangani ancaman keamanan eksternal. Direktorat mendukung usaha untuk menerapkan Strategi Global Uni Eropa dalam hal keamanan dan pertahanan, terutama mengenai pengembangan kebijakan dan alat yang sesuai dengan tingkat ambisi Uni Eropa di wilayah ini, dan pengembangan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum Uni Eropa lebih lanjut.

Hal ini mencakup pekerjaan tentang masalah strategis dan kebijakan seperti ancaman keamanan siber, bahan kimia, biologis, radiologi dan nuklir (CBRN), ancaman campuran, keamanan maritim, kontra-terorisme, pelucutan senjata, kendali non-proliferasi dan ekspor senjata. Direktorat juga bertanggung jawab untuk berkontribusi atas kebijakan pertahanan dan

untuk inisiatif yang dirancang untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan mengembangkan kemampuan sipil dan militer guna memperluas peran Uni Eropa sebagai penyedia keamanan. Dalam peran ini, Uni Eropa harus selalu bisa mengatasi ancaman yang sudah lama dan yang baru juga berkontribusi pada kedamaian dan keamanan global. Direktorat juga bertanggung jawab untuk mempromosikan hubungan Uni Eropa dengan negara dunia ketiga dan organisasi internasional juga regional dalam hal CSDP, melalui kerja sama CSDP.

SCDEFPOL terdiri dari empat divisi, yaitu:

1. Kebijakan keamanan dan pertahanan
2. Kerja sama dan perjanjian
3. Kontra-terorisme
4. Pelucutan senjata, non-proliferasi dan kontrol ekspor senjata

Staf Militer Uni Eropa (EUMS) merupakan sumber ahli militer kolektif yang ada dalam EEAS. Ini bekerja di bawah arahan Ketua Komite Militer Uni Eropa dan di bawah otoritas Perwakilan Tinggi. EUMS mengkoordinir instrumen militer sebagai bagian dari Pendekatan Terintegrasi Uni Eropa, dengan fokus tertentu pada misi dan operasi militer, juga penciptaan kemampuan militer.

Hal ini memungkinkan aktivitas seperti peringatan awal, penilaian situasi, perencanaan strategis, sistem komunikasi dan informasi, pengembangan konsep, pelatihan dan pendidikan, juga dukungan pada kerja sama melalui hubungan militer dengan militer.

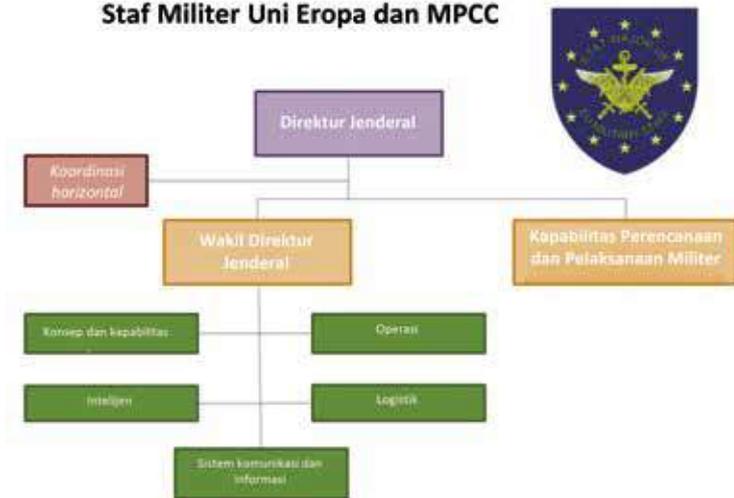
Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Militer (MPCC) didirikan pada 8 Juni 2017, dengan tujuan untuk memungkinkan Uni Eropa untuk bereaksi lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif sebagai penyedia keamanan di luar perbatasan. MPCC merupakan bagian dari EUMS dan bertanggung jawab atas perencanaan operasional dan pelaksanaan misi militer non-eksekutif Uni Eropa. Ini memiliki potensi untuk menjadi Markas militer seutuhnya di masa mendatang



dan dapat, misalnya, mengambil alih pimpinan operasi dan misi militer.

Sampai saat ini, MPCC telah memimpin Misi Latihan Uni Eropa di Mali, Somalia dan Republik Afrika Tengah. Pada 19 November 2018, Dewan memberi MPCC tanggung jawab tambahan atas perencanaan dan pelaksanaan, sebagaimana diperlukan, operasi militer eksekutif seukuran Satuan tugas Uni Eropa.

Staf Militer Uni Eropa dan MPCC



Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil (CPCC), markas permanen untuk misi sipil CSDP, membantu



Komandan Operasi Sipil (CivOpsCdr, yang juga merupakan Direktur CPCC) dalam perencanaan dan pelaksanaan operasional misi sipil CSDP.

CivOpsCdr dimandatkan oleh Negara Anggota uni Eropa untuk melaksanakan komando dan kendali di tingkat strategis bagi semua misi CSDP, di bawah kendali politik dan arahan strategis dari Komite Politik dan Keamanan (PSC) dan keseluruhan otoritas Perwakilan Tinggi. Dibantu oleh Ketua Staf, yang juga merupakan wakil dari CivOpsCdr untuk tujuan menjaga keberlangsungan komando dan kendali, secara keseluruhan CivOpsCdr adalah komandan dari semua Kepala Misi sipil dan bertugas untuk menjaga personel yang ditugaskan di lapangan.

CPCC mendukung perencanaan lanjutan CSDP, bekerja sama dengan ISP, dan memimpin perencanaan operasional misi sipil. Juga memastikan bahwa

dukungan yang cukup disediakan untuk misi dan mengawasi penerapan dan pelaksanaan mandat.



Sel Koordinasi Dukungan Gabungan (JSCC)

menyatukan keahlian sipil dan militer di tingkat strategis untuk memperkuat koordinasi sipil-militer dan kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan operasional misi CSDP.

PUSAT INTELIJEN DAN SITUASI UNI EROPA (EU INT-CEN)

Pusat Intelijen dan Situasi Uni Eropa (EU INT-CEN) bekerja sama dengan bagian militernya, yaitu Direktorat Intelijen Staf Militer Uni Eropa (EUMS INT) dalam Kapasitas Analisis Intelijen tunggal (SIAC). Kedua entitas tersebut membentuk sumber yang unik untuk dukungan intelijen strategis sipil-militer bagi seluruh institusi Uni Eropa dan meliputi beragam masalah yang ada di luar urusan CSDP. Sejalan dengan pengembangan ini, EU INT-CEN yang baru distruktur ulang telah dibuat, yang berfokus pada kesadaran situasional berbasis intelijen dan melaporkannya langsung kepada Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden, dengan demikian menghubungkan SIAC langsung ke pembuat keputusan tingkat tinggi.

Entitas lain dalam EEAS yang relevan untuk manajemen krisis dan CSDP termasuk Badan Manajemen Krisis EEAS juga direktorat yang mengatur geografis, multilateral dan global EEAS.

2.5. MEKANISME TANGGAP KRISIS EEAS

oleh Pedro Serrano

Mekanisme Tanggap Krisis (CRM) EEAS adalah prosedur internal EEAS yang terdiri dari susunan dan struktur untuk respons dengan dikoordinir dan cara yang sinergis atas krisis dan hal darurat - termasuk ancaman campuran - yang bersifat eksternal atau dengan dimensi eksternal, yang berpotensi atau memang memengaruhi urusan Uni Eropa atau Negara Anggota.

APA ITU KRISIS?

Dalam hal CRM, krisis merupakan kejadian atau perkembangan darurat di negara atau wilayah tertentu yang tiba-tiba, merusak secara serius urusan politik, keamanan dan/atau ekonomi yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap urusan keamanan Uni Eropa atau keamanan personel atau warga Uni Eropa.

Respons atas krisis dan keadaan darurat yang diterapkan melalui CRP harus memperkirakan penggunaan semua sumber daya yang ada dengan cara yang dikoordinir dan sinergis, sejalan dengan pendekatan komprehensif Uni Eropa.

AKTIVASI

Saat terjadinya situasi serius atau darurat yang berhubungan atau dalam hal apa pun melibatkan dimensi eksternal Uni Eropa, maka Deputi Sekretaris Jenderal (DSG) untuk Tanggap Krisis harus berunding dengan Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden (HR/VP) atau Sekretaris Jenderal (SG) dan manajer senior EEAS, dan apabila diperlukan, untuk mengaktifkan Mekanisme Tanggap Krisis EEAS.

Deputi Sekretaris Jenderal Tanggap Krisis juga dapat diminta untuk memulai Mekanisme Tanggap Krisis oleh HRVP, SG, atau DSG lain atau Direktur Utama (MD). Jika DSG tidak ada, maka tanggung jawab dipindahkan kepada perwakilan yang ditunjuk, untuk tujuan praktis, yang ditunjuk tersebut adalah Direktur INTCEN.

ELEMEN MEKANISME TANGGAP KRISIS

Elemen dasar dari Mekanisme Tanggap Krisis adalah: Rapat Krisis; katalog Tindakan Segera yang memungkinkan; Sel Krisis; Platform Krisis; dan Satuan Tugas.

RAPAT KRISIS mengumpulkan manajer senior EEAS, Komisi dan Dewan yang secara langsung terpengaruhi oleh krisis tersebut. Rapat ini menilai efek jangka pendek dari krisis dan dapat memutuskan untuk menerapkan satu atau lebih tindakan: (A) melakukan tindakan segera; (B) mengaktifasi Sel Krisis; (C) mendirikan Platform Krisis. Tindakan tersebut dapat diterapkan kapan saja.

Rapat Krisis dapat memutuskan beberapa tindakan segera, termasuk menyediakan panduan dan dukungan kepada Delegasi Uni Eropa, memberikan panduan kepada misi dan operasi CSDP, memperkuat kontak dan tindakan internasional, menyebarkan pesan publik, memulai perencanaan CSDP dengan bijak dan melaksanakan misi pencarian fakta, selain tindakan lain.

SEL KRISIS memberikan dukungan kepada pembuat keputusan di Markas EEAS dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat di Rapat Krisis diterapkan. Sel ini juga diketuai oleh perwakilan dari DSG Tanggap Krisis dan perwakilan dai jasa yang utamanya



Rapat Platform Krisis mengumpulkan ahli dari EEAS, Komisi dan Dewan Uni Eropa.

terlibat dalam krisis. Sel ini terdiri dari beberapa stasiun kerja yang dioperasikan oleh perwakilan EEAS, Komisi dan Dewan yang terlibat dalam respons krisis.

Tujuan dari **PLATFORM KRISIS** adalah untuk mengumpulkan jasa EEAS, Komisi dan Dewan terkait untuk menilai efek menengah dan jangka lanjut dari krisis dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan. Platform ini diketuai oleh HR/VP, Sekretaris Jenderal atau DSG Tanggap Krisis. Platform Krisis dapat menyetujui untuk mengaktifkan Satuan Tugas, mengevaluasi laporan penerapan, memutuskan untuk tindakan lebih lanjut yang memungkinkan dan mendiskusikan proposal tindakan Dewan. Platform Krisis merupakan konfigurasi ad-hoc; oleh karena itu, tidak aktif secara permanen.

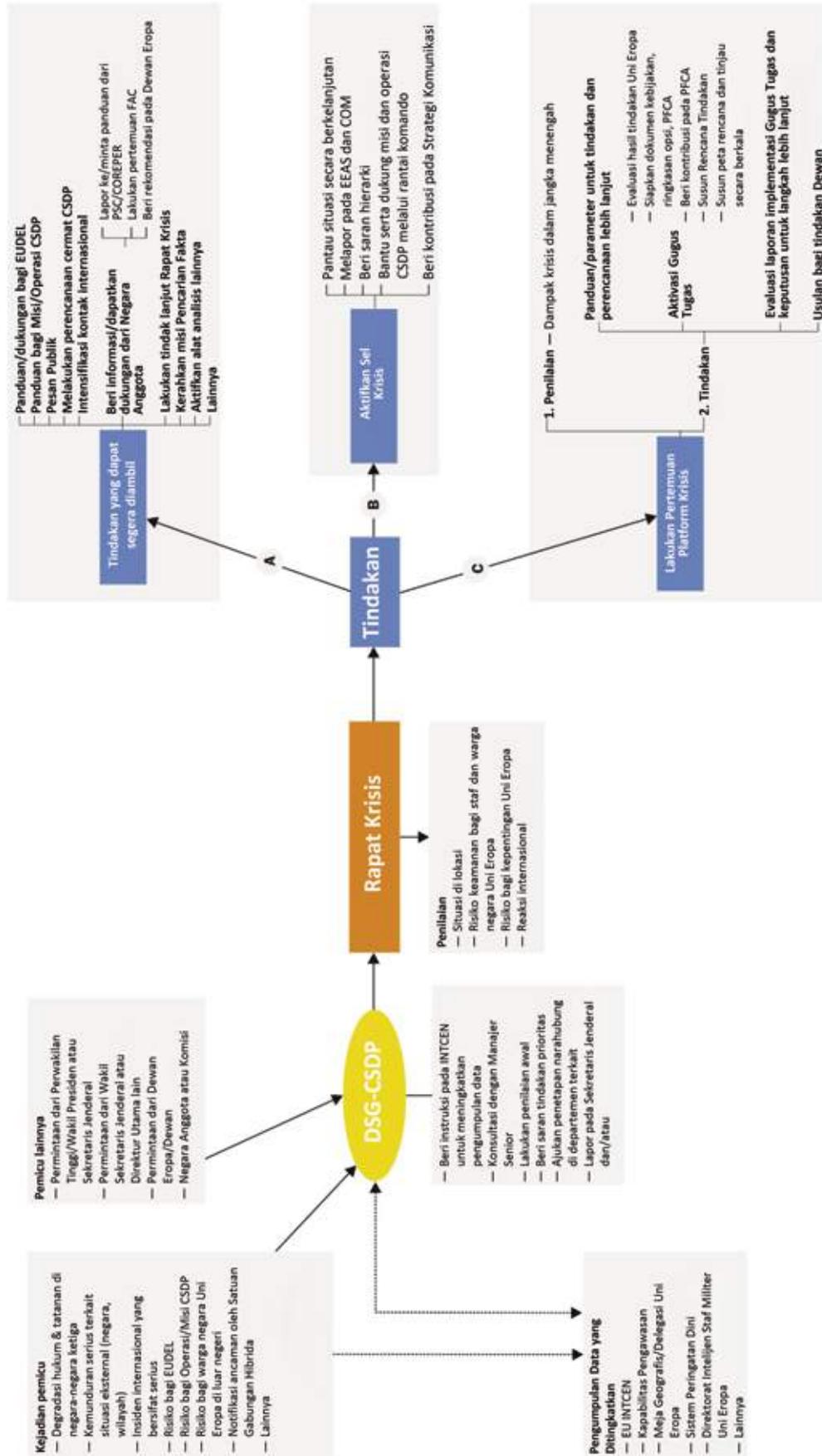
SATUAN TUGAS dipimpin oleh MD geografis yang kompeten dan anggotanya terdiri dari perwakilan jasa yang terlibat dalam respons. Tujuannya adalah untuk mengikuti dan menerapkan respons Uni Eropa. Satuan Tugas mengevaluasi dampak tindakan Uni Eropa, mempersiapkan dokumen dan pilihan kebijakan, berkontribusi pada persiapan Kerangka Kerja

Politik Pendekatan Krisis (PFCA), mengembangkan rencana aksinya sendiri, membuat rencana dan meninjaunya secara berkala, berkontribusi pada strategi komunikasi, dan mengadopsi segala susunan yang dapat memfasilitasi penerapan respons Uni Eropa.

Rencana Tanggap Krisis Politik Terintegrasi (IPCR) diaktifkan oleh Presidensi Uni Eropa atau atas permintaan dari satu atau beberapa Negara Anggota. Hal ini memungkinkan konsultasi cepat Negara Anggota Uni Eropa di tingkat politis jika terjadi keadaan darurat politik yang signifikan yang juga memiliki dampak yang luas, yang terjadi di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa.

EEAS berkontribusi atas proses IPCR, termasuk menyediakan masukan bagi laporan Kesadaran dan Analisis Situasi Terintegrasi (ISAA). Ruang Situasi adalah poin kontak EEAS pusat dengan IPCR 24/7.

Arsitektur Mekanisme Tanggap Krisis EEAS



Rencana Tanggap Krisis Politik Terintegrasi (IPCR).

2.6. KAPASITAS ANALISIS INTELIJEN TUNGGAL (SIAC)

oleh Jose Morgado dan Radoslaw Jezewski



Kapasitas Analisis Intelijen Tunggal (SIAC) adalah rencana kerja di situ Pusat Intelijen dan Situasi Uni Eropa (EU INTCEN) dan Direktorat Intelijen Staf Militer Uni Eropa (EUMS INT) bersama memberikan analisis Intelijen dan peringatan awal juga kesadaran situasional kepada dewan pimpinan EEAS begitu juga kepada institusi dan Negara Anggota Uni Eropa.

SIAC merupakan titik masuk tunggal bagi intelijen sipil dan militer/pertahanan juga jasa keamanan bagi Negara Anggota Uni Eropa di situ mereka menyediakan dokumen strategi rahasia atau rapat persiapan kepada institusi Uni Eropa.

BAGAIMANA SIAC BEKERJA?

SIAC memberikan jasa gabungan yang unik, menggabungkan intelijen dari semua intelijen militer dan sipil Negara Anggota yang berpartisipasi dan jasa keamanan dalam kerangka kerja SIAC.

Dibangun atas 'pendekatan seluruh sumber' dan didukung oleh Divisi OSINT dan Pusat Satelit Uni Eropa (Satcen), analisis SIAC, memproses dan menyebarkan intelijen strategis. Analisis SIAC bekerja di seluruh wilayah dan area asing utama dan urusan kebijakan keamanan untuk Uni Eropa. Sejak 2016, Sel Fusi Gabungan Uni Eropa, yang dibuat atas keputusan Dewan Eropa, telah menyediakan dukungan intelijen kepada semua aktor Uni Eropa.

SIAPA PENGGUNA SIAC?

SIAC menyediakan dukungan intelijen kepada Perwakilan Tinggi dari Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa juga kepada Wakil Presiden Komisi Uni Eropa (HR/VP) dan semua struktur EEAS. SIAC mendukung beragam badan pembuat keputusan Uni Eropa di bidang Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan (CFSP), Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Umum (CSDP), kontra-terorisme dan menangani ancaman gabungan, termasuk Komite Politik dan Keamanan (PSC) juga Komite Militer Uni Eropa (EUMC). Sejak diberlakukan pada tahun 2007, SIAC telah memberikan intelijen bagi Dewan, Komisi dan Negara Anggota, guna membentuk pemahaman dasar umum.

PRODUK INTELIJEN SIAC

Produk SIAC, beragam mulai dari Catatan Rapat Awal Kilat tingkat tinggi hingga Intelijen mendalam atau Penilaian Ancaman, hal tersebut dibuat berdasarkan intelijen yang diberikan oleh jasa intelijen dan keamanan Negara Anggota Uni Eropa, laporan dari delegasi Uni Eropa, misi dan operasi CSDP, analisis gambar satelit dari SatCen, juga dari bermacam sumber terbuka.

PUSAT INTELIJEN DAN SITUASI UNI EROPA (EU INTCEN)

EU INTCEN merupakan badan intelijen sipil eksklusif dari Uni Eropa, yang memberikan analisis mendalam bagi pembuat keputusan di Uni Eropa. EU INTCEN adalah sebuah direktorat dari Pelayanan Aksi Eksternal Eropa (EEAS). Direktorat EU INT-CEN secara langsung terhubung ke HR/VP.

EU INTCEN terdiri dari Analisis Intelijen dan Divisi Pelaporan dan Penilaian Sumber Terbuka juga Divisi Pendukung.



untuk latihan. Cabang Dukungan bertindak sebagai manajer informasi dan memberikan hub komunikasi pusat untuk secara efisien menyebarkan, membagikan dan mengarsipkan informasi dan produk.

DIREKTORAT INTELIJEN STAF MILITER UNI EROPA (EUMS INT)



EUMS INT merupakan direktorat dalam EUMS yang staf nya merupakan profesional intelijen yang datang dari Negara Anggota. EUMS bergantung pada dukungan jaringan luas dari Organisasi Pertahanan Intelijen (DIO) Negara Anggota.

EUMS INT terdiri dari tiga cabang: Produksi, Kebijakan dan Dukungan. Cabang Produksi merupakan komponen kunci dari EUMS INT, yang menggabungkan semua sumber dan kontribusi intelijen DIO. Cabang Kebijakan bertanggung jawab untuk mengembangkan konsep yang berhubungan dengan intelijen bersama badan sipil Uni Eropa terkait. Juga berkontribusi atas perencanaan misi EU CSDP dan mempersiapkan skenario dan spesifikasi intelijen

3 MISI DAN OPERASI CSDP

3.1. CARA MERENCANAKAN DAN MELUNCURKAN MISI ATAU OPERASI CSDP

oleh Fernando Moreno

Menurut Perjanjian Lisboa, tujuan dari kebijakan keamanan dan pertahanan bersama (CSDP) adalah untuk memberikan Persatuan kapasitas operasional untuk melakukan misi di luar Uni Eropa untuk menjaga perdamaian, pencegahan konflik dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip Piagam PBB. Misi ini termasuk operasi pelucutan senjata bersama, tugas kemanusiaan dan penyelamatan, tugas saran militer dan bantuan, tugas pencegahan konflik dan menjaga perdamaian, juga tugas satuan tempur dalam manajemen krisis, termasuk mendorong perdamaian dan stabilisasi pascakonflik. Kapabilitas sipil dan militer diperlukan untuk melakukan misi ini akan disediakan oleh Negara Anggota. Keputusan yang berhubungan dengan misi ini akan

diadaptasi oleh Dewan yang bertindak secara sepakat atas proposal dari Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Urusan Luar Negeri dan Keamanan atau inisiatif dari Negara Anggota.

Guna mewujudkan hal ini Uni Eropa mengadaptasi prosedur manajemen krisis ('Sara untuk prosedur manajemen krisis untuk operasi manajemen krisis CSDP'). Prosedur ini didorong oleh Komite Politik dan Keamanan (PSC) pada Juni 2013 setelah dilakukannya tinjauan komprehensif atas 'Saran untuk prosedur manajemen krisis untuk Manajemen Krisis Uni Eropa yang koheren dan komprehensif' pada Juli 2003. Tinjauan 2013 juga mempertimbangkan pelajaran yang didapat dari dekade pertama ESDP/CSDP dan pendirian Pelayanan Aksi Eksternal Uni Eropa





Prosedur Manajemen Krisis (CMP) memberikan kerangka kerja bersama untuk interaksi antara badan Pembuatan Keputusan Dewan, maka EEAS dan partisipasi dalam proses.

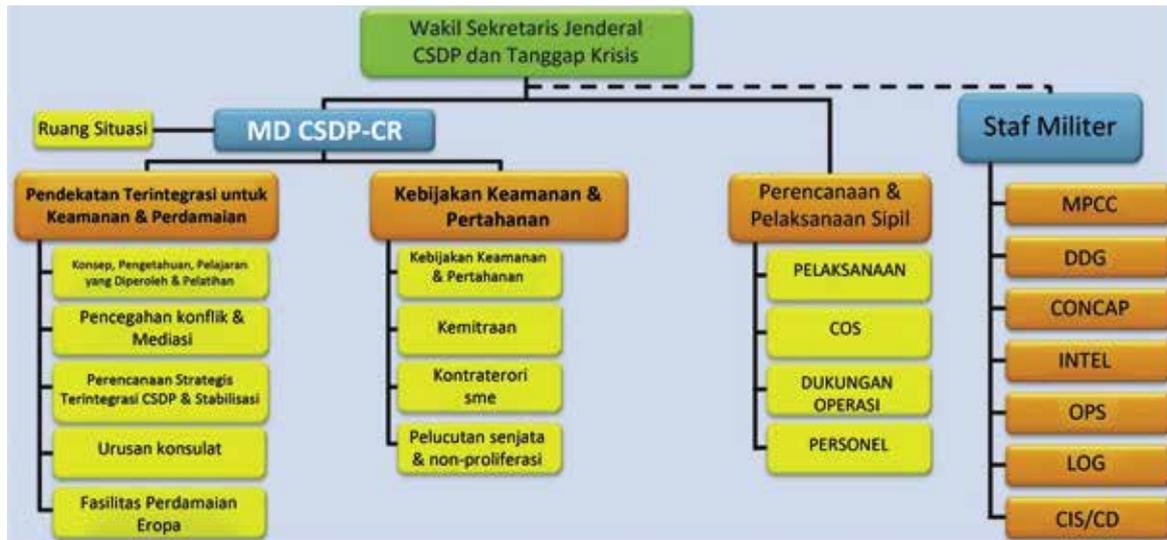
(EEAS), termasuk pengembangan struktur CSDP baru, sebagai sebab dari pelaksanaan Perjanjian Lisboa.

Prosedur manajemen krisis (CMP) menjelaskan proses melalui keterlibatan Uni Eropa dalam krisis dengan instrumen CSDP sebagai bagian dari keseluruhan pendekatan terintegrasi. Semua tahap dalam proses dijelaskan secara penuh, dan proses dirancang untuk membahas krisis dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Prosedur sangat mendetail dan berulang, tetapi hal ini tidak menahan kemampuan Uni Eropa untuk melakukan pendekatan pada krisis dengan cara yang fleksibel dan efektif.

CMP dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas CSDP dibuat, dirancang, diluncurkan, dilaksanakan dan ditutup dengan kendali politik penuh juga arahan strategis yang dilakukan oleh PSC, di bawah tanggung jawab Dewan dan Perwakilan tinggi (HR). Oleh karena

itu prosedur tersebut memberikan kerangka kerja bagi pembuatan keputusan dan proses perencanaan untuk menyiapkan dan meluncurkan misi dan operasi CSDP, sebagai bagian dari pendekatan Uni Eropa lebih luas yang terintegrasi, memberikan penengahan untuk interaksi antar Negara Anggota Uni Eropa, struktur EEAS dan CSDP, Komisi dan aktor terkait.

CMP menjelaskan proses pembuatan keputusan dan perencanaan untuk membangun aksi CSDP, termasuk tanggung jawab atas beragam aktor dan interaksinya, memenuhi spesifikasi bagi instrumen CSDP. Mereka juga mengatur agar dokumen terkait untuk disiapkan dan diadaptasi di seluruh proses dan ruang lingkungannya, dengan memperhatikan sifat sipil-militer dari CSDP. CMP juga melibatkan ketentuan untuk keterlibatan dengan mitra dan organisasi internasional lainnya.



Gratik: Fernando Moreno

Di bawah otoritas Deputy Sekretaris Jenderal EEAS untuk CSDP dan Tanggap Krisis, struktur manajemen krisis melakukan perencanaan dan persiapan proposal yang akan HR ajukan kepada Dewan dan keputusan PSC.

CMP menentukan pendekatan lima fase kepada pembuatan keputusan, perencanaan respons krisis, dan pelaksanaan dan peninjauan misi dan operasi. Walau tahap-tahap tersebut yang dilakukan secara bertahap, pada kenyataannya beberapa proses saling tumpang tindih atau bahkan disatukan atau dilewati jika memungkinkan. Selain itu, perancangan dokumen tertentu seperti konsep manajemen krisis, peninjauan strategis, konsep operasi atau rencana operasi merupakan proses yang rumit yang melibatkan interaksi dengan faktor lain, misi pencarian fakta, konsultasi formal atau informal dengan Negara Anggota, rekan atau otoritas lokal, misi penilaian teknis, dll., yang membuat setiap misi atau operasi menghadapi tantangan perencanaan yang unik.

FASE 1: IDENTIFIKASI KRISIS DAN PENGEMBANGAN KESELURUHAN PENDEKATAN UNI EUROPA

Selama fase pertama dari proses, HR yang dibantu oleh EEAS, berkontribusi pada pencegahan konflik dan penguatan keamanan internasional melalui pemantauan dan peringatan dini. Fase ini tidak berfokus pada CSDP juga tidak dipimpin oleh CSDP, tetapi ditujukan untuk mengetahui **MENGAPA** Uni



Toolbox Uni Eropa Misi dan Operasi CSDP terdiri dari satu instrumen terkait untuk Pendekatan terintegrasi Uni Eropa untuk krisis dan konflik eksternal.

Eropa harus terlibat, mengidentifikasi urusan Uni Eropa yang dipengaruhi oleh krisis tersebut juga opsi dan tujuan untuk respons Uni Eropa yang terintegrasi. Hasil dari fase ini akan menjadi perwakilan dari kerangka kerja politik untuk pendekatan krisis (PFCA) pada PSC (perwakilan Negara Anggota) untuk menginformasikan diskusi tentang bagaimana Uni Eropa harus menangani situasi. PFCA dirancang oleh meja geografis terkait dengan dukungan dari

layanan EEAS dan Komisi lain. Masukkan CSDP kepada PFCA diberikan oleh departemen Perencanaan Strategis Terintegrasi, didukung oleh Staf Militer Uni Eropa (EUMS) dan Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil (CPCC). Perancangan PFCA bisa dilewati, jika PSC setuju, dalam situasi genting atau jika sudah ada kerangka kerja strategis bagi respons CSDP potensial (mis. Strategi regional). PSC kemudian dapat mengundang EEAS untuk merancang konsep manajemen Krisis (CMC) untuk tindakan CSDP. Dalam fase ini, konsultasi dengan NATO, Uni Eropa dan organisasi internasional juga rekan lainnya dilakukan secara sistematis.

FASE 2: PEMBANGUNAN CMC DAN PEMBANGUNAN MISI/OPERASI

Setelah diskusi dalam PFCA, PSC dapat memutuskan untuk melanjutkan dengan tahap perencanaan spesifik untuk tindakan CSDP dan untuk mengundang EEAS guna merancang konsep manajemen krisis. Ini merupakan bagian politik-strategis dari proses dan ditujukan untuk menentukan **APA** yang akan dilakukan dengan instrumen CSDP. Hasilnya adalah persetujuan CMC oleh Dewan, setelah presentasi

kepada PSC oleh HR atau perwakilannya dan adaptasi keputusan Dewan yang membangun misi/operasi (disebut sebagai mandat). Fase ini, yang dipimpin oleh Perencanaan Strategis Terintegrasi untuk CSDP dan Unit Stabilisasi (ISP3), mengarahkan interaksi yang sering terjadi dengan rekan, organisasi internasional, otoritas lokal, layanan Komisi dan aktor terkait, juga misi pencarian fakta yang diperlukan. Selama fase ini, opsi strategis militer dan/atau sipil juga dapat dibuat untuk membantu CMC. Badan Dewan (Komite Militer Uni Eropa (EUMC), Komite untuk Aspek Krisis dari Manajemen Krisis (CIVCOM) dan Kelompok Politis-Militer (PMG) akan dilibatkan di seluruh proses untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada PSC sebelum dokumen apa pun disetujui. CMC merupakan bagian penting dari proses pembuatan keputusan CSDP, menyederhanakan ambisi dan kebutuhan politik menjadi opsi CSDP yang jelas untuk keterlibatan. CMC dibuat oleh ISP3 dengan dukungan dari EUMS dan CPCC dan dengan berkonsultasi kepada EEAS dan dinas Komisi lain, dengan mempertimbangkan instrumen Uni Eropa dan respons rekan lain. Pada tahap ini, EEAS akan memberikan rekomendasi kepada PSC tentang kemungkinan untuk melibatkan pihak ketiga untuk terlibat dalam misi/operasi CSDP.



Walaupun perencanaan untuk respons sipil dan militer CSDP mengikuti jalur yang harmonis, ada beberapa ketentuan yang disebabkan oleh perbedaan sifat dari kedua alat, seperti regulasi finansial, struktur C2 atau kemampuan yang digunakan.

Atas dasar keputusan Dewan dan parameter yang ditentukan dalam CMC (ditambah opsi strategis sipil dan/militer); maka fase ketiga akan dimulai.

FASE 3: OPERASI PERENCANAAN MISI ATAU OPERASI CSDP DAN KEPUTUSAN UNTUK PELAKSANAAN

Untuk misi/operasi militer, rumusan perintah militer (IMD) kan dibuat oleh EUMS atas dasar dokumen sebelumnya, yang diberikan kepada komandan operasi atau misi (biasanya ditentukan di akhir fase kedua) oleh EUMC. Selama fase ini, komandan operasi/misi sipil dan/atau militer akan melakukan perencanaan, menentukan **BAGAIMANA** dirinya akan menerapkan mandat yang diterima. Jika ada operasi eksekutif militer, maka markas besar operasi (OHQ) akan ditentukan dalam fase sebelumnya dan

aktivasinya akan berlanjut, CPCC dan MPCC (Kapasitas Perencanaan dan Pelaksanaan Militer) jika perlu akan di augmentasi untuk misi sipil atau militer. Komandan operasi/misi membuat dan mempresentasikan untuk mendapatkan persetujuan konsep operasi (CONOPS) dan rencana operasi (OPLAN) dari PSC; perencanaan ini akan diinformasikan dengan misi penilaian teknis yang diperlukan yang ditugaskan ke lapangan dan akan melibatkan proses penambahan pasukan. Setelah persetujuan OPLAN oleh DEWAN, maka keputusan kedua dari Dewan untuk melaksanakan misi/operasi akan diadaptasi, menentukan tanggal berlakunya pelaksanaan misi/operasi. Opsi jalur cepat ditentukan dalam CMP, dengan jumlah tahap dan dokumen yang dikurangi (hanya CMC, IMD dan OPLAN yang diperlukan untuk melakukan misi/operasi) jika respons cepat diperlukan; maka PSC dapat selalu memutuskan untuk menerapkannya. Selama fase ini, EEAS melakukan negosiasi perjanjian antara



Grafik: Jochen Rehr

Perencanaan Operasi dilakukan oleh Komandan Operasi Sipil dan Operasi di bawah kendali politik dan arahan strategis PSC. Walaupun tingkat komando sama, tetapi pembuatan struktur C2 berbeda dari Misi dan Operasi Sipil dan Militer.

Uni Eropa dan negara tuan rumah mengenai status misi/operasi Uni Eropa (SOFA/SOMA) sedangkan badan Dewan terus memberikan masukan dan rekomendasi pada PSC akan bermacam dokumen untuk dipresentasikan untuk persetujuan.

FASE 4: PENERAHAN MISI ATAU OPERASI

Fase keempat mungkin dimulai secara paralel dengan fase ketiga dan akan menentukan pengerahan pasukan dan pelaksanaan mandat, juga secara berkala akan dilaporkan kepada PSC, yang di bawah otoritas Dewan dan HR akan melaksanakan kendali politik dan menentukan arah strategis. Dalam melaksanakan misi dan operasi CSDP, EEAS terus terlibat dengan pihak ketiga dan organisasi internasional untuk memastikan koherensi tindakan CSDP dengan respons lain, sedangkan komandan operasi/misi mengkoordinir pelaksanaan mandat mereka dengan aktor lain yang terlibat. Tidak terlepas dari kenyataan bahwa kepada delegasi Uni Eropa dan perwakilan khusus Uni Eropa bukanlah bagian dari rantai komando misi/operasi CSDP, tetapi mereka dapat memberikan panduan politik lokal mengenai tindakan CSDP.

FASE 5: TINJAUAN STRATEGIS MISI DAN OPERASI CSDP

Fase kelima (bukan fase yang harus ada) terdiri dari penilaian ulang parameter seputar misi/operasi CSDP (skenario, situasi, urusan dan tujuan Uni Eropa, penambahan nilai CSDP, kebutuhan dan peluang, keterlibatan pihak lain, komitmen lokal, dll.) dengan tujuan untuk memberikan opsi bagi keputusan Dewan untuk memperpanjang, berfokus ulang dan/atau menghentikan tindakan CSDP. Tinjauan Strategis (SR) dilakukan oleh EEAS (ISP3) di bawah otoritas HR saat akhir mandat mendekat atau saat keadaan menandakan bahwa adanya keperluan untuk meninjau parameter tindakan CSDP. SR dipresentasikan kepada PSC oleh HR, atau perwakilannya, untuk keputusan mengenai masa depan misi/operasi. Saat misi atau operasi CSDP dibuat, Dewan biasanya mengizinkan PSC untuk

melakukan semua keputusan terkait, sedangkan kuasa pembuatan keputusan sehubungan dengan tujuan dan penghentian tindakan CSDP akan tetap berada di tangan Dewan.

KESIMPULAN

Fitur utama dari CMP adalah kendali yang dilakukan oleh Negara Anggota di seluruh proses, sejalan dengan ketentuan Perjanjian Lisboa bagi CSDP, maka Dewan dan PSC dapat, namun, memutuskan pada saat kapan pun dalam proses untuk mengurangi tahap atau jumlah dokumen yang dibuat.

Pada tahun 2013, PSC setuju bahwa CMP harus ditinjau secara rutin. Kini ada keperluan untuk meninjau CMP guna (i) merefleksikan perubahan yang telah dibuat pada struktur EEASD CSDP dan instrumen Komisi baru yang telah dibuat sejak 2013; (ii) menggabungkan konsep pendekatan terintegrasi; dan (ii) menghubungkan CMP kepada mekanisme respons krisis. Tinjauan harus menjaga koherensi antara perencanaan sipil dan militer.

3.2. TANTANGAN OPERASI DAN MISI MILITER

oleh Georgios Tsitsikostas



Uni Eropa

Kurangnya hasil yang cepat dan spektakuler dapat membuat frustrasi. Akan tetapi, 'cepat menang' tak pernah bisa diantisipasi atau diperkirakan, walaupun itu menjadi hal yang bisa diterima.

Sejak tahun 2003, Uni Eropa telah meluncurkan 13 misi dan operasi militer CSDP. Dikerahkan di dua benua, di darat dan laut, misi-misi dan operasi ini membentuk kontribusi kepada pendekatan komprehensif Uni Eropa akan manajemen krisis. Tujuan mereka, terlepas dari area geografis tempat mereka ditugaskan, adalah untuk mendukung usaha untuk memulihkan stabilitas dan membangun keamanan di negara dan wilayah di sekitar Uni Eropa. Hari ini, enam misi dan operasi militer yang dipimpin Uni Eropa sedang aktif.

Mandat dari misi dan operasi ini, yang dibuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB atau melalui permintaan oleh negara asal, menjadi beragam. Hal ini mendukung sifat fleksibilitas asal dan kemampuan beradaptasi pendekatan militer yang memungkinkan dan mengaktifkan perkembangan keterlibatan Uni

Eropa yang mulus, seiring perkembangan di negara tersebut. Contoh dari perkembangan bertahap operasi militer Uni Eropa di Republik Afrika Tengah (EUFOR CAR) menjadi Misi Penasihat Militer non-eksekutif (EUMAM CAR) yang kemudian menjadi Misi Pelatihan (EUTM CAR) memiliki nilai edukasi dalam hal ini.

PROYEKSI STABILITAS DAN PEMBANGUNAN KEAMANAN

Kurangnya hasil yang cepat dan spektakuler dapat membuat frustrasi. Akan tetapi, 'cepat menang' tak pernah bisa diantisipasi atau diperkirakan, walaupun itu menjadi hal yang bisa diterima. Sifat dari keterlibatan militer dalam misi dan operasi CSDP saat ini



Ancaman baru butuh respons baru. Ancaman transnasional, multidimensional dan dinamis yang mengaburkan batas divisi keamanan internal/eksternal tradisional.

secara mendasar berbeda dengan tugas militer pada umumnya, karena ini dilakukan di bawah kendali nasional dan dalam batas wilayah nasional. Walaupun militer terhubung dengan elemen 'keras' yang dimiliki negara adidaya atau organisasi, dan memang begitu, maka dalam pendekatan Uni Eropa yang unik ini, membuatnya dibungkus dalam 'sarung tangan merah'.

Keberadaannya di negara tuan rumah atau di laut di sebelah wilayah tidak stabil ditujukan untuk memproyeksikan stabilitas dan bukan kekuatan, juga untuk meningkatkan keamanan.

Komitmen Uni Eropa adalah perdamaian dan keamanan di Afrika agar bertumbuh, dan memburuknya lingkungan keamanan di bagian benua tersebut - yang sangat penting bagi Eropa - yaitu Republik Afrika Tengah, Mali dan Somalia, menyebabkan tantangan dan ancaman yang harus ditangani dengan wajar dan efektif. Dari sisi Eropa diakui bahwa kunci untuk mencapai Lingkungan yang Aman dan Selamat (SASE) yang berkelanjutan, adalah dengan mendukung, memungkinkan dan mendukung institusi keamanan lokal dalam membangun kapasitas mereka sendiri. Untuk tujuan tersebut, maka pembuatan kepemilikan usaha keras dan menikmati dukungan yang ekstensif dari pemilik kepentingan terkait di negara yang terlibat adalah *'sine qua nons'*.

Dalam konteks ini tugas yang dipercayakan kepada militer, termasuk mendukung pembangunan keamanan pribumi, memberikan masukan kepada institusi keamanan terkait di wilayah seperti operasi,

rencana, logistik, urusan administrasi dan legal, juga memberikan latihan khusus untuk Angkatan Bersenjata di negara terkait.

Penekanan yang besar diletakkan pada perintah konstitusional dan demokratis yang terus melaju melebihi aparaturnya militer dan memperkuat supremasi hukum. Penguatan efektivitas angkatan bersenjata lokal, reformasi menjadi institusi yang modern, seimbang secara etnis dan demokratis juga pemulihan kredibilitas juga keseluruhan kesan di antara masyarakat merupakan hal fundamental bagi lingkungan keamanan yang akan tahan waktu. Walau mandat dari ketiga misi militer non-eksekutif Uni Eropa ini berbeda, mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang berbeda bagi negara tertentu, namun serupa yaitu fokus untuk beroperasi di latar belakang dan melakukan pekerjaan yang mendalam, yang memerlukan kesabaran, ketahanan dan komitmen: kualitas tersebut disematkan dalam DNA militer.

KARAKTER DAN MANDAT EKSEKUTIF

Pendekatan yang sama sudah pasti merupakan operasi militer Uni Eropa. Karakter dan mandat eksekutif memprioritaskan tugas terkait Kata yang digunakan di sini lebih keras: [...] *menjaga lingkungan yang Selamat dan Aman* dalam hal EUFOR perlindungan ALTHEA, [...] *akan pengiriman, proyeksi pencegahan, penanganan aksi perompakan* dalam hal EUNAVFOR ATALANTA, [...] *mencegah bisnis penyelundupan dan perdagangan manusia* dalam hal EUNAVFORMED SOPHIA. Namun, perbaikan tidak ada yang instan: EUFOR ALTHEA mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga Lingkungan yang Selamat dan Aman dari Pasukan Stabilisasi (SFOR) NATO pada tahun 2004; EUNAVFOR ATALANTA telah beroperasi di Samudra Hindia sejak 2008. EUNAVFORMED SOPHIA juga mungkin akan aktif untuk waktu yang lama. Kemudian perlu diingat, fleksibilitas dan adaptabilitas instrumen militer telah terbukti sebagai hal yang penting. Seiring waktu, dan berdasarkan pengembangan di lapangan dan konsep fase awal operasi, operasi telah berkembang dengan tugas yang diubah dan ditambah.

Dalam hal tertentu, tugas ini lebih bersifat



Uni Eropa/EUPOR ALTHEA

Tantangan tertentu dapat diatasi dengan cepat dengan syarat ada keteguhan politik untuk melakukannya.

non-eksekutif, seperti operasi untuk [...] *mendukung kapasitas pembangunan dan latihan penjaga laut*.

ANCAMAN TRANSNASIONAL, MULTIDIMENSIONAL DAN DINAMIS

Dalam satu dekade terakhir, lingkungan keamanan di wilayah sekitar Eropa telah berubah secara signifikan. Tantangan dan ancaman baru telah muncul menambah yang sudah ada. Hal ini termasuk terorisme, [ancaman gabungan] keamanan siber, bertambahnya senjata pemusnah massal dan cara pengirimannya, kejahatan terorganisasi transnasional, perompakan dan konflik bersenjata. Strategi Global Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan secara akurat mengidentifikasi tantangan dan ancaman ini juga memberikan pandangan peran Uni Eropa sebagai penyedia keamanan yang handal.

Ancaman baru butuh respons baru. Beberapa ancaman transnasional, multidimensional dan dina-

mis yang mengaburkan batas divisi keamanan internal/eksternal tradisional, oleh karena itu respons gabungan sipil-militer diperlukan guna menangannya secara efektif. Uni Eropa harus inovatif, dapat beradaptasi dan teguh untuk menjadi aktor strategis yang diakui.

Pemanfaatan yang lebih baik dari instrumen sudah ada dalam kotak alat yang ekstensif, juga memperkuat dan menambahnya dengan bermacam fitur tambahan untuk menjembatani celah atau menutup kekurangan akan memungkinkan Uni Eropa untuk memenuhi peran ini.

KELOMPOK TEMPUR: RESPONS CEPAT, TIDAK PERNAH DIGUNAKAN

Misi dan operasi militer CSDP dihadapkan dengan tantangan internal juga eksternal bagi Uni Eropa, menambah kerumitan dari keseluruhan hal. Semua ini telah diketahui dan dianalisis secara cermat. Uni



Uni Eropa/EUTM Somalia

Sifat dari keterlibatan militer dalam misi dan operasi CSDP saat ini secara mendasar berbeda dengan tugas militer pada umumnya karena ini dilakukan di bawah kendali nasional.

Eropa telah dikritisi secara ekstensif sebagai lambat dalam melakukan respons. Kritik yang lebih keras juga disebabkan oleh keengganan untuk menggunakan pasukan respons cepat, yaitu, Kelompok Tempur. Tidak dapat disangkal bahwa prosedur pembuatan keputusan yang sudah ada dalam Uni Eropa memang membutuhkan banyak waktu. Namun, hal ini dapat diperdebatkan bahwa prosedur tersebut dirancang dengan demikian guna memfasilitasi proses ini, dalam sebuah institusi yang saat ini menggabungkan 27 negara dengan suara yang sama. Di saat yang sama, setiap kali ada hal kritis, seperti halnya Operasi Artemis atau EUFOR CAR, fleksibilitas yang memadai ditujukan dan keputusan dibuat dengan tepat waktu, sebuah fakta yang sudah diketahui secara luas. Hal ini membuktikan bahwa tantangan dapat ditangani, dengan syarat keteguhan politik juga ada.

Argumen serupa juga dapat digunakan untuk mendukung potensi pengerahan Kelompok Tempur, instrumen yang pada tahun ini telah berusia sepuluh tahun namun tak pernah dikerahkan, walau pada kenyataannya pada beberapa kesempatan dapat digunakan sebagai respons yang sesuai. Sepuluh tahun setelah

didirikan, ini waktu yang tepat untuk menilik kembali konsep Kelompok Tempur dan memeriksa seberapa relevan pada tantangan kontemporer. Ini waktunya untuk menanyakan pertanyaan yang sulit, seperti apakah kita masih butuh (atau ingin) memiliki kemampuan respons yang cepat semacam ini dan, bergantung pada jawabannya, membuat keputusan sesuai. Jika hasil dari debat ini adalah bahwa ancaman dan tantangan yang dihadapi Uni Eropa memerlukan kemampuan tersebut, maka tidak hanya harus dipertahankan, tapi juga harus dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang berarti dan berguna. Dan kegunaannya, maka menjadi diperlukan dan layak digunakan. Seperti halnya masalah pembuatan keputusan, hal ini juga merupakan masalah keteguhan politik.

PENDANAAN KOLEKTIF DI BAWAH 'ATHENA' ¹

Pendanaan yang cukup juga merupakan tantangan bagi misi dan operasi militer Uni Eropa. Operasi militer biasanya didanai melalui pendanaan nasional, walau beberapa operasi dapat didanai melalui penda-



Uni Eropa/EUNAVFOR Somalia

Tujuan militer dari keterlibatan CSDP, terlepas dari area geografis tempat mereka ditugaskan, adalah untuk mendukung usaha untuk memulihkan stabilitas dan membangun perdamaian untuk urusan Uni Eropa.

naan kolektif di bawah ketentuan mekanisme 'Athena'. Ketentuan ini tidak membuat partisipasi dalam misi dan operasi menjadi menarik, dan hal tersebut membuat Negara Anggota yang lebih kecil, atau negara yang terkena krisis finansial, untuk ikut memberikan kontribusi yang lebih aktif. Tinjauan atas mekanisme 'Athena' yang akan datang di tahun 2017 memberikan peluang yang unik untuk membahas masalah ini, yang meningkatkan dan sampai batas tertentu menjelaskan, keengganan untuk mengerahkan Kelompok Tempur. Dalam hal misi militer Uni Eropa, pendanaan seharusnya juga meliputi penyediaan dukungan materi terkait bagi penerima program latihan mereka, jika pelatihan tersebut bermanfaat secara operasional. Harus dicatat bahwa keseluruhan biaya CSDP pada anggaran Uni Eropa adalah minim, dibandingkan dengan pentingnya untuk menerapkan hal tersebut. Revisi mekanisme 'Athena' dalam hal ini mungkin menyebabkan efek sekunder yang akan meningkatkan ketertarikan negara yang mungkin akan berkontribusi, memfasilitasi pembentukan pasukan tambahan

dan meningkatkan keberlanjutan usaha tersebut. Ekspektasinya adalah bahwa peluang ini akan diambil dan keputusan politik akan dibuat guna memfasilitasi operasi dan memaksimalkan keefektifan keterlibatan militer di bawah CSDP.

MARKAS UNI EROPA PERMANEN

Cara Uni Eropa membahas kesulitan dan celah yang diketahui dalam hal misi dan operasi militer CSDP pada saat ini direncanakan dan dilakukan membentuk jenis tantangan baru. Di antara kesulitan ini adalah periode perpanjangan tidak adanya komandan yang ditugaskan untuk pergi dari posnya untuk berada di Brussel. Ini juga akan menghasilkan dari hilangnya pengalaman keras yang berharga, pelajaran dan keahlian yang didapatkan setelah misi atau operasi berakhir. Prosedur selama ini di Uni Eropa, yang telah teruji, terbukti dan koheren, berbeda dari yang digunakan oleh institusi pertahanan nasional. Pem-

1 mekanisme finansial saat ini dapat dilihat di bab 3.5 Fasilitas Perdamaian Eropa di halaman 103.

bentukan struktur manajemen dan perencanaan juga markas operasional Uni Eropa telah dengan jelas teridentifikasi sebagai tahap perbaikan, membuat praktik Uni Eropa menjadi efisien dengan norma yang baik dan terbukti. Tantangannya adalah untuk menyeimbangkan Negara Anggota yang meminta pengembangan kemampuan militer Uni Eropa yang lebih ambisius, dan yang mengutarakan keraguan atas dasar untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dengan NATO, hal yang disetujui secara bulat.

Juga ada perjanjian guna memperdalam kerja sama dengan NATO, dalam beragam area yang merupakan kepentingan bersama. Ini juga merupakan wilayah yang memberikan tantangan, dengan memerhatikan sifat yang berbeda dari setiap institusi dan sensitivitas politik yang ada dari Negara Anggota tertentu. Kerja sama praktis dilakukan di tingkat taktis, dengan memecahkan masalah di lapangan dan memaksimalkan keefektifan misi dan operasi terkait.

KEAMANAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Batas yang kabur dari batas divisi keamanan internal/eksternal tradisional dan pengakuan kebutuhan untuk membahas permintaan jaringan keamanan internal/eksternal, bukannya memerlukan, kerja sama yang lebih erat antara pasukan militer dan keamanan. Hal ini sudah dialami oleh beberapa Negara Anggota, yang memobilisasi Angkatan Bersenjata mereka guna memberikan respons atas situasi seperti krisis migran, yang intensitasnya melebihi kapasitas otoritas sipil yang bertanggung jawab. Di masa mendatang mungkin ada permintaan atas misi militer Uni Eropa untuk memberikan dukungan semacam kepada Negara Anggota, sebagaimana telah diimplikasikan.

Seruan atas Pasal 42(7) (klausul bantuan mutual) dari TEU oleh Prancis, setelah terjadinya serangan teroris mematikan pada November 2015 di Paris mengangkat masalah dan meramaikan diskusi tentang cara Uni Eropa akan memberikan bantuan kepada Negara Anggota atas situasi serupa di masa mendatang. Diskusi juga melibatkan Pasal 222 (klausul solidaritas) dari TFEU.

Referensi eksplisit untuk menggunakan sumber daya militer yang tersedia bagi Uni Eropa ('[...] *memobilisasi semua instrumen yang ada, termasuk sumber daya militer yang disediakan oleh Negara Anggota [...]*'), memberikan peluang tambahan untuk mencerminkan bahwa cara ini dapat dimungkinkan, terutama karena Pasal 222 TEFU bukanlah bagian dari Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama dan karenanya tidak dalam lingkup tanggung jawab EUMC.

UNI EROPA: AKTOR GLOBAL DAN PENYEDIA KEAMANAN

Uni Eropa merupakan pelaku global dan penyedia keamanan. Oleh karena itu sangat dihormati dan dianggap tinggi. Terlepas dari hal tersebut, hal ini tidak dapat diterima begitu saja: posisi pelaku dalam sistem internasional dan kekuatan terkait adalah terus dievaluasi dan diperhitungkan, berdasarkan keputusan dan posisinya. Dalam lingkungan keamanan saat ini, yang dikarakterisasi oleh ketidakstabilan dan revisionisme, pelaku baru - negara atau non negara - telah muncul. Jika Uni Eropa ingin tetap dianggap sebagai penyedia keamanan maka dirinya harus memosisikan dirinya dengan pasti dan meyakinkan sebagai penyedia keamanan. Di tingkat konsep, presentasi Strategi Global Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan juga Penerapan Rencana akan Keamanan dan Pertahanan adalah tepat waktu. Ini waktunya untuk bertindak.

3.3. TANTANGAN BAGI MISI SIPIL CSDP

oleh Kate Fearon dan Sophie Picavet



Unit Eropa/EU/MW Georgia

Misi sipil CSDP mempromosikan stabilitas dan membangun ketahanan di lingkungan yang rapuh dengan memperkuat peraturan hukum institusi dan pemimpin kunci.

Misi sipil CSDP mempromosikan stabilitas dan membangun ketahanan di lingkungan yang rapuh dengan memperkuat supremasi hukum institusi dan pemimpin kunci. Hal tersebut hanyalah salah satu alat dari kotak alat Uni Eropa dalam menghadapi masalah keamanan dan pertahanan, dan mereka bekerja sama dengan delegasi Uni Eropa dalam teater misi dan operasi militer CSDP dan dengan Direktorat Komisi seperti Kerja Sama Pembangunan. Oleh karena itu mereka bekerja untuk menggabungkan ketiga elemen penting dari pendekatan Uni Eropa yang terintegrasi sebagaimana tertulis dalam Strategi Global untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa (2016) (selanjutnya disebut ‘Strategi Glo-

bal’) - diplomasi, keamanan dan pertahanan, dan pengembangan.

SEPULUH MISI SIPIL DI TIGA BENUA

Pada tahun 2016 ada sepuluh misi sipil di tiga benua (Kosovo,¹ Ukraina, Georgia, Niger, Mali, Wilayah Palestina, Afghanistan, Somalia dan Libya), dengan sekitar 2500 staf dikerahkan di teater dan anggaran sekitar 200 juta EUR. Misi ini didukung oleh Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil (CPCC), yang bermarkas di Markas Operasional Brussel. EU CPCC adalah sebuah direktorat dari Dinas Luar Negeri Eropa

¹ Penunjukan ini tanpa prasangka tas posisi atau status, dan sejalan dengan UNSCR 1244 (1999) dan Opini JCJ mengenai deklarasi kemerdekaan Kosovo.



Uni Eropa

Secara tematis, misi CSDP menangani masalah seperti pemberlakuan ketertiban umum, kejahatan terorganisasi dan transnasional, migrasi ilegal, anti korupsi, manajemen sumber daya manusia, masalah hak asasi manusia dan gender dalam sistem keadilan.

(EEAS).

Mandat misi ditentukan oleh Dewan Uni Eropa dan disetujui oleh negara bersangkutan, yang mengundang misi untuk membantu mereka. Walau mandat beragam dari tempat ke tempat, biasanya melibatkan dukungan institusi lokal dan pemimpin kunci dalam pihak berwajib. Terutama, institusi terkait biasanya termasuk dinas prosecution publik, polisi, penjaga perbatasan, penjaga laut, cukai, penjara dan kehakiman. Secara tematis, mereka menangani masalah seperti pemberlakuan ketertiban umum, kejahatan terorganisasi dan transnasional, migrasi ilegal, korupsi, manajemen sumber daya manusia, masalah hak asasi manusia dan gender dalam sistem keadilan.

Misi sipil bertugas untuk meningkatkan kapasitas institusi pihak berwajib dengan mengawasi, memandu dan menasihati organisasi mereka dan mengenai legislasi dan kerangka kerja kebijakan yang mereka gunakan, dan dengan melatih personel. Sebuah misi memiliki mandat eksekutif, jadi juga menginvestigasi, menghukum dan mengadili kasus kriminal.

Beberapa misi dilakukan dalam lingkungan dengan ancaman keamanan tinggi - dalam misi di Afghanistan, Niger, Mali dan Libya tahun 2016 dengan tingkat risiko keamanan yang TINGGI. Komandan Operasi Sipil, yang bertindak atas nama Perwakilan tinggi/

Wakil Presiden Komisi, memiliki 'tugas penanganan' atas seluruh staf.

Sebelum menghadapi tantangan, kita akan melihat beragam pencapaian misi di tahun 2016. Misalnya di **Kosovo**² misi EULEX menerapkan perjanjian dialog yang difasilitasi Uni Eropa tentang manajemen batas wilayah terintegrasi, kendaraan dan plat nomornya, perlindungan sipil, integrasi kepolisian dan kehakiman, yang meningkatkan normalisasi antara Kosovo¹ dan Serbia, juga menangkap figur publik profil tinggi, yang mendemonstrasikan bahwa tak ada siapa pun yang ada di atas hukum dan semua harus tunduk padanya.

Di **Ukraine** misi (EUAM) memfasilitasi Menteri Dalam Negeri nya untuk melakukan program pengaturan masyarakat di seluruh negeri, berdasarkan program awal yang berhasil di tingkat kantor polisi.

Di **Georgia** misi (EUMM) mengurangi ketegangan dan memfasilitasi perjanjian antara pihak yang mengalami konflik melalui saluran telepon dan kemampuannya untuk dengan cepat menugaskan staf ke lokasi terpencil tempat insiden terjadi.

Di **Niger**, misi (EUCAP Sahel Niger) menyelesaikan revisi panduan latihan bagi kepolisian, dan memfasilitasi operasional konsep pos Komando 'PC Mixte' - sebuah mekanisme yang akan meningkatkan koordinasi antara beragam pasukan keamanan internal.

Di **Mali** misi sipil (EUCAP Sahel Mali) mendukung perbaikan sepenuhnya tentang kurikulum latihan nasional untuk polisi, yang memastikan keberlanjutan, latihan yang terstandarisasi dan tingkat tinggi bagi semua anggota baru juga petugas berpengalaman, yang di masa mendatang akan ditambah modul tentang hak asasi manusia dan gender sebagai standar.

Di **Palestine** misi (EUPOL COPPS dan EUBAM Rafah) mendukung peningkatan kapasitas institusi manajemen batas wilayah kunci, dan kami melihat kemajuan dalam kemampuan forensik dan penertiban masyarakat dengan Polisi Sipil Palestina.

Di **Afghanistan** misi (EUPOL) memfasilitasi penandatanganan dua perjanjian kunci tentang Ombudsman Polisi yang akan melindungi masyarakat dari pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi, dan

2 Penunjukan ini tanpa prasangka tas posisi atau status, dan sejalan dengan UNSCR 1244 (1999) dan Opini JCJ mengenai deklarasi kemerdekaan kosovo.



Uni Eropa/EUMM Georgia

Menangani situasi yang sulit: Orang yang tepat tidak selalu tersedia untuk pos yang tepat di waktu yang tepat.

Kerja Sama Polisi-Kejaksaan, yang akan menjadi kunci keefektifan deteksi dan investigasi kejahatan.

Di **Somalia** misi sipil (EUCAP Nestor) melihat adanya Kebijakan Keamanan Nasional baru, yang memfasilitasi rapat Komite Koordinasi Keamanan Maritim Somalia, dan dengan rekanan, mendukung pembukaan Ruang Operasi bagi Penjaga Laut Somalia.

Di **Libya**, walaupun adanya situasi politik dan keamanan yang menantang, misi (EUBAM Libya) dapat terlibat dalam Persetujuan Pemerintahan Nasional, dan menjadikan dirinya sebagai pemain kunci bagi reformasi sektor keamanan di masa mendatang, sebagai bagian dari pembaruan Manajemen Tim Nasional untuk Keamanan dan Batas Wilayah.

Dan, untuk pertama kalinya, kami mencapai kesetaraan gender 50-50 dalam hal Kepala Misi sipil, dengan lima orang wanita dan lima orang pria yang memimpin misi sipil.

TANTANGAN JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN JANGKA PANJANG

Sedangkan untuk hal logistik, keamanan, komunikasi, transportasi, pelaksanaan mandat, perubahan dalam personel rekan lokal, pemindahan personel terlatih ke peran lain, gangguan politik, institusi lokal yang lemah, kapasitas penyerapan dan transisi juga strategi keluar dari semua tantangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi misi sipil CSDP, empat tantangan kunci yang diketahui: dua ada dalam hal operasional dan tingkat strategis, dan dua murni di tingkat strategis saja. Tantangan tersebut adalah (1) Respons, (2) visibilitas, (3) adaptasi konteks keamanan yang lebih luas dan berkembang dan (4) output, dampak dan pengaruh.



Uni Eropa/EU/ANSEC Sudan Selatan

Uni Eropa dipanggil untuk meneruskan aktivitas manajemen krisis sipil yang luas, termasuk dalam area yang berhubungan dengan kemampuan untuk membangun sektor keamanan, reformasi polisi, peraturan hukum dan manajemen perbatasan.

PERKEMBANGAN INDIKATOR

Perekrutan pasukan dan kecepatan penugasan dalam hal personel dan dukungan teknis dan administratif merupakan persyaratan utama untuk memastikan responsivitas. Strategi Global berada dalam posisi yang lebih *'cepat dan efektif'* tindakan CSDP diperlukan dan hal ini dapat dicapai *'dengan menambah perekrutan pasukan [dan] mempercepat penugasan.'*

Misi terdiri dari campuran staf internasional pilihan dan yang dikontrak dan staf lokal yang dikontrak. Mayoritas staf internasional pilihan diambil dari Negara Anggota. Hal ini merepresentasikan komitmen politik yang penting dan yang disambut dalam misi juga CSDP oleh Negara Anggota, tetapi staf pada waktu tertentu rentan akan permintaan yang dibuat oleh institusi domestik (seperti polisi, kehakiman, kejaksaan dan lembaga masyarakatan), yang menyebabkan orang yang tepat menjadi tidak selalu tersedia di pos yang tepat dan di waktu yang tepat. Karenanya menangani situasi ini menjadi sebuah tantangan.

Guna mengurangi hal ini, CPCC melakukan peninjauan ulang dan revisi atas deskripsi pekerjaan, meracik beberapa teks untuk 80 fungsi jabatan dan membagikan hal tersebut dengan Negara Anggota. Hal ini memungkinkan pasukan awal untuk merasakan, meningkatkan prosedur perekrutan dan meningkatkan transparansi, juga - dalam tingkat praktis - guna membantu Negara Anggota dengan semua perencanaan mereka.

Kapasitas CSDP sipil cadangan

Respons yang cepat mengangkat masalah tentang kapasitas CSDP sipil cadangan, yaitu, memiliki 'penanggap pertama' yang terdiri dari staf internal (dari Markas Operasional) untuk penugasan interim yang cepat dengan pemberitahuan yang cepat ke pos kunci - seperti halnya kapasitas cadangan polisi dan staf supremasi hukum di PBB - dan setelah penugasan, ikut dalam proses perencanaan awal untuk misi CSDP yang diperkirakan (yang saat ini memiliki mandat yang rumit terkait kapasitas bangunan untuk kepolisian, migrasi dan otoritas pengadilan pidana).



Uni Eropa/EUCAP Nestor

Semakin besar pembelian dalam wilayah oleh negara lokal dan kepemilikan lokal, semakin besar dampak di lapangan atas pelaksanaan mandat oleh misi CSDP.

Namun, memiliki kapasitas cadangan tidak begitu menguntungkan kecuali mereka dapat beroperasi di lapangan.

Oleh karena itu dukungan personal, teknis dan administratif diperlukan, dan pengembangan protokol standar dan prosedur untuk semua misi merupakan tantangan di tahun mendatang.

Mengenai hal tersebut, penggunaan teknologi informasi yang aman adalah hal penting, karena kemampuan untuk mengerahkan peralatan seperti kendaraan dan komputer dalam waktu yang singkat: konsep baru penyimpanan dan manajemen stok strategis - 'Warehouse 2.0' - telah dikembangkan untuk hal tersebut.

Penerapannya akan menjadi tantangan, terutama tingkat sumber daya yang ada saat ini. Oleh karena itu, pengadaan kapasitas sipil cadangan dan dukungan misi pembantu akan memungkinkan kemajuan kualitatif dalam hal respons sipil CSDP, tetapi tantangan adalah mendapatkan akses kepada sumber daya tambahan untuk mencerminkan peningkatan dalam tindakan dan respons tersebut.

VISIBILITAS

Strategi Global menerangkan urusan vital Uni Eropa sebagai '*perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan demokrasi*'. Strategi Global menerangkan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan (CSDP) sebagai instrumen pelaksana inti, bersama dengan diplomasi dan pengembangan keterlibatan global dan pengaruh. Hal ini mendukung CSDP untuk menjadi '*lebih responsif dan efektif*', untuk lebih terlibat dalam kebijakan dan instrumen eksternal Uni Eropa lainnya, dan untuk menjadi lebih terlihat.

Komunikasi strategis

Utamanya yang berhubungan dengan komunikasi strategis, dengan jelas menyatakan bahwa '*Uni Eropa akan meningkatkan komunikasi strategisnya [...] guna menghubungkan kebijakan luar negeri Uni Eropa dengan masyarakat dan menyampaikannya dengan lebih baik kepada rekanan*'. Dalam hal ini, Strategi Global menggaungkan dan mengafirmasi kebijakan yang tegas dalam keputusan Dewan (2013, 10124, 2015),

misalnya dengan menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran publik, dan membuat CSDP yang lebih efektif, terlihat dan berorientasi pada hasil.

Dalam teater, penyediaan yang layak telah dilakukan. Setiap misi (kecuali di Libya) memiliki anggaran tertentu untuk visibilitas dan menghasilkan hingga sepuluh produk media dan/atau komunikasi dan menampilkan-nya sampai dengan di 15 platform dan 12 bahasa. Misi yang lebih besar memiliki sekitar sepuluh orang yang ditugaskan dalam pekerjaan ini, sedangkan misi yang lebih kecil hanya sekitar dua sampai empat orang.

Komunikasi publik

Namun, CPCC, Markas Operasional berbasis di Brussel untuk misi - dan antarmuka kunci antara institusi kerja misi dan Uni Eropa, Negara Anggota dan publik umum - tidak memiliki anggaran atau personel penuh waktu yang didedikasikan pada komunikasi strategis. Oleh karena itu output dari komunikasi publik pusat terbatas pada memperbarui postingan di halaman berita CSDP dan EEAS dengan cerita tentang misi. Audiens kunci di Brussel (Perwakilan Permanen Negara Anggota, institusi Uni Eropa lain) dan dalam Negara Anggota (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, Kehakiman dan Dalam Negeri) juga harus mendapat kabar terbaru. Markas operasional misi juga menyadari tentang tantangan ini dan telah melakukan tindakan untuk menanganinya.

BERADAPTASI PADA KONTEKS KEAMANAN YANG BERKEMBANG

Bagaimana kita harus beradaptasi pada konteks keamanan yang terus berkembang dan menantang? Strategi Global mencatat tantangan berikut: 'Keamanan *keamanan energi, migrasi, perubahan iklim, kekerasan ekstrim, dan perang campuran*'. Area prioritas bagi keterlibatan sipil di perkirakan oleh Dewan Eropa Feira tahun 2000 yang mengarahkan bantuan untuk negara yang rapuh atau pascakonflik dalam hal yang berhubungan dengan penertiban, peraturan hukum, administrasi sipil dan perlindungan sipil, namun, dua tugas terakhir tidak pernah diterapkan. Sejak saat itu,

dimensi eksternal instrumen keamanan internal Uni Eropa (Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri) telah dikembangkan dalam bidang anti korupsi, melawan kejahatan terorganisasi, migrasi ilegal dan terorisme. Hubungan yang lebih dekat antara dimensi eksternal Kebebasan, Keamanan dan Keadilan (FSJ) dan manajemen krisis sipil CSDP juga dikembangkan.

Pada November 2016, Dewan Urusan Luar Negeri mengambil kesimpulan untuk menerapkan tiga prioritas strategis yang ditemukan oleh EUGS: (a) respons pada konflik dan krisis eksternal, (b) membangun kapasitas rekanan dan (c) melindungi Uni Eropa dan masyarakatnya. Kesimpulan menyebutkan perlunya untuk kembali membahas wilayah prioritas Feira dengan fokus pada migrasi ilegal, ancaman gabungan, keamanan siber, terorisme, radikalisasi, kejahatan terorganisir dan manajemen perbatasan. Tetapi walau misi sipil CSDP sebelumnya berfokus utamanya pada kapasitas aktivitas pembangunan, misi CSDP dalam kerangka kerja baru EUGS akan lebih terlibat dengan aktivitas keamanan internal. Tinjauan Feira harus membahas nilai tambah yang diberikan oleh CSDP dalam model pendekatan yang komprehensif melalui siklus konflik keseluruhan. Persyaratan ini memiliki implikasi baik untuk memperkuat ikatan dengan pelaku FSJ dan untuk meningkatkan kerja sama dengan instrumen militer.

Respons pada konflik dan krisis eksternal

Dengan memperhatikan prioritas strategis yang lebih klasik yang dibuat untuk CSDP (respons pada konflik dan krisis eksternal dan membangun kapasitas rekanan), kesimpulannya berfokus utamanya pada kesadaran dan respons Uni Eropa dalam fase pencegahan konflik, respons yang cepat dan tegas juga penggunaan komunikasi strategis yang ditingkatkan.

Membangun kapasitas rekanan

Kapabilitas untuk berkontribusi secara lebih sistematis kepada ketahanan dan stabilisasi negara rekanan dalam jaringan keamanan dan pengembangan, termasuk melalui latihan, nasihat dan/atau mentor dalam sektor keamanan, sangat diperhatikan. Penggunaan instrumen internal untuk mengatasi keamanan eksternal dengan timbal-balik juga disarankan.



Uni Eropa/EUPM

Perekrutan pasukan dan kecepatan penugasan dalam hal personel dan dukungan teknis dan administratif merupakan persyaratan utama untuk memastikan responsivitas.

Melindungi Uni Eropa dan masyarakatnya

Prioritas strategis ketiga cukup baru bagi CSDP. Yaitu meliputi kontribusi, bahwa Uni Eropa dan Negara Anggotanya dapat membentuk perspektif keamanan dan pertahanan dari luar Uni Eropa guna melindungi urusan domestiknya dalam bermacam area: jaringan perlindungan dan ketahanan Uni Eropa juga infrastruktur penting, keamanan perbatasan eksternal Uni Eropa, membangun kapasitas rekanan untuk mengatur perbatasan mereka, perlindungan sipil dan respons pada bencana, akses pada hal global bersama termasuk laut dan angkasa, melawan ancaman gabungan, keamanan siber, mencegah dan melawan terorisme juga radikalisme dan melawan penyelundupan dan perdagangan orang. Jaringan keamanan internal dan eksternal juga kerja sama dengan (FSJ) pelaku sekali lagi digarisbawahi dalam area ini.

Uni Eropa dipanggil untuk meneruskan aktivitas manajemen krisis sipil yang luas, termasuk dalam area yang berhubungan dengan kemampuan untuk membangun sektor keamanan, reformasi polisi, peraturan

hukum dan manajemen perbatasan. Uni Eropa bertujuan untuk menjadi lebih Eropa-sentris (perlindungan Eropa). Pergeseran paradigma dapat memberikan tantangan baru bagi misi CSDP sehubungan dengan persyaratan pembelian lokal dan kepemilikan lokal. Batasan ini harus dibahas melalui aktivitas CSDP yang dirancang dengan sangat baik.

Tingkat Ambisi (LoA)³ baru harus dievaluasi terhadap kriteria yang realistis. Selain itu, penerapan EUGS untuk misi sipil CSDP juga menandakan tinjauan struktur perencanaan dan pelaksanaan juga kemampuan, pun juga peningkatan sinergi sipil/militer. Kebutuhan untuk memikirkan kembali mandat kita melalui kombinasi alat yang lebih baik, termasuk menggabungkan tugas militer dan sipil dalam satu mandat, dapat dieksplorasi menggunakan model misi militer yang sudah ada dengan komponen penegak hukum (misalnya, mandat anti penyelundupan di Atalanta di Teluk Aden).

3 LoA sebelumnya adalah: *Uni Eropa harus dapat menugaskan banyak misi sipil CSDP dalam format yang beragam, inter alia dalam situasi reaksi cepat tanggap, termasuk misi besar (kemungkinan sampai dengan 3000 ahli), yang dapat berlangsung selama beberapa tahun.* Hal ini ditentukan menurut metodologi yang diambil dari sistem militer.

OUTPUT, DAMPAK DAN PENGARUH

Tantangan keempat, dan yang utama, yang dihadapi oleh misi sipil CSDP berhubungan dengan dampak baik pada lapangan dan tingkat strategi. Sambil mengejar tujuan politis-strategis dalam rangka kerja misi sipil CSDP Uni Eropa bertujuan juga untuk mendukung perubahan yang berkelanjutan di negara dan wilayah yang terpengaruh oleh konflik.

Kurangnya data dasar untuk mengoptimalkan indikator merupakan masalah yang berulang di negara pascakonflik dengan kemampuan untuk mengumpulkan informasi terganggu oleh kapasitas nasional dan sistem data. Keandalan CPCC dalam hal pelaporan kepada Negara Anggota dalam pelaksanaan mandat memberikan peluang yang untuk meningkatkan usahanya untuk memperkuat keefektifan operasional. Di saat yang bersamaan, ini juga menunjukkan kesulitan dalam mengukur dampak aktivitas: kesulitan ini umumnya lebih besar dalam area militer (di situ tujuan operasional lebih mudah dinilai). Tugas penasih, menurut sifatnya, sulit untuk diukur, dan aktivitas kapasitas-pembangunan dapat membutuhkan waktu untuk memberikan hasil. Oleh karena itu, CPCC tetap memegang metodologi yang digunakan untuk mengukur hasil misi di bawah tinjauan yang konstan.

Usaha yang signifikan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir guna memperkuat alat penilaian. Namun, pengembangan pendekatan metodologi umum di seluruh misi harus diperhalus. Selama musim panas 2016, misi dilengkapi dengan panduan dan template Rencana Penerapan Misi (MIP) baru yang bertujuan untuk kembali memperkuat pendekatan yang terstandarisasi dan sederhana selama siklus hidup misi.

Melakukan penilaian dampak mengantisipasi perang yang kuat bagi CPCC. Terutama, disarankan agar CPCC untuk mempromosikan penggunaan terminologi dan template yang standar dan konsisten agar bergantung pada analisis tren yang tahan tanpa merekonstruksi indikator post-facto. Pelaksanaan latihan bagi misi untuk implementasi penilaian dampak dilakukan di negara terkait dan di Brussel. Penilaian dampak dapat dilakukan oleh petugas biasa dan staf CPCC lainnya yang ditugaskan ke negara tersebut. Komunikasi akan penemuan adalah hal yang penting. Dan

yang terakhir, harmonisasi antara peninjauan strategis dari waktu dan ruang lingkup penilaian dampak akan sangat menguntungkan.

Metodologi juga seharusnya membantu memperkuat analisis EEAS/CPCC mengenai penghalang operasional dan penerapan. Semakin besar pembelian dalam wilayah oleh negara lokal dan kepemilikan lokal, semakin besar dampak di lapangan atas pelaksanaan mandat oleh misi CSDP.

Misi CSDP tentunya dapat menghadapi keraguan dari pemerintah untuk menerapkan komitmen reformasi tanpa dapat menggunakan manfaat untuk bertanggung jawab atas otoritas ini guna memenuhi komitmen mereka. Aktivitas yang terlalu berfokus pada pelatihan namun tidak cukup dalam reformasi institusional dapat menyebabkan hasil tersebut. Oleh karena itu, campuran aktivitas baik di tingkat strategis atau operasional biasanya diperlukan.

PERKEMBANGAN INDIKATOR

Pendekatan yang lebih komprehensif bagi formulasi rangka kerja strategi operasi CSDP dalam lingkup Uni Eropa (Misi, Komisi Eropa, Perwakilan Khusus Uni Eropa, Negara Anggota) juga harus ditelusuri lebih lanjut, termasuk melalui pengembangan indikator dan pengukuran indikator. Berdasarkan model indikator yang digunakan oleh Delegasi Uni Eropa saat mengembangkan kontrak pembangunan negara (dukungan anggaran), misi CSDP dapat menelusuri penyusunan tolak ukur pada kondisionalitas dan penghentian aktivitas. Seperti alat yang akan memungkinkan misi untuk menentukan tahap yang bekerja dengan pemerintah yang akan memungkinkan mereka untuk mempromosikan reformasi secara efektif. Beberapa penekanan juga dapat diterapkan pada perspektif yang lebih luas dengan melihat penilaian dampak dalam keseluruhan situasi konflik. Yang terakhir, koordinasi di tingkat pusat dapat membantu mengembangkan penilaian dampak yang lebih strategis.

3.4. PERJANJIAN SIPIL CSDP

oleh Crista Huisman dan Deirdre Clarke Lyster

Setelah proses negosiasi yang berlangsung selama setahun, Perjanjian Sipil CSDP secara formal dibentuk oleh Dewan Uni Eropa, dan Negara Anggota pada 19 November 2018, dengan tujuan untuk memperkuat Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) Uni Eropa. Yang akan diterapkan paling lambat di awal musim panas 2023, yang pada intinya terdiri dari 22 komitmen koheren oleh Dewan dan MS untuk membentuk CSDP yang lebih handal, efektif, fleksibel dan responsif, dan lebih terintegrasi dengan instrumen Uni Eropa lain dan rekannya. Untuk pertama kalinya menggabungkan ambisi politik, arah strategis dan target pengembangan kemampuan yang diperlukan, Perjanjian ini merupakan pencapaian dalam pengembangan CSDP sipil yang akan meningkatkan peran Uni Eropa sebagai penyedia keamanan yang komprehensif. Tulisan ini akan melacak pengembangan Perjanjian, menandai elemen kunci yang membuatnya berbeda dari yang sebelumnya, juga mencatat kemajuan penerapannya sejauh ini.

LATAR BELAKANG

Membangun prinsip yang dirancang dalam Feira tahun 2000, CSDP sipil awalnya berfokus pada penerbitan, peraturan hukum, administrasi sipil dan perlindungan sipil¹. Tiga tahun kemudian, pembentukan misi sipil Uni Eropa pertama, Misi Ketertiban Uni Eropa di Bosnia dan Herzegovina (EUPM BiH), menyaksikan operasionalisasi CSDP sipil. Misi sipil kini bertanggung jawab atas sebelas dari tujuh belas misi sipil dan militer Uni Eropa di Eropa, Timur tengah dan Afrika.

Pada tahun 2016, lingkungan keamanan eksternal yang mana CSDP sipil terbentuk telah terlibat secara luas, dengan ancaman baru yang ditemukan di wilayah sekitar Uni Eropa dan lebih luas lagi. Strategi Global

Uni Eropa, yang diadopsi pada tahun tersebut, menyadari konteks keamanan yang diubah ini, memberikan penekanan pada pendekatan baru, seperti Pendekatan Konflik dan Krisis Terintegrasi, dan imperatif baru, seperti jaringan keamanan internal-eksternal, sambil memberikan tingkat ambisi baru dalam hal Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa, dan utamanya, CSDP.

Dengan adanya Strategi Global ini, maka pembuat keputusan melihat kebutuhan untuk memperkuat CSDP sipil, termasuk memperluas dan memperdalam prinsip dasar Feira (dan *Tujuan Pokok Sipil* setelahnya pada tahun 2008 dan 2010) Setelah proses negosiasi selama setahun, Perjanjian Sipil CSDP secara formal diadopsi pada 19 November 2018.

KOMITMEN PERJANJIAN

Perjanjian Sipil CSDP terdiri dari tiga bagian:

- a) Panduan strategis,
- b) Komitmen oleh Dewan dan Negara Anggota, dan
- c) Langkah Selanjutnya.

Bagian pertama, panduan strategis, menentukan prioritas politik. Sambil menjaga fungsi utama yang awalnya ditentukan dalam Feira - memperkuat kepolisian, peraturan hukum dan administrasi sipil juga reformasi sektor keamanan (SSR) dan tugas pengawasan - bagian awal ini bergerak melebihi prinsip yang disetujui, untuk pertama kalinya menekankan pentingnya memberikan dukungan bagi respons Uni Eropa yang lebih luas bagi tantangan keamanan baru dan yang akan muncul. Menemukan tantangan keamanan yang berhubungan dengan imigrasi ilegal, ancaman gabungan, keamanan siber, terorisme dan radikalisme, kejahatan terorganisir, manajemen perbatasan dan keamanan maritim, juga mencegah dan melawan ekstremisme, dan perlin-

¹ Perlindungan sipil kemudian dihapuskan dari tugas inti CSDP, sedangkan reformasi sektor keamanan (SSR) dan tugas pengawasan ditambahkan.

dungan warisan budaya, Perjanjian akan mendukung pemenuhan prioritas strategis dari Strategi Global.

Inti dari Perjanjian adalah bagian kedua, yaitu serangkaian komitmen politik oleh Dewan dan, terutama mengenai kemampuan pengembangan, dari Negara Anggota. Menentukan tiga klaster kunci guna memperkuat CSDP sipil - (a) kemampuan, (b) keefektifan, fleksibilitas dan responsivitas juga (c) pendekatan

gabungan dengan instrumen Uni Eropa - komitmen tersebut menandakan perkembangan yang komprehensif dari CSDP sipil yang belum dilakukan sejak Feira.

Klaster pertama berfokus utamanya pada kemampuan pengembangan sipil ('CSDP sipil yang lebih cakap') Ambisi signifikan yang ditampilkan dalam komitmen ini termasuk peningkatan kontribusi MS kepada misi sipil dan 70% staf bagi Misi sipil oleh Negara Anggota Uni Eropa. Untuk mewujudkan tujuan ini, semua MS ditugaskan untuk meninjau prosedur nasionalnya, melalui Rencana Penerapan Nasional, sedangkan kemajuan akan pengembangan kemampuan sipil dipantau melalui Laporan Sipil Tahunan mengenai Kapabilitas.

Klaster kedua ('CSDP sipil yang lebih efektif, fleksibel dan responsif') bertujuan untuk lebih memperkuat rangka kerja institusional CSDP sipil dengan berfokus pada pengaktif kunci seperti pembentukan misi yang lebih modular, dapat diukur dan fleksibel guna meningkatkan responsivitas, juga kemampuan untuk menugaskan 200 personel dalam 30 hari. Klaster ini juga melibatkan komitmen mengenai gender dan penggunaan anggaran CFSP yang efisien.

Untuk meningkatkan sinergi dengan pemilik kepentingan lain, klaster ketiga ('CSDP sipil yang lebih terintegrasi') memerlukan beberapa komitmen untuk memperpanjang dukungan *Pendekatan Terintegrasi mengenai*



Konflik Eksternal dan Krisis Uni Eropa dan terus memperkuat kerja sama dengan negara ketiga dan rekanan seperti PBB, OSCE dan NATO. Hal ini menekankan pentingnya kerja sama dengan pelaku JHA, baik agensi JHA dan pelaku MS, dalam hal output operasional yang berkelanjutan. Juga menyerukan 'konsep mini' yang memiliki target untuk memetakan ruang lingkup usaha CSDP sipil yang memungkinkan di bidang tertentu, seperti kejahatan terorganisir dan keamanan maritim.

IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN PERJANJIAN

Untuk memfasilitasi penerapan yang efektif dari Perjanjian, Negara Anggota yang berkomitmen untuk mengembangkan Rencana Penerapan Nasional, yang dibantu oleh Rencana Aksi Gabungan yang disetujui oleh EEAS dan layanan Komisi. Kemajuan menuju penerapan, yang seharusnya berlangsung sesegera mungkin dan tidak melebihi musim panas 2023, yang akan didukung oleh Konferensi Tinjauan Tahunan.

Konferensi Tinjauan tahunan (ARC) kedua berlangsung pada bulan November 2020, dan melibatkan presentasi tentang Laporan Tahunan Sipil mengenai Kapabilitas. MS menyambut secara positif keseluruhan kemajuan atas penerapan Perjanjian dan komitmen yang kuat guna melaksanakan semua aspeknya.

Serangkaian ‘titik’ untuk memandu penerapan Perjanjian pada tahun 2021, dipresentasikan dalam ARC dan kemudian disetujui oleh Dewan. Titik ini utamanya meliputi tapi tidak seluruhnya tentang: secara bersama meningkatkan angka yang didukung oleh ahli tentang misi dan meningkatkan representasi wanita, memperkuat sinergi antara dimensi sipil dan militer dari CSDP, menelusuri cara untuk mengevaluasi dampak operasional dari misi dan mempromosikan aksi yang lebih tergabung, termasuk antara CSDP sipil dan pelaku JHA (termasuk kementerian, agensi dan pihak yang bekerja di Dewan yang terkait).

HASIL DARI PERJANJIAN

Hanya dua setengah tahun setelah penerapannya, hasil dari Perjanjian sudah dapat terlihat. Misi CSDP sipil pertama akan dilakukan di bawah Perjanjian, EUAM RCA, telah melibatkan elemen kunci dari Perjanjian seperti mandat yang modulat dan dapat terukur, juga fokus tertentu mengenai salah satu tantangan prioritas baru yang ditemukan dalam misi (ancaman gabungan). Pekerjaan juga terus berlanjut untuk memperkuat hubungan antara CSDP dan pelaku JHA, dengan kerja konseptual mengenai cara meningkatkan sinergi dengan agensi JHA seperti Frontex, Europol dan CEPOL untuk membentuk dasar bagi interaksi ditingkatkan di lapangan. Usaha tersebut, yang berdasarkan atas prinsip nilai tambah mutual, dicapai melalui konsep misi yang dibentuk dalam Perjanjian. Dalam institusinya sendiri, rapat Dewan yang lebih tergabung telah direncanakan, menggabungkan kelompok kerja yang menangani CSDP seperti PSC dan CivCom, dengan Dewan terkait lainnya yang bekerja dengan badan seperti yang menangani masalah hukum dan finansial (Relex) atau penanganan lain dengan keamanan internal (COSI dan kelompok Dukungan COSI).

Di tingkat nasional, sekelompok Negara Anggota telah membentuk Pusat Keunggulan mengenai Manajemen Krisis Sipil untuk, misalnya, memperkuat dukungan penerapan Perjanjian. Dalam bidang pengembangan kemampuan, semua Negara Anggota mengembangkan atau telah memiliki Rencana Pene-

rapan Nasional mereka, sebuah proses yang telah membantu memperkuat koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan antar institusi. Beberapa Negara Anggota bahkan telah berhasil meningkatkan kontribusi mereka pada misi sipil.

EEAS secara aktif mendukung proses nasional dalam berbagai cara, termasuk dengan mendorong MS untuk membagikan pelajaran yang mereka dapat dan praktik yang baik. Selain itu, pekerjaan yang sedang berlangsung untuk secara terpusat meninjau kebijakan dan prosedur perekrutan CSDP guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang disediakan oleh Negara Anggota, untuk mempercepat perekrutan dan agar sesuai dengan sistem nasional. Yang terakhir, dari perspektif komunikasi, pekerjaan dilakukan guna meningkatkan visibilitas CSDP sipil dengan tujuan untuk menyoroti pekerjaan misi sipil CSDP baik di negara rekanan maupun dalam administrasi nasional Negara Anggota.

KESIMPULAN

Melalui pengembangan Perjanjian Sipil CSDP, Uni Eropa telah meneguhkan komitmennya untuk menjadi penyedia keamanan yang komprehensif juga telah memperkuat salah satu alat kebijakan luar negerinya yang unik. Baik dorongan secara strategis maupun operasional, Perjanjian Sipil merupakan elemen kunci dari Strategi Global Uni Eropa, yang memungkinkannya untuk mengatasi tantangan keamanan yang baru dan akan muncul dengan lebih baik. Dengan penerapan yang sedang berlangsung, didukung oleh proses peninjauan internal, juga linimasa yang ambisius, Perjanjian Sipil CSDP berada di jalur yang benar dari komitmen politik hingga menjadi operasional di awal musim panas tahun 2023 paling lambat.

3.5. FASILITAS PERDAMAIAN EROPA

oleh Sebastian Puig Soler

Pendekatan yang ambisius atas keamanan dan pertahanan adalah hal yang penting untuk menghadapi tantangan eksternal tak terduga yang berhubungan dengan ketidakstabilan dan kerapuhan wilayah sekitar Uni Eropa dan sekitarnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Strategi Global Uni Eropa, pendekatan ini mengimplikasikan usaha lebih untuk mencegah konflik, mempromosikan keamanan manusia, menanggapi ketidakstabilan dan berusaha membentuk dunia yang lebih aman. Secara konkret, dan sejalan dengan Rencana Penerapan Keamanan dan Pertahanan, juga kemajuan yang terjadi di beberapa Inisiatif Keamanan Uni Eropa (PESCO, CARD, CDP, EDF, dan Kompas Strategi yang akan datang), kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk menanggapi konflik dan kiris eksternal, membangun kapasitas rekanan dan melindungi Uni Eropa juga masyarakatnya.

Pada Juni 2017, Sekretaris Jenderal EEAS Helga Schmidt membentuk Satuan Tugas (TF) untuk meninjau instrumen finansial saat ini yang disediakan oleh Dewan Luar Negeri, untuk memperbaiki pendanaan dengan lebih baik dengan prioritas politik, berdasarkan pengalaman saat ini, dan berfokus pada hasil. Salah satu elemen paling relevan dari revisi ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan dukungan finansial untuk tujuan perdamaian dan keamanan, yang dapat ditingkatkan baik melalui anggaran Uni Eropa maupun dana lain.

Pada 13 Juni 2018, pengembangan Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF) diumumkan secara publik oleh mantan HRP/VP Federica Mogherini dengan dukungan dari Komisi Eropa. EPF merupakan instrumen dari dana lain yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Uni Eropa untuk mencegah konflik, membangun perdamaian dan memperkuat keamanan

internasional, dengan memberikan pendanaan pada aksi operasional di bawah Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) yang memiliki implikasi militer atau pertahanan. Dimulai pada 2021, ini akan menggantikan dan memperbesar instrumen finansial saat ini dalam area ini, misalnya Mekanisme Athena dan Fasilitas Perdamaian Afrika.

APA YANG KITA MILIKI SAMPAI SAAT INI

Pengalaman operasional yang didapatkan dalam beberapa tahun terakhir di area keamanan dan perdamaian telah mengajarkan kita bahwa walau anggaran Uni Eropa adalah komponen kunci dari respons atas masalah perdamaian dan keamanan, itu tidak dapat mendanai semua kategori tindakan yang Uni Eropa harus lakukan. Bahkan dengan memperhatikan mekanisme dana lain yang ada, telah ada secara konsisten celah terkait di arsitektur dukungan finansial Uni Eropa saat ini yang ternyata membatasi keefektifan usaha perdamaian, keamanan dan pertahanan Uni Eropa secara keseluruhan, terutama dalam tiga area kunci:

- **Misi dan operasi militer CSDP:** kemampuan Uni Eropa untuk mendukung misi dan operasi CSDP secara finansial masih terbatas. Oleh karenanya hal tersebut didanai oleh dana di luar anggaran Uni Eropa oleh Negara Anggota, termasuk biaya bersama melalui Mekanisme Athena, yang dibuat pada tahun 2004. Tinjauan Athena berturut-turut tidak menghasilkan evolusi yang signifikan dalam lingkup finansial ini. Tujuan EPF untuk meningkatkan ruang lingkup biaya bersama dengan mendanai kemampuan kunci untuk misi dan operasi,



FASILITAS PERDAMAIAN EROPA

Dana di luar anggaran Uni Eropa untuk membangun perdamaian dan memperkuat keamanan internasional

#EUDefence #FutureofEurope



June 2020

Dalam lingkungan global yang semakin menantang, Uni Eropa perlu berupaya lebih keras guna meningkatkan kemampuannya dalam menjaga perdamaian, mencegah konflik, dan memperkuat keamanan internasional. Melalui **Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF)** baru, Uni Eropa berniat mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai penyedia keamanan global.

EPF adalah sebuah usulan dari Perwakilan Tinggi terkait penyusunan dana baru yang berada di luar anggaran multi-tahunan Uni Eropa dengan potensi nilai sebesar **€8 miliar**. Dana tersebut akan memungkinkan pendanaan tindakan operasional di bawah Kebijakan Umum Luar Negeri dan Keamanan (CFSP) yang memiliki implikasi militer atau pertahanan. EPF akan menyatukan mekanisme di luar anggaran terkait yang telah ada sebelumnya, seperti mekanisme Athena dan Fasilitas Perdamaian Afrika, serta mengatasi kekurangan dan batasan keduanya.

MENGAPA FASILITAS PERDAMAIAN EROPA DIBUTUHKAN?

Tujuan EPF adalah:



Meningkatkan efektivitas operasi: EPF bertujuan mendanai biaya umum militer Uni Eropa dalam misi dan operasi Kebijakan Umum Keamanan dan Pertahanan (CSDP). EPF akan memastikan pendanaan Uni Eropa tersedia secara permanen, sehingga membantu mempercepat pengerahan misi dan meningkatkan fleksibilitas. Hingga saat ini, melalui mekanisme Athena, sebagian kecil - mulai dari 5% hingga 10% - dana operasi militer diperoleh dari pembiayaan umum. EPF menawarkan solidaritas yang lebih kuat dalam hal biaya umum.



Mitra pendukung: EPF akan memberikan Uni Eropa kapabilitas untuk berkontribusi dalam pendanaan operasi dukungan perdamaian militer yang dipimpin oleh mitra internasional dalam skala global. Hingga saat ini, Fasilitas Perdamaian Afrika hanya mengizinkan pendanaan operasi dukungan perdamaian yang dipimpin oleh negara Afrika.



Meningkatkan aksi yang dilakukan: Saat ini Uni Eropa memiliki keterbatasan kapasitas untuk terlibat dalam aksi militer atau pertahanan, seperti membangun kapasitas, menyediakan pelatihan, peralatan, atau infrastruktur. EPF akan membantu angkatan bersenjata negara mitra dalam mengembangkan kapasitas guna menjaga perdamaian, mencegah konflik, dan mengatasi tantangan keamanan. Misalnya, ada kalanya Misi Pelatihan Militer Uni Eropa dihadapkan pada kenyataan bahwa mitra tidak dapat menerima manfaat dari pelajaran yang diperoleh selama pelatihan, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya perlengkapan atau fasilitas dasar. EPF akan membuat Uni Eropa mampu menyediakan dukungan melalui paket terintegrasi, yang dapat mencakup pelatihan, peralatan, dan bentuk dukungan lainnya. Hal ini akan membantu mitra mengatasi krisis dan tantangan keamanan dengan kemampuan mereka sendiri.

EPF hanya membiayai pengeluaran dengan implikasi militer atau pertahanan yang tidak dibiayai oleh anggaran Uni Eropa. Dengan demikian, EPF akan membantu memaksimalkan dampak, efektivitas, dan keberlanjutan aksi eksternal Uni Eropa dalam hal perdamaian dan keamanan.

Melalui EPF, Uni Eropa dapat berbuat lebih banyak dan bertindak lebih cepat dalam menggunakan upaya militer dan pertahanan sesuai keperluan.

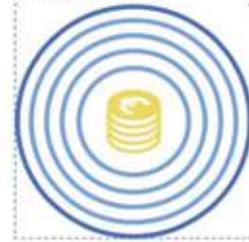


PENDANAAN

Dana EPF diperoleh melalui kontribusi Negara Anggota Uni Eropa berdasarkan kunci sebaran Pendapatan Nasional Bruto. Batas atas EPF dalam usulan terbaru yang diajukan oleh Presiden Dewan Eropa adalah €8 miliar selama periode yang bertepatan dengan Kerangka Kerja Keuangan Multi-Tahunan (MFF) berikutnya.

EPF akan meringkas dan menyederhanakan penyusunan pendanaan terdahulu yang berbeda-beda, khususnya mekanisme Athena dan Fasilitas Perdamaian Afrika, serta menjadikannya jauh lebih fleksibel. Aksi yang dibiayai oleh Fasilitas akan diputuskan oleh kendali Dewan dan Negara Anggota yang dijamin melalui komite manajemen.

€8 miliar



APAKAH FASILITAS PERDAMAIAN EUROPA AKAN MENGGANTIKAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN LAIN MILIK UNI EUROPA?

- EPF dibuat di atas Fasilitas Perdamaian Afrika dan mekanisme Athena. EPF akan tetap membiayai aksi yang saat ini didukung oleh kedua instrumen tersebut, tetapi juga memungkinkan Uni Eropa mengatasi batasan geografis dan tematis, yang telah menjadi kendala selama beberapa tahun terakhir.
- EPF tidak dirancang untuk membiayai pengeluaran yang dapat dibiayai oleh anggaran Uni Eropa.
- Dukungan pada mitra di bawah EPF akan tetap mempertimbangkan tujuan luar negeri dan keamanan Uni Eropa, seperti terdapat pada Perjanjian Uni Eropa. Hal tersebut akan tetap tunduk pada kendali ketat, termasuk kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi, hukum hak asasi manusia, dan Hukum Kemanusiaan Internasional.
- Sejalan dengan Pendekatan Terintegrasi Uni Eropa, konsistensi antara aksi yang dibiayai melalui EPF serta aksi lain yang diterapkan dalam CFSP atau instrumen aksi eksternal Uni Eropa lainnya, termasuk mekanisme Pembangunan Kapasitas dalam Mendukung Keamanan dan Pembangunan, akan tetap dijaga.

¹ Fasilitas Perdamaian Afrika kini memperoleh dana dari kelebihan anggaran Dana Pembangunan Eropa. Mekanisme Athena adalah kesepakatan pendanaan di luar anggaran.

berdasarkan pengalaman (mis. penasihat strategis, perlindungan pasukan, helikopter, ROLE 2, dll.).

- **Dukungan pada operasi militer pendukung perdamaian Rekanan:** dukungan tersebut saat ini hanya terbatas pada operasi di Afrika. Pendanaan disediakan di luar anggaran Uni Eropa melalui Fasilitas Perdamaian Afrika (APF) sebagai bagian dari Dana Pembangunan Eropa (EDF). Karena penganggaran EDF sejak 2021, instrumen APF akan segera hilang. EPF akan memberikan Uni Eropa kemampuan untuk memberikan dukungan operasional secara langsung kepada negara dunia ketiga juga organisasi internasional dan regional di seluruh dunia, tidak hanya Afrika atau Uni Afrika.
- **Aksi yang lebih luas yang bersifat militer / pertahanan untuk mendukung tujuan CFSP:** saat ini, ada kapasitas terbatas untuk terlibat dalam tindakan semacam itu, utamanya aktivitas kapasitas pembangunan untuk pelaku militer dan penyediaan latihan militer, perlengkapan juga infrastrukturnya. Kelemahan terbesar dari pengadaan Kapasitas Pembangunan Keamanan dan Pembangunan (CBSD), sebagai mana ditentukan dalam instrumen saat ini yang berkontribusi pada Stabilitas dan Perdamaian (IcSP) dan - sejak 2021 - di Wilayah Sekitar di masa mendatang, Instrumen Pembangunan Dan Kerja Sama Internasional (NDICI), adalah ruang lingkungannya menjadi terbatas pada aksi yang utamanya memiliki tujuan pengembangan kerja sama, di keadaan tertentu. Dalam Misi Latihan Militer Uni Eropa (EUTMs), penyediaan elemen kapasitas pembangunan yang terbatas sejauh ini telah didanai oleh kontribusi sukarela dari Negara Anggota. EPF akan secara eksplisit mengizinkan aktivitas 'latihan dan melengkapi' untuk mendukung rekanan negara dunia ketiga untuk mencapai tujuan CFSP.

APA YANG AKAN KITA MILIKI

Pada saat ditulisnya artikel ini, diskusi politik mengenai Keputusan Dewan pembentukan EPF dan beberapa elemen tambahan akan segera diputuskan, menunda beberapa detail mengenai penyediaan anggaran, penerapan penjagaan, panduan politik dan

ruang lingkup dana bersama. Tetapi elemen utama dari instrumen sudah ada.

EPF membentuk **dua pilar pendanaan** dalam satu instrumen, karenanya menyederhanakan prosedur pembuatan keputusan, memberikan kesatuan yang lebih baik dan koherensi pada tindakan Uni Eropa dalam konteks ini:

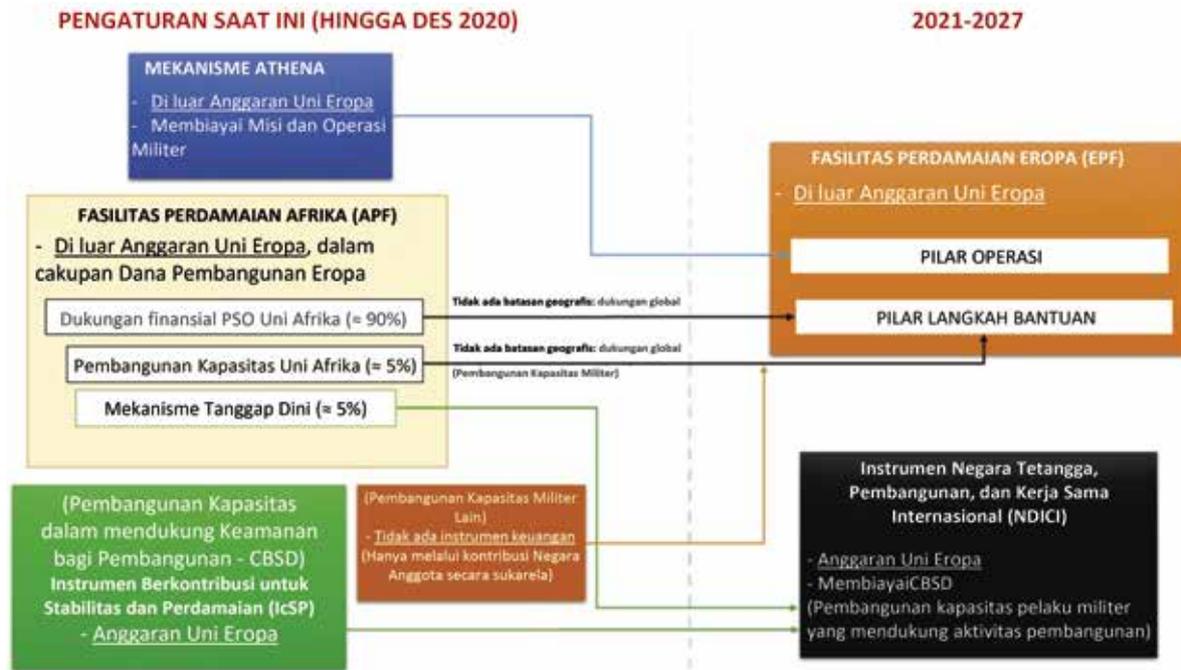
- **Pilar Operasi:** untuk mendanai biaya bersama untuk misi dan operasi militer Uni Eropa.
- **Pilar Usaha Bantuan:** untuk mendanai tindakan Uni Eropa ini di bawah Pasal 28 TEU, yang mana Dewan membuat keputusan mutlak bahwa pengeluaran operasi yang timbul dari hal tersebut akan dibebankan kepada Negara Anggota:
 - tindakan untuk memperkuat kapasitas militer dan pertahanan negara dunia ketiga dan organisasi internasional;
 - dukungan untuk aspek militer dari operasi pendukung perdamaian yang dipimpin oleh organisasi regional atau internasional atau oleh negara dunia ketiga.

Sebagaimana diizinkan oleh EPF bagi misi dan operasi militer CSDP untuk secara langsung menerapkan atau mendukung penerapan usaha bantuan jika Dewan memutuskan demikian, mereka juga akan dapat memberikan paket terintegrasi dalam ruang lingkup mandat mereka, menggabungkan keamanan, pelatihan, perlengkapan dan bantuan militer langsung, dengan tujuan untuk melakukan keterlibatan yang penuh dan komprehensif.

Penyediaan perlengkapan militer melalui EPF akan sesuai dengan standar tertinggi internasional untuk ekspor perlengkapan tersebut, dengan memperhatikan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional (IHRL) dan hukum kemanusiaan internasional (IHL), juga dengan jaminan yang layak mengenai penggunaannya.

MANAJEMEN

EPF akan diatur oleh otoritas dan arahan Komite Fasilitas tunggal yang terdiri dari perwakilan setiap Negara Anggota, diketuai oleh perwakilan Negara Anggota yang memegang posisi Presiden Dewan. Akan



ada dua Administrator, satu untuk operasi dan lainnya untuk usaha bantuan, yang akan bertindak sebagai perwakilan hukum dari Fasilitas dalam hal yang berhubungan dengan kewajiban terkait. Peraturan finansial tertentu akan dikembangkan untuk penerapan pengeluaran, membangun penyediaan yang ada dalam Mekanisme Athena dan APF.

AMBISI FINANSIAL

Bagi EPF, sejumlah 5 milyar EUR telah disetujui pada Juli 2020 dalam Keputusan Dewan Eropa. Dewan Eropa tidak memberikan rincian atas jumlah ini per tahunnya. Jumlah ini akan dipecah menjadi beberapa laporan tahunan untuk periode tahun 2021 sampai 2027, dengan melibatkan perkiraan untuk misi dan operasi militer juga untuk melanjutkan tingkat dukungan saat ini yang disediakan di bawah APF, juga perkiraan tren yang bertumbuh sampai tahun 2023-2024, saat Fasilitas mencapai 'kecepatan penuh' sesuai dengan ruang lingkup global.

KESIMPULAN: MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN

EPF bertujuan untuk menutup celah yang ada dalam kotak alat Uni Eropa, memungkinkan Uni Eropa untuk melakukan hal dan bertindak lebih mulus dengan menggunakan militer atau pertahanan jika perlu. Guna mencapai tujuan ini, EPF akan menawarkan fleksibilitas yang ditingkatkan, merancang dari pengalaman instrumen dan mekanisme saat ini. Hal ini juga akan memastikan bahwa pendanaan Uni Eropa yang tersedia secara permanen dan perspektif jangka panjang, sambil memungkinkan respons cepat atas kritis dan permintaan genting lainnya. Kemudian, EPF mengawasi pengadaan paket terintegrasi yang akan melibatkan latihan militer yang disediakan oleh EUTM, perlengkapan dan dukungan militer.

Hal ini merupakan hal yang signifikan dalam kerangka kerja CSDP militer, yang akan memungkinkan Uni Eropa untuk menjadi rekan yang lebih efektif dan berpengaruh dalam manajemen krisis internasional.

4 TANTANGAN KEAMANAN YANG BERKEMBANG

4.1. MIGRASI DAN CSDP

oleh Jochen Rehr



Uni Eropa/EUNAVFOR MED

CSDP sudah digunakan dan telah terbukti menjadi alat yang berguna dalam membantu Uni Eropa dan Negara Anggotanya dalam manajemen aliran migrasi.

Dalam pidatonya ‘Keadaan Uni tahun 2016’,¹ Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, mengatakan bahwa kita harus memulai pencerminan dalam perspektif realisme dan dengan sangat jujur.

Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa kita memiliki masalah yang belum terpecahkan di Eropa. Tidak ada yang bisa diragukan tentang hal ini. ...

Kedua, kita harus sadar bahwa dunia mengawasi kita. ...

Ketiga, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa memecahkan masalah kita dengan pidato lainnya. atau dengan pertemuan lainnya.²

Hal ini juga titik awal yang baik bagi topik migrasi, yang menyoroti hubungan yang rumit antara keamanan internal dan eksternal. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat aliran migran, pencari suaka

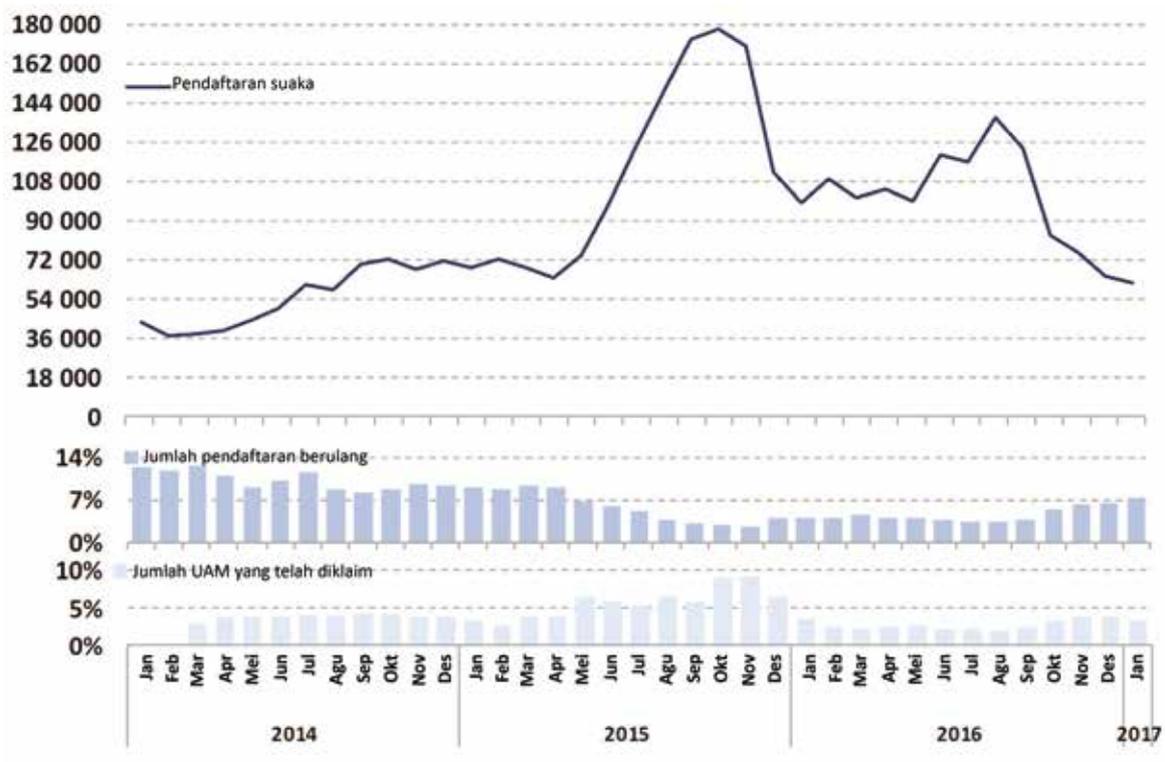
dan pengungsi yang sangat besar, dan menyadari bahwa tak ada satu pun negara yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian.

Migrasi tidak selalu menjadi tantangan terbesar di Eropa dan bagi Eropa, tetapi tantangan migrasi selalu ada dalam diskusi harian kita, dalam media massa juga di jalanan. Oleh karena itu publik membuat hal tersebut menjadi agenda dari politisi kita, yang - sejak saat itu - telah mencari solusi bersama.

Migrasi bukanlah fenomena musiman; tekanannya mungkin akan terus bertahan. Sistem kita tidak dibuat dengan memikirkan skenario ini. Oleh karena itu kita harus memperluas kapasitas, hilangnya kepercayaan dan kredibilitas atas pemerintahan demokratis kita dan sebagai hasil dari meningkatnya partai politik populis yang memanfaatkan situasi ini. Terlebih lagi, solida-

1 Jean-Claude Juncker: The State of the Union 2016. Towards a better Europe – A Europe that protects, empowers and defends. Kantor Penerbitan Uni Eropa, 2016.

2 Jean-Claude Juncker, hal. 7.



Hak cipta: EASO, latest asylum trends, Januari 2017

Migrasi bukanlah fenomena musiman; tekanannya mungkin akan terus bertahan.
Jumlah total pengungsi dan pencari suaka hanya menurun 70.000 dari tahun 2015 sampai 2016

ritas antara Negara Anggota Uni Eropa, yang dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 2³ dan Pasal 3(5)⁴ dari Perjanjian Uni Eropa sepertinya mulai melemah. Hal ini menyebabkan menurunnya keeratan dalam Uni.

Jawaban kita atas tantangan migrasi harus komprehensif, andal dan strategis. Kita tidak boleh lupa akan nilai dan urusan kita. Bagaimana Uni menangani krisis migrasi akan menjadi ujian ketahanan akan struktur di Brussel dan ibu kota negara.

BAGAIMANA KITA MENGATUR MIGRASI?

Migrasi merupakan masalah yang menggabungkan aspek kemanusiaan, pekerjaan, kesejahteraan sosial, keamanan dan area lainnya. Tanggung jawab utama untuk menanganinya berada di tangan Negara Anggota Uni Eropa. Komisi Eropa dan agensinya sudah bekerja dengan baik, tetapi masih banyak yang harus dilakukan.

Pun juga Uni Eropa tidak berdiam dalam menghadapi krisis ini. Memanfaatkan semua alat kebijakan

3 Pasal 2 TEU: 'Uni Eropa didirikan atas dasar nilai-nilai yang menghargai harga diri manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, hukum dan HAM, termasuk hak orang minoritas. Nilai-nilai ini adalah nilai bersama bagi Negara Anggota dalam masyarakat di situ pluralitas, non-diskriminasi, toleransi, keadilan, solidaritas dan kesetaraan antara pria dan wanita ditegakkan.'

4 Pasal 3(5) TEU: 'Dalam hubungannya dengan dunia, Uni Eropa harus menjunjung dan mendukung nilai-nilai dan kepentingannya dan berkontribusi pada perlindungan masyarakatnya. Harus berkontribusi dalam perdamaian, keamanan, pengembangan keberlanjutan di muka Bumi, solidaritas dan saling menghormati, perdagangan yang bebas dan adil, penghapusan kemiskinan dan perlindungan HAM, terutama hak anak, juga untuk mengawasi dengan ketat hukum internasional dan mengembangkannya, termasuk yang berhubungan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB'.



Uni Eropa/EUNAVFOR MED

Dalam beberapa teater Uni Eropa telah mengerahkan misi dan operasi CSDP dengan tujuan untuk membantu usaha Uni Eropa lainnya guna menghadapi migrasi ilegal.

yang tersedia, sejumlah tindakan penting telah dilakukan untuk respons Eropa yang terkoordinasi dan koheren. Pendekatan baru untuk menangani migrasi dengan lebih baik melalui pembangunan kerangka kerja akan kerja sama telah ditentukan di Dewan Eropa pada 28-29 Juni 2016, yang sepenuhnya menyematkan masalah migrasi dalam keseluruhan kebijakan luar negeri Uni Eropa.

Strategi Global Eropa, yang juga diterima dalam rapat dewan yang sama, menyatakan dengan jelas bahwa *'Bersama dengan negara asal dan transit, kita akan mengembangkan dan merajut-membuat pendekatan bersama yang melibatkan pengembangan, diplomasi, mobilitas, migrasi legal, manajemen perbatasan, admisi ulang dan pengembalian. Kita akan bekerja*

dengan rekan internasional untuk memastikan tanggung jawab global bersama dan solidaritas'.⁵

Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP), alat Negara Anggota untuk menangani krisis eksternal, bisa jadi bukanlah instrumen utama untuk menghadapi masalah kompleks ini. Namun, ini tetap menjadi bagian dari kotak alat manajemen krisis komprehensif, dan kita harus memeriksa bagaimana instrumen CSDP dapat membantu aktivitas saat ini. Dalam beberapa teater Uni Eropa telah mengerahkan misi dan operasi CSDP dengan tujuan untuk membantu usaha Uni Eropa lainnya guna menghadapi migrasi ilegal, terutama di Mediterania Tengah dan Sahel.

Di saat yang sama kita juga harus sadar bahwa CSDP ditujukan untuk dikerahkan di luar wilayah

5 Dinas Luar Negeri Eropa: *Berbagi Visi, Bertindak Bersama: Eropa Lebih Kuat Strategi Global untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa*. Juni 2016. hal. 28. https://eas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

6 Pasal 42(1) TEU: *'Kebijakan keamanan dan pertahanan bersama harus menjadi bagian integral dari kebijakan keamanan dan luar negeri bersama. Ini harus memberikan Uni Eropa kapasitas operasional dari aset sipil atau militer. Uni Eropa dapat menggunakan mereka dalam misi di luar Uni Eropa untuk menjaga perdamaian, pencegahan konflik dan penguatan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB Pelaksanaan tugas-tugas ini harus dilakukan dengan menggunakan kemampuan yang disediakan oleh Negara Anggota.'*



Uni Eropa/EUBAM Libya

Dalam banyak misi dan operasi CSDP, tantangan migrasi baik secara tersurat atau tersirat dibahas dalam mandatnya.

Uni Eropa;⁶ oleh karena itu bantuan dan dukungan kepada Negara Anggota Uni Eropa lainnya dengan CSDP tidak memungkinkan saat ini dalam kerangka kerja hukum kita.

Mengamankan perbatasan eksternal Uni Eropa dan Negara Anggotanya adalah salah satu kebijakan kunci dari Komisi di bawah bermacam inisiatif yang telah diluncurkan. Agenda Eropa mengenai Migrasi,⁷ Peraturan Perbatasan dan Penjaga Laut Eropa,⁸ Perbatasan Cerdas dan EUROSUR adalah beberapa dari usaha yang signifikan yang dilakukan untuk memperkuat manajemen perbatasan Eropa.

Da saat kita mencapai titik di situ kita berniat untuk mengerahkan misi dan/atau operasi CSDP, kita harus memerhatikan struktur, instrumen dan mekanisme yang ada di luar ruang lingkup CSDP, memastikan

bahwa mereka tidak terulang atau terlewat dalam kerja mereka yang bernilai.

Misalnya, sejak 6 Oktober 2016, Penjaga Perbatasan dan Laut Eropa telah memberikan garis yang hilang dalam memperkuat perbatasan eksternal Eropa, sehingga orang-orang bisa terus hidup dan bergerak dengan bebas dalam Uni Eropa - membantu memenuhi komitmen Eropa untuk kembali mengembalikan fungsi normal dari area Schengen dan pengangkatan kendali perbatasan internal sementara.

Walau demikian, beberapa instrumen dan struktur yang ada yang saat ini diberlakukan (mis. Penjaga Perbatasan dan Laut Eropa) dan dalam kesulitan jangka pendek dan jangka panjang dapat teridentifikasi. CSDP dapat digunakan untuk mengisi celah ini dan **mendukung entitas sipil.**

7 Agenda Eropa atas Migrasi. Pesan dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Wilayah. Brussels, 13 Mei 2015. COM(2015) 240 final. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

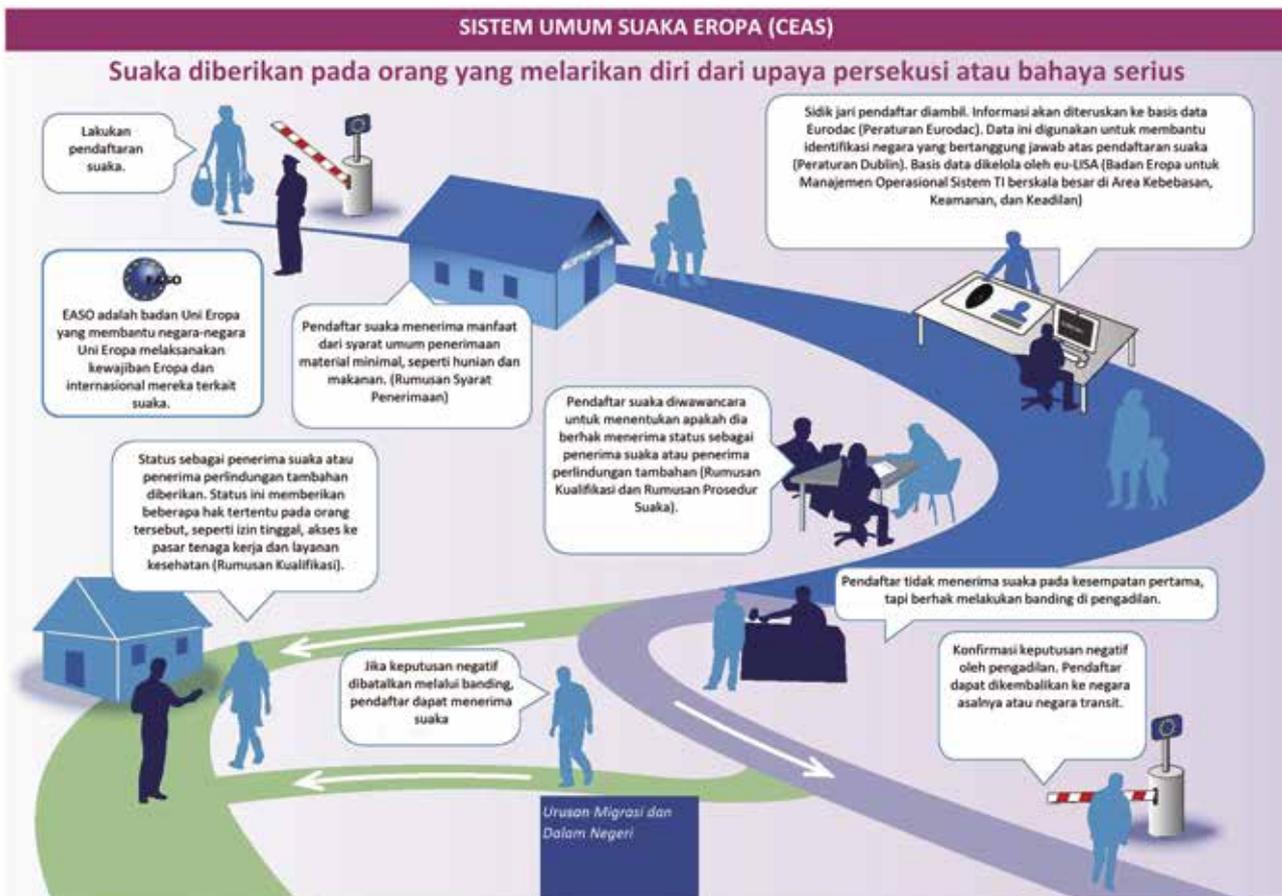
8 Penjaga Perbatasan dan Laut Eropa dan manajemen efektif perbatasan eksternal Eropa. Pesan dari Komisi kepada Parlemen dan Dewan Eropa Strasbourg, 15 Desember 2015. COM(2015) 673 final. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0673>

QAS Menurut Anda apakah dua isu terpenting yang sedang dihadapi Uni Eropa saat ini? (MAKSIMAL 2 JAWABAN) (% - Uni Eropa)

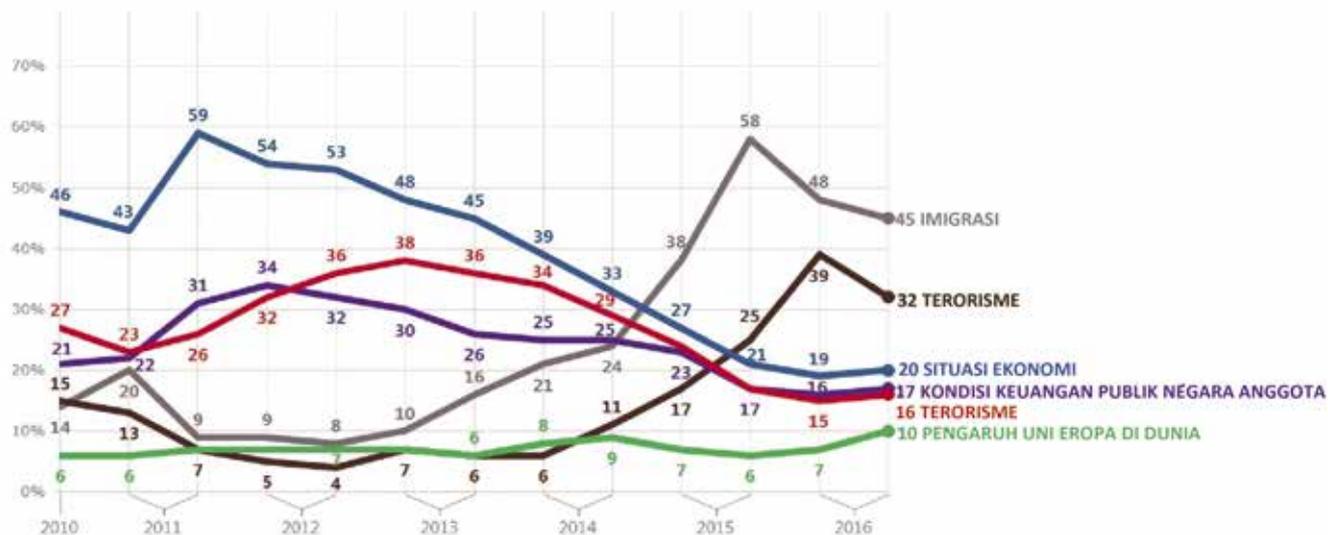


Sumber: Eurobarometer, Desember 2016

Migrasi tidak selalu menjadi tantangan terbesar di Eropa dan bagi Eropa, tetapi tantangan migrasi selalu ada dalam diskusi harian kita, dalam media massa juga di jalanan.



QA5 Menurut Anda apakah dua isu terpenting yang sedang dihadapi Uni Eropa saat ini? (MAKSIMAL 2 JAWABAN)
(% - Uni Eropa)



Sumber: Eurobarometer, Desember 2016

Migrasi hanya masalah kecil hingga tahun 2013

CSDP TELAH TERBUKTI BERGUNA

The **CSDP sudah digunakan** dan telah terbukti menjadi alat yang berguna dalam membantu Uni Eropa dan Negara Anggotanya dalam manajemen aliran migrasi. Tak lagi diragukan, CSDP adalah satu-satunya alat milik Uni Eropa untuk menangani tantangan migrasi. Dalam banyak misi dan operasi CSDP, migrasi baik secara tersurat atau tersirat dibahas dalam mandatnya. Tugas termasuk mendukung negara tuan dengan memberikan latihan dan nasihat untuk pasukan militer dan keamanan, membangun institusi bagi peraturan hukum yang berkelanjutan, dan membangun kapasitas lokal dengan tujuan utama untuk membentuk kondisi bagi pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. EUFOR ALTHEA, EUCAP SAHEL NIGER, EUNAVFOR MED SOPHIA, EUTM MALI dan banyak lagi dapat disebutkan sebagai contohnya.

Walau demikian, karena CSDP pada intinya berfokus pada aspek keamanan bagi dukungan Uni Eropa bagi negara rekanan dalam menangani aliran migrasi di perbatasan mereka, ada beberapa area kunci yang dapat didukung oleh CSDP dan mendapatkan nilai tambah. Misi dan operasi CSDP dapat bekerja bersama dengan Penjaga Perbatasan dan Laut Eropa juga agensi

Uni Eropa khusus lainnya untuk meningkatkan perlindungan perbatasan dan keamanan maritim dengan tujuan untuk melawan kejahatan lintas perbatasan dan menghentikan jaringan perdagangan orang yang dapat menyelamatkan nyawa.

Area yang mungkin ditingkatkan dengan dukungan CSDP seperti dijelaskan di atas misalnya:

- **Pengawasan perbatasan** dan pencegahan penyebab perbatasan ilegal, terutama untuk perbatasan darat dan laut;
- **Pemrosesan migran ilegal**, terutama dengan memberikan latihan dan bantuan teknis juga kapasitas pembangunan untuk 'titik panas';
- **Aktivitas penegakan hukum** guna melawan jaringan penyelundup dengan memperkuat pembagian intelijen;
- **Reformasi sektor keamanan** di negara asal atau transit.

Sejumlah waktu tertentu dapat diperlukan bagi misi atau operasi CSDP penuh untuk diluncurkan dan mulai melaksanakan dukungan secara penuh. Hal ini dapat menjadi masalah dalam situasi yang cepat berubah di situ penyelundup cepat merespons dan beradaptasi atas tindakan penegak hukum. Oleh karena itu layak untuk mempertimbangkan apakah prosedur dan

mekanisme manajemen krisis yang ada dapat digunakan dengan lebih cepat dan fleksibel. Untuk alternatifnya, jika negara anggota memutuskan bahwa CSDP harus memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada rekanan kita, maka mekanisme yang sepenuhnya baru bagi pengerahan CSDP yang lebih cepat dapat dirancang untuk keadaan yang membutuhkan bantuan segera atau fleksibilitas akan diperlukan - sebagaimana telah diserukan oleh negara anggota sejak terjadinya krisis saat ini.

BAGAIMANA UNI EUROPA MEMBANTU NEGARA YANG MEMBUTUHKAN?

Salah satu caranya bisa dengan membentuk **fungsi rumah kliring** di tingkat Uni Eropa untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai inisiatif nasional, bilateral, multilateral dan regional. Selain itu, rumah kliring dapat mengumpulkan permintaan dari negara anggota dan melanjutkannya kepada entitas yang dapat memberikan dukungan. Masih ada pertanyaan mengenai di situ rumah kliring ini harus ditempatkan; di Komisi Eropa (mis. DG HOME), Dinas Luar Negeri (mis. CMDP atau EUMS) atau salah satu dari agensi terkait lainnya.

Solusi lain yang memungkinkan dapat merujuk ke **Pasal 222 Perjanjian Uni Eropa mengenai Pelaksanaan**. ‘Klausul solidaritas’ memiliki dasar hukum yang

kuat dan meliputi bencana alam dan buatan manusia juga terorisme (baik manajemen pencegahan juga konsekuensi). Prosedur dan struktur penerapannya sudah ada dan bisa langsung digunakan. Uni Eropa harus memobilisasi semua instrumen yang dimiliki, termasuk menyediakan sumber daya militer oleh negara anggota.

KESIMPULAN

Proposal tersebut di atas dikembangkan oleh ahli dari negara anggota Uni Eropa dan institusi Uni Eropa dalam margin di panel diskusi mengenai migrasi, yang diadakan di Egmont Palace. Faktor penggerak untuk menerapkan satu proposal atau lainnya adalah keteguhan politik. Kewajiban hukum adalah buatan manusia dan dapat diubah seperti halnya mereka dibuat. Solusi harus memerhatikan dimensi kemanusiaan dari krisis migrasi, nilai-nilai ke-Eropa-an dan populasi Eropa yang menginginkan hasil.

Akar masalah dari tantangan migrasi harus ditangani, dan lebih baik hari ini daripada esok hari. Secara umum, situasi keamanan di negara asal bukanlah yang utama. Ada alasan ekonomi dan personal bagi migrasi.

Dan elemen utama dalam menangani akar masalah adalah pendidikan. Jika tidak memberikan anak-anak di negara asal atau transit pandangan yang jelas akan masa depan mereka, aliran migrasi tidak akan pernah berakhir.

Kita harus bertindak sekarang dan kita harus inovatif dalam berpikir. Mantan Sekretaris Jenderal Dinas Luar Negeri Eropa,

MIGRAN

Istilah **‘migran’** dipahami sebagai meliputi semua kasus di situ keputusan untuk bermigrasi dilakukan secara bebas oleh individu bersangkutan, untuk tujuan ‘kenyamanan pribadi’ dan bukan disebabkan oleh faktor eksternal yang memaksa. Definisi ini menunjukkan bahwa istilah ‘migran’ tidak merujuk pada pengungsi, orang teroris atau mereka yang dipaksa dan terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Sumber: <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/>

PENGUNGS

Pasal 1(A)(2) Konvensi tahun 1951 mendefinisikan **pengungsi** sebagai individu yang ada di luar negara atau kewarganegaraan atau tempat tinggal asalnya yang tidak dapat atau tidak mau kembali karena adanya rasa takut yang jelas akan persekusi karena ras, agama, kewarganegaraan, opini politik, atau karena bagian dari kelompok sosial tertentu.

TETAPI: Individu yang telah mendapatkan perlindungan di negara dunia ketiga tidak dianggap sebagai pengungsi. (Pasal 1(C)).



Anggatan Bersejarah Austria/Wolfgang Pendlisberger

Tanggung jawab utama untuk menangani tantangan migrasi berada di tangan Negara Anggota Uni Eropa.

Pierre Viemont, menyatakan hal yang sama, menurutnya 'ini saat menjadi ambisius'.⁹

Jean-Claude Juncker dalam pidatonya mengatakan bahwa dua belas bulan selanjutnya adalah penting bagi Eropa yang lebih baik: *'Oleh karena itu kita butuh*

- *Eropa yang melindungi;*
- *Eropa yang menjaga gaya hidup Eropa;*
- *Eropa yang memperkuat masyarakatnya;*
- *Eropa yang memberikan pertahanan di dalam dan luar negeri; juga*
- *Eropa yang bertanggung jawab.'*¹⁰

⁹ Pierre Viemont: Migration in Europe. Bridging the Solidarity Gap. Carnegie Endowment for International Peace.

Washington/Brussels, September 2016. hal. 23. http://carnegieendowment.org/files/Vimont_Migration_fulltext.pdf

¹⁰ Jean-Claude Juncker, hal. 9.

MIGRASI

Migrasi merupakan kegiatan melewati batas unit administrasi politik untuk jangka waktu minimal tertentu.

Hal ini termasuk pergerakan pengungsi, orang terlantar, orang terusir juga migran ekonomi.

Sumber: <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant/>

PENCARI SUKA

Pencari Suaka merupakan orang-orang yang bergerak melewati batas negara guna mencari perlindungan, tapi bisa saja tidak memenuhi kriteria ketat yang ditentukan oleh Konvensi tahun 1951.

Istilah 'pencari suaka' dan 'pengungsi' hanya berbeda dalam hal tempat di situ seseorang mencari perlindungan.

Sumber: <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/asylum-seeker/>



PERBATASAN DAN PENJAGA PANTAI EROPA YANG DIPERKUAT



November 2019

Eropa harus mampu mengelola perbatasan luarnya secara efektif dan menyediakan keamanan bertingkat tinggi di dalam wilayahnya. Hal inilah yang mendasari Presiden Juncker mengajukan usulan pada Pidato Kenegaraan Uni Eropa tahun 2018 untuk memperkuat Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa agar memiliki ambisi yang sesuai guna menjawab tantangan umum yang sedang dihadapi Eropa terkait pengelolaan migrasi dan perbatasan. Setelah usul tersebut diadopsi oleh Parlemen Eropa dan Dewan Eropa, Agensi akan segera memiliki sumber daya dan kapabilitas yang diperlukan untuk mendukung Negara Anggota di lokasi - secara terus-menerus dan mumpuni.



HAL APA SAJA YANG BARU?



KESATUAN TETAP SEJUMLAH 10.000 PERSONEL

Kesatuan tetap sejumlah 10.000 penjaga perbatasan - yang akan dikerahkan secara bertahap - akan memastikan kecukupan sumber daya bagi Agensi.



PERLENGKAPAN MILIK SENDIRI

Agensi akan memiliki perlengkapan sendiri, seperti kapal, pesawat, dan kendaraan darat yang siap dikerahkan setiap saat.



PERLUASAN TUGAS DAN WEWENANG

Kesatuan tetap dapat menjalankan tugas eksekutif seperti pemeriksaan identitas dan pemberian izin masuk - hanya di bawah otoritas dan kendali Negara Anggota setempat.



KANTOR SATELIT

Kantor satelit sementara dapat didirikan di Negara Anggota Uni Eropa dan negara-negara ketiga guna mendukung aktivitas operasional Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa.



LEBIH BANYAK DUKUNGAN PEMULANGAN

Agensi akan mendukung Negara Anggota dalam prosedur pemulangan, termasuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menerbitkan keputusan pemulangan dan mengidentifikasi warga negara bukan Uni Eropa yang tidak memiliki izin tinggal, memperoleh dokumen perjalanan dari negara bukan Uni Eropa, serta menyusun dan membiayai operasi pemulangan.



KERJA SAMA DENGAN NEGARA BUKAN UNI EROPA

Agensi dapat melakukan operasi gabungan dan mengerahkan penjaga perbatasan ke negara-negara di luar Uni Eropa dan di luar negara tetangga.

KESATUAN TETAP BARU SEJUMLAH 10.000 PENJAGA PERBATASAN

? KENAPA 10.000?

Kesatuan tetap yang mencapai 10.000 personel disusun dengan saksama - termasuk jumlah dan komposisinya - agar dapat memenuhi kebutuhan Negara Anggota di masa kini dan masa mendatang.

Penyusunan didasarkan pada:

Tugas tambahan
Agensi;

Kesenjangan pada staf dan
perlengkapan terdahulu;

Pengalaman dari krisis
migrasi.

📅 KAPAN?

Kesatuan tetap baru akan siap dikerahkan mulai tahun 2021 secara bertahap hingga mencapai kapasitas penuhnya sejumlah 10.000 penjaga perbatasan.

⚙️ BAGAIMANA?

Semua operasi Agensi Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa akan ditempatkan di bawah komando dan kendali Negara Anggota setempat. Regu yang dikerahkan dari kesatuan tetap Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa akan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sesuai instruksi pemimpin regu dari negara setempat.



Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa yang Lebih Kuat TIDAK AKAN:

- Mengurangi kedaulatan nasional
- Mengambil alih tanggung jawab Negara Anggota dalam melindungi perbatasan
- Menggantikan penjaga perbatasan nasional
- Menjalankan operasi secara sepihak di perbatasan Negara Anggota



TAHUKAH ANDA?



Selama krisis migrasi, Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa harus **meningkatkan pengerahan personel** di seluruh Eropa sebanyak 5 kali.



Operasi Uni Eropa di laut, termasuk operasi yang dikoordinasi oleh Agensi Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa, berkontribusi dalam **menyelamatkan hampir 760.000 nyawa** sejak 2015.



Semua **biaya** yang timbul dari pengerahan kesatuan tetap akan **didanai oleh Agensi**.



Kesatuan tetap hanya dapat melakukan intervensi berdasarkan **permintaan dari Negara Anggota**.



Penjaga perbatasan yang mencapai 10.000 personel hanya **8,7%** dari total **115.000 orang staf operasional Negara Anggota** yang bertugas mengelola perbatasan di seluruh Uni Eropa.

4.2. KONTRATERORISME DAN CSDP

oleh Birgit Löser



Unit Eropa/EUCAP SAHEL Niger

CSDP sangat cocok untuk membantu otoritas negara menghadapi peningkatan ancaman yang pada akhirnya berkaitan dengan keamanan internal EU, termasuk isu migrasi (disebabkan oleh akar masalah yang sama).

Sejak 2001, misi CSDP sipil telah berkembang sebagai sarana penting bagi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama EU, beroperasi dengan mandat pascakonflik dan pencegahan konflik di berbagai negara dan wilayah di luar negeri. Meskipun pada dasarnya misi ini didokumentasikan dan dianalisis dengan cukup baik, ada satu aspek yang menjadi pertimbangan beberapa orang hingga kini, yaitu hubungan dengan upaya kontraterorisme (CT) EU yang juga merupakan bagian penting dari dimensi kebijakan eksternal dan keamanan EU. Bahkan di dalam institusi EU sendiri pun tampaknya hanya ada sedikit sekali interaksi di antara badan-badan yang saling terkait. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat badan-badan tersebut memiliki sasaran, tujuan, serta prioritas geografis yang mirip. Selain itu, mereka juga tidak saling berkoordinasi dalam melakukan pendekatan masing-masing, meskipun sebenarnya terdapat potensi besar untuk saling bersinergi.

Artikel ini mencoba menganalisis kemiripan tersebut secara lebih mendalam dengan tujuan mendorong lebih

banyak interaksi dan koordinasi antara dua instrumen kebijakan eksternal EU tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendekatan 'komprehensif' atau 'terintegrasi' yang dimiliki oleh Strategi Global EU baru seperti yang selama ini diharapkan. Artikel ini juga mendukung upaya memperkuat CSDP, terutama agar perhatian yang lebih sistematis diberikan kepada ketentuan CT di negara dunia ketiga saat hal tersebut berkaitan dengan keamanan Eropa.

KEMIRIPAN

Kemiripan pertama adalah kesamaan tujuan dalam memperkuat pemerintahan berdasar hukum: misi CSDP sipil dengan mandat pengembangan kapasitas biasanya berfokus pada pendampingan, pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan bagi kepolisian dan badan peradilan negara tuan rumah. Misi tersebut membantu negara dengan lembaga penegakan hukum yang lemah menga-



Unit Eropah/EUCAP SAHEL Niger

Saat ini, EUCAP Sahel Niger adalah satu-satunya misi yang secara langsung menyebutkan kontraterorisme sebagai bagian dari mandatnya.

daptasikan undang-undang nasional mereka. Misi tersebut juga membantu mereka mereformasi sektor keamanan serta berkontribusi dalam meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarbadan dan meningkatkan performa aparaturnegara dan personel terkait. Salah satu keunikan misi ini adalah pendekatan sipil dalam upaya yang dilakukan: CSDP sipil menggunakan pakar sipil dari anggota kepolisian dan badan peradilan Negara Anggota untuk menjalankan tugas terkait peningkatan kualitas pemerintahan berdasar hukum di negara dunia ketiga.

Pendekatan yang diambil oleh EU terhadap CT dilakukan berdasarkan pemerintahan berdasar hukum, yang menjadikan aksi teroris sebagai sebuah tindakan kriminal, sehingga harus diinvestigasi, dituntut, dan pelakunya dihukum sesuai pemerintahan berdasar hukum serta standar internasional. Sejak Keputusan Kerangka Kerja EU pertama dalam melawan terorisme pada 2001, serta setelah penetapan strategi CT EU pada 2005, upaya CT eksternal EU senantiasa menerapkan pendekatan sipil

ini. EU telah berkontribusi secara aktif dalam berbagai tonggak resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC) terkait kontraterorisme dan perlawanan terhadap ekstrimisme kekerasan (CVE) yang bertujuan menjadikan aksi teroris sebagai tindakan kriminal serta dalam memperkuat kepolisian dan sistem peradilan dalam menghadapi teror. EU adalah anggota pendiri Forum Kontraterorisme Global (GCTF), sebuah platform sipil bagi para politikus dan praktisi yang terlibat dalam CT. EU terus secara aktif menyebarkan berbagai inisiatif kebijakan, dokumen praktik terbaik, serta dukungan dan koordinasi bagi pengembangan kapasitas di negara yang membutuhkan. Pada 2016, EU menyumbang sekitar 224 juta Euro untuk program bantuan CT/P-CVE (Pencegahan dan Perlawanan terhadap Ekstrimisme Kekerasan) di negara rekan dan 175 juta Euro untuk program bantuan terkait CT/P-CVE, sehingga totalnya mencapai sekitar 400 juta Euro untuk pengembangan kapasitas terkait pemerintahan berdasar hukum di luar negeri.



Unit Eropa/EUCAP Nestor

Misi CSDP sipil menggunakan personel aktif yang masih bertugas, sehingga mereka dapat menggunakan praktik terbaik dan kebijakan terbaru.

Kemiripan lainnya adalah upaya aktif dalam standar internasional dan praktik terbaik untuk negara rekan: penggunaan standar internasional adalah fitur berkesinambungan dalam dokumen perencanaan untuk misi CSDP sipil. Misi CSDP sipil menggunakan personel aktif yang masih bertugas, sehingga mereka dapat menggunakan praktik terbaik dan kebijakan terbaru negara asal mereka saat membantu mereformasi badan dan undang-undang lokal.

Dimensi penting lainnya dari upaya CT eksternal EU adalah advokasi dan diplomasi, misalnya melalui sejumlah dialog politik CT yang dilakukan dengan berbagai negara dan organisasi regional seperti Liga Arab, Dewan Kerja Sama Teluk, Organisasi Kerja Sama Islam, dan Uni Afrika (AU). EU juga berpartisipasi aktif dalam GCTF (termasuk ikut mengepalai salah satu grup kerjanya) serta menjadi sponsor sejumlah pelatihan dan seminar mengenai topik-topik terkait CT dan CVE di negara dan wilayah prioritas. Jaringan para pakar CT yang ditugaskan dalam berbagai delegasi EU sejak 2015 juga berkontribusi dalam mengintegrasikan dan mempromosikan standar serta kebijakan yang disepakati secara global.

Jika melihat fokus geografis CSDP sipil dan upaya CT eksternal EU, tampaknya hanya terjadi lebih sedikit tum-

pang tindih dari yang diperkirakan, mengingat bahwa di beberapa wilayah, terorisme adalah akar masalah dari instabilitas, atau sebaliknya, timbul akibat aparaturnegara yang lemah serta konflik berkepanjangan. Beberapa contoh yang lebih detail:

- **Balkan Barat:** EULEX Kosovo, berfokus pada reformasi kepolisian dan pengembangan kapasitas: Pakar CT ditugaskan sejak akhir 2016 untuk mencakup seluruh wilayah tersebut serta membantu koordinasi inisiatif utama di Balkan Barat guna menangani masalah CT dan radikalisis;
- **Pakistan:** tidak terdapat misi CSDP, tapi cukup terlibat dalam permasalahan CT, termasuk menugaskan pakar CT dan memantapkan program rencana besar (CT STRIVE);
- **Afghanistan:** terdapat upaya CSDP yang signifikan (EUPOL Afghanistan, tidak lama lagi dibubarkan), tapi saat ini tidak terdapat pakar CT;
- **Timur Tengah:** Misi CSDP Irak telah ditutup, tapi pakar CT telah ditugaskan sejak 2015 guna membantu koordinasi sejumlah proyek bantuan utama, termasuk pengembangan kapasitas badan intelijen;
- **Palestina:** misi CSDP yang berfokus pada reformasi kepolisian dan pengembangan kapasitas, tapi tanpa penugasan pakar CT;

- **Lebanon dan Yordania:** tidak terdapat misi CSDP, tapi memberikan bantuan yang cukup besar terkait CT serta menugaskan pakar CT sejak 2015;
- **Aljazair, Tunisia dan Maroko:** tidak terdapat misi CSDP, tapi memberikan bantuan CT yang cukup besar bagi Tunisia (Aljazair dan Maroko masih menunggu) serta menugaskan pakar CT sejak 2015;
- **Sahel:** terdapat dua misi CSDP sipil dalam bidang Reformasi Sektor Keamanan yang sedang berjalan; dua pakar CT telah ditugaskan (di Chad dan Nigeria) bersama sejumlah program bantuan CT yang masih berjalan.

Ringkasan di atas menunjukkan bahwa saat ini hampir tidak ada koordinasi di antara kedua instrumen. Sisi positifnya adalah kedua instrumen tersebut menghindari saling tumpang tindih, sehingga dapat melengkapi satu sama lain. Namun, itu dengan asumsi bahwa keputusan tersebut memang disengaja. Kenyataannya, tidak ada koordinasi mengenai waktu penentuan suatu instrumen, atau setidaknya hal ini tidak cukup sering terjadi.

Meski demikian, ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa pertimbangan kontraterorisme berperan penting dalam desain serta kelahiran misi CSDP sipil:

Contoh pertama adalah **Misi Bantuan AMIS** (2005-2006), yang membantu operasi komando dan kendali atas misi perdamaian pertama pimpinan AU dengan tujuan melawan dampak grup militan yang menyebabkan kerusakan parah di Darfur, yang pada saat itu belum dikategorikan sebagai 'teroris'.

Beberapa tahun kemudian (pada 2012), misi **EUAV-SEC** di Sudan Selatan secara jelas dibentuk atas potensi ancaman akibat keamanan yang lemah di bandara Juba, dengan risiko terbesarnya adalah potensi pembajakan pesawat oleh teroris di bandara. Sebagai negara pedalaman yang baru berdiri, Sudan Selatan pada saat itu sangat bergantung pada transportasi udara untuk mendukung pembangunan negara, sehingga satu-satunya bandara internasional mereka menjadi penyambung nyawa mereka.

EUCAP Nestor, yang direncanakan dan dibentuk secara paralel (pada 2012) guna membantu melawan ancaman yang semakin meningkat dari Al-Shabaab serta koneksinya terhadap kawanan perompak yang beroperasi di Samudra India. Meskipun hal tersebut adalah tujuan utama misi ini, namun mandat misi ini lebih berfokus pada membantu membentuk penjaga pantai yang efektif

bagi negara di wilayah tersebut, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan terorisme.

EUCAP Niger, direncanakan dan dibentuk pada 2012, merupakan satu-satunya misi sejauh ini yang secara langsung menyebutkan kontraterorisme sebagai bagian dari mandatnya, yang mencakup pendampingan, pemberian bimbingan, dan pelatihan bagi badan keamanan lokal mengenai undang-undang serta hal-hal lainnya.

EUBAM Libya, direncanakan pada 2013, tidak secara langsung menyebutkan tentang terorisme, meskipun pada saat itu terorisme merupakan salah satu alasan pembentukannya.

TANTANGAN SERTA PELUANG BAGI INTERAKSI DAN KOORDINASI LEBIH LANJUT

Penjelasan di atas mengenai keterkaitan (atau ketidakterkaitan) antara CSDP dengan CT sejauh ini menunjukkan dua hal secara jelas. Di satu sisi, keterkaitan di antara keduanya tidak harus jelas: sasaran serta tujuan keduanya, dengan penekanan pada (pembentukan kembali) pemerintah berdasar hukum, berujung pada hal yang sama, baik melalui CSDP sipil, maupun upaya CT eksternal EU yang telah dilakukan sejak lama, seperti dialog atau program bantuan finansial Komisi Eropa. Di sisi lainnya, terdapat ruang yang jelas bagi misi CSDP sipil untuk digunakan secara lebih spesifik guna mencapai tujuan CT eksternal.

Bahkan, sesungguhnya lingkungan global yang terus berubah menandakan bahwa EU perlu melipatgandakan upaya mereka di area ini, akibat beberapa faktor utama berikut.

Pertama, kepemilikan teritori di Irak dan Suriah, cepat atau lambat, akan menimbulkan situasi yang mengakibatkan para pejuang Da'esh yang tersisa pindah ke 'tempat aman', termasuk Yaman atau Somalia, juga Sudan, Libya dan Sahel yang lebih luas.

CSDP telah dibentuk di Sahel, melalui dua misi EUCAP Sahel (Mali dan Niger), serta kemungkinan misi baru di Libya yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Ketiga misi tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan mandat yang dimilikinya untuk lebih memberikan bantuan langsung kepada masing-masing negara tuan rumah dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus bertumbuh. Hal yang sama juga berlaku bagi EUCAP

Nestor di pesisir timur Afrika. Salah satu tugas misi-misi tersebut mencakup menyesuaikan undang-undang nasional dengan standar internasional (misalnya resolusi dan konvensi UNSC), memberikan pendampingan dan pelatihan terkait kasus CT di pengadilan, meningkatkan penilaian terhadap ancaman CT, pertukaran informasi dan pengumpulan barang bukti, dll.

Diskusi yang sedang dilangsungkan mengenai ‘regionalisasi’ misi CSDP sipil di Sahel melalui penugasan pakar CSDP di seluruh delegasi EU Sahel juga menciptakan kesempatan ideal untuk membentuk sinergi antara pakar CSDP yang telah berada di lapangan dengan proyek yang dibiayai oleh Komisi, yang memiliki tujuan sama dengan CSDP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misi CSDP sipil baru untuk Libya yang saat ini sedang direncanakan pun dapat memberikan kesempatan ideal guna menyatukan upaya, mengingat bahwa sasaran misi baru ini bukan hanya untuk membantu badan penegak hukum mengatasi terorisme dan radikalisme, tapi juga memutus mata rantai migrasi – karena teror dan migrasi memiliki akar masalah yang sama dan membutuhkan penanganan yang serupa oleh otoritas negara.

Hal ini sangat mungkin dapat terjadi, terutama sekarang, dengan potensi pengurangan keterlibatan US di wilayah-wilayah tersebut, yang merupakan faktor utama kedua untuk dipertimbangkan dalam konteks ini.

Secara singkat, ada beberapa peluang yang berpotensi muncul guna mewujudkan koneksi yang lebih sistematis antara CSDP dan CT, dengan mandat misi CSDP sipil yang lebih berfokus dan secara spesifik terkait dengan permasalahan CT. Hal ini akan menggabungkan kinerja yang telah dilakukan oleh badan EU lainnya terkait langkah CT eksternal/pengembangan kapasitas dengan metodologi khusus CSDP terkait pendampingan serta pemberian bimbingan/latihan ‘secara langsung’.

Terlepas dari semua pertimbangan positif ini, masih terdapat satu tantangan besar atas ide yang dijabarkan dalam artikel ini, yaitu menyangkut permasalahan sumber daya: CSDP sipil bergantung pada personel aktif yang diperbantukan dari Negara Anggota EU. Lembaga keamanan dan peradilan sangat disibukkan akibat peningkatan ancaman di dataran utama Eropa.

Oleh karena itu, sangat sulit, bahkan mustahil, untuk menyediakan sumber daya tambahan guna peningkatan

misi CSDP sipil tanpa disertai perubahan kebijakan secara drastis yang dapat memperjelas koneksi antara keamanan internal dan eksternal.

KESIMPULAN

Tidak diragukan lagi bahwa pada prinsipnya CSDP sipil memiliki ruang untuk mempertimbangkan aspek terorisme secara lebih spesifik dalam mendefinisikan mandat. Alasannya adalah karena CSDP sipil sangat cocok untuk membantu otoritas negara menghadapi peningkatan ancaman yang pada akhirnya berkaitan dengan keamanan internal EU, termasuk isu migrasi (disebabkan oleh akar masalah yang sama).

Namun, hal tersebut tidak menjamin pembentukan kebijakan atau pemerintah berdasar hukum yang baik. Untuk menghadapi fenomena ini secara lebih efektif, diperlukan perhatian terhadap aspek yang lebih spesifik terkait kontraterorisme: yaitu pertukaran informasi terkait CT, penyesuaian undang-undang nasional dengan standar internasional, mengembangkan praktik terbaik CT untuk lembaga penegak hukum dan peradilan (lihat kinerja GCTF), dll.

Hal-hal tersebut berada di luar area yang lazim bagi struktur CSDP EU saat ini, tapi dapat diatasi dengan mudah selama mandat CSDP mendatang mencakup kepatuhan pada sumber daya yang tersedia serta memiliki sasaran tujuan dan tugas yang relevan dengan CT.

Hal ini jelas dapat menguntungkan EU dan sejalan dengan prerogatif strategi keamanan global Uni Eropa yang baru saja diterapkan, yang menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dengan instrumen eksternal EU guna memenuhi kebutuhan keamanan, baik internal maupun eksternal.

4.3. KEAMANAN/PERTAHANAN SIBER DAN CSDP

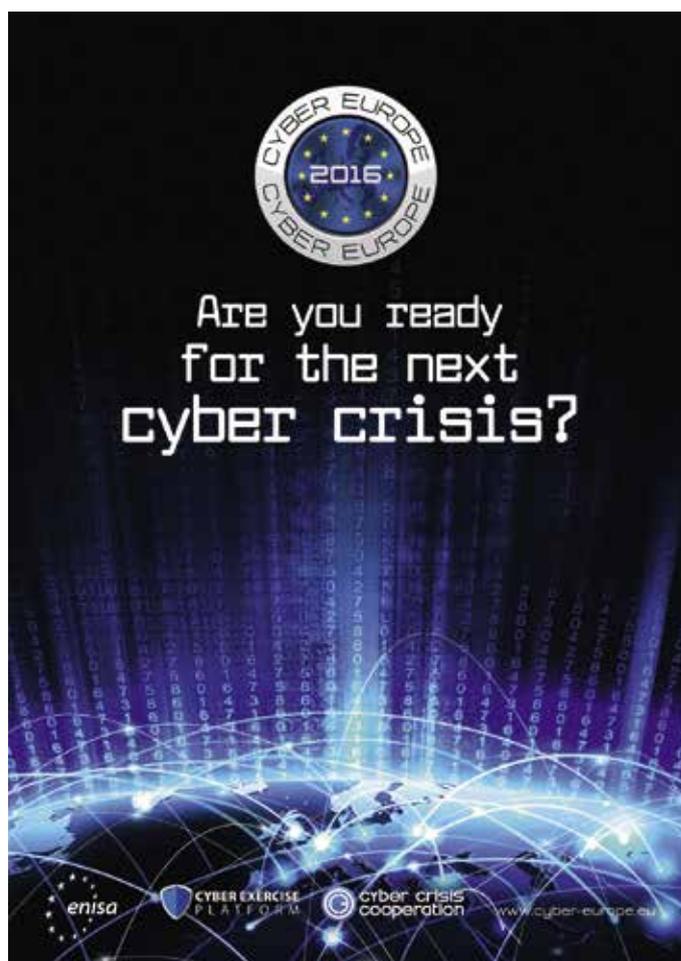
oleh Jan Peter Giesecke

Komunitas informasi modern kita sangat bergantung pada ketersediaan akses yang gratis dan aman terhadap ruang siber dan internet. Hal ini berlaku dalam hampir semua aspek dalam hidup kita, termasuk, tentunya, dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Tidak terkecuali aktivitas Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) EU, termasuk misi serta operasi sipil dan militer. Aktivitas tersebut diuntungkan oleh dunia digital dan kesuksesannya tidak lepas dari ketersediaan informasi tepercaya serta sistem komunikasi dan informasi yang bekerja dengan baik.

LANSKAP ANCAMAN BARU

Ruang siber dan internet kini telah berubah menjadi medan peperangan baru. Serangan siber telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan semakin canggih, mulai dari serangan *denial-of-service* hingga penerobosan yang dilakukan secara lihai dan kompleks dengan tujuan mengumpulkan, mencuri, mengenkripsi, atau memanipulasi dan merusak informasi. Para pelakunya dapat beragam, mulai dari peretas '*script kiddie*' dan *hacktivist*, hingga pelaku kriminal, teroris, dan pejabat pemerintah – atau pihak yang dibantu oleh mereka. Mereka telah memahami ketergantungan kita dan menyasar kelemahan kita menggunakan domain siber guna mendapatkan keuntungan asimetris serta mencapai tujuan ekonomi, politik, atau militer secara anonim dan tanpa diketahui, sambil tetap berada di bawah ambang batas konflik bersenjata.

Jaringan institusi Uni Eropa juga sering mendapat serangan dan ujian. Operasi dan misi CSDP telah menghadapi dimensi siber yang terus bertumbuh, meskipun tidak ada bukti bahwa keduanya menjadi sasaran. Saat ini, semakin banyak konflik yang didukung oleh kampanye disinformasi pada media sosial,



Ruang siber dan internet kini telah berubah menjadi medan peperangan baru.

atau operasi destabilisasi melalui serangan siber pada sektor pendukung. Oleh karena itu, aktivitas siber harus menjadi bagian pertimbangan dalam semua skenario mendatang, dikaji secara menyeluruh, diintegrasikan ke dalam respons krisis yang lebih luas, serta dijadikan pertimbangan saat menghadapi ancaman hibrida. Dengan mempertimbangkan semua hal itu, apa yang bisa dilakukan dan telah dilakukan, terutama terkait dengan CSDP?

KERANGKA KERJA POLITIK

Pada 2013, institusi EU mengembangkan Strategi Keamanan Siber EU setelah mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan keamanan siber serta ‘ruang siber yang terbuka, aman, dan terlindungi’. Berdasarkan hal itu, sebagai markas CSDP, Pelayanan Aksi Eksternal Eropa (EEAS) mengembangkan Kerangka Kerja Kebijakan Pertahanan Siber (CDPF) EU pada 2014. Kerangka kerja kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan ketahanan dan kemampuan pertahanan siber untuk implementasi aktivitas CSDP dengan cara melacak, menghubungkan, dan mengoordinasikan semua hal yang dikerjakan oleh berbagai pemangku kepentingan di EEAS dan lainnya.

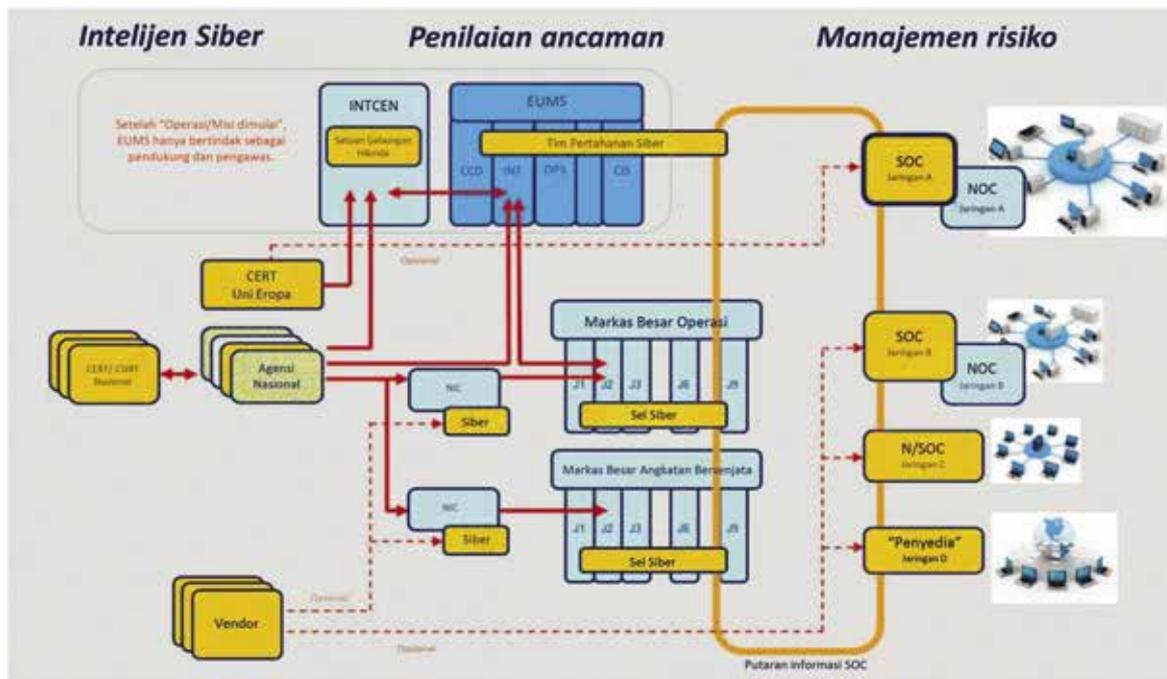
Akhir-akhir ini, Strategi Global Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa menentukan keamanan dan pertahanan siber sebagai prioritas, dengan berfokus pada ketahanan dan perlindungan, serta menyatakan secara khusus kebutuhan untuk bekerja sama dan berbagi informasi di antara Negara Anggota (MS) dan rekan militer serta sipil.

Dokumen strategis ini membentuk fondasi serta kerangka kerja yang berharga bagi keamanan dan pertahanan siber pada CSDP. Tapi, apa arti semua itu dalam aspek praktis?

KEAMANAN DAN PERTAHANAN SIBER DALAM ASPEK PRAKTIS

Selama beberapa tahun, keamanan dan pertahanan siber telah menjadi bahan pertimbangan dalam operasi serta misi CSDP. Namun, semua dilakukan secara berbeda-beda. Kapabilitas siber sangat bergantung pada permintaan dari pemimpin misi atau operasi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh situasi, pemahaman terkait ancaman siber, serta keputusan dalam menentukan ragam kapabilitas yang perlu ‘dipersiapkan’. Hal itu menyebabkan langkah keamanan dan pertahanan siber pada operasi dan misi yang sedang berlangsung dapat berbeda-beda, mulai dari langkah keamanan dan jaminan informasi standar hingga ketahanan dan perlindungan terancang guna memberi proteksi pada sistem komando dan kendali serta sistem komunikasi dan informasi.

Di masa mendatang, semua misi dan operasi CSDP perlu menjadikan keamanan dan pertahanan siber sebagai bahan pertimbangan serius. Hal ini telah dilakukan pada tiga misi dan operasi terkini (EUMAM RCA, EUNAVFORMED SOPHIA, EUTM RCA). Namun, saat ini hal tersebut baru diterapkan hingga tingkat praktik terbaik. Hingga kini belum ada perencanaan



Organisasi pertahanan siber dalam Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama.

struktur atau prosedur formal untuk pertimbangan yang meyakinkan dan efektif terhadap ancaman siber, yang dapat membentuk dasar penentuan kebutuhan yang tepat akan kapabilitas pertahanan siber yang perlu disediakan dalam misi dan operasi.

KONSEP PERTAHANAN SIBER

Berkaitan dengan hal ini, EUMS, sebagai penyedia pakar militer bagi EU dan EEAS, mengembangkan versi baru Konsep Pertahanan Siber EU pada 2016. EUMS meninjau aspek organisasi dan struktural tertentu pada perencanaan militer dan pengerahan kekuatan militer serta kebutuhan kapabilitas siber yang perlu disediakan oleh MS untuk aktivitas CSDP. Karena misi sipil tidak bergantung pada kemampuan MS, maka konsep tambahan untuk implementasi keamanan siber bagi misi yang murni bersifat sipil pun disiapkan, dengan mempertimbangkan aspek khusus yang terdapat di dalamnya serta konsep militer.

Pada titik ini, kita harus memahami bahwa EU dan EEAS cenderung menggunakan istilah 'keamanan siber' dalam konteks sipil dan mengaitkan istilah 'pertahanan siber' dengan aksi militer, meskipun kedua konsep tersebut berhubungan erat, mencakup ancaman yang sama, bergantung pada prinsip dasar yang sama, dan menggunakan langkah penanganan yang serupa. Pernyataan dalam artikel ini pada prinsipnya berlaku untuk istilah yang lebih luas, yaitu 'keamanan dan pertahanan siber', tapi akan lebih berfokus pada pertahanan siber serta prinsip dan panduan yang terdapat dalam Konsep Pertahanan Siber.

Merencanakan pertahanan siber

Prinsip dasar dalam memastikan keamanan dan pertahanan siber yang efektif serupa dengan pelajaran yang diperoleh dari aktivitas perencanaan belum lama ini, yaitu dengan sedini mungkin menjadikan aspek siber sebagai pertimbangan dalam proses perencanaan dan pengelolaan krisis EU. Aspek siber harus dijadikan pertimbangan dan disertakan dalam evaluasi ancaman keseluruhan untuk misi atau operasi yang direncana-



Pada 2013, institusi EU mengembangkan Strategi Keamanan Siber EU setelah mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan keamanan siber serta 'ruang siber yang aman dan terlindungi' serta terbuka.

kan. Struktur intelijen strategis EU perlu menyediakan informasi dalam bentuk lanskap ancaman siber, dengan berdasar pada EEAS INTCEN dan Direktorat INTEL EUMS, serta perlu didukung oleh aktivitas berbagi informasi, misalnya dengan hub informasi siber EU (CERT-EU), rekan militer seperti NATO, dan tentu saja penyedia informasi siber MS.

Tim pertahanan siber EUMS, bersama dengan pakar INTEL, akan meninjau informasi yang disediakan dan mendukung tim perencana operasi/misi, sembari memasukkan naratif siber ke dalam dokumen perencanaan awal (terutama Konsep Pengelolaan Krisis dan Arahan Inisiasi Militer), sehingga dapat memberikan alasan kuat untuk perencanaan lebih lanjut. Melalui alasan tersebut, pemimpin operasi atau misi yang ditunjuk serta stafnya – dengan didukung oleh intelijen serta analisis ancaman dan risiko secara mendalam atas ruang siber di wilayah operasi – dapat mengambil keputusan mengenai keutamaan pertahanan siber dan menjelaskan, dalam konsep operasi dan rencana operasi atau misi, cara memiliki pertahanan yang efektif terhadap potensi ancaman dari ruang siber, sehingga dapat meminta kapabilitas yang diperlukan guna memastikan ketahanan dan perlindungan bagi sistem dan jaringan IT untuk digunakan dalam misi atau operasi.

EUMS tidak menyediakan sumber daya atau menukarkan personel siber, sehingga pada umumnya permintaan akan hal tersebut diajukan kepada MS yang mendukung aktivitas CSDP terkait dan bersedia memberikan bantuan. Oleh karena itu, secara umum, MS

bertanggung jawab dalam menyediakan kapabilitas tersebut. Mereka mendapat arahan dan bimbingan terkait hal ini melalui Konsep Siber. Tapi, apa sebenarnya makna dari istilah ‘kapabilitas siber’?

Menerapkan pertahanan siber

Implementasi keamanan dan pertahanan siber pada CSDP melibatkan lebih dari sekadar memberikan mekanisme perlindungan di dalam jaringan. Oleh karena itu, istilah ‘kapabilitas’ telah dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas pada Konsep Pertahanan Siber, mencakup aspek doktrin, organisasi, pelatihan, materi, kepemimpinan, personel, fasilitas, dan interoperabilitas (menggunakan skema DOTMLPF-I). Selain perlindungan materi secara ‘sederhana’, hal tersebut juga sangat berkaitan dengan persiapan sistem, struktur, prosedur, dan, terutama, semua orang yang terlibat, guna memastikan ketahanan terhadap ancaman dari ruang siber. Ketahanan siber dan kapabilitas terkait harus dibentuk dan diterapkan sejak jauh hari sebelum proses perencanaan dimulai.

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT), yang merupakan dasar dari sistem dan jaringan yang digunakan dalam aksi CSDP, tidak dapat dibuat memiliki ketahanan siber jika diserahkan kepada komandan. Penyedia ICT, baik MS, institusi EU, maupun kontraktor pada umumnya, harus mengembangkan sistem mereka sesuai dengan ketentuan dasar desain standar serta aturan keamanan dan jaminan yang diperlukan (*‘design-to-security’*).

Sama seperti saat fase perencanaan, elemen dan prosedur organisasi guna memastikan pertahanan siber yang efektif juga harus diterapkan selama fase pelaksanaan operasi dan misi. Dengan demikian, struktur yang dikenal sebagai ‘unit siber’ harus diterapkan dalam setiap OHQ/FHQ guna memberikan penilaian berkesinambungan terhadap informasi ancaman siber yang diterima dari struktur intelijen pendukung. Unit siber harus memberikan saran bagi pembuat keputusan di HQ serta membantu dalam memberikan aksi atau reaksi yang disepakati dan sesuai. Oleh karena itu, unit tersebut memiliki tugas yang berkaitan erat dengan

pusat operasi keamanan (SOC), yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko atas jaringan misi, mengawasi jaringan, serta mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menurunkan risiko. Prosedur operasi standar (SOP) diperlukan untuk memperkuat elemen organisasi tersebut dan akan memastikan tingkat strategis serta operasional misi dan operasi dapat beraksi dan bereaksi secara tepat tanpa penundaan dan memungkinkan penerapan ‘pertahanan mendalam’.

Menurunkan risiko manusia

Aspek terpenting dalam ketahanan adalah mempersiapkan orang-orang yang terlibat. Elemen manusia adalah ‘kelemahan siber’ yang paling umum. Pada dasarnya, menurunkan risiko manusia memerlukan perubahan budaya dan perilaku dalam menangani dan bekerja dengan ICT. Perubahan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Hal ini perlu didukung oleh pengetahuan terkini dan kesadaran terhadap lingkungan ancaman melalui latihan kesadaran siber secara berkala. Selain itu, di samping pendidikan dasar bagi semua pengguna ICT dan pelatihan bagi spesialis mendalam (*‘para kutu buku’*), masih ada beragam ketentuan pelatihan tertentu, misalnya untuk penasihat siber, untuk spesialis dalam bidang ketentuan kapabilitas siber dan intelijen siber, dan khususnya untuk para pembuat keputusan serta perencana, termasuk penasihat hukum dan politik. Mereka harus mampu memahami informasi yang berkaitan dengan siber dan laporan intelijen secara mendalam serta mengetahui dampak operasi siber saat keputusan yang bersifat segera diperlukan dalam bereaksi terhadap sebuah insiden. Oleh karena itu, memberikan mereka pelatihan dan pembelajaran terkait isu-isu tersebut sangat penting, demi menjembatani ‘perbedaan pola pikir’ di antara pembuat keputusan tingkat tinggi dengan spesialis sesungguhnya, serta demi membangun keunggulan operasional yang lebih luas guna mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman dari ruang siber.



KEAMANAN DAN PERTAHANAN SIBER DALAM CSDP: LANGKAH BERIKUTNYA

Berbagai aspek terkait kapabilitas pertahanan siber yang efektif memang telah dibahas dalam Konsep Pertahanan Siber, tapi tetap harus diterapkan ke dalam paket kerja yang dapat ditindaklanjuti.

Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah **pengembangan kebutuhan yang lebih nyata** dan paket kapabilitas siber tertentu yang dapat diimplementasikan oleh penyedia potensial – tidak hanya MS, tapi juga kontraktor sipil.

Sebagai dasar atas pembentukan katalog kebutuhan kapabilitas baru dalam kerangka kerja implementasi Strategi Global, aspek siber dan lanskap ancaman perlu disertakan ke dalam skenario yang telah ada, dengan mempertimbangkan siber sebagai domain operasional.

Dampaknya, kapabilitas siber yang nyata dan detail perlu ditentukan, didukung, dan ditopang oleh kajian dari Badan Pertahanan Eropa (EDA) serta tim proyek pertahanan siber mereka.

Meskipun Konsep Pertahanan Siber yang baru telah memberikan pemahaman dasar mengenai aksi dan

reaksi yang tepat, SOP perlu dikembangkan sebagai langkah berikutnya dalam kerja sama antara EUMS dengan pemangku kepentingan operasional dari tingkat HQ.

Hal ini juga mencakup **pengembangan bisnis berkesinambungan dan rencana pemulihan**, demi memastikan operasi dapat dilanjutkan meskipun dalam kondisi lingkungan siber yang sulit dan tidak memadai.

Aspek ketiga tentunya adalah **pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran** serta penyederhanaan pendidikan pertahanan siber dan lanskap pelatihan EU.

Bidang ilmu siber Grup Kerja Pelatihan Militer EU, Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDC), dan EDA, dengan dukungan dari EUMS dan MS, sedang bekerja sama membuat inisiatif baru untuk desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi aktivitas pelatihan dan pembelajaran, mulai dari pelatihan kesadaran hingga kursus bagi pembuat keputusan tingkat tinggi.

KERJA SAMA DENGAN REKAN

Kunci dalam implementasi semua aspek tersebut adalah kerja sama dengan rekan sipil dan militer. Pakar siber dari industri dan lembaga pendidikan memang dilibatkan ke dalam proses oleh EDA dan EDSC, tapi EUMS lebih banyak berinteraksi dengan NATO jika menyangkut aspek militer pertahanan siber, meskipun hal ini masih bersifat informal. Rencana implementasi Deklarasi Bersama EU-NATO, yang diadopsi oleh keputusan Dewan pada Desember 2016 memberikan dorongan besar tidak hanya bagi penggunaan umum dan pengembangan pelatihan serta pembelajaran oleh kedua organisasi tersebut, tapi juga pertukaran dan pelibatan dalam tugas kebijakan siber serta aktivitas berbagi informasi siber guna meningkatkan sinergi, menghindari duplikasi, dan memungkinkan kedua organisasi saling memahami mekanisme satu sama lain.

Selain itu, beberapa langkah awal menuju kerja sama yang lebih erat antara keamanan dan pertahanan siber pada CSDP dengan keamanan siber pada sektor sipil (kontraterorisme dan kejahatan, energi dan penerbangan) di bawah naungan Komisi dan badan terkait, seperti Badan Keamanan Informasi dan Jaringan (ENISA) atau Pusat Kejahatan Siber Eropa di Europol (EC3) telah ditempuh, misalnya pemusatan dan latihan bersama serta menghadiri dan memberi dukungan terhadap pelatihan (seperti 'Multi Layer' dan 'Cyber Europe').

KESIMPULAN

Keberhasilan keamanan dan pertahanan siber pada operasi dan misi CSDP tetap bergantung pada kombinasi seimbang antara teknologi terkini, struktur dan prosedur yang bekerja dengan baik, serta staf yang berpendidikan, memiliki kesadaran, dan kompeten. Namun, yang terpenting adalah keberhasilan ini hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama dan perjanjian berbagi informasi, baik dengan rekan eksternal seperti NATO maupun internal seperti MS dan institusi EU. Pendekatan terintegrasi untuk melawan ancaman siber (termasuk ancaman hibrida) sangat dibutuhkan dalam menghadapi perubahan struktural mendatang serta integrasi elemen sipil dan militer dalam pengelolaan dan respon krisis. Oleh karena itu, diperlukan penggabungan antara upaya dan langkah keamanan siber dengan pertahanan siber guna meningkatkan ketahanan semua aktivitas CSDP militer dan sipil.

4.4. ANCAMAN HIBRIDA DAN CSDP

oleh John Maas

Melawan ancaman hibrida – respons Uni Eropa melalui Komunikasi Gabungan

Setahun yang lalu, istilah ‘hibrida’ baru saja masuk ke dalam kosakata Uni Eropa. Para komentator, politikus, perencana, dan lainnya telah menebak makna dari kata ‘hibrida’ yang dimaksud, tapi mereka masih belum sepenuhnya memahami sifat alami ancaman tersebut. Dalam hal reaksi, memang benar bahwa langkah pertama adalah dengan terlebih dahulu memahami fakta bahwa ancaman hibrida adalah sebuah tantangan bagi Uni Eropa, baik pada tingkat Negara Anggota maupun lembaga-lembaga di Brussel.

Penegasan terhadap makna istilah ‘hibrida’ dan ‘ancaman hibrida’: konsep ancaman hibrida berkaitan dengan penggunaan secara sengaja serta gabungan aktivitas koersif dan subversif, baik secara konvensional maupun nonkonvensional dalam lingkup diplomasi, informasi, militer, ekonomi – dengan sifat hibrida tersebut berasal dari kerja sama antara pejabat negara dan/atau bukan negara demi mencapai tujuan tertentu, sambil bersembunyi, dan tetap berada di bawah ambang batas peperangan secara resmi.

Perlu dipahami bahwa pada umumnya terdapat penekanan pada upaya mengeksploitasi kelemahan masyarakat serta menciptakan ketidakjelasan guna menghambat proses pengambilan keputusan pada tingkat politik – demi memperoleh keuntungan. Serangan yang pada umumnya berbahaya ini sering ditutupi oleh kampanye disinformasi besar-besaran menggunakan media sosial untuk mengendalikan narasi politik atau meradikalisasi, merekrut, dan mengarahkan aktor proksi yang kemudian dapat digunakan sebagai kendaraan untuk melancarkan strategi hibrida.

Untuk menanggapi tantangan ini, Negara Anggota Uni Eropa, melalui Dewan Luar Negeri dan Dewan Eropa, telah mengambil tindakan dan memberi mandat kepada Perwakilan Tinggi agar bekerja sama dengan lembaga Komisi dan Badan Pertahanan Eropa (EDA) guna mempersiapkan respons yang kredibel untuk Eropa.



Hibrida dalam ‘ancaman hibrida’ mengacu pada koordinasi antara pejabat negara dan/atau bukan negara dalam mencapai tujuan tertentu sembari tetap bersembunyi dan berada di bawah ambang batas peperangan secara resmi.

KERANGKA KERJA GABUNGAN KOMPREHENSIF

Kinerja gabungan ekstensif yang dibentuk tersebut telah menghasilkan sebuah Kerangka Kerja Gabungan Komprehensif yang menetapkan 22 proposal tindakan untuk dijalankan pada semua lingkup kompetensi Uni Eropa dalam melawan ancaman hibrida. Proposal ini berfokus pada empat elemen utama, yaitu: meningkatkan kesadaran, membangun ketahanan, pencegahan, dan menanggapi krisis.

Tujuan Uni Eropa adalah mengembangkan respons signifikan dengan prioritas nyata untuk tingkat politik dalam menanggapi perubahan besar pada lingkungan keamanan Uni Eropa, terutama di wilayah timur dan selatan. Selain itu, mengingat bahwa tantangan utama terhadap perdamaian dan stabilitas terus menuntut Uni Eropa agar beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya sebagai penyedia keamanan, penekanan pun diberikan pada hubungan erat antara keamanan eksternal dan internal, yang membutuhkan kerja sama erat dengan rekan. Karena NATO juga sedang berupaya melawan ancaman hibrida, Dewan Luar Negeri pun mengusulkan agar kerja sama EU-NATO saat ini diperkuat.



PERWAKILAN TINGGI UNI EROPA
UNTUK URUSAN LUAR NEGERI
DAN KEBIJAKAN KEAMANAN

Brussels, 6.4.2016
JOIN(2016) 18 final

KOMUNIKASI BERSAMA PADA PARLEMEN UNI EROPA DAN DEWAN

Kerangka Kerja Bersama dalam melawan ancaman hibrida

Respons Uni Eropa

MENINGKATKAN KESADARAN

Beralih ke prinsip utama kerangka kerja: metode pelaksanaan ancaman hibrida seringkali sangat sulit dideteksi, sehingga **meningkatkan kesadaran** adalah elemen penting dalam mendukung identifikasi dini terhadap perubahan pada lingkungan keamanan terkait aktivitas hibrida yang dilakukan baik oleh pejabat negara maupun bukan negara. Tindakan untuk mendukung tujuan ini telah dilakukan pada tiga area utama:

Pertama, pembentukan Satuan Gabungan Hibrida Uni Eropa, yang dibentuk di dalam Pusat Intelijen dan Situasi Uni Eropa (EU INTCEN) dan menjadi layanan satu pintu dalam mengolah informasi guna mendukung analisis terhadap potensi ancaman hibrida. Satuan ini, begitu beroperasi secara penuh, akan mampu menganalisis informasi yang secara khusus terkait dengan indikator dan peringatan mengenai ancaman hibrida untuk kemudian diinformasikan kepada pembuat keputusan strategis Uni Eropa. Hal ini juga akan membantu memberikan masukan untuk

penilaian risiko keamanan Negara Anggota Uni Eropa. Selain itu, Satuan ini berhubungan langsung dengan mekanisme Tanggap Krisis Politik Terintegrasi (IPCR) Dewan yang, melalui pertemuan berkala dengan DG Komisi, mengumpulkan 'sinyal' pada peristiwa yang sedang berlangsung dari berbagai bidang (energi, perdagangan, kompetisi, telekomunikasi, dll.), sehingga mampu mendeteksi perubahan. Sebagai contoh, jika ada satu negara yang memberikan dua sinyal atau lebih, maka hal itu akan memicu mekanisme agar meningkatkan kewaspadaan.

Elemen **kedua** berkaitan dengan komunikasi strategis. Uni Eropa dituntut memiliki kemampuan untuk menanggapi kampanye disinformasi yang dilakukan dengan sengaja, baik kepada Uni Eropa sebagai sebuah institusi maupun kepada Negara Anggotanya. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki strategi komunikasi strategis (yang memanfaatkan media sosial, juga media tradisional berbasis visual, audio, dan web, serta disampaikan oleh komunikator profesional dengan bahasa yang tepat dan kesadaran

budaya) yang tepat. Sebagai respons atas hal tersebut, dua gugus tugas – Komando Strategi Timur yang bekerja dalam bahasa Rusia dan Gugus Tugas Selatan yang membuat narasi untuk melawan Da'esh – telah dibentuk guna melawan kampanye disinformasi aktif. Produk mereka disebarluaskan melalui publikasi mingguan, yang memberi koreksi atas kekeliruan fakta, dengan dukungan dari penggunaan media modern seperti Twitter.

EU Mythbusters (@EUvDisinfo) adalah salah satu media dengan jumlah pengikut yang terus bertambah.

Ketiga, mengacu kepada pengalaman beberapa Negara Anggota dan organisasi rekan, juga untuk mengisi lubang pada tingkat strategis, Finlandia telah menerima tantangan dari Uni Eropa kepada Negara Anggota untuk mendirikan Pusat Keunggulan Eropa. Pusat ini akan didirikan pada awal 2017 serta memiliki tugas yang berpusat pada penelitian dan pelatihan mengenai cara penerapan strategi hibrida serta mendorong pengembangan konsep doktrin baru untuk membantu Negara Anggota dan sahabat meningkatkan kualitas saran bagi pembuat keputusan strategis. Hal ini diprediksi akan berujung pada kapasitas real-time guna menjalankan skenario mendesak yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam situasi yang samar akibat ambiguitas. Penelitian juga dapat memberikan kontribusi dalam menyelaraskan Uni Eropa serta kebijakan, doktrin, dan konsep nasional, juga membantu memastikan pembuat keputusan dapat memberikan respons yang lebih baik saat berhadapan dengan tantangan rumit dari ancaman hibrida yang memang dirancang untuk menciptakan ketidakpastian.

KAPASITAS BERTAHAN DARI TEKANAN DAN MEMULIHKAN DIRI

Jika kita beralih ke aksi jangka panjang, maka masih ada domain keempat, yaitu membangun ketahanan. Ketahanan dalam konteks ini adalah kapasitas untuk bertahan dari tekanan dan memulihkan diri, terutama melalui aksi setelah mengidentifikasi masalah. Untuk melawan ancaman hibrida secara efektif, maka potensi titik lemah infrastruktur kunci, rantai suplai, dan masyarakat perlu dianalisis dan titik

lemah yang ada perlu ditangani. Supaya hal tersebut dapat berhasil, pendekatan komprehensif harus diambil agar semua instrumen dan kebijakan Uni Eropa dapat diikutsertakan dan Negara Anggota mampu mendapatkan panduan terbaik dalam merancang infrastruktur utama guna memastikan peningkatan ketahanan secara menyeluruh pada Uni Eropa dan rekan-rekannya. Untuk meningkatkan kualitas lingkup kerja hal ini, beberapa langkah telah diambil demi **membangun ketahanan** dalam aspek-aspek seperti keamanan siber, perlindungan infrastruktur penting, perlindungan sistem finansial terhadap eksploitasi ilegal, serta perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan dan radikalisme. Implementasi strategi yang telah disepakati oleh institusi Uni Eropa dan penerapan undang-undang secara penuh oleh Negara Anggota menjadi kunci sukses dalam setiap aspek tersebut.

Badan Pertahanan Eropa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong bentuk lain dari ketahanan – yaitu membangun kapabilitas pertahanan. Uni Eropa harus dapat mengikuti perkembangan inovasi teknologi agar kapasitasnya sebagai penyedia pertahanan dan keamanan tetap relevan dalam dunia yang terus berubah secara drastis dan cepat ini. Saat ini, Uni Eropa dianggap mampu memainkan peran penting dalam membantu Negara Anggota mengembangkan kapabilitas yang akan diperlukan di masa mendatang untuk melawan semua potensi ancaman. Langkah pertama adalah dengan mengidentifikasi bidang kapabilitas utama yang relevan pada pengawasan dan pengintaian sebagai bidang katalis untuk pengembangan kapabilitas militer di masa depan. Kemajuan teknologi juga dapat didukung dengan cara memangkas siklus pengembangan kapabilitas, fokus pada investasi purwarupa teknologi, serta mendorong inovasi dan teknologi komersial yang inovatif. Jika menyangkut pembangunan ketahanan terhadap serangan hibrida, seringkali operator komersial memiliki praktik terbaik yang telah dikembangkan melalui pengalaman selama bertahun-tahun dan dapat digunakan oleh Uni Eropa alih-alih mencari solusi militer. Salah satu contohnya adalah aspek keamanan siber.

KEAMANAN SIBER

Meskipun Uni Eropa sangat diuntungkan oleh masyarakatnya yang saling terhubung dan terdigitalisasi – yang dianggap sebagai kekuatan utama dan pendorong ekonomi – mereka tetap harus waspada terhadap ketergantungan yang berlebihan. Konektivitas yang menggerakkan masyarakat Uni Eropa adalah sebuah titik pusat dan dapat menjadi sasaran empuk serangan hibrida. Oleh karena itu, keamanan siber yang kuat menjadi sangat penting dalam melawan ancaman hibrida. Meningkatkan ketahanan sistem komunikasi dan informasi di Eropa adalah hal yang sangat penting dalam mendukung pasar tunggal digital. Strategi Keamanan Siber Uni Eropa dan Agenda Eropa di Bidang Keamanan memberikan kerangka kerja strategis yang menyeluruh untuk inisiatif Uni Eropa dalam keamanan dan kejahatan siber. Selain itu, Uni Eropa juga sangat aktif dalam mengembangkan kesadaran Negara Anggota dan membangun kerja sama antarmekanisme.

Namun, dalam dunia masa kini yang saling terhubung, Uni Eropa tidak dapat bekerja sendiri. Ada ketergantungan bawaan terhadap negara sahabat dan tetangga, baik melalui ikatan ekonomi global, aktivitas berbagi sumber daya, maupun sekadar keterkaitan budaya. Oleh karena itu, jika melihat wilayah di sekitar Eropa, maka sangat penting untuk membangun kapasitas di **negara sahabat** dalam sektor keamanan. Uni Eropa sedang secara aktif mengembangkan dimensi keamanan pada revisi Kebijakan Eropa untuk Negara Tetangga melalui pendekatan holistik dengan cara membangun keterkaitan antara keamanan dan pembangunan.

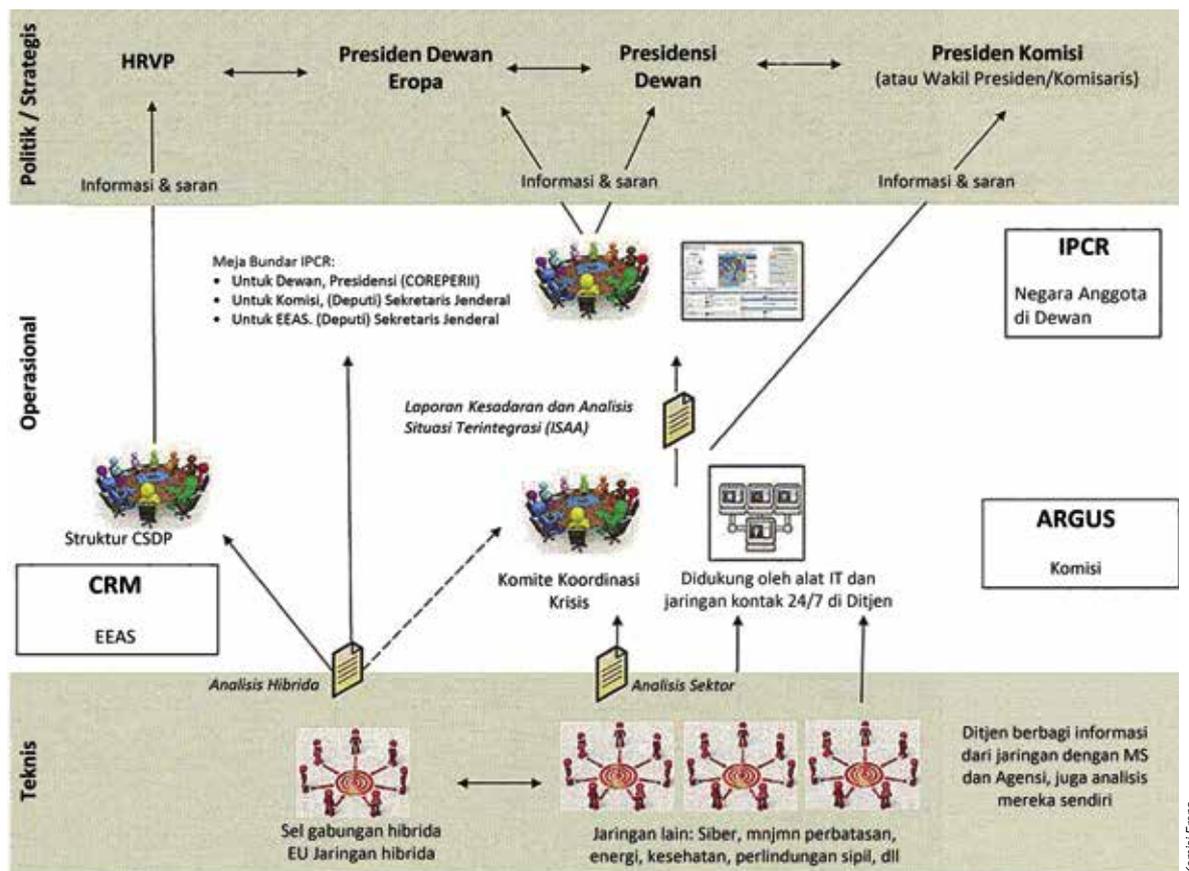
Terkait hal ini, Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) dapat menawarkan sarana untuk digunakan dalam misi dan operasi, baik untuk melengkapi instrumen Uni Eropa lain yang telah diterjunkan maupun untuk digunakan secara terpisah. Beberapa contohnya adalah dukungan penasihat bagi kementerian kunci yang berada di bawah tekanan akibat ancaman hibrida atau dukungan tambahan bagi badan pengelola perbatasan yang memiliki risiko kewalahan akibat situasi genting yang direkayasa.

KLAUSUL GOTONG ROYONG DAN KLAUSUL SOLIDARITAS

Mari kita kembali ke permasalahan terkait **mencegah, menanggapi, dan memulihkan diri dari ancaman hibrida**. Salah satu proposal yang dapat ditindaklanjuti adalah meninjau kelayakan penerapan Klausul Solidaritas pada Pasal 222 TFEU (seperti dijelaskan dalam Putusan terkait) dan Pasal 42(7) TEU saat terjadi serangan hibrida serius dalam skala besar – serta secara khusus meninjau potensi tindakan Uni Eropa dalam memberikan bantuan kepada Negara Anggota yang membutuhkannya.

Tahap awal pengembangan protokol operasional Uni Eropa telah dilakukan. Diagram alir yang sederhana bertujuan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara mekanisme respons Uni Eropa yang sudah dikembangkan dengan baik, tapi seringkali terlalu beragam. Sasarannya juga sederhana, yaitu menghubungkan informasi dan analisis informasi agar dapat diberikan secara cepat dan akurat ke pembuat keputusan, baik di Komisi maupun di Dinas Luar Negeri. Penerapan protokol bersama ini dapat mempersingkat waktu yang diperlukan sejak identifikasi awal potensi ancaman hingga pengambilan keputusan dalam memberikan reaksi. Tidak hanya itu, protokol ini juga menggarisbawahi metode untuk meningkatkan koordinasi antarstruktur, meningkatkan penyatuan intelijen dan analisis guna memberikan informasi yang lebih baik kepada tingkat politik, operasional, dan teknis yang berwenang dalam membuat rekomendasi kebijakan.





Pembentukan Satuan Gabungan Hibrida Uni Eropa menawarkan layanan satu pintu dalam mengolah informasi guna mendukung analisis terhadap potensi ancaman hibrida.

Koordinasi pengelolaan krisis di Uni Eropa terbagi menjadi tiga tingkat: politik, operasional, dan teknis. Koordinasi tersebut menangani siklus utuh pengelolaan krisis: pencegahan/pengurangan, persiapan, respons, dan pemulihan. Prosedur khusus mengatur implementasi sistem Komisi (ARGUS), rencana Dewan (IPCR), dan Mekanisme Tanggap Krisis (CRM) EEAS. Dalam CRM, titik masuk yang telah teridentifikasi memungkinkan kerja sama dengan pejabat EU dan rekan internasional. Prosedur pengelolaan krisis ini akan diterapkan sesuai kebutuhan saat konsultasi luas/darurat mengenai ancaman hibrida diperlukan di antara berbagai dinas Komisi, EEAS, dan lembaga Uni Eropa.

Uni Eropa juga mungkin perlu mengambil langkah tepat dalam fase pra-krisis, mengingat ancaman hibrida biasanya ditujukan dan dirancang untuk tetap berada di bawah ambang batas aktivitas yang dapat memicu krisis secara jelas. Bagan terlampir menunjukkan inter-

aksi yang diperlukan untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik dan mempersingkat waktu pengambilan keputusan.

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Dewan akhirnya mengusulkan **peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Uni Eropa dengan NATO** dalam upaya bersama melawan ancaman hibrida, khususnya karena kedua organisasi ini menganut nilai dan menghadapi tantangan yang serupa. Baik Negara Anggota Uni Eropa maupun NATO sama-sama mengharapkan dukungan dari organisasi sahabat saat terjadi krisis, melalui tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dalam dunia yang sempurna, mereka pasti mampu mencegah krisis terjadi.

Oleh karena itu, respons secara efektif menuntut dialog aktif serta koordinasi erat di antara kedua orga-

nisasi, baik pada tingkat politik maupun operasional. Interaksi yang lebih dekat antara Uni Eropa dengan NATO akan meningkatkan kemampuan kedua organisasi tersebut dalam mempersiapkan dan merespons ancaman hibrida secara efektif dengan cara yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

Kerja sama ini perlu didasarkan atas prinsip inklusivitas dengan menghormati otonomi dalam pengambilan keputusan serta aturan perlindungan data pada masing-masing organisasi. Uni Eropa dan NATO telah menunjukkan kerja sama yang lebih erat pada tingkat tertinggi dalam beberapa aspek.

Aspek-aspek tersebut mencakup kesadaran situasional, komunikasi strategis, keamanan siber, serta pencegahan dan respons krisis.

Selain itu, kedua organisasi itu juga memiliki kesepakatan politik yang menyatakan bahwa mereka perlu melakukan tindakan paralel dan terkoordinasi yang diatur dalam kerangka kerja kooperatif.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, respons Uni Eropa terhadap ancaman hibrida sangat bergantung pada kesediaan Negara Anggota dalam berbagi sinyal yang mereka deteksi dan kerentanan mereka; Poin umumnya, yang perlu dipahami semua orang, adalah bahwa melawan ancaman hibrida mengharuskan semua orang melakukan pendekatan intelektual yang berbeda-beda dalam isu keamanan. Pemisahan tradisional seperti internal dan eksternal, sipil dan militer, publik dan swasta, dalam pendekatan Uni Eropa terhadap permasalahan keamanan dan pertahanan tidak lagi dapat dilakukan, sehingga diperlukan langkah perubahan dalam pola pikir. Strategi Global Eropa telah cukup berhasil memperbarui pemikiran mengenai keamanan dan pertahanan di Eropa. Selain itu, Komunikasi Gabungan dalam Melawan Ancaman Hibrida merepresentasikan langkah awal menuju Eropa yang lebih aman. Meski begitu, ada masih banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk mempersiapkan semua orang yang bekerja di institusi Uni Eropa atau bertugas dalam delegasi misi dan operasi yang menghadapi ancaman hibrida secara nyata. Mereka semua ikut berperan dalam upaya mendukung pembentukan masyarakat yang lebih aman.

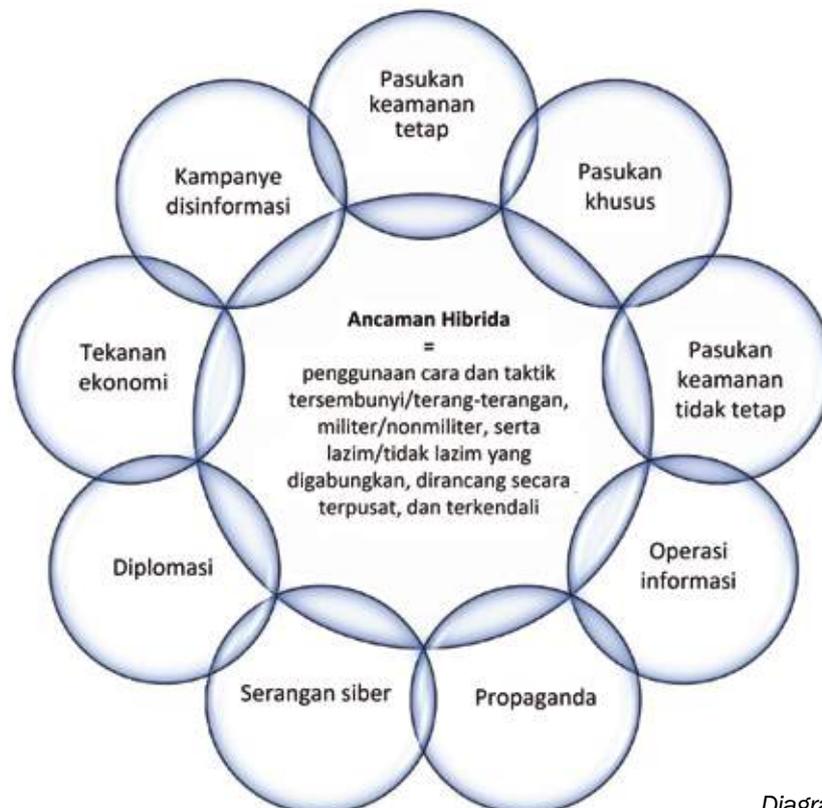


Diagram: Jochen Rehr

5 ISU-ISU PENTING DALAM CSDP

5.1. GENDER DAN PEREMPUAN, PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DALAM CSDP

oleh Taina Järvinen



Uni Eropa/EUPOL Afghanistan

Masyarakat dengan kesetaraan gender yang tinggi cenderung lebih stabil dibandingkan masyarakat dengan jurang kesetaraan gender yang luas.

Perempuan dan laki-laki, baik anak-anak maupun dewasa, mengalami dan merasakan dampak konflik bersenjata secara berbeda. Kekerasan, penggusuran, gangguan pada layanan pendukung, kerapuhan ekonomi, dan kehancuran struktur sosial serta lembaga hukum dan keamanan adalah beberapa akibat jangka panjang yang harus dialami oleh orang-orang pada masa sesudah konflik. Setiap akibat tersebut memiliki dimensi gender.

Intervensi internasional, dalam bentuk misi pengelolaan krisis atau program rekonstruksi pascakonflik, perlu diterapkan dengan memperhatikan isu gender, sehingga langkah yang diambil tidak bersifat diskriminatif serta tidak memperburuk ketidakadilan yang telah terjadi, melainkan menguntungkan baik laki-laki maupun perempuan.

DEFINISI GENDER

Gender mengacu kepada atribut dan peluang sosial yang berkaitan dengan menjadi laki-laki dan perempuan serta hubungan antara perempuan dan laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, juga antara sesama perempuan dan sesama laki-laki. Atribut, peluang, serta hubungan ini terkonstruksi secara sosial dan dipelajari melalui proses sosialisasi. Ketiganya berlaku pada konteks dan waktu tertentu serta dapat berubah.

(Institut Kesetaraan Gender Eropa, EIGE).



Uni Eropa/EULEX Kosovo, Enisa Kaserni

Tujuan utama kebijakan pengintegrasian gender CSDP adalah kesetaraan gender, salah satu nilai utama Uni Eropa.

KEBIJAKAN GENDER EU

Kebijakan gender EU dalam aspek pengelolaan krisis disusun berdasarkan konsep integrasi, yaitu memadukan perspektif gender secara sistematis ke dalam seluruh area CSDP, mulai dari perencanaan serta implementasi misi dan operasi hingga pelaporan, evaluasi, pelatihan, dan pengajaran. Tujuan utama kebijakan pengintegrasian gender CSDP adalah kesetaraan gender, salah satu nilai utama Uni Eropa yang dilindungi dalam Perjanjian Uni Eropa. Aksi eksternal EU, termasuk CSDP, menjadikan nilai utama serta prinsip Uni Eropa sebagai panduan.

Mendorong kesetaraan gender dapat membantu stabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan kesetaraan gender yang tinggi cenderung lebih stabil dibandingkan masyarakat dengan jurang kesetaraan gender yang luas. Serupa dengan hal tersebut, ketidaksetaraan gender berkaitan erat dengan konflik bersenjata. Contohnya, kecuali satu negara, semua negara dalam sepuluh peringkat terbawah indeks ketidaksetaraan gender (GII) Program Pembangunan UN mengalami atau baru saja keluar dari konflik (HDR 2015).

PENGINTEGRASIAN GENDER

Pengintegrasian gender juga diterapkan untuk alasan efektivitas operasional. Hal ini didasari atas alasan bahwa menerapkan perspektif gender akan meningkatkan kapasitas pengelolaan krisis EU dengan cara memobilisasi sumber daya tambahan dan mengeksploitasi potensi penuh sumber daya manusia yang tersedia. Selain itu, hal ini juga akan menambah efektivitas misi terkait penerapan perdamaian dan keamanan serta penguatan nilai demokrasi (11932/2/05). Alasan pragmatis lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran situasional dan menjangkau populasi sipil negara tuan rumah, khususnya pada isu yang berkaitan dengan konflik kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender.

Dokumen kunci baru yang menyediakan kerangka kerja kebijakan komprehensif bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam aktivitas eksternal EU adalah Rencana Aksi Gender (GAP) EU untuk 2016-2020. Dokumen tersebut memperbarui komitmen EU terhadap kesetaraan gender, hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, serta penghapusan kekerasan berbasis gender.



Keseimbangan gender dalam misi CSDP

oleh Maline Maiske

Pada Oktober 2015, Dewan Keamanan PBB melakukan Tinjauan Tingkat Tinggi untuk menilai progres implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Tinjauan tersebut memberi peluang untuk melihat sejauh apa perkembangan dan progres yang dihasilkan dalam konteks CSDP. Memastikan partisipasi perempuan dalam operasi manajemen krisis CSDP masih menjadi tantangan utama, khususnya dalam operasi militer. Upaya di tingkat EU sendiri belum mencukupi, dan hanya bisa berhasil jika diringi dengan upaya dari negara-negara anggota.

EU makin menyadari bahwa manajemen konflik dan krisis bukanlah urusan netral gender, dan telah mengeluarkan banyak kebijakan dan inisiatif gender untuk mencapai tujuan UNSCR 1325. Frasa utamanya adalah 'pengarusutamaan gender', yaitu proses penilaian implikasi setiap tindakan yang direncanakan untuk laki-laki dan perempuan, yang mencakup perwakilan sebanding dari kedua gender dalam operasi resolusi konflik dan manajemen krisis (juga disebut 'penyeimbangan gender').

Peningkatan partisipasi perempuan dimulai dari isu hak kesetaraan, namun hal ini telah berkembang menjadi argumen fungsionalis mengenai peningkatan efektivitas operasional manajemen krisis dan keberlanjutan resolusi konflik. Perwakilan personel perempuan yang cukup dianggap dapat membantu memerangi kekerasan seksual, mengampayekan kesadaran gender di negara tuan rumah, dan mempererat hubungan antara penjaga perdamaian dan penduduk lokal.

Dengan dirilisnya data yang memisahkan gender secara bertahap mengenai partisipasi perempuan dalam operasi manajemen krisis, studi tentang keseimbangan gender dan dampaknya terhadap efektivitas operasi pun meningkat. Data EEAS mengenai 16 misi sipil CSDP antara 2007 dan 2013 mengungkapkan adanya peningkatan partisipasi perempuan, yang menunjukkan bahwa kebijakan dan inisiatif gender berhasil. Secara keseluruhan, proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam misi sipil CSDP meningkat dari 20% menjadi 26% dan jumlah absolut personel sipil perempuan meningkat dari 240 menjadi 869.

Untuk operasi militer CSDP, tidak diperoleh data yang memisahkan gender. Ini menjadi kekurangan yang sedang dalam proses untuk dibahas. Meski demikian, Staf Militer EU memperkirakan bahwa hanya ada 3%-8% personel perempuan yang ditugaskan dalam operasi militer CSDP.

Perhatikan kesenjangan ini

Untuk mengetahui mengapa perempuan kurang terwakili dalam misi dan operasi CSDP, metode perekrutan harus dikaji. Personel utamanya disediakan melalui penugasan nasional. Artinya, kewenangan pengambilan keputusan dalam proses alokasi ada di tangan masing-masing negara anggota. Karakteristik dasar dari masing-masing negara menentukan partisipasi perempuan dalam

Sejak itu, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi enam resolusi lain: 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, dan 2242. Kedelapan resolusi ini menjadi dasar dari agenda tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan.

Uni Eropa sangat mendukung agenda tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Uni Eropa telah secara konsisten mengajak implementasi penuh agenda tersebut, sambil menekankan perlunya melawan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik serta mendorong kesetaraan dan partisipasi penting perempuan dalam mencegah dan mengakhiri konflik, negosiasi perdamaian, membangun perdamaian, menjaga perdamaian, respons kemanusiaan, serta rekonstruksi pascakonflik.

IMPLEMENTASI AGENDA PEREMPUAN, PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN

Dokumen kunci EU dalam mengimplementasikan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan (WPS) adalah '*Pendekatan Komprehensif Implementasi EU terhadap UNSCR 1325 dan 1820 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan*' (15671/1/2008).

Dokumen ini menawarkan pendekatan holistik yang mengakui kaitan erat antara perdamaian, keamanan, pembangunan, dan kesetaraan gender serta menyertakan daftar instrumen aksi eksternal EU. Dokumen panduan '*Implementasi UNSCR tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam misi dan operasi CSDP*' (dokumen PSC 7109/2012) menitikberatkan pada implementasi agenda WPS dalam misi CSDP.

Pada 2010, EU mengadopsi 17 indikator guna mengidentifikasi kemajuan serta jurang dalam implementasi berdasarkan Pendekatan Komprehensif; lima di antaranya secara khusus difokuskan pada CSDP.

Indikator tersebut direvisi pada 2016 (12525/16) dan digabungkan ke dalam empat topik tematis: pencegahan, partisipasi, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan.

Langkah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan pada tahun 2000 untuk pertama kalinya menggarisbawahi hak wanita dan kesetaraan gender sebagai faktor kunci dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas internasional. Hal ini diikuti oleh Resolusi 1820 (2008), yang menitikberatkan pada kekerasan seksual sebagai taktik perang serta potensinya sebagai kejahatan perang.

Artikel lengkap dapat dilihat di:
<http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/gender-balancing-in-csdp/>

UNSCR 1325 TENTANG PEREMPUAN, PERDAMAIAN, DAN KEAMANAN

5.2. HAK ASASI MANUSIA DAN CSDP

oleh Taina Järvinen



Uni Eropa/EUTM Mali

Pelatihan hukum kemanusiaan internasional pada Misi Pelatihan EU di Mali.

Dalam konteks Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP), peningkatan dan perlindungan hak asasi manusia serta pemerintahan berdasar hukum dianggap menjadi faktor penting dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan.

Selama bertahun-tahun, EU telah menugaskan berbagai misi yang berpusat pada mengembangkan kapasitas, melatih, serta memberikan saran dan dukungan bagi reformasi sektor keamanan atau institusi lainnya dalam situasi pascakonflik yang menyertakan hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya rekonstruksi secara luas.

Namun, semakin banyak misi CSDP yang beroperasi di wilayah konflik yang kompleks dan berbahaya, negara dengan institusi nasional yang rapuh atau bahkan tidak ada, serta warga sipil yang sering menjadi sasaran disengaja oleh kelompok bersenjata

– sebuah indikasi jelas pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.

KERANGKA KERJA NORMATIF

Uni Eropa berkomitmen mendorong dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Pembangunan kebijakan hak asasi manusia EU dalam aksi eksternal, termasuk CSDP, memiliki dasar normatif yang kuat. Hak asasi manusia, demokrasi, pemerintahan berdasar hukum, serta prinsip kesetaraan dan solidaritas adalah prinsip dasar EU yang tercantum dalam Perjanjian Uni Eropa (TEU). Sesuai dengan Pasal 21 TEU, EU menjadikan prinsip tersebut sebagai panduan serta tujuan dalam setiap aksi eksternal mereka. Selain itu, Pasal 21 TEU menempatkan



Uni Eropa/EUCAP Sahel Niger

Pelatihan hak asasi manusia pada Misi Pembangunan Kapasitas EU di Niger.

aktivitas eksternal EU dalam kerangka kerja normatif internasional yang lebih luas dengan menyertakan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional di antara prinsip-prinsip panduan. Dengan kata lain, meskipun mandat misi CSDP tidak secara langsung menyebutkan tentang hak asasi manusia, misi tersebut beroperasi dalam kerangka kerja internasional dan standar hak asasi manusia EU serta secara tidak langsung bertujuan mendorong hak asasi manusia.

PENINGTEGRASIAN HAK ASASI MANUSIA

Pada masa awal, EU mengadopsi kebijakan pengintegrasian demi memastikan implementasi komitmen hak asasi manusia secara efektif pada CSDP.

Pada 2006, Komite Politik dan Keamanan mendukung sebuah tulisan ilmiah berjudul 'Peningtegrasian Hak Asasi Manusia ke dalam ESDP' (11936/4/06). Dokumen tersebut menjabarkan prinsip dasar pengintegrasian hak asasi manusia

dalam CSDP dan berisi daftar sejumlah langkah implementasi untuk misi, Anggota Negara, dan Komisi, yang mencakup:

- memastikan markas pusat dan misi memiliki pakar hak asasi manusia yang diperlukan;
- memberikan pelatihan hak asasi manusia kepada personel misi;
- mengintegrasikan aspek hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya penguatan atau bantuan teknis yang diberikan dalam konteks misi dan operasi;
- memastikan prosedur pelaporan khusus misi yang sesuai dan mengintegrasikan pembelajaran aspek hak asasi manusia dalam misi dan operasi;
- bekerja sama dengan pemangku kepentingan internasional lainnya.

Dalam konteks operasi dan misi CSDP, pengintegrasian hak asasi manusia berarti aspek hak asasi manusia diintegrasikan secara sistematis ke dalam seluruh tahapan misi dan operasi CSDP, mulai dari tahap perencanaan hingga peninjauan.

Kebijakan pengintegrasian harus memperhatikan secara serius kebutuhan dan situasi anak-anak serta kelompok rentan lainnya yang terdampak oleh konflik bersenjata.

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN KOHERENSI

Uni Eropa kembali memastikan komitmennya terhadap hak asasi manusia pada 2012 saat Dewan mengadopsi sebuah paket berjudul ‘Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Kerangka Kerja Strategis EU dan Rencana Aksi EU’. Rencana aksi kedua mengenai hak asasi manusia dan demokrasi untuk periode 2015-2020 diadopsi pada tahun 2015. Kerangka kerja strategis dan rencana aksi yang mengikutinya bertujuan meningkatkan efektivitas dan koherensi kebijakan EU melalui penetapan tujuan, prinsip, dan prioritas, serta memastikan pendekatan komprehensif terhadap pencegahan dan penanganan konflik dan krisis.

MENINGTEGRASIKAN HAK ASASI MANUSIA KE DALAM CSDP – SEBUAH TINJAUAN

EU telah berhasil membuat kemajuan pesat dan banyak langkah yang dijabarkan pada dokumen tahun 2006 telah berhasil diterapkan dalam sepuluh tahun terakhir ini. EU dan para Negara Anggota telah mengadopsi kebijakan baru dan mengembangkan kumpulan panduan, daftar periksa, buku pegangan, serta alat-alat lainnya guna mengintegrasikan hak asasi manusia dan aspek lain yang terkait dengan hak asasi manusia, seperti keadilan transisional dan hukum kemanusiaan internasional, ke dalam CSDP.

Aspek-aspek hak asasi manusia telah diintegrasikan ke dalam prosedur pengelolaan krisis tahun 2013. Selain itu, jumlah pakar serta sumber daya terkait hak asasi manusia juga telah ditingkatkan. Penasihat hak asasi manusia atau petugas pusat kontak hadir dalam sebagian besar misi dan operasi CSDP. Selain itu, komponen hak asasi manusia disertakan

dalam kursus pelatihan CSDP yang diadakan oleh berbagai Negara Anggota di bawah kerangka kerja Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDC). Pelatihan khusus mengenai hak asasi manusia, gender, anak-anak dan konflik bersenjata, perlindungan warga sipil dan pencegahan konflik juga tersedia melalui inisiatif ESDC dan Negara Anggota lain.

Namun, setelah sepuluh tahun, kita perlu meninjau kemajuan yang telah dibuat dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Pada April 2015, 20 Negara Anggota mengajukan surat tak resmi yang mendorong EU agar meningkatkan upayanya dalam mengintegrasikan hak asasi manusia, gender, perempuan, perdamaian, dan keamanan ke dalam CSDP. Pada Mei 2015, Dewan menyambut inisiatif atas kajian garis dasar yang akan memungkinkan kemajuan serta penerapan hak asasi manusia, gender, dan bidang terkait lainnya menjadi dapat diukur dari waktu ke waktu. Menjawab hal tersebut, EEAS pun menjalankan kajian garis dasar mengenai integrasi hak asasi manusia dan gender ke dalam CSDP pada tahun 2016. Dua puluh satu garis dasar dikembangkan berdasarkan komitmen kebijakan yang telah ada untuk pengintegrasian hak asasi manusia, gender, Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325, dan perlindungan terhadap anak-anak terdampak konflik bersenjata ke dalam misi CSDP.

Kajian tersebut menitikberatkan pada hak asasi manusia dan gender karena kebijakan CSDP telah secara konsisten mendorong hak asasi manusia dan gender. Namun, terdapat upaya untuk memisahkan hak asasi manusia dari gender untuk membedakan kepentingan yang saling melengkapi dalam CSDP, yaitu hak asasi manusia pada satu sisi, serta gender dan UNSCR 1325 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan pada sisi lainnya.

Laporan akhir kajian garis dasar tersebut disetujui oleh Perwakilan Tinggi dan diserahkan kepada Dewan pada Desember 2016. Hasil temuan dan rekomendasi kajian tersebut akan memberikan dasar informasi guna meningkatkan integrasi hak asasi manusia ke dalam CSDP.

5.3. PEMERINTAHAN BERDASAR HUKUM DAN CSDP

oleh Daphne Lodder



Uni Eropa/EULEX Kosovo, Enisa Kasenthi

Pemerintahan berdasar hukum adalah prinsip pemerintahan dengan semua orang, institusi dan lembaga, baik umum maupun swasta, termasuk negara, bertanggung jawab di bawah hukum yang diterbitkan secara umum, ditegakkan, dan diputuskan secara independen.

Pasal 2 Perjanjian Uni Eropa (TEU, Lisboa, 2009) menyatakan bahwa:

‘Uni Eropa dibentuk atas dasar nilai-nilai yang menghormati martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, pemerintahan berdasar hukum, dan hak asasi manusia [...]. Nilai-nilai ini adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat para Negara Anggota yang menegakkan pluralisme, non-diskriminasi, toleransi, keadilan, solidaritas, serta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.’

Pasal 3(1) TEU menyatakan bahwa:

‘Tujuan Uni Eropa adalah mengedepankan perdamaian, nilai-nilai yang dianutnya, serta kesejahteraan rakyatnya,’ yang ditambahkan oleh Pasal 3(5) *‘Dalam berhubungan dengan dunia yang lebih luas, Uni Eropa hendaknya menegakkan dan mengedepankan nilai-nilai yang dianutnya*

[...]. Uni Eropa wajib berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan [...] (dan) perlindungan hak asasi manusia [...].’

Pasal 21 TEU menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi landasan kebijakan luar negeri EU serta memperluas nilai-nilai yang dianut oleh Negara Anggota, yang menjadi landasan Uni Eropa, ke aksi eksternal yang bertujuan menegakkan dan mengedepankan nilai-nilai berikut secara adil:

‘Tindakan Uni Eropa dalam ranah internasional wajib dipandu oleh prinsip-prinsip yang memicu pembentukan, pengembangan, dan pertumbuhan prinsip-prinsip tersebut, serta perluasannya pada bidang yang lebih luas: demokrasi, pemerintahan berdasar hukum, keseragaman dan ketak-terpilahan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sikap menghormati martabat manusia, prinsip kesetaraan dan

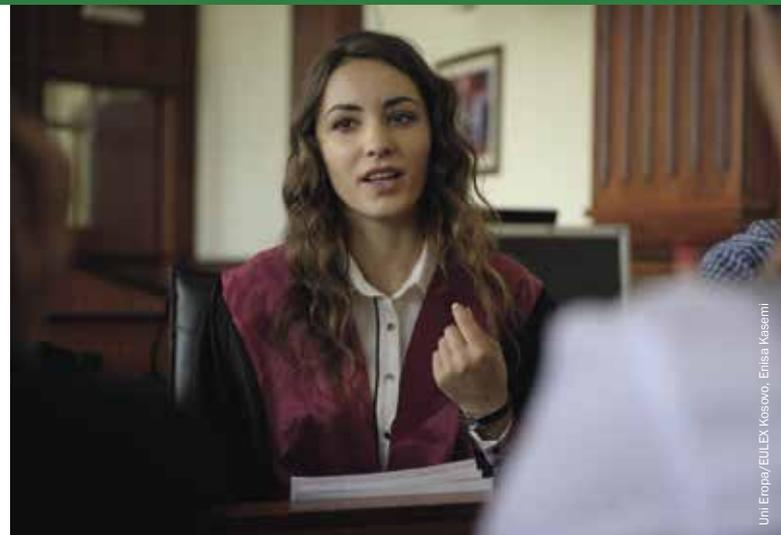
solidaritas, serta sikap menghormati prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Lebih jauh lagi: *'Uni Eropa wajib menetapkan dan mengupayakan kebijakan serta tindakan bersama, juga wajib mengusahakan [...] kerja sama dalam semua bidang hubungan internasional'*, (Pasal 21(2) TEU) untuk *'memperkuat dan mendukung demokrasi, pemerintahan berdasar hukum, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum internasional.'* (Pasal. 21(3)(b) TEU).

Penegakan pemerintahan berdasar hukum memberikan dua dampak pada EU: sebagai nilai dasar dan nilai bersama (dimensi internal) serta sebagai prinsip yang memandu aksi internasional (dimensi eksternal). Kedua dimensi tersebut – seperti juga disebutkan dalam Strategi Global EU¹ – menjadi semakin berkaitan satu sama lain: hal ini terlihat jelas pada hubungan antara keamanan internal dan eksternal, yang menekankan bahwa keamanan di rumah kita *'melibatkan kepentingan paralel terkait perdamaian di wilayah sekitar serta sekeliling kita'*.²

PEMERINTAHAN BERDASAR HUKUM SEBAGAI PRINSIP PEMERINTAHAN

Pemerintahan berdasar hukum adalah prinsip pemerintahan³ dengan semua orang, institusi dan lembaga, baik umum maupun swasta, termasuk negara, bertanggung jawab di bawah hukum yang diterbitkan secara umum, ditegakkan secara adil, dan diputuskan secara independen, serta sesuai dengan norma dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara internasional. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan prinsip keadilan yang melibatkan prinsip pertanggungjawaban dan kesamarataan dalam hal perlindungan dan pembuktian kebenaran serta pemberian hukuman bagi kesalahan.⁴

Hal dasar yang ditekankan dalam pemerintahan berdasar hukum adalah keadilan, yang bertujuan menghadapi kejahatan perang serta korupsi yang mengancam stabili-



Uni Eropa/EULEX Kosovo, Enisa Kaseimi

Simulasi persidangan yang dilakukan oleh EULEX untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pristina.

tas negara yang baru keluar dari konflik. Badan peradilan yang independen adalah faktor penting dalam penerapan keadilan tersebut, sehingga konsep pemerintahan berdasar hukum yang modern – lebih luas – seperti dijelaskan di atas juga melibatkan badan eksekutif (terutama kepolisian) dan legislatif otoritas sebuah negara. Namun, di samping keterkaitan antara *'pemerintahan berdasar hukum'* dan *'keadilan'*, pada umumnya kedua istilah tersebut sering digunakan sebagai sinonim: istilah pemerintahan berdasar hukum sering digunakan dalam arti *'sistem keadilan/peradilan'*, atau mengacu pada *'rantai keadilan'* (kriminal) yang tersusun atas kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Paragraf selanjutnya akan menjelaskan makna pemerintahan berdasar hukum dalam konteks CSDP.

Dalam hubungan antara hak asasi manusia dengan pemerintahan berdasar hukum, hak asasi manusia berkaitan dengan hakikat hak dan kebebasan, sedangkan pemerintahan berdasar hukum berkaitan dengan upaya perlindungan serta penegakan yang adil dan efektif. Atau, seperti dinyatakan dalam pendahuluan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, *'hak asasi manusia wajib dilindungi oleh pemerintahan berdasar hukum.'* Selain itu, Reformasi Sektor Keamanan (SSR)⁵ dan pemerintahan berdasar hukum juga memiliki

1 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy (Visi Bersama, Aksi Bersama: Eropa yang Lebih Kuat – Strategi Global untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa), Juni 2016 (EUGS).

2 EUGS, hal. 14.

3 EU telah mengadopsi definisi tersebut seperti dinyatakan dalam laporan UN tahun 2004 S/2004/616*, 23 Agustus 2004: *'Pemerintahan berdasar hukum dan keadilan transisional dalam masyarakat konflik dan pascakonflik'*, Laporan Sekretaris Jenderal.

4 Lihat EU Concept for CSDP Justice Missions (within the Rule of Law framework), Council of the European Union, Brussels (Konsep EU atas Misi Peradilan CSDP (dalam kerangka kerja Pemerintahan Berdasar Hukum), Dewan Uni Eropa, Brussels), 20 Desember 2010, 18173/10, hal. 13.

5 Konsep dan proses SSR akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya buku pegangan ini (5.4).

hubungan penting, karena SSR ditujukan untuk secara bertahap memberikan keamanan yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan bagi perseorangan dan negara dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, demokrasi, pemerintahan berdasar hukum, serta prinsip pemerintahan yang baik.⁶

PRINSIP DAN KONSEP EU YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAHAN BERDASAR HUKUM DALAM MISI CSDP

Pada pertemuan Dewan Eropa tahun 2000 di Feira, ‘Pemerintahan Berdasar Hukum’ ditetapkan sebagai salah satu dari empat aspek prioritas dalam pengelolaan krisis sipil bersama kepolisian, administrasi sipil, dan perlindungan sipil – dengan demikian menyamai ‘(reformasi) keadilan’ dalam makna terbarunya. Namun, setelah keputusan Dewan tentang pelaksanaan Strategi Global EU dalam bidang Keamanan dan Pertahanan⁷ diadopsi, timbul usulan untuk meninjau aspek prioritas misi CSDP sipil dengan tujuan meningkatkan prioritas politik serta guna memberikan respons yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di masa kini dan masa mendatang. Peninjauan ini perlu mengidentifikasi nilai tambah yang dapat dimasukkan ke dalam CSDP dan sesuai dengan pendekatan komprehensif EU selama keseluruhan siklus konflik.⁸ Peninjauan prioritas juga dapat menjadi peluang bagus dalam memperjelas konsep ‘pemerintahan berdasar hukum’ dan ‘keadilan’ serta cara penerapannya dalam konteks CSDP. Terkait konteks ini, peninjauan terhadap konsep EU yang telah ada juga dapat dipertimbangkan, terutama konsep yang terkait dengan misi penguatan kepolisian dan misi peradilan⁹ (seperti dijelaskan dalam artikel ini).

Konsep EU untuk misi CSDP mencakup fungsi negara yang berbeda-beda serta bidang kebijakan dalam aspek pemerintahan berdasar hukum yang lebih luas, seperti kepolisian dan peradilan, administrasi sipil, kepabeanan, pengelolaan perbatasan, antikorupsi, hak asasi manusia,

dan gender. Konsep-konsep tersebut perlu dipahami bersama ‘konsep inti’, yaitu ‘Konsep EU untuk Misi Peradilan CSDP (dalam Kerangka Kerja Pemerintahan Berdasar Hukum)’ (18173/10).

Tujuan perancangan, perencanaan, serta pelaksanaan misi CSDP, seperti dijelaskan dalam konsep tersebut adalah memastikan institusi yang berkelanjutan, transparan, efektif, dan bertanggung jawab di negara tuan rumah, dibentuk secara demokratis, bebas dari korupsi, menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, berjalan dalam kerangka kerja legal yang koheren, disusun melalui proses legislatif yang adil, serta sejalan dengan norma dan standar internasional. Institusi tersebut wajib menyertakan sistem peradilan yang independen dan tidak memihak, dengan kemampuan untuk mengakses, tanpa dipersulit, guna menghadapi – tanpa rasa takut atau keberpihakan – warisan masa lalu dan kebutuhan masa kini, berdampingan dengan mekanisme penyelesaian masalah non-formal atau alternatif. Jika ingin mengedepankan standar dan konsep tersebut, maka penting bagi misi CSDP untuk beroperasi dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku serta standar profesional dan perilaku. Bentuk pertanggungjawaban internal yang kuat adalah Kode Etik dan Disiplin, yang diterapkan oleh semua misi CSDP sipil secara merata dan mewajibkan anggota misi untuk bertanggung jawab atas perilaku profesional mereka. Panel Tinjau Hak Asasi Manusia adalah contoh lain mekanisme pertanggungjawaban, tapi dengan dimensi eksternal/publik. Panel tersebut dibentuk oleh EULEX Kosovo untuk memastikan misi tersebut bertanggung jawab terhadap populasi lokal, mengingat tugas eksekutif serta dampak langsung dari keputusan yang dihasilkannya.

Misi harus mengupayakan pendekatan yang disesuaikan, sistemik, dan komprehensif di bawah pertanggungjawaban lokal, dengan visi bersama, yang sejalan dengan institusi dan pejabat EU serta komunitas internasional yang lebih luas. Pada akhirnya, misi pemerintahan berdasar hukum dan peradilan CSDP dilaksanakan sebagai bagian dari aksi EU yang lebih luas dan koheren, serta harus ber-

6 SWD(2016) 221 Joint Communication to the European Parliament and the Council – Elements for an EU-wide strategic framework to support security sector reform (Komunikasi Gabungan Parlemen dan Dewan Eropa – Elemen kerangka kerja strategis EU untuk mendukung reformasi sektor keamanan).

7 14149/16, 14 November 2016.

8 14149/16, hal. 7, paragraf 11(a).

9 15031/09 dan 18173/10.

landaskan atau menciptakan landasan bagi pelaksanaan dukungan institusional EU lainnya yang lebih luas melalui instrumen bantuan eksternal EU lainnya dan Negara Anggota sebagai alat pembangunan dan pengembangan kapasitas. Hal tersebut akan meningkatkan keberhasilan misi penguatan dan/atau misi substitusi secara pesat.¹⁰

JENIS MISI DALAM KERANGKA KERJA RoL

Misi CSDP dalam aspek pemerintahan berdasar hukum dapat dibagi menjadi dua jenis umum: pertama, misi penguatan, yaitu misi yang menugaskan personel peradilan berkualifikasi untuk mengawasi, membimbing, mengajar (MMA), dan melatih, jika memungkinkan, petugas peradilan negara tuan rumah, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, guna memastikan sistem hukum negara tuan rumah memenuhi standar internasional. Jenis umum misi pemerintahan berdasar hukum yang kedua adalah misi pada tingkat fungsi eksekutif/substitusi atas sistem peradilan/hukum lokal. Misi jenis ini dapat diterapkan pada situasi krisis atau pascakonflik, saat struktur negara tuan rumah telah gagal, atau bahkan tidak ada, juga saat personel peradilan ditugaskan untuk menjalankan fungsi eksekutif, yaitu membangun pemerintahan berdasar hukum, sehingga berkontribusi terhadap pengembalian tatanan dan keamanan publik.¹¹ Misi (peradilan) CSDP dapat berupa seperti berikut. Hal berikut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel di halaman berikutnya:

Misi penguatan peradilan CSDP (pengawasan, pembimbingan, dan pengajaran petugas peradilan, termasuk dalam konteks reformasi sistem peradilan);

Misi peradilan CSDP yang menjalankan aktivitas penguatan dan eksekutif/substitusi;

Misi pemerintahan berdasar hukum terintegrasi CSDP yang terdiri atas beberapa komponen (misalnya komponen peradilan dan komponen kepolisian);

Misi SSR yang terdiri atas proses reorganisasi dan reformasi awal struktur militer, kepolisian, peradilan, pemerintahan, dan administrasi sipil terkait. Misi ini dapat melibatkan banyak pejabat dan badan dalam sebuah pendekatan holistik.

Bergantung dari mandat yang diberikan, misi dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis umum tersebut serta dapat menangani berbagai fungsi kenegaraan dan bidang kebijakan yang telah dijelaskan. Meskipun tidak semua misi memiliki komponen atau pilar RoL yang jelas, pelaksanaan misi selalu dilakukan dengan memastikan berbagai aktivitas yang dilakukan mengedepankan pemerintahan berdasar hukum sebagai prinsip pemerintahan. Dalam konsep saat ini, misi eksekutif/substitusi tidak akan berjalan sendiri, melainkan selalu dilengkapi dengan aktivitas penguatan – contohnya adalah EULEX Kosovo, satu-satunya misi CSDP saat ini yang mandatnya mencakup fungsi eksekutif.

KERANGKA KERJA & DOKUMEN ACUAN LAINNYA

Selain dokumen yang telah disebutkan dalam artikel ini dan catatan kaki, konsep kerangka kerja pemerintahan berdasar hukum EU secara menyeluruh mencakup:

- Keputusan Dewan tentang Penghormatan atas Pemerintahan Berdasar Hukum, 16682/14: *(...) menghormati pemerintahan berdasar hukum adalah prasyarat dalam perlindungan hak-hak dasar*.
- Keputusan Dewan tentang hak dasar dan pemerintahan berdasar hukum, 10168/13.
- Konsep Komprehensif atas Misi Penguatan Kepolisian ESDP (Dalam Kaitannya dengan Pemerintahan Berdasar Hukum yang Lebih Luas), 15031/09.
- Konsep Komprehensif atas Misi Substitusi Kepolisian – Versi Revisi, 8655/5/02.
- Konsep komprehensif EU atas misi pada bidang Pemerintahan Berdasar Hukum dalam pengelolaan krisis, termasuk lampiran, 14315/02 dan 9792/03.
- Konsep EU atas Dukungan ESDP terhadap Reformasi Sektor Keamanan (SSR), 12566/4/05.

¹⁰ 18173/10, hal. 15

¹¹ 18173/10, hal. 20.

Pemerintahan berdasar hukum dalam misi CSDP: ringkasan aktivitas dan beberapa contoh pencapaian

MISI DENGAN KOMPONEN PEMERINTAHAN BERDASAR HUKUM	
<p>EUPOL COPPS (Palestina) 2006 – masih berlangsung</p>	<p>Bantuan untuk Sistem Peradilan Kriminal Palestina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan bagi otoritas lokal dalam melakukan deliniasi kompetensi Kementerian Kehakiman, Kantor Jaksa Agung, dan Mahkamah Yudisial dengan tujuan mengadopsi Undang-Undang baru untuk Otoritas Peradilan • Bantuan untuk Institut Peradilan Palestina • Bantuan dalam melakukan inisiasi perencanaan legislatif, termasuk perubahan terhadap Undang-Undang antikorupsi, Panduan Prosedur Kriminal, atau Undang-Undang Perlindungan Keluarga dari Kekerasan <p>Bantuan untuk kerja sama kepolisian-kejaksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan MoU di antara kepolisian dan kejaksaan • Bantuan untuk Kelompok Kerja implementasi MoU
<p>EUPOL Afghanistan 2007 – 2016</p>	<p>Meningkatkan kerja sama antara kepolisian dengan kejaksaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu pembuatan dan penggunaan Manual Pelatihan Kerja Sama Kepolisian dan Kejaksaan
<p>EULEX Kosovo 2008 – masih berlangsung</p>	<p>Penggunaan kompetensi peradilan eksekutif dalam aspek tertentu (kejahatan terorganisir, kejahatan perang, korupsi, isu kepemilikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hakim misi menjatuhkan lebih dari 43.600 putusan • Jaksa misi telah meninjau lebih dari 2.300 dokumen kasus kejahatan perang serta kejahatan berat dan terorganisir yang menghasilkan 250 dakwaan atau penyelidikan <p>Memperkuat institusi Pemerintahan Berdasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penasihat misi, melalui MMA dan pengelolaan kasus rekan ke rekan (panel campuran), telah memungkinkan otoritas peradilan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menginvestigasi, menuntut, dan menjatuhkan putusan suatu kasus • Membantu penyusunan reformasi legislatif



Uni Eropa/EULEX Kosovo. Enisa Kasemi

Misi harus mengupayakan pendekatan yang disesuaikan, sistemik, dan komprehensif di bawah pertanggungjawaban lokal, dengan visi bersama.

MISI DENGAN KOMPONEN PEMERINTAHAN BERDASAR HUKUM

<p>EUCAP Somalia (dahulu bernama EUCAP NESTOR) 2012 - masih berlangsung</p>	<p>Pemberian dukungan terhadap penyusunan dan penerapan undang-undang keamanan maritim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu meninjau dan menyusun undang-undang keamanan maritim terkait sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (Undang-Undang Organisasi Kepolisian, Keamanan Maritim Somalia, Perlawanan terhadap Perompak, dan Penjaga Pantai) <p>Pemberian dukungan terhadap badan keamanan maritim dan institusi peradilan/hukum terkait (pendirian & pengembangan, kemampuan organisasi, dan keahlian profesional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberi saran kepada pejabat tingkat tinggi di Kementerian Kehakiman, Mahkamah Agung (dan peradilan lainnya), Kantor Jaksa Agung, Satuan Polisi Maritim, dan Penjaga Pantai • Mengelola konferensi regional tentang keamanan maritim serta pelatihan regional dan seminar hukum secara berkala bagi jaksa, hakim, dan praktisi hukum lainnya mengenai peradilan terhadap perompak di Nairobi, Djibouti, Mogadishu, Puntland, dan Somaliland
<p>EUAM Ukraina 2014 - masih berlangsung</p>	<p>Pemberian saran strategis, terutama mengenai investigasi kriminal (termasuk penuntutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan saran mengenai klarifikasi tanggung jawab investigasi dan penuntutan yang dimuat dalam Panduan Prosedur Kriminal • Memberikan saran mengenai pengembangan kerangka kerja untuk pemeriksaan di Kantor Jaksa Agung <p>Pemberian bantuan operasional guna memastikan implementasi saran strategis untuk reformasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Biro Antikorupsi Nasional/Kantor Khusus Antikorupsi untuk kerja sama internasional di bidang hukum • Melatih kepolisian nasional dan kantor jaksa dalam teknik investigasi pencucian uang dan kejahatan lintas perbatasan

MISI PENYEDERHANAAN PEMERINTAHAN BERDASAR HUKUM DI SEMUA KOMPONEN MISI

<p>EUCAP Sahel Niger 2012 - masih berlangsung</p>	<p>Pemberian saran kepada Misi yang menangani permasalahan Pemerintahan Berdasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meninjau kurikulum pelatihan untuk pasukan keamanan Niger dan sektor peradilan dengan fokus pada penguatan Pemerintahan Berdasar Hukum dan kapasitas Niger dalam menghadapi terorisme dan kejahatan terorganisir • Menyertakan standar utama EU mengenai Reformasi Sektor Keamanan ke dalam kurikulum pelatihan nasional demi keberlanjutan upaya
<p>EUCAP Sahel Mali 2014 - masih berlangsung</p>	<p>Pemberian saran kepada Misi yang menangani permasalahan Pemerintahan Berdasar Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meninjau kurikulum pelatihan untuk pasukan keamanan internal (ISF) Mali, terutama mengenai modul pelatihan melawan terorisme, kejahatan terorganisir, polisi peradilan, investigasi kriminal, prosedur penahanan dan interogasi, pengajuan keluhan, dan dukungan untuk korban • Mendistribusikan panduan (hukum pidana dan prosedur pidana) dan manual kepada ISF

5.4. KERANGKA KERJA STRATEGIS UNTUK MENDUKUNG SSR

oleh Karin Gatt Rutter dan Gianmarco Scuppa

Reformasi Sektor Keamanan (SSR) dapat diartikan sebagai

‘mengubah sistem keamanan sebuah negara agar mampu memberikan keamanan yang lebih efektif dan bertanggung jawab bagi perseorangan dan negara dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, demokrasi, pemerintahan berdasar hukum, dan prinsip pemerintahan yang baik.’

Selama bertahun-tahun, EU telah mendukung Reformasi Sektor Keamanan di sejumlah negara menggunakan instrumen aksi eksternal dan alat pengelolaan krisis. Pada tahun 2015, para menteri luar negeri meminta Perwakilan Tinggi dan Komisi untuk meninjau kerangka kerja kebijakan yang telah ada serta memaksimalkan dampak, efektivitas, dan konsistensi dukungan EU. Hal ini berujung pada pengembangan **kerangka kerja strategis EU untuk mendukung Reformasi Sektor Keamanan** baru, yang dikeluarkan dalam bentuk Komunikasi Gabungan oleh Perwakilan Tinggi dan Komisi pada Juli 2016 serta didukung oleh Dewan Luar Negeri pada bulan November di tahun yang sama.

Kerangka kerja SSR baru ini menggabungkan dan memperbarui kebijakan tahun 2005 dan 2006¹ yang telah menjadi panduan aksi EU dalam bidang Reformasi Sektor Keamanan dan menyertakan elemen baru yang sejalan dengan tren internasional, misalnya pengakuan terhadap peningkatan keterkaitan antara kea-

manan dengan pembangunan, seperti yang dijelaskan pada Agenda 2030 dan lebih jelas lagi pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan 16.²

TUJUAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

Kerangka kerja strategis SSR ini menetapkan tujuan yang jelas bagi keterlibatan EU dalam sektor keamanan:

- membantu negara rekan dalam meningkatkan keamanan secara nyata bagi perseorangan dan negara; *Hal ini berarti, khususnya, mengatasi kebutuhan keamanan bagi beberapa kelompok berbeda (termasuk perempuan, anak di bawah umur, dan kaum minoritas) sesuai dengan yang diyakini dan dirasakan oleh mereka.*
- meningkatkan legitimasi, pemerintahan yang baik, integritas, dan keberlanjutan sektor keamanan di negara rekan.

Hal ini berarti mendorong serta mendukung sektor keamanan di negara rekan agar menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, prinsip pemerintahan berdasar hukum dan demokrasi, menerapkan prinsip transparansi, keterbukaan, partisipasi, inklusivitas, dan tanggung jawab dalam pemerintahan yang baik, menghormati aturan dan prosedur pengelolaan keuangan publik, melawan korupsi, dan berkelanjutan secara fiskal.

1 A concept for European Community support for Security Sector Reform, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament (Konsep dukungan Komunitas Eropa bagi Reformasi Sektor Keamanan, Komunikasi dari Komisi kepada Dewan dan Parlemen Eropa) (SEC(2006) 658), dan EU concept for ESDP support to SSR (Konsep EU terhadap dukungan ESDP untuk SSR) (12566/4/05), yang dibuat berdasarkan European Security Strategy – A Secure Europe in a Better World (Strategi Keamanan Eropa – Eropa yang Aman di Dunia yang Lebih Baik), diadopsi oleh Dewan Eropa pada Desember 2003.

2 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Mengubah dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan) (Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 25 September 2015; UNGA A/RES/70/1); Tujuan 16: ‘mengedepankan masyarakat damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan, memberikan akses pada keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif pada semua tingkat.’



Uniti Eropa/EUPOL COPPS

Kedaulatan nasional adalah hal penting dalam mewujudkan perubahan berkelanjutan di negara rekan.

RUANG LINGKUP SSR

Kerangka kerja strategis SSR memiliki cakupan yang luas dan berlaku bagi semua pejabat dan instrumen EU, termasuk politik/diplomatik, instrumen aksi eksternal, respons krisis, serta pejabat sipil dan militer CSDP. SSR juga berlaku dalam semua konteks, tidak hanya dalam situasi konflik atau pascakonflik, atau suatu wilayah geografis tertentu. SSR dirancang agar memiliki cakupan luas sebagai panduan berbagai situasi yang mungkin dihadapi dalam berbagai fase dukungan EU, mulai dari identifikasi, perencanaan dan penyusunan program, hingga implementasi aktivitas.

Semua aksi EU dalam sektor keamanan di negara rekan harus diawali oleh pemahaman atas sektor keamanan dan konteks situasi tempat sektor tersebut berada. Delegasi EU akan diminta agar melapor secara berkala mengenai perkembangan sektor keamanan sebagai bagian dari pelaporan politik berkala ke markas pusat. Jika terdapat misi dan operasi CSDP di lapangan, maka analisis dan pelaporan terhadap sektor keamanan tersebut harus dilakukan bersama-sama. Jika situasi yang

dihadapi memerlukan bantuan keamanan serius, maka penilaian sektor keamanan secara spesifik dan mendalam dapat dilakukan guna mengidentifikasi kebutuhan keamanan sesuai dengan yang diyakini dan dirasakan oleh berbagai kelompok dalam populasi (misalnya perempuan dan kelompok minoritas) dan cakupan sektor keamanan terhadap mereka.

KEDAULATAN NASIONAL

Bantuan EU harus didasarkan pada pemahaman yang solid atas sifat dan pelaku sektor keamanan. Bantuan ini juga harus dibuat di atas debat dan inisiatif nasional serta strategi, kebijakan, dan rencana nasional, jika ada dan bersifat kredibel. Hal ini akan meningkatkan kedaulatan nasional, yang merupakan hal penting dalam mewujudkan perubahan berkelanjutan di negara rekan. Pejabat nasional harus memegang kendali atas proses reformasi dan bertanggung jawab atas hasil intervensi yang terjadi akibat dialog politik dan kebijakan secara mendalam mengenai sektor keamanan dengan



Semua aksi EU dalam sektor keamanan di negara rekan harus diawali oleh pemahaman atas sektor keamanan dan konteks situasi tempat sektor tersebut berada.

semua pemangku kepentingan nasional, termasuk badan pengawas, seperti badan legislatif, dan masyarakat sipil. Isu mengenai pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, pemerintahan berdasar hukum, dan demokrasi juga merupakan bagian dari dialog tersebut, karena sikap hormat terhadap prinsip-prinsip tersebut adalah hal penting dalam sektor keamanan.

Mengubah sektor keamanan adalah proses yang rumit dan panjang serta memerlukan keterlibatan jangka panjang dan fleksibilitas. Hal ini disebabkan oleh lingkungan politik dan/atau operasional yang dapat berubah dengan cepat, sehingga EU harus mampu menyesuaikan dukungan politik, teknis, dan finansial yang diberikannya.

Selain itu, dalam banyak kasus, populasi dapat memiliki kebutuhan keamanan yang lebih mendesak. Oleh karena itu, penting untuk berkontribusi terhadap solusi cepat atas kebutuhan tersebut sambil tetap membuat kemajuan secara bertahap menuju perubahan sistemik jangka panjang pada sektor keamanan.

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Salah satu aspek kunci dalam kerangka kerja strategis baru adalah peningkatan efektivitas dan dampak atas aksi EU melalui koordinasi dukungan EU yang lebih baik, termasuk dengan Negara Anggota EU. Oleh

karena itu, kerangka kerja baru mengusulkan pemetaan semua aktivitas SSR EU dan pengembangan *matriks koordinasi* yang menetapkan tujuan bersama EU serta mengidentifikasi hubungan dan urutan kerja sama diplomatik, pengembangan, serta aksi CSDP yang memungkinkan guna mewujudkannya.

Pelibatan pejabat internasional terkait lainnya juga diperlukan untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan pemahaman bersama atas kebutuhan dan tujuan.

Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dari semua bentuk aktivitas dukungan, begitu juga dengan pemahaman terhadap risiko terkait pemberian bantuan/intervensi. Risiko yang paling penting dapat dikelompokkan ke dalam kategori besar yang terkait dengan 1) tidak ada komitmen politik nasional untuk berubah, 2) konsekuensi negatif yang tidak diharapkan, 3) risiko reputasi, dan 4) risiko non-intervensi.

Analisis konteks dan analisis sensitif terhadap konflik adalah dua alat penting guna menimbulkan pemahaman atas konteks situasi tempat dukungan diberikan. Selain itu, kerangka kerja penurunan risiko dan pengelolaan risiko yang solid akan dikembangkan sebagai panduan aktivitas bantuan EU pada sektor keamanan negara rekan di masa mendatang.

Untuk memaksimalkan efektivitas EU dalam memberikan dukungan SSR, para pakar SSR EU perlu dibekali pelatihan, baik pada tingkat markas pusat maupun lapangan. Sebagai dampak dari dukungan atas kerangka kerja strategis, sebuah gugus tugas permanen, informal, dan antarlembaga telah dibentuk dengan staf yang berasal dari badan EEAS dan Komisi tematik terkait.

Fungsi gugus tugas ini adalah mengembangkan alat metodologis, mengawasi aktivitas SSR EU, dan memberikan dukungan serta saran kepada Delegasi EU, badan EEAS dan Komisi, serta misi CSDP.

Di lapangan, misi CSDP harus membantu Delegasi EU pada permasalahan terkait SSR dan semua pejabat EU – termasuk misi diplomatik Negara Anggota – serta harus berbagi informasi dan analisis, berpartisipasi dalam analisis gabungan, dan berkontribusi pada penyusunan matriks koordinasi SSR.

6 KERJA SAMA DAN KOLABORASI

6.1. KEMITRAAN DALAM KEAMANAN DAN PERTAHANAN

oleh Alison Weston dan Frédéric Maduraud



Uni Eropa/EUFOR ALTHEA

Uni Eropa dan mitranya dapat saling memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan khusus milik satu sama lain, sehingga membuat mereka menjadi lebih dekat.

Tantangan bersama menuntut pembagian tanggung jawab yang diperlukan untuk mengatasinya. Strategi Global Uni Eropa menyatakan bahwa *'EU akan menjadi pemangku kepentingan global yang bertanggung jawab, tapi tanggung jawab tersebut harus dibagi dan membutuhkan investasi dalam kemitraan kita.'*

Kemitraan dalam keamanan dan pertahanan adalah instrumen penting dalam meningkatkan keamanan EU dan bagian dari praktik penting dalam keamanan rekan EU. Selain hal ini, kemitraan EU juga dapat dianggap memiliki dampak positif pada: (i) konsolidasi tatanan berbasis aturan multilateral; (ii) keamanan regional; (iii) reformasi di negara rekan sebagai bentuk pembangunan struktur pemerintahan yang baik, termasuk pertanggungjawaban demokratis; (iv) sikap hormat terhadap pemerintahan berdasar hukum; dan (v) partisipasi negara rekan dan EU dalam kerja sama multinasional

sebagai anggota komunitas internasional yang lebih besar.

Sejak awal, CSDP telah menjadi proyek terbuka. Pendekatan komprehensif berarti tidak hanya mengeluarkan

STRATEGI GLOBAL UNI EROPA

'Uni Eropa akan menjadi pemangku kepentingan global yang bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab harus dibagi dan membutuhkan investasi dalam kemitraan kami. Tanggung jawab bersama akan menjadi prinsip yang memandu kami dalam memajukan tatanan global berbasis aturan. Dalam mencapai tujuan, kami akan menjangkau negara, badan regional, dan organisasi internasional. Kami akan bekerja dengan mitra inti, negara-negara yang berpikiran sama, dan kelompok regional.'

seluruh kekuatan EU, tapi juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional, seperti UN, NATO, OSCE dan Uni Afrika, juga dengan negara yang tidak tergabung dalam EU. EU dan rekan-rekannya dapat meraih keuntungan dari pengetahuan, keahlian, dan kapabilitas tertentu yang dimiliki satu sama lain. Hal ini dapat membantu mempererat hubungan mereka.

Lingkungan keamanan yang semakin menyulitkan, ditambah dengan upaya selama beberapa tahun terakhir dalam merombak kebijakan EU dalam aspek keamanan dan pertahanan, terutama setelah presentasi Strategi Global EU pada Juni 2016, menegaskan bahwa kerangka kerja kemitraan EU pada aspek ini perlu ditinjau kembali. EU telah menanggapi tuntutan mendesak dari beberapa rekan agar meninjau, dan dalam beberapa kasus agar meningkatkan, hubungannya dengan mereka dalam aspek ini dengan menawarkan bimbingan (khususnya dalam Keputusan Dewan Mei 2017 dan Juni 2018). Hal ini semakin mempertegas bahwa pendekatan kemitraan yang lebih strategis sangat diperlukan. Perwakilan Tinggi yang baru, Josep Borell, menyebutkan pembangunan kemitraan keamanan dan



Dewan telah menekankan perlunya mengupayakan pendekatan yang lebih strategis pada kemitraan terkait keamanan dan pertahanan, membangun berlandaskan praktik saat ini dan belajar dari pengalaman masa lalu.



Uni Eropa adalah mitra yang spesial dan penting bagi NATO. Kedua organisasi ini berbagi mayoritas anggota, memiliki nilai-nilai yang sama serta menghadapi ancaman dan tantangan yang sama (kiri ke kanan: Josep Borrell, Charles Michel, Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg).

pertahanan sebagai salah satu prioritas utama dalam mandatnya.

Penduduk Eropa harus menghadapi dunia dengan sebagaimana mestinya, bukan dengan situasi yang mereka harapkan terjadi. Hal tersebut berarti mempelajari ulang bahasa kekuatan serta menggabungkan sumber daya milik EU dan rekan dalam cara yang memaksimalkan dampak geopolitik. Ada beberapa krisis di sekitar Eropa yang mengharuskan EU dengan segera meningkatkan keterlibatan operasionalnya, baik bersama rekan maupun dengan sinergi lain yang memungkinkan.

Saat ini dunia sedang menyaksikan kembalinya kompetisi geo-strategis di antara para kekuatan besar, terutama US, Tiongkok, dan Rusia, dalam dunia multikutub. Dalam konteks ini, banyak negara dunia ketiga merasa bahwa meningkatkan keterlibatan mereka dengan EU dapat memberikan manfaat bagi mereka. Penduduk EU juga menginginkan Eropa yang mampu melindungi mereka dalam konteks yang semakin menyulitkan, baik di dalam maupun di luar perbatasan EU. Selain itu, juga dalam menghadapi tantangan keamanan dan ancaman baru yang jauh melampaui hal yang kita pahami sebagai pertahanan tradisional. Ancaman hibrida, serangan siber, gangguan luar negeri, disinformasi, infrastruktur utama yang masih lemah, serta tantangan terhadap ruang, perubahan iklim, dan teknologi disruptif – termasuk kecer-



Kerja sama Uni Eropa-PBB di lapangan sangat penting untuk menyelesaikan misi.

dasar buatan – adalah sejumlah aspek yang menuntut keterlibatan EU secara kuat dan efektif.

I. KERJA SAMA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL SERTA DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONAL

1. Kerja sama EU-UN dalam mengelola krisis dan memelihara perdamaian semakin berkembang. Kerja sama tersebut memberikan nilai tambah bagi kedua organisasi dan fokus dalam memberikan manfaat operasional bagi upaya di lapangan. Kerja sama di Mali dan Republik Afrika Tengah adalah salah satu contoh dukungan koordinasi EU dan UN bagi sektor keamanan dan pertahanan nasional, dengan misi EU ditugaskan bersama operasi pemeliharaan perdamaian UN. EU juga telah menjalankan operasi penghubung demi mendukung misi pemeliharaan perdamaian UN, seperti operasi EUFOR RCA di Republik Afrika Tengah.

EU telah menugaskan 13 dari 17 misi dan operasi CSDP bersama operasi pemeliharaan perdamaian UN: di Mali, Republik Afrika Tengah, Somalia, Libya, Tan-

duk Afrika, dan Balkan Barat. Kerja sama EU dengan UN dalam memelihara perdamaian menempatkan misi CSDP EU dalam kerangka kerja politik dan operasional yang lebih luas, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensinya serta memungkinkan EU memainkan perannya dalam mendukung multilateralisme efektif. Selain melakukan kerja sama di lapangan, kedua organisasi tersebut juga melakukan dialog berkala dalam merencanakan, membuat tinjauan strategis, serta menjalankan mandat.

Kerja sama operasional disertai dengan inisiatif multilateral yang dimanfaatkan oleh UN dan EU untuk memperkuat kemitraan mereka. Pada 2019, kedua organisasi tersebut menyatakan prioritas baru bagi Kemitraan Strategis UN-EU dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Pengelolaan Krisis untuk periode 2019-2021. Berdasarkan prioritas dari periode sebelumnya, yaitu 2015-2018¹, mereka memperbarui prinsip utama dan prioritas sejalan dengan perkembangan terbaru dalam UN dan EU serta dalam keamanan internasional (pencegahan konflik; pemeliharaan perdamaian; generasi muda, perdamaian, dan keamanan; hubungan antara keamanan dengan pembangunan). Cakupan hal tersebut telah diperluas menjadi lebih dari sekadar pemeliharaan perdamaian, sehingga dapat meliputi operasi perdamaian dan pengelolaan krisis. Delapan aspek prioritas² telah diidentifikasi (tiga di antaranya adalah aspek baru), dan setiap prioritas diikuti dengan penjabaran sejumlah aksi tertentu. Peningkatan efisiensi, pemanfaatan keuntungan komparatif, serta peningkatan kesaling-lengkapan, sinergi, dan ketimbang-balikan adalah fokus utamanya.

Kemitraan tersebut juga melibatkan dialog berkala dalam tingkat tinggi, termasuk Komite Pengarah EU-UN tentang Pengelolaan Krisis yang diadakan setiap dua tahun sekali, pertemuan berkala antara duta besar dari Komite Politik dan Keamanan (PSC) EU dengan Dewan Keamanan UN, partisipasi Wakil Sekretaris Jenderal UN untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian dalam per-

¹ Prioritas tahun 2015-2018 antara lain tanggap cepat, reformasi sektor keamanan, pertukaran informasi dan analisis, dan dukungan untuk Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Afrika.

² Delapan prioritas tersebut adalah: 1) perempuan, perdamaian, dan keamanan (baru); 2) memperkuat kerja sama antara misi dan operasi di lapangan; 3) transisi (baru); 4) memfasilitasi kontribusi dan dukungan Negara Anggota Uni Eropa untuk operasi perdamaian PBB dan inisiatif Aksi Penjaga Perdamaian (A4P) Sekretaris Jenderal PBB; 5) pencegahan konflik dalam operasi perdamaian dan dukungan untuk proses dan solusi politik (baru); 6) kerja sama kepolisian, supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan (SSR); 7) kerja sama dengan dan dukungan untuk operasi perdamaian Afrika; dan 8) pelatihan dan peningkatan kapasitas.



Uni Eropa

Kerja sama Uni eropa dengan negara-negara ASEAN.

temuan tingkat tinggi Negara Anggota EU (misalnya pertemuan informal menteri pertahanan, PSC) dan kunjungan tahunan Perwakilan Tinggi ke Dewan Keamanan UN.

2. Uni Eropa dan NATO adalah mitra utama dalam keamanan dan pertahanan. Dalam konteks strategis saat ini, yang ditandai dengan kembalinya ‘politik kekuasaan’, kerja sama transatlantik – Eropa dan Amerika Utara yang berdiri bersama – tetap penting. Untuk Uni Eropa, ini adalah sebuah persamaan yang saling menguatkan.

Elemen pertama dari persamaan ini adalah bahwa NATO yang lebih kuat dapat berkontribusi membuat Uni Eropa juga menjadi lebih kuat. Dalam Deklarasi London Desember 2020, para pemimpin Sekutu menegaskan kembali persatuan, solidaritas, dan kohesi mereka. Ini sangat penting bagi rakyat Eropa dan, lebih luas lagi, untuk pertahanan Eropa.

Elemen kedua adalah bahwa Uni Eropa yang lebih kuat juga membuat NATO lebih kuat. Inisiatif pertahanan Uni Eropa seperti Kerja Sama Terstruktur Tetap (PESCO), Tinjauan Tahunan Terkoordinasi Tentang Pertahanan (CARD) dan Dana Pertahanan Eropa (EDF)

akan memberikan lebih banyak kemampuan tidak hanya dengan membelanjakan lebih banyak, tetapi juga membelanjakan lebih baik, secara bersama-sama. Ini akan meningkatkan Basis Industri dan Teknologi Pertahanan Eropa (EDTIB) dan keamanan Eropa secara lebih luas. Mengingat prinsip satu perangkatan kekuatan, upaya ini juga memperkuat pilar Eropa di NATO dan mendukung pengembangan kemampuan yang dapat dijalankan oleh Negara Anggota, dalam koherensi yang maksimal dengan persyaratan NATO bahwa kemampuan tersebut berpotensi tersedia untuk operasi NATO. Secara keseluruhan, upaya pertahanan Uni Eropa memperkuat NATO dan berkontribusi pada keamanan transatlantik dan pembagian beban.

Kerja sama EU-NATO, yang merupakan pilar integral dari pekerjaan Uni Eropa di bidang pertahanan, tetap menjadi prioritas politik utama bagi kepemimpinan Uni Eropa yang baru.

Uni Eropa telah menempatkan agenda kerja sama yang sangat erat, membangun kerangka kerja yang ditetapkan oleh dua Deklarasi Bersama 2016 dan 2018 serta 74 tindakan bersama berikutnya. Kerja sama EU-NATO mencakup berbagai bidang, seperti:

- melawan ancaman hibrida;
- kerja sama operasional (termasuk di laut dan terkait migrasi)
- keamanan siber dan pertahanan siber;
- kemampuan pertahanan, industri, penelitian, dan latihan;
- membangun kapasitas pertahanan dan keamanan mitra;
- dialog politik.

Tindakan-tindakan ini terus dibangun dengan prinsip-prinsip utama yang menopang dan memandu kerja sama EU-NATO, yaitu keterbukaan dan transparansi, inklusivitas dan timbal balik, dan penghormatan sepenuhnya terhadap otonomi pengambilan keputusan kedua organisasi, tanpa mengurangi karakter khusus keamanan dan kebijakan pertahanan Negara Anggota mana pun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak hal telah dicapai dan tingkat kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya telah tercapai. Mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh kedua organisasi ini, tetap penting bagi Uni Eropa dan NATO untuk melanjutkan kolaborasi mereka.

3. Mengenai kerja sama multilateral, **Panel Kemitraan Timur di CSDP**, yang diluncurkan pada tahun 2013, melengkapi hubungan bilateral dan memungkinkan semua enam negara **Kemitraan Timur (EaP)** (Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Republik Moldova, dan Ukraina) untuk terlibat dalam berbagai lokakarya, seminar, kunjungan lapangan, dan kegiatan pelatihan lainnya. Georgia, Republik Moldova, dan Ukraina tetap menjadi mitra paling aktif dan berkontribusi secara teratur untuk misi dan operasi CSDP.

Semua kegiatan pelatihan CSDP diselenggarakan dengan bekerja sama dengan otoritas nasional negara mitra dan didukung secara finansial oleh Uni Eropa (di bawah Instrumen Wilayah Eropa). Sejak 2013, struktur Tanggap Krisis CSDP EEAS, bersama dengan Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDC), dan Negara Anggota Uni Eropa, telah melakukan lebih dari 30 kegiatan CSDP yang berbeda untuk mitra Timur, termasuk acara sosialisasi di Kyiv, Tbilisi, Chisinau, Minsk, dan Yerevan. Selain itu, semua negara mitra memanfaatkan acara pelatihan dan pendidikan rutin yang diselenggarakan oleh ESDC.

Dalam jangka pendek dan menengah, Uni Eropa dan mitranya mencari peluang untuk memperluas kerja sama di bidang keamanan. Kerja sama dengan negara-negara EaP, baik di tingkat regional maupun bilateral, berfokus pada penerapan target yang ditetapkan dalam 20 Hasil Kerja EaP untuk tahun 2020, dengan menekankan CSDP, melalui kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan ketahanan negara-negara tersebut melawan ancaman keamanan, termasuk ancaman hibrida dan bencana. Mengembangkan kerja sama dan kemampuan adalah bagian penting dari semua pendekatan pemerintah EaP untuk mengatasi ancaman hibrida, keamanan siber, komunikasi strategis, dan perlindungan infrastruktur penting.

4. **Kemitraan dengan organisasi regional** juga memainkan peran penting. Misalnya, kemitraan Uni Eropa dengan **Uni Afrika (AU)** dan pelaksana dari Afrika di bidang perdamaian dan keamanan dan manajemen krisis diletakkan di pijakan strategis dengan Strategi Bersama Afrika-Uni Eropa, yang ditandatangani pada tahun 2007, yang menjadikan perdamaian dan keamanan sebagai prioritas di delapan kemitraan tematik yang akan dikembangkan secara komprehensif antara Uni Eropa dan Afrika. Dukungan Uni Eropa untuk pengembangan kapasitas untuk perdamaian dan keamanan di Afrika, di bawah berbagai instrumen dan bidang kebijakan, telah meningkat secara bertahap selama beberapa tahun terakhir. Ini termasuk dukungan struktural jangka panjang dan dukungan yang lebih bersifat terikat dengan waktu. Kegiatan dapat dibiayai dengan anggaran umum Uni, dari EDF atau secara bilateral dari Negara Anggota Uni Eropa. Kegiatan CSDP di Afrika adalah alat pertahanan dan keamanan utama Uni Eropa untuk kerja sama dengan pasukan keamanan dan pertahanan Afrika, baik dalam pasukan nasional atau koordinasi erat dengan kontingen PBB atau AU. Misi sipil dan militer di Sahel, Afrika Tengah dan Tanduk Afrika setiap hari bekerja sama dengan pasukan Afrika.

Pada Mei 2018, Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perdamaian, Keamanan, dan Pemerintahan ditandatangani antara Uni Afrika dan Uni Eropa. MoU tersebut memperkirakan adanya kerja sama yang diperkuat di seluruh siklus konflik, mulai dari pencegahan konflik hingga manajemen krisis dan tata kelola. MoU juga



Uni Eropa/EUNAVFOR Somalia

Kapal perang Angkatan Laut Uni Eropa FS Siroco dan FGS Hessen melakukan latihan kontrapembajakan bersama dengan dua kapal Angkatan Laut Tiongkok, CNS Yancheng dan CNS Taihu.

mengikat kedua pihak untuk mengambil langkah-langkah praktis menuju pendekatan yang lebih terkoordinasi guna memastikan hubungan multilateralisme yang efektif, termasuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan PBB guna menangani perdamaian dan keamanan serta tantangan lainnya yang terkait. Diskusi tentang implementasi sedang berlangsung.

5. EU telah menyatakan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama dengan **mitra Asia**, dengan menetapkan tujuan, dalam Kesimpulan Dewan Mei 2018, untuk meningkatkan kerja sama keamanan di dan dengan Asia. Hal ini telah menghasilkan momentum baru dalam keterlibatan bilateral, sebagaimana dibuktikan dengan kesimpulan pada Oktober 2019 dari Perjanjian Partisipasi Kerangka Kerja (FPA) dengan Vietnam, yaitu negara ASEAN pertama yang membuat kesepakatan tersebut dengan Uni Eropa dan hanya yang kedua di Asia (setelah Republik Korea).

Komitmen ini juga diwujudkan dalam kegiatan multilateral. Kerja sama EU-ASEAN sangat luas dan mencakup banyak bidang Pada tahun 2020, EU dan ASEAN sepakat untuk meningkatkan hubungan mereka menjadi

Kemitraan Strategis. Sebagai langkah praktis menuju kerja sama yang lebih erat, Uni Eropa bertujuan memperoleh status pengamat kegiatan Kelompok Kerja Ahli tertentu di bawah format ADMM Plus dan bergabung dengan KTT Asia Timur. Rencana Kerja EU-ASEAN untuk Memerangi Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara telah diadopsi untuk kedua kalinya, yaitu dalam periode 2018-2020. Uni Eropa dan ASEAN juga telah sepakat untuk meningkatkan keterlibatan negara anggota ASEAN dalam misi CSDP dengan mengedepankan FPA bilateral. Kedua pihak terus meningkatkan dialog dan kerja sama politik dan keamanan, termasuk di Forum Regional ASEAN (ARF), dalam bidang keamanan non-tradisional yang semakin luas. Pada tahun 2019, Uni Eropa bersama-sama memimpin Pertemuan Antar-Sesi ARF tentang keamanan maritim dan kontra-terorisme dan secara aktif berpartisipasi dalam bidang lainnya (siber, non-proliferasi, dan bantuan bencana). Tawarannya untuk menjadi ketua bersama Pertemuan Antar-Sesi ARF tentang Konraterorisme dan Kejahatan Transnasional untuk periode 2019-22 telah disetujui oleh Pertemuan Menteri ARF pada tanggal 2 Agustus 2019 di Bangkok.



Georgia telah berkontribusi pada operasi CSDP yang dipimpin Uni Eropa dengan 156 militer di puncak pengerahannya.

Uni Eropa/EUFOR RCA

II. KEMITRAAN UNI EROPA DENGAN NEGARA KETIGA

Sejak tahun 2017, Dewan telah menekankan perlunya bekerja untuk mendapatkan pendekatan yang lebih strategis dalam kemitraan keamanan dan pertahanan, meningkatkan praktik yang saat ini dilakukan, dan belajar dari pengalaman masa lalu. Pendekatan baru ini dilaksanakan berdasarkan tujuan berikut:

- meningkatkan keamanan Uni Eropa dan mitra dengan mengembangkan kepentingan strategis bersama mengenai tujuan keamanan dan pertahanan;
- mewujudkan ini menjadi sebuah dukungan nyata untuk tujuan bersama Uni Eropa dan mitranya dan terutama kontribusi untuk misi dan operasi Uni Eropa (CSDP);
- meningkatkan legitimasi internasional dan mengakui

PERJANJIAN UNI EROPA

Pasal 21: 'Organisasi akan berusaha untuk mengembangkan hubungan dan membangun kemitraan dengan negara-negara ketiga dan organisasi-organisasi internasional, regional atau global yang memiliki prinsip-prinsip [yang sama] [...]. Organisasi akan mempromosikan solusi multilateral untuk masalah bersama, khususnya dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.'

peran Uni Eropa dan mitranya sebagai penyedia keamanan, serta peran strategis global Uni Eropa;

- mengamankan pelaksanaan kemitraan yang efektif dengan mempromosikan inklusivitas, penerimaan, dan akuntabilitas timbal balik antara Uni Eropa dan mitranya.

Oleh karena itu, Uni Eropa mulai mengembangkan kemitraan CSDP yang lebih komprehensif dengan negara-negara ketiga. Kemitraan ini tidak hanya bergerak di manajemen krisis dan partisipasi dalam misi dan operasi CSDP Uni Eropa untuk juga mengatasi tantangan multifaset seperti ancaman hibrida, keamanan iklim, komunikasi strategis, disinformasi, campur tangan asing, keamanan maritim, kontraterorisme, pengembangan kemampuan, keamanan maritim, dan pembangunan kapasitas.

Kemitraan ini diatur di tiga bidang utama kerja sama:

- meningkatkan dialog dan kerja sama tentang masalah keamanan dan pertahanan dengan cara yang disesuaikan untuk mengatasi masalah Uni Eropa dan negara mitra, serta menggunakan semaksimal mungkin forum kerja sama yang ada di bidang keamanan dan pertahanan;
- memfasilitasi partisipasi mitra negara ketiga dalam misi dan operasi CSDP;
- memperkuat dukungan timbal balik antara Uni Eropa dan mitranya, termasuk melalui misi dan operasi

CSDP Uni Eropa dan program dukungan pengembangan kapasitas.

Misalnya, Uni Eropa mengadakan FPA dengan negara-negara mitra terpilih untuk memfasilitasi kontribusi mereka pada misi dan operasi CSDP. Sampai saat ini, 20 perjanjian tersebut telah ditandatangani, dan saat ini 12 mitra berpartisipasi dalam 10 dari 17 misi dan operasi CSDP yang telah dibuat. Di luar kerja sama dalam kerangka kerja misi dan operasi CSDP, Uni Eropa menyelenggarakan dialog bilateral secara rutin dengan lebih dari 20 negara, yang mencakup berbagai topik terkait keamanan dan pertahanan. Selain itu, Uni Eropa menginvestasikan lebih dari EUR 900 juta dalam program bantuan dengan negara-negara mitra prioritas pada tahun 2017. Dalam menghadapi ancaman hibrida, sebuah survei program yang bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan dan membangun ketahanan telah diusulkan ke enam mitra Balkan Barat, serta ke negara-negara di wilayah yang lebih luas seperti Georgia, Moldova, dan Yordania.

Uni Eropa juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya di lapangan untuk terlibat dalam masalah keamanan dan pertahanan dengan mitra, dengan dikerahkannya ahli khusus ke Delegasi Uni Eropa terpilih. Sampai saat ini, Uni Eropa telah mengerahkan 18 penasihat kontraterorisme dan sedang dalam proses mengerahkan gelombang pertama penasihat militer berseragam untuk Delegasi Uni Eropa ke Amerika Serikat dan Kanada, Tiongkok, Serbia (mandat akan diperluas secara progresif ke semua Balkan Barat), Indonesia, Federasi Rusia, Ukraina, dan Kenya. Inisiatif ini akan memungkinkan pengembangan kemitraan Uni Eropa lebih lanjut di bidang keamanan dan pertahanan dengan melibatkan otoritas pertahanan dan keamanan Negara ketiga, memperkuat profil Uni Eropa sebagai pelaksana keamanan, meningkatkan koordinasi dengan Negara Anggota secara lokal dan memberikan dukungan kepada Negara Anggota yang tidak memiliki penasihat pertahanan atau keamanan di negaranya.

LANGKAH SELANJUTNYA

Di bawah bimbingan Perwakilan Tinggi yang baru, pekerjaan akan dilanjutkan untuk menerapkan Kesim-

DEWAN URUSAN LUAR NEGERI, 14 NOVEMBER 2016

‘Dewan berkomitmen untuk memperkuat kemampuan Organisasi untuk bertindak sebagai penyedia keamanan dan untuk meningkatkan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) sebagai bagian penting dari tindakan eksternal Organisasi. Ini akan meningkatkan peran strategis global dan kapasitasnya untuk bertindak secara mandiri kapan pun dan di mana pun diperlukan dan dengan mitra apabila dimungkinkan.’

DEWAN URUSAN LUAR NEGERI, 25 JUNI 2018

“Mengingat kesimpulan pada tanggal 18 Mei 2017 dan menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama dengan mitra, baik dengan negara ketiga maupun organisasi internasional lainnya. Dalam konteks ini, Dewan mengundang badan-badan persiapan terkait untuk melanjutkan pekerjaan dan menyajikan rekomendasi-rekomendasi konkret secara tepat waktu berdasarkan proposal yang baru-baru ini dibuat oleh Perwakilan Tinggi guna mengembangkan pendekatan yang lebih strategis untuk Kemitraan Uni Eropa di bidang keamanan dan pertahanan dengan negara ketiga. Dewan menggarisbawahi bahwa kemitraan antara Uni Eropa dan negara-negara ketiga harus saling menguntungkan dan harus berkontribusi untuk memperkuat upaya keamanan dan pertahanan Uni Eropa, sambil sepenuhnya menghormati kerangka kelembagaan Uni Eropa dan otonomi pengambilan keputusannya.”

pulan Dewan tanggal 25 Juni 2018: *‘Dewan mengundang badan-badan persiapan terkait untuk melanjutkan pekerjaan dan menyajikan rekomendasi-rekomendasi konkret secara tepat waktu berdasarkan proposal yang baru-baru ini dibuat oleh Perwakilan Tinggi guna mengembangkan pendekatan yang lebih strategis untuk Kemitraan Uni Eropa di bidang keamanan dan pertahanan dengan negara ketiga.’*

Dalam skenario pasca-Brexit, menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kerja sama yang erat dan solid dengan Inggris dalam hal keamanan dan pertahanan juga akan menjadi sebuah prioritas.



MENINGKATKAN KERJA SAMA KEAMANAN DI DALAM DAN DENGAN ASIA

Keterkaitan erat antara kesejahteraan Eropa dengan perdamaian dan keamanan Asia telah membuat Uni Eropa memutuskan untuk memperkuat kerja sama keamanan di dalam dan dengan Asia. Hal ini juga sejalan dengan langkah yang diambil Uni Eropa beberapa tahun lalu untuk memperkuat perannya sebagai **penyedia keamanan global**:

Eropa dan Asia memiliki minat dasar yang sama dalam menegakkan **sistem internasional berbasis peraturan**, juga pandangan bahwa tantangan yang dihadapi dunia saat ini melampaui batas negara dan tidak bisa diatasi sendirian. Oleh karena itu, **kemitraan keamanan EU-Asia diharapkan dan diperlukan**.

PRIORITAS KEMAMAN UNI EROPA-ASIA

-  **KEAMANAN MARITIM**
-  **KEAMANAN SIBER**
-  **KONTRA TERORISME**
-  **PENCEGAHAN KONFLIK**
-  **ANCAMAN HIBRIDA**
-  **KERJA SAMA REGIONAL**
-  **NONPROLIFERASI SENJATA KIMIA, BIOLOGIS, RADIOLOGIS, DAN NUKLIR**

KERJA SAMA UNI EROPA-ASEAN

Uni Eropa dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) setuju untuk meningkatkan hubungan menjadi **Kemitraan Strategis** dan **memperkuat kerja sama** pada berbagai bidang keamanan. **Contoh praktisnya meliputi:**



€26 juta
untuk mengurangi resiko kimia, biologi, radiologi, dan nuklir



Kerja sama di dalam **Forum Regional ASEAN**
untuk meningkatkan langkah pembangunan kepercayaan diri multilateral & diplomasi pencegahan

€10 juta
untuk mendukung kerja sama antara **Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN** dan **badan perlindungan sipil EU**



Penasihat kontraterorisme dan militer di antara Utusan Uni Eropa di wilayah



KERJA SAMA BILATERAL UNI EROPA-ASIA YANG SEDANG BERLANGSUNG PADA BIDANG KEAMANAN & PERTAHANAN

- Perjanjian Partisipasi Kerangka Kerja:** memungkinkan rekan kami untuk berkontribusi pada operasi manajemen krisis Uni Eropa di seluruh dunia
- Konsultasi Pertahanan dan Keamanan:** memupuk kerja sama yang diperkuat guna menghadapi tantangan global
- Interaksi Militer-ke-Militer:** Pertukaran, diskusi, serta latihan gabungan antara pakar, penasihat, dan pihak militer
- Kontraterorisme/Perlawanan terhadap Ekstrimisme Berbasis Kekerasan:** bekerja mencegah, melindungi, serta menindaklanjuti dan menanggapi tantangan lintas-perbatasan
- Keamanan Siber:** bekerja demi ruang siber global yang terbuka, stabil, dan aman di bawah kendali hukum internasional
- Non-proliferasi:** guna menegakkan serta memperkuat semua perjanjian internasional dan kerangka kerja sama terkait
- Keamanan Maritim:** mendukung Supremasi Hukum di kawasan laut serta berkontribusi mewujudkan wilayah maritim yang terbuka dan aman

6.2. PELATIHAN UNTUK KEMITRAAN

oleh Jochen Rehr



Kerja sama yang erat dengan TAIEX (Balkan Barat) dan DG NEAR (Kemitraan Timur) memastikan pelatihan berkualitas untuk kebutuhan pelatihan secara langsung di bidang keamanan dan pertahanan untuk mitra Uni Eropa

Uni Eropa melihat multilateralisme dan kemitraan sebagai prinsip dasar dalam hal tindakan eksternal. Oleh karena itu, baik organisasi multilateral atau mitra di sekitar Eropa menerima perlakuan prioritas, yang seharusnya membawa dampak yang saling menguntungkan dan meluas di bidang lain juga.

Bidang kemitraan utama adalah 'Kemitraan Timur' (EaP) dengan enam anggota¹, Balkan Barat (WB) dengan enam mitra lainnya² dan 'Uni Mediterania' dengan 15 negara non-Uni Eropa³. Di bidang pelatihan dan pendidikan, yang terakhir fokus pada Euro-Mediterranean University, yang diresmikan di Slovenia pada Juni 2008, dan isu-isu non-pertahanan lainnya.

Program pelatihan yang disesuaikan oleh permintaan telah dibentuk untuk dua kemitraan regional lain-

nya (EaP dan WB). Karakteristik yang sama dari kedua program tersebut antara lain dimensi keamanan dan pertahanan, inklusivitas (terbuka untuk semua Negara Anggota dan mitra Uni Eropa), dan fakta bahwa program tersebut diselenggarakan di bawah naungan Akademi Keamanan dan Pertahanan (ESDC). Pada akhirnya, mitra kami harus siap untuk bergabung dengan upaya kami dalam manajemen krisis menggunakan instrumen sipil dan militer di seluruh dunia.

PROGRAM PELATIHAN UNTUK BALKAN BARAT

Uni Eropa memiliki hubungan dekat dengan negara-negara Balkan Barat. Organisasi mempunyai tujuan memastikan masyarakat demokratis yang stabil, makmur, dan berfungsi dengan baik di jalur yang stabil menuju integrasi Uni Eropa. Pada tahun 2006, Austria, Jerman, Hongaria, dan Slovenia membentuk program pelatihan yang akan membantu negara-negara di kawasan tersebut untuk mempersiapkan pembahasan akses dan khususnya untuk negosiasi bab 31 (kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan) dari kesepakatan Organisasi.

Balkan Barat adalah wilayah tempat operasi kebijakan keamanan dan pertahanan bersama (CSDP) pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2003 dengan misi CSDP (EUPM, EUPOL Proxima) dan operasi CSDP (Concordia) pertama. Sejak itu, Uni Eropa telah mempertahankan peran pendukung utama dalam menstabilkan Bosnia dan Herzegovina melalui misi yang dipimpin secara militer (EUFOR ALT-

1 Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Moldova, Ukraina

2 Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, Makedonia Utara, Serbia

3 Albania, Aljazair, Bosnia dan Herzegovina, Mesir, Israel, Yordania, Lebanon, Mauritania, Monaco, Montenegro, Maroko, Palestina, Suriah (ditanggihkan), Tunisia, dan Turki.



Kegiatan pelatihan CSDP tahunan dengan lebih dari 600 peserta di Universitas Pertahanan Nasional Ukraina ditandai sebagai acara ESDC terbesar dalam satu tahun akademik.

HEA). Antara tahun 2003 dan 2012, Uni Eropa juga mengerahkan misi polisi (EUPM) di Bosnia dan Herzegovina. Di Kosovo⁴, Uni Eropa telah mengerahkan misi untuk mendukung otoritas Kosovo dalam menegakkan supremasi hukum (EULEX). Misi dan operasi CSDP juga telah dikerahkan di Makedonia Utara (Concordia, Proxima).

Program pelatihan pada mulanya merupakan 'salinan' dari sesi latihan tingkat tinggi ESDC, dilengkapi empat modul, tetapi hanya terbuka untuk mitra Balkan Barat. Seiring waktu, jumlah modul dikurangi menjadi tiga, dan modul terakhir dilaksanakan di Brussel. Meskipun dari segi konten sangat dihargai oleh penerima manfaat, pelatihan tersebut berdampak besar pada anggaran pengeluaran perjalanan otoritas pengirim. Oleh karena itu, kurangnya penunjukan

untuk sesi latihan tiga modul akan membuat adanya pertimbangan dari penyelenggara dan penyusunan ulang konten.

Sebagai hasil dari diskusi tersebut, program disusun ulang dan diperbarui menjadi program pelatihan tiga modul, yang mencakup kursus eLearning (modul I), kursus orientasi CSDP reguler (modul II), dan seminar pengamatan interaktif (modul III), di situ peserta dibimbing untuk menggunakan ilmu yang didapat selama modul I dan II.

Austria, Kroasia, dan Hongaria secara sukarela menjadi penyelenggara program pelatihan yang diperbarui. Selain itu, program pelatihan diberikan di bawah naungan ESDC pada tahun 2010. Inisiatif tersebut menghasilkan beberapa situasi yang saling menguntungkan:

⁴ Penunjukan ini tanpa mengurangi posisi status, dan sejalan dengan UNSCR 1244 dan Opini ICJ tentang deklarasi kemerdekaan Kosovo.

- Peserta pelatihan diperluas dengan membawa Negara Anggota Uni Eropa, yang akan duduk di ruangan yang sama, mempelajari konten yang sama dan mendiskusikan masalah yang sama dengan mitra Balkan Barat di tingkat yang sama.
- Pelatihan dilaksanakan dengan program akademik ESDC dan mengikuti kurikulum standar. Oleh karena itu, para peserta pelatihan menerima sertifikat keikutsertaan yang diakui oleh semua Negara Anggota Uni Eropa dan institusi Uni Eropa.
- Penyelenggara membuat kerja sama dengan instrumen Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi (TAIEX) dari Komisi Eropa. TAIEX mendukung administrasi publik terkait dengan pendekatan, penerapan, dan penegakan undang-undang Uni Eropa serta memfasilitasi tindakan membagikan praktik terbaik Uni Eropa. Kerja sama ini memungkinkan penerima manfaat Balkan Barat untuk menghadiri pelatihan daripada harus menolak tawaran pelatihan karena keterbatasan anggaran.

Program pelatihan saat ini memasuki gelombang ke-14 dan menghasilkan sekitar 500 alumni dari administrasi publik mitra Balkan Barat. Nama-nama alumni dicatat dalam basis data dan daftar tersebut diperbarui secara berkala melalui seminar dan konferensi alumni. Melalui pelatihan yang diberikan di bawah naungan ESDC, selain informasi terbaik tentang CSDP, para peserta juga mendapatkan pandangan sekilas tentang budaya keamanan Eropa bersama, yang akan membantu negara-negara Eropa dan negara lainnya dengan cara yang koheren dan kredibel untuk membangun strategi otonomi.

Hasil positif pertama dari program pelatihan ini adalah masuknya Kroasia ke Uni Eropa pada tahun 2013. Montenegro dan Serbia telah memulai pembicaraan tentang keanggotaan. Makedonia Utara dan Albania adalah negara kandidat, sedangkan negara lainnya adalah kandidat potensial untuk keanggotaan Uni Eropa.

PROGRAM PELATIHAN CSDP UNTUK KEMITRAAN TIMUR

Karena keberhasilan program pelatihan untuk Balkan Barat, Austria mengembangkan gagasan untuk menyediakan kegiatan serupa untuk negara-negara Kemitraan Timur. Di tengah Presidensi Lituania di Dewan Uni Eropa pada tahun 2013, Austria memulai program pelatihan dengan tiga modul menggunakan pengalaman yang diperoleh sejauh ini. Namun, program pelatihan bersifat berdasarkan permintaan dan oleh karena itu harus disesuaikan dengan ambisi wilayah, mengingat perbedaan budaya, agama, dan politik antara enam negara.

Secara umum, Kemitraan Timur bertujuan untuk membangun area bersama untuk berbagi dalam hal demokrasi, kemakmuran, stabilitas, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, ikatan yang dijalin melalui Kemitraan Timur membantu memperkuat ketahanan negara dan masyarakat: hal itu membuat Uni Eropa dan mitranya lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal.

CSDP hanyalah salah satu bagian, tetapi sangat penting, dari kerja sama dengan negara-negara mitra. Masalah keamanan dan pertahanan dibahas dalam panel EaP tentang 'keamanan, CSDP, dan perlindungan sipil', yang mengadakan pertemuan dua kali setahun di Brussel dan mendukung hasil kerja 12 'kerja sama keamanan yang lebih kuat' dari 20 hasil kerja untuk tahun 2020⁵. Dalam pertemuan tersebut, sebuah rencana kerja ('dokumen hidup') ditetapkan, yang terdiri dari semua kegiatan di berbagai bidang, yang disediakan oleh satu Negara Anggota Uni Eropa, koalisi sukarela, atau di bawah payung ESDC. Dukungan keuangan diberikan dengan batas anggaran terpisah dalam anggaran Uni Eropa, yang mencakup biaya perjalanan dan akomodasi peserta EaP dan beberapa ahli serta biaya untuk ruang pertemuan dan katering.

Sejauh ini, kegiatan pelatihan telah dilakukan di enam negara EaP. Selain program pelatihan dengan

5 Hasil kerja baru akan didasarkan pada ide-ide yang ditetapkan dalam Komunikasi Bersama: kebijakan EaP setelah tahun 2020: Memperkuat Ketahanan - Kemitraan Timur yang memberikan untuk semua (JOIN(2020)7 final 18.03.2020).



Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa/Protoko Nilita

Memberikan pelatihan untuk mitra kami akan membuat mereka kuat, yang akan membuat Uni Eropa bersama dengan mitranya menjadi lebih kuat di dunia.

tiga modul, Austria juga menyediakan kegiatan di bidang ‘ancaman hibrida’, ‘komunikasi strategis’, ‘keamanan manusia’, ‘keamanan siber’, dan ‘analisis konflik’. Seminar dan konferensi alumni membuat mantan peserta tetap bisa mendapatkan kabar terbaru tentang isu-isu CSDP saat ini dan memfasilitasi jaringan antara mantan peserta.

DAMPAK POSITIF LAIN

Jejaring koneksi adalah salah satu dampak positif lain dari pelatihan untuk daerah mitra. Alumni lama dapat mengandalkan jaringan di dalam Negara Anggota Uni Eropa (baik mantan peserta maupun pakar) dan wilayah mitra (baik antar dan intra-institusi). Yang terakhir adalah nilai tambah yang jelas dan membantu memperkuat pembangunan kapasitas dan tata kelola yang baik. Kontak pribadi, pertemuan tatap muka, dan pertukaran nomor telepon memfasilitasi proses pengambilan keputusan dan pertukaran informasi. Karena sesi pelatihan, seminar, dan konferensi diadakan secara rutin untuk alumni, para mantan peserta memperluas jaringan mereka dari tahun ke tahun.

Selain itu, sesi pelatihan berlangsung berdasarkan prinsip ‘di wilayah, untuk wilayah’, yang membantu mereka yang terlibat untuk memahami tradisi, kebiasaan, dan budaya lokal. Ini juga membantu para peserta untuk saling memahami cara berpikir, hidup dan bekerja, dan cara berpikir negara tetangga mereka. Memahami satu sama lain juga penting guna menghindari kesalahpahaman, membangun kepercayaan, dan membangun hubungan bertetangga yang baik.

KESIMPULAN

Program pelatihan untuk Balkan Barat dan Kemitraan Timur adalah kegiatan yang dibuat dengan baik. Keberhasilan kegiatan regional bergantung pada kurikulum standar ESDC, dan upaya berkelanjutan dari penyelenggara dan pembicara kelas atas, yang mendukung acara tersebut dengan berbagi pengalaman dan keahlian mereka.

Meskipun program telah dilakukan selama lebih dari satu dekade, kontennya selalu mengikuti perkembangan zaman. Mengingat ancaman hibrida, keamanan siber, komunikasi strategis, dan perubahan iklim, agenda keamanan dan pertahanan Uni Eropa akan tetap menjadi salah satu elemen penting untuk kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara mitra.

Garis antara keamanan internal dan eksternal menjadi tidak jelas, dan ada hubungan yang tidak bisa disangkal di antara keamanan dan pembangunan, dan perubahan iklim dan globalisasi adalah topik yang menjadi perhatian umum. Oleh karena itu, pelatihan untuk kebijakan pertahanan dan keamanan bersama tidak akan pernah ketinggalan zaman, tidak akan pernah sia-sia, dan tidak akan pernah membuang-buang waktu.

Memberikan pelatihan untuk mitra kami akan memperkuat mereka, yang akan membuat Uni Eropa bersama dengan mitranya menjadi lebih kuat di dunia.

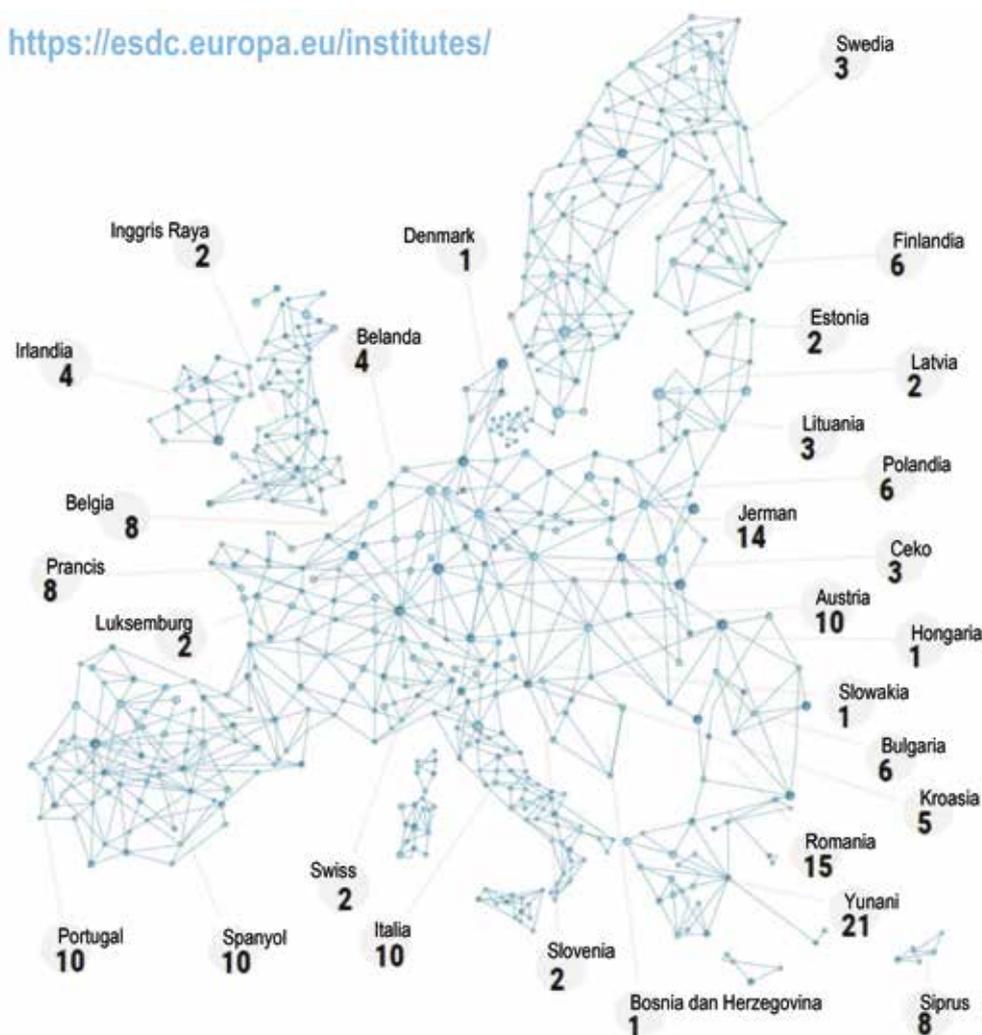
AKADEMI KEAMANAN DAN PERTAHANAN EROPA (ESDC)

Sejak didirikan secara sederhana pada tahun 2005 sebagai jaringan penyedia pelatihan sipil dan militer, Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa secara signifikan telah memperluas kegiatannya, baik dalam hal jumlah kegiatan pelatihan, bidang yang dinaungi, dan hasil yaitu orang-orang yang terlatih. Sebagai satu-satunya penyedia pelatihan terkait kebijakan keamanan dan pertahanan bersama di tingkat Uni Eropa, ESDC dengan cepat menjadi sebuah nama yang terkenal di bidang pelatihan. Pada tanggal 1 September 2020, ESDC telah menjadi penyedia untuk 189 pelatihan dan

pendidikan dari semua 28 Negara Anggota¹ dan dari organisasi antarpemerintah dan negara ketiga.

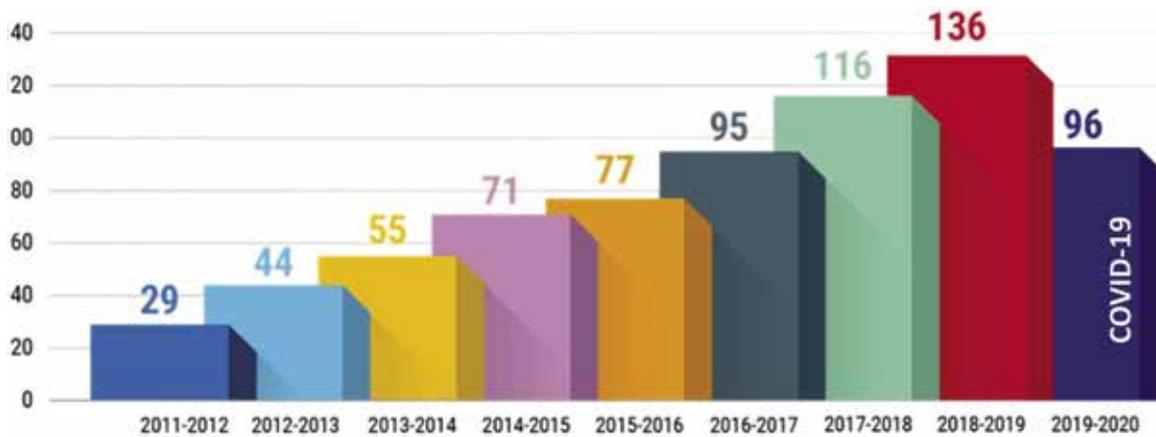
Selama dekade terakhir, jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh akademi ini terus meningkat. Ini adalah hasil dari peran sejumlah faktor. Pertama dan paling penting, ada persyaratan yang bertambah dari Negara Anggota Uni Eropa dan dari badan dan Institusi Uni Eropa untuk memiliki pendidikan dan pelatihan bersama dengan domain khusus. Model bisnis yang diterapkan oleh ESDC semakin meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa Sekolah Tinggi ini memberikan jawaban yang fleksibel dan hemat biaya untuk persyaratan ini. Model bisnis yang diterapkan

adalah pendekatan mengumpulkan dan berbagi, di situ semua Negara Anggota secara sukarela berkontribusi pada tawaran pelatihan ESDC dan mengirimkan peserta. Sebagian kecil dari biaya organisasi pelatihan dibiayai bersama oleh ESDC melalui hibah yang diterima dari anggaran CFSP, tetapi beban usaha masih ditanggung oleh Negara Anggota. Aspek kedua yang memainkan peran penting adalah bahwa ESDC, sebagai organisasi yang tergabung dalam Layanan Tindakan Eksternal Eropa, juga berkontribusi dalam upaya diplomasi publik Uni Eropa melalui upaya pelatihan di lingkungan Eropa (negara-negara Kemitraan Timur dan Balkan Barat), dengan sesi pelatihan yang dide-



Visualisasi jaringan ESDC.

1 Anggota Inggris diberikan status ANP pada tanggal saat Inggris meninggalkan Uni Eropa.



Jumlah kegiatan ESDC per tahun akademik: evolusi dari tahun 2011 sampai 2020

dikasikan untuk wilayah tertentu (Amerika Latin dan negara-negara ASEAN) dan bahkan dengan Tiongkok. Untuk sesi pelatihan ini, ESDC bekerja sama dengan badan regional yang bertanggung jawab dan struktur manajemen krisis dari EEAS dan dengan layanan Komisi terkait.

Terlepas dari semua kegiatan dan tugas ini, jumlah orang yang dibayar di ESDC serta anggaran tahunan tetap terbatas. Untuk mencapainya, sejak awal, jaringan mengandalkan penggunaan aktif solusi TI yang khusus atau siap pakai untuk mengotomatisasi proses administrasi. Pada saat yang sama, ESDC mempromosikan pendekatan modern pelatihan kepada anggota jaringannya melalui pertukaran praktik terbaik. Sejak awal pembelajaran jarak jauh, pembelajaran terbalik, dan pembelajaran campuran telah menjadi bagian dari semua sesi pelatihan kami.

Dari sudut pandang organisasi, struktur ESDC terdiri dari empat elemen. Penyedia pelatihan diwakili oleh Dewan Akademik Eksekutif, yang bertanggung jawab atas kualitas kegiatan pelatihan ESDC. Mereka berada di bawah bimbingan politik dari Komite Pengarah ESDC, dengan Negara Anggota memberikan bimbingan politik, menentukan keseluruhan arah Sekolah Tinggi ini dan menetapkan prioritas. Manajemen harian Sekolah Tinggi berada di tangan Kepala ESDC, yang merupakan satu-satunya perwakilan hukum ESDC. Manajer pelatihan di sekretariat ESDC memberikan bantuan kepada semua elemen ini, tetapi yang lebih penting adalah memainkan peran kunci dalam organisasi kegiatan pelatihan dalam kerja sama



Struktur organisasi ESDC

yang erat dengan lembaga pelatihan dalam jaringan. Pada saat yang sama, dengan pengalaman dan keahlian mereka, manajer pelatihan sering bekerja sama secara erat dengan badan regional dan topikal yang berbeda di EEAS dan Institusi Uni Eropa.

Pada awal tahun 2008, Menteri Pertahanan Negara Anggota mempercayakan ESDC dengan melaksanakan Inisiatif Eropa untuk Pertukaran Perwira Muda, yang terinspirasi oleh Erasmus. Selama bertahun-tahun, beberapa tugas lain diberikan kepada ESDC. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, Komite Pengarah setuju untuk membuat konfigurasi Dewan Akademik Eksekutif yang berbeda. Pada bulan September 2020, Forum Sekolah Menengah Militer Uni Eropa dibuat sebagai konfigurasi ketujuh. Hal ini memungkinkan akademi ini untuk menangani tugas-tugas rumit dengan cepat dan efektif di tingkat yang tepat dan selalu mengutamakan peninjauan luas yang

tepat. Selama bertahun-tahun, beberapa prosedur memastikan bahwa struktur tetap sehat dan fleksibel, menghentikan konfigurasi tertentu saat tidak lagi relevan dan membuat yang baru bila diperlukan.

Dengan diadopsinya kebijakan pelatihan Uni Eropa tentang CSDP pada bulan April 2017 dan pedoman pelaksanaan terkait, ESDC diakui secara resmi sebagai pemain sentral di bidang ini. Sebagai peserta tetap di kelompok pelatihan sipil dan militer, akademi ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kedua kelompok tetap selaras dan aspek sipil-militer ternaungi. Dengan demikian, ESDC bisa memungkinkan dapat mempromosikan pelatihan sipil-militer bersama untuk memastikan bahwa pendekatan terintegrasi Uni Eropa segera dimulai oleh para peserta dari institusi Uni Eropa, Negara Anggota, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan CSDP/CFSP. Saat Negara Anggota meminta dukungan keuangan untuk pekerjaan koordinator pelatihan sipil, ESDC segera

menawarkan layanan administrasinya untuk mengelola dana ini atas nama Komisi. Untuk tahun 2019, anggaran ESDC menyediakan dana yang diperlukan tanpa meningkatkan jumlah rujukan yang telah disepakati, sedangkan untuk tahun 2020 anggaran ditingkatkan untuk membayar biaya tambahan.

Tahun 2020 akan menjadi tahun yang penting bagi Sekolah Tinggi, karena akan merayakan hari jadinya yang ke-15, dan merupakan tahun saat Keputusan Dewan (CFSP) baru tahun 2020/1515 akan disiapkan. Keputusan ini harus memberikan dasar hukum untuk waktu yang akan datang. Pada saat yang sama, mengingat rekam jejak ESDC, tahun 2020 juga harus menjadi tahun saat kita harus memikirkan masa depan jangka panjang Sekolah Tinggi sebagai alat untuk kepentingan Negara Anggota dan Uni Eropa. Apa pun yang terjadi, bagaimana pun, kami ingin menjadi bagian dari solusi, bukan hambatan!



Konfigurasi berorientasi tugas di Dewan Akademik Eksekutif

6.3. HUBUNGAN KEAMANAN INTERNAL DAN EKSTERNAL: KERJA SAMA CSDP-JHA

oleh Crista Huisman



Uni Eropa

Kini, misi dan operasi EU lebih tercapuk pada pendekatan EU yang lebih luas.

Menanggapi wilayah di dalam dan di luar Uni Eropa yang menjadi semakin tidak stabil, ada pekerjaan yang sedang dilakukan untuk memperkuat hubungan keamanan internal-eksternal. Tugas misi/operasi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) dan lembaga Keadilan dan Dalam Negeri (JHA) telah tumbuh semakin dekat: Europol, Eurojust, CEPOL dan terutama Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex) meningkatkan operasi di luar perbatasan Uni Eropa, sementara CSDP telah mengambil tugas yang juga mencakup kepentingan keamanan Uni Eropa seperti migrasi tidak teratur, kontraterorisme, dan kejahatan terorganisir. Sementara sebagian besar

misi dan operasi sudah bekerja sama dalam beberapa bentuk dengan lembaga JHA, pendekatan yang lebih terstruktur diperlukan untuk meningkatkan sinergi, berdasarkan fokus dan latar belakang masing-masing.

KERJA SAMA CSDP-JHA: SAMA-SAMA UNTUNG

Manfaat kerja sama ini jelas untuk kedua instrumen. Misi dan operasi CSDP, saat dikerahkan di luar Uni Eropa, antara lain membantu negara-negara mitra untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, peradilan, prosedur manajemen perbatasan,



Terdapat kaitan erat antara yang terjadi di luar perbatasan EU dan keamanan di dalam Eropa.

dan kemampuan militer mereka untuk mempromosikan stabilitas internal dan memerangi terorisme dan kejahatan terorganisir. Dengan demikian, mereka juga berkontribusi pada perlindungan dan keamanan warga negara Uni Eropa. Peningkatan kerja sama antara lembaga CSDP dan JHA, termasuk melalui berbagi informasi yang sesuai, menawarkan peluang untuk meningkatkan efektivitas tindakan ini. Demikian juga, untuk lembaga JHA, peningkatan kesadaran akan ancaman keamanan eksternal sangat penting untuk peran mereka dalam meningkatkan keamanan internal Uni Eropa. Pelaksana CSDP sering bekerja secara langsung dengan pemangku kepentingan keamanan utama di negara ketiga dan memiliki pengetahuan yang baik tentang keamanan lokal dan konteks politik yang sering relevan dengan keamanan internal Uni Eropa, mandat lembaga JHA, dan kepentingan penegakan hukum yang lebih

luas dari Negara Anggota Uni Eropa. Hubungan yang dikembangkan oleh pelaksana CSDP dengan pihak tuan rumah yang berwenang dapat memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaksana penegakan hukum Uni Eropa dan otoritas lokal ini. Karena tugas CSDP sering membutuhkan keahlian khusus dan berhubungan dengan keamanan, maka sinergi dengan pelaksana JHA di Negara Anggota juga dilakukan dengan penempatan staf.

KERJA SAMA CSDP-JHA: BERTAHAN LAMA

Tindakan untuk memperkuat hubungan antara CSDP dan bidang Kebebasan, Keamanan, dan Keadilan (FSJ), termasuk badan-badan JHA, telah dibentuk bertahun-tahun yang lalu, dan hubungan telah terjalin selama bertahun-tahun antara keamanan

eksternal dan internal Uni Eropa. Negara Anggota dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya peningkatan kerja sama lebih lanjut. Pada tahun 2011, Negara Anggota Uni Eropa untuk pertama kalinya sepakat tentang 'Peta Jalan untuk memperkuat hubungan antara pelaksana FSJ dan CSDP', yang kemudian diperbarui dengan tulisan Bahan untuk Dipikirkan pada tahun 2016¹. Ini diikuti dengan non-tulisan dari EEAS tentang peningkatan kerja sama antara misi/operasi CSDP dan lembaga JHA (2017).

Perjanjian CSDP Sipil (2018), yang juga menggarisbawahi pentingnya hubungan keamanan internal-eksternal, menyoroti bahwa misi CSDP sipil juga harus berkontribusi pada respons Uni Eropa yang lebih luas dalam mengatasi tantangan keamanan 'baru' yang dapat menghambat kestabilan negara tuan rumah atau daerah dan menghambat pencapaian amanat misi. Tantangan-tantangan baru ini termasuk ancaman keamanan yang berhubungan dengan migrasi tidak teratur, ancaman hibrida, keamanan siber, terorisme dan radikalisme, kejahatan terorganisir, manajemen perbatasan, dan keamanan maritim, serta mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan, sambil mempertimbangkan kebutuhan untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya. Peran CSDP sipil dalam memberikan kontribusi untuk mengatasi tantangan keamanan tersebut dapat dilihat sebagai pendalaman bidang prioritas inti kepolisian, supremasi hukum, dan administrasi sipil sebagaimana dijelaskan di Feira (Kesimpulan Presidensi, Dewan Eropa Santa Maria da Feira Juni 2000)². Komitmen 20 dan 21 dari Perjanjian secara khusus menyerukan peningkatan kerja sama dengan pelaksana JHA (badan MS dan JHA) dan pengembangan konsep kecil yang ditargetkan pada tantangan keamanan baru ini.

KERJA SAMA CSDP-JHA: SITUASI SAAT INI

Misi dan operasi CSDP tidak bertindak tanpa ada pengaruh dari luar dan semua itu mempunyai kepentingan untuk membangun hubungan kerja yang baik dan saling memperkuat dengan melakukan upaya lain, seperti dialog dan operasi Uni Eropa yang ada dengan negara-negara mitra, program Uni Eropa yang relevan di bawah JHA, dan inisiatif Negara Anggota. CSDP bekerja sama dengan berbagai cara bersama Europol, Frontex, CEPOL, Eurojust, Interpol, dan EGF. Berbagai perjanjian kerja sama antara lembaga EEAS dan JHA³ menyediakan kerangka kerja strategis untuk semua kolaborasi operasional dan strategis. Kerja sama terjadi di lapangan, dan di tingkat politik, strategis, dan kebijakan. Misalnya, EEAS diundang untuk menghadiri pertemuan rutin jaringan lembaga JHA, termasuk pertemuan direktur, dan mengadakan pertemuan reguler antarstaf, misalnya antara EEAS dan Frontex. Selain itu, EEAS secara rutin terus berhubungan mengenai isu-isu operasional dan strategis terkait CSDP yang relevan dengan lembaga JHA tertentu.

Ada banyak interaksi di lapangan antara CSDP dan lembaga JHA. Contoh nyata kerja sama ada di Libya, yaitu para ahli Frontex di dalam EUBAM Libya mendukung misi berdasarkan kebutuhan dan rotasi, atau di Sahel, yaitu terjadinya pertukaran informasi strategis di antara misi EUCAP Sahel dan Frontex. Sejak tahun 2009, EULEX Kosovo tetap menjadi fokus utama operasional dan strategis untuk komunikasi antara polisi Kosovo dan Europol. Di sisi militer, Sel Informasi Kejahatan (CIC) adalah contoh utama bentuk kerja sama. CIC didirikan di EUNAVFOR MED Sophia, sebuah misi militer eksekutif CSDP, dan sekarang direplikasi di EUNAVFOR MED Irini. Di CIC, personel khusus dari lembaga Uni Eropa, Europol, Frontex, dan operasi CSDP bertukar informasi tentang aktivitas kriminal di Mediterania Tengah dan memfasilitasi pertukaran informasi secara langsung.

1 'From strengthening ties between CSDP/FSJ actors towards more security in EUROPE', ST 10934/16

2 baca juga 'Strengthening civilian CSDP - Concept paper' ST 8084/2018

3 Eurojust-EEAS Dokumen Kesepahaman (2017), Perjanjian Interpol (2016), Perjanjian Europol (2014/2015 & 2018), Perjanjian Frontex (2013-2015), Nota Kesepahaman CEPOL dengan ESDC (2015), European Gendarmerie Force (2014)



FRONTEX

Bersama dengan Negara Anggota, kami memastikan bahwa perbatasan yang aman dan berfungsi baik memberikan keamanan. Misi dan operasi CSDP dapat memanfaatkan Frontex yang sudah kuat.

KERJA SAMA CSDP-JHA: MASA DEPAN

Meskipun peningkatan kerja sama mungkin terlihat mudah, kenyataannya terbukti menantang karena berbagai alasan. Pertama, kedua instrumen tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda: JHA berhubungan dengan keamanan dalam negeri, termasuk kementerian dalam negeri (MoI) dan kementerian kehakiman (MoJ), sedangkan CSDP umumnya berada di bawah tanggung jawab kementerian luar negeri (meskipun stafnya juga berasal dari kementerian bidang MoI dan MoJ) dan kementerian pertahanan. Kedua bidang tanggung jawab ini juga tercermin di Brussel, yang semakin diperumit oleh bidang pembiayaan yang berbeda dan struktur tanggung jawab Uni Eropa yang berbeda. Tantangan lain berkaitan dengan sifat kerja sama: lembaga JHA

pada umumnya membutuhkan informasi yang sifatnya *dapat dilaksanakan* (operasional), beberapa tantangan, ada untuk misi dan operasi CSDP guna menyediakan data tersebut. Tantangan terakhir berkaitan dengan sifat dari kedua instrumen tersebut, bahkan jika mereka ditempatkan di area yang sama, pekerjaan mereka dilakukan dengan dasar pilar Uni Eropa yang berbeda.

Meskipun CSDP dan JHA sangat berbeda, ada pemahaman dan kemauan bersama untuk bekerja sama. Pengaturan dan praktik yang ada di antara CSDP dan JHA telah meningkatkan kerja sama dan pertukaran informasi. Masih banyak yang harus dilakukan agar kolaborasi berada di satu arus, khususnya membangun kerangka hukum baru Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex)⁴ dan Eurojust⁵, dan memperkuat mandat Europol⁶ saat ini. Sementara sebagian besar misi

4 Regulasi (EU) 2019/1896 dari Parlemen Eropa dan Dewan 13 November 2019 mengenai Perbatasan Eropa dan Penjaga Pantai dan pencabutan Regulasi (EU) No 1052/2013 dan (EU) 2016/1624, OJ L 295, 14.11.2019 (Regulasi EBCG).

5 Regulasi Eurojust (Regulasi (EU) 2018/1727 dari Parlemen dan Dewan Eropa)

6 Regulasi (EU) 2016/794 dari Parlemen dan Dewan Eropa pada 11 May 2016, OJ L 135, 24.5.2016 p.53.

dan operasi sudah bekerja sama dalam berbagai bentuk dengan lembaga JHA, pendekatan yang lebih terstruktur diperlukan untuk memastikan bahwa kedua alat Uni Eropa ini bekerja sama secara koheren, dan bahwa setiap bentuk tumpang tindih, atau bahkan persaingan, dapat dicegah. Bentuk-bentuk kerja sama ini perlu mempertimbangkan perbedaan sifat dari kedua instrumen tersebut dan oleh karena itu didasarkan pada keunggulan komparatif masing-masing. Pilihan untuk kerja sama lebih lanjut dapat diringkaskan secara luas di sepanjang bidang (1) peningkatan berbagi informasi, (2) peningkatan konsultasi dari tahap perencanaan dan seterusnya, (3) peningkatan kerja sama di lapangan (misalnya saling memberikan fasilitas dan dukungan logistik), (4) pengembangan kemampuan, termasuk pelatihan bersama, koordinasi upaya pelatihan, lokakarya, dan kunjungan studi, dan (5) penguraian peran selama pelaksanaan tindakan dan koordinasi selama fase transisi (pengurutan). Selain itu, kerja sama dapat diperkuat dengan penegakan hukum nasional (MS) dan pelaksana peradilan, termasuk dengan meningkatkan dialog di antara CSDP dan kementerian terkait. Akhirnya, perlu dipertimbangkan apakah penempatan bersama lembaga JHA dalam misi atau operasi CSDP akan membawa manfaat. Ini juga akan menguntungkan misi dan operasi CSDP, karena mereka akan memiliki akses langsung ke keahlian khusus (pengetahuan, sumber daya manusia, informasi, dll.) yang relevan dengan mandat mereka.

CSDP – KERJA SAMA FRONTEx

Regulasi EBCG mempertimbangkan peningkatan signifikan dalam kapabilitas Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex), termasuk pembuatan korps pasukan siaga yang awalnya berjumlah 5.000 staf operasional pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 10.000 penjaga perbatasan nanti pada tahun 2027. Regulasi baru juga memperluas perjanjian eksternal Frontex: Frontex mengerahkan pejabat perantara ke wilayah dari Balkan Barat hingga Afrika Barat, dan kini

memungkinkan untuk beroperasi di negara asing yang berkomitmen perjanjian dengan EU. Regulasi baru juga ‘mengatur’ kerja sama dengan CSDP: Pasal 68(1), sub-ayat kedua, pada Regulasi EBCG⁷ menyatakan: “[...] Badan tersebut akan bekerja sama, terutama, dengan: j) misi dan operasi CSDP, sesuai dengan mandat mereka, dengan pertimbangan yang memastikan beberapa hal berikut: (i) menerapkan standar pengelolaan perbatasan terintegrasi Eropa; (ii) kesadaran situasional dan analisis risiko”.

Meskipun terdapat beberapa risiko tumpang tindih dalam tugas dan persaingan untuk sumber daya Negara Anggota, misi dan operasi CSDP dapat memanfaatkan Frontex yang sudah kuat, misalnya terkait dengan pusat kehebatan secara de facto yang menjadi cita-cita. Sebagai Negara Anggota hanya memiliki satu set sumber daya yang digunakan, kapabilitas tambahan yang dikembangkan dapat menguntungkan CSDP secara tidak langsung. Faktor kunci dari kerja sama di masa depan adalah saling pengertian yang menjadi sarana yang dapat digunakan. Untuk tujuan ini, pemahaman bersama antara MoI nasional dan MFA akan krusial, juga diskusi bersama di Dewan misalnya PSC-COSI.

KESIMPULAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Area Kebebasan, Keamanan dan Keadilan (FSJ) dengan badan JHA dan misi dan operasi CSDP adalah area kebijakan khusus di bawah berbagai rezim legal, dikelola oleh berbagai pemangku kepentingan (militer, diplomatik atau urusan dalam negeri) dan diterapkan oleh berbagai entitas EU. Tetapi, keamanan internal dan eksternal telah menjadi saling terkoneksi. Kerja sama telah terjadi pada hampir semua misi dan operasi CSDP, lebih diupayakan untuk menguatkan dan mengefektifkan kerja sama ini. Kerja sama yang ditingkatkan ini dapat terus memberikan dampak pada upaya EU untuk melindungi warga dan mempertahankan kepentingan dan nilai di Eropa dan wilayah lain.

⁷ Pasal 68(1)(j) Regulasi (EU) 2019/1896 dari Parlemen Eropa dan Dewan 13 November 2019 mengenai Perbatasan Eropa dan Penjaga Pantai dan pencabutan Regulasi (EU) No 1052/2013 dan (EU) 2016/1624, OJ L 295, 14.11.2019

6.4. HUBUNGAN KEAMANAN DAN PEMBANGUNAN

oleh Clément Boutillier



European Union/ECHO, Malika Panoret

Untuk meningkatkan keefektifan dan dampak dari kebijakan pengembangan EU, jaringan keamanan dan pengembangan memberikan nilai tambah dibanding pendekatan pengembangan tradisional dengan memperhatikan spesifikasi bekerja dalam kondisi yang rapuh dan terpengaruh konflik.

Perhubungan keamanan dan pembangunan – kedamaian juga seringkali ditambahkan ke persamaan – telah didefinisikan dan dirujuk ke berbagai komunikasi Komisi, kesimpulan dan dokumen kebijakan lainnya dari Dewan. Strategi Keamanan EU tahun 2003 menekankan bahwa prakondisi untuk pembangunan dan bahwa, pada gilirannya, pembangunan adalah sarana yang kuat untuk mendorong reformasi di negara mitra. Pada tahun 2003, Eropa telah mulai menghadapi ancaman baru berupa *‘lebih beragam, kurang terlihat dan*

kurang terprediksi’, terorisme kombinasi, konflik regional, pengelolaan negara lemah dan kejahatan terorganisasi di luar perbatasan, termasuk di banyak negara yang didukung oleh kebijakan pembangunan EU. Konsensus Eropa 2006 mengenai Pembangunan mendefinisikan perhubungan keamanan dan pembangunan sebagai berikut: ‘Tanpa kedamaian dan keamanan, pembangunan dan penghapusan kemiskinan tidak dimungkinkan dan tanpa pembangunan dan penghapusan kemiskinan tidak akan terwujud tanpa kedamaian’.¹

¹ European Consensus on Development, 2006, tersedia di <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2006%3A046%3A0001%3A0019%3AEN%3APDF>, terakhir di akses pada 10 Desember 2016.

PENGHAPUSAN KEMISKINAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 208 Perjanjian tentang Fungsinya EU, tujuan utama kebijakan pembangunan adalah pengurangan dan, dalam jangka panjang, penghapusan kemiskinan. Kebijakan pengembangan juga mengejar tujuan lain, seperti memastikan kelangsungan perkembangan ekonomi, sosial dan lingkungan serta peningkatan demokrasi, kepatuhan hukum, pemerintahan yang bagus dan penghormatan internasional terhadap hak asasi manusia.

Untuk meningkatkan keefektifan dan dampak dari kebijakan pengembangan EU, jaringan keamanan dan pengembangan memberikan nilai tambah dibanding pendekatan pengembangan tradisional dengan memperhatikan spesifikasi bekerja dalam kondisi yang rapuh dan terpengaruh konflik (FCAS).

Lebih dari 50% bantuan pengembangan EU hari ini diarahkan pada negara-negara yang terpengaruh oleh konflik dan kerapuhan EU memiliki berbagai instrumen untuk mengatasi konflik dan krisis, seperti pencegahan konflik, sanksi, bantuan kemanusiaan, mediasi, misi dan operasi Keamanan Umum dan Kebijakan Perlindungan (CSDP), stabilisasi, dialog politik dan kerja sama pengembangan.

Kerja sama pengembangan adalah landasan dari tindakan eksternal Uni Eropa. Hal ini diatur oleh Direktur Jenderal untuk Kerja sama dan Pembangunan Internasional (Ditjen DEVCO), yang menentukan kebijakan pengembangan EU dan menggunakan serangkaian instrumen untuk menerapkan program dan proyek.

Hal ini dilakukan dengan mengikuti prinsip keefektifan pengembangan seperti kepemilikan intervensi oleh mitra di level lokal, nasional atau regional, kesetaraan di balik tujuan dan strategi ditentukan oleh mitra tersebut dan koordinasi dan pembagian informasi di antara donor untuk menghindari duplikasi. Pada tahun 2015, anggaran yang diatur oleh Ditjen-DEVCO adalah sejumlah EUR 8,42 miliar. Uni Eropa dan Negara Anggotanya merupakan



Ukraina: Persediaan vital menjangkau penduduk di desa garis depan. Peralatan kebersihan didistribusikan di Starohnativka, wilayah Donetsk

penyedia nomor satu untuk bantuan pembangunan resmi (ODA) di dunia.

PERHUBUNGAN KEAMANAN DAN PEMBANGUNAN

Contoh awal dari strategi pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan jaringan ini disediakan oleh Sierra Leone dari tahun 2001 dan seterusnya. Pihak berwenang, dengan dukungan masyarakat internasional, memprioritaskan keamanan sebagai tujuan pembangunan pertama mereka setelah bertahun-tahun perang saudara agar dapat membangun infrastruktur dan memberikan layanan sosial di seluruh negeri nanti.

Karena semakin jelas bahwa FCAS tertinggal dari negara-negara berkembang lainnya dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium² (MDGs), sebuah konsensus muncul di antara para pendonor untuk memprioritaskan dukungan kepada negara-negara tersebut.

2 Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim; untuk mencapai pendidikan dasar universal; untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; menurunkan angka kematian anak; untuk meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; untuk memastikan kelestarian lingkungan; untuk mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

KERJA SAMA PENGEMBANGAN, KEMANUSIAAN DAN KEAMANAN

Meskipun kerapuhan adalah konsep multidimensi yang mencakup faktor ekonomi (misalnya pengangguran kaum muda), lingkungan (misalnya paparan bencana alam dan epidemi), politik (misalnya korupsi, kurangnya inklusivitas politik), keamanan (misalnya kejahatan) dan sosial (misalnya ketidaksetaraan),³ kekerasan dan ketidakamanan seringkali menjadi alasan utama sebuah negara dianggap rapuh. FCAS biasanya memiliki kapasitas, wewenang dan/atau legitimasi yang terbatas untuk mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, dan pihak berwenang harus menangani berbagai prioritas yang mendesak. Sebagai hasilnya, serangkaian reformasi telah diadaptasi ke konteks spesifik, meskipun biasanya dimulai dengan pembangunan institusi dan tindakan spesifik untuk meningkatkan kepercayaan antar negara dan masyarakat. Kesepakatan Baru untuk keterlibatan di negara-negara rapuh,⁴ diadopsi sebagai bagian dari hasil Forum Tingkat Tinggi Busan tentang efektivitas bantuan pada tahun 2011 dengan dukungan kuat dari EU, mencantumkan lima tujuan pembangunan perdamaian dan pembangunan negara untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan bantuan di FCAS: politik yang sah, keamanan, keadilan, fondasi ekonomi dan pendapatan dan layanan. Koordinasi antara pengembangan, kemanusiaan dan pelaksana keamanan, dalam kepatuhan penuh dengan memperhatikan mandat dan prinsipnya, guna mencegah krisis kembali terjadi atau untuk membantu negara-negara kembali pulih dalam jangka panjang, seringkali menjadi tantangan tambahan. Meskipun kemajuan mengesankan baru-baru ini di negara-negara seperti Myanmar/Burma dan Kolombia, krisis dan konflik menjadi lebih berlarut-larut dan berulang. Di enam dari sepuluh negara, kebutuhan kemanusiaan yang signifikan terkait dengan bencana yang berasal dari manusia dan alam ber-

langsung selama delapan tahun atau lebih. Peningkatan implementasi jaringan keamanan dan pembangunan di FCAS akan menjadi semakin penting di masa depan karena diperkirakan persentase penduduk miskin dunia yang hidup di FCAS akan meningkat dari 43 % pada tahun 2015 menjadi 62 % pada tahun 2030, dibandingkan dengan hanya 20 % pada tahun 2005.⁵

EU telah menjadi salah satu pemain paling awal dan paling menonjol yang menerjemahkan hubungan antara keamanan dan pembangunan ke dalam kerangka kebijakan dan tindakannya mengingat sejarah dan pengalamannya dalam mempromosikan perdamaian di dalam perbatasannya sendiri dan kredibilitasnya dalam mempromosikan nilai-nilai seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Hal itu juga dikarenakan skala dukungannya, kemitraan berkelanjutan yang telah dibangun selama ini dengan berbagai FCAS dan keragaman instrumen jangka pendek dan panjang yang dapat dimobilisasi oleh EU di seluruh siklus konflik. Agenda Perubahan 2011,⁶ yang mendefinisikan kebijakan pembangunan EU, menggarisbawahi upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan terkait keamanan dan kerapuhan yang menyerukan respons yang lebih terintegrasi, koheren, dan terkoordinasi. Strategi Global EU 2016 juga menyerukan 'sifat ganda - keamanan dan pembangunan - dari keterlibatan [EU]' untuk dikembangkan untuk menghadapi tantangan spesifik yang ditimbulkan oleh konflik. Proposal untuk Konsensus Pembangunan Eropa yang baru, yang diadopsi oleh Komisi Eropa pada November 2016,⁷ juga menyatakan bahwa 'EU dan Negara-negara Anggotanya akan menggunakan kerja sama pembangunan sebagai bagian dari rangkaian lengkap kebijakan dan instrumen untuk mencegah, mengelola, dan membantu menyelesaikan konflik dan krisis, memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan membangun perdamaian abadi dan pemerintahan yang baik'. Konsensus Eropa pada Pembangunan mencerminkan fakta bahwa EU bertujuan untuk memainkan peran penting

3 OECD, *States of Fragility 2016 (Highlights)*, p. 37, tersedia di <http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/Fragile-States-highlights-2016.pdf>, terakhir di akses pada 10 Desember 2016

4 A New Deal for engagement in fragile states, tersedia di https://www.pbsdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf, terakhir di akses pada 10 Desember 2016.

5 OECD, *States of Fragility 2015: Meeting Post-2015 Ambitions*, p. 21, tersedia di <http://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/documentuploads/SOF2015.pdf>, terakhir di akses pada 10 Desember 2016.

6 Lihat COM (2011) 637 final 13 Oktober 2011.

7 COM(2016) 740 final pada 22 November 2016.



European Union - 2017/Jemiller-Jacquemart

Keikutsertaan Karmenu Vella, Anggota Komisi Eropa, di EU/Pertemuan Menteri Tahunan Angola untuk Keamanan Maritim.

dalam penerapan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi pada tahun 2015. Agenda 2030 mewakili cara baru dalam menghadapi tantangan global berdasarkan tujuan umum dan tanggung jawab bersama untuk semua negara. Perdamaian dan keamanan adalah blok bangunan untuk pencapaian agenda secara keseluruhan, dan kemajuan akan dipantau melalui tujuan khusus – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 – tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.

PENERAPAN PROGRAM DAN PROJEK

Dua evaluasi dari dukungan yang diberikan Komisi Eropa, untuk reformasi sektor keadilan dan keamanan (JSSR)⁸ dan untuk pencegahan konflik dan pembangunan kedamaian (CPPB)⁹ secara masing-masing,

diterbitkan pada tahun 2011. Mereka membantu mengukur bagaimana jaringan keamanan dan pembangunan memperoleh kepentingan tak hanya dalam kebijakan tapi juga dalam penerapan program dan proyek. Antara 2001 dan 2009, dukungan Komisi Eropa untuk JSSR meningkat dari EUR 14 juta menjadi EUR 174 juta per tahun, dan dukungan untuk CPPB dari EUR 120 juta menjadi EUR 854 juta. Untuk periode 2014 – 2020, lebih dari 10% kerja sama pembangunan EU diprogram untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan pencegahan, resolusi, perdamaian, dan keamanan konflik. Intervensi EU di bidang-bidang ini terjadi di semua tingkatan, dari tingkat lokal hingga global. Dukungan ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari mendukung mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat di timur laut Nigeria hingga berkontribusi pada dana perwalian rekonstruksi di Afghanistan, mencegah pelanggaran hak asasi manusia di Uganda, dan mendukung

8 Tersedia di http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2011/1295_vol1_en.pdf, terakhir di akses pada 10 Desember 2016.

9 Tersedia di http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/thematic_evaluation_of_ec_support_to_pb_and_conflict_prevention_2011_en.pdf, terakhir di akses pada 10 Desember 2016.

program penghapusan ranjau dan aksi anti-pembajakan. Fasilitas Perdamaian Afrika (APF) mewakili sebagian besar dukungan EU yang diberikan kepada CPPB. Fasilitas ini didirikan pada tahun 2004 untuk mendukung kapasitas Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Regional (REC) untuk mengelola konflik dan sejauh ini lebih dari EUR 2 miliar telah berkomitmen di bawah APF. Ini berfungsi untuk mendukung operasi perdamaian di Afrika seperti AMISOM di Somalia, MISCA di Republik Afrika Tengah, ECOMIB di Guinea-Bissau dan Gugus Tugas Gabungan Multi-Nasional (MNTJF) untuk memerangi Boko Haram. Ini juga digunakan untuk meningkatkan dialog tentang tantangan terhadap perdamaian dan keamanan dan untuk mendukung operasi Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Afrika untuk pencegahan dan pengelolaan konflik.

PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA

Evaluasi program kerja sama pembangunan menyoroti sejumlah isu yang secara khusus relevan untuk pembangunan perdamaian dan pembangunan negara: (a) saling ketergantungan antara pemerintahan yang baik, keamanan, keadilan, pertumbuhan, lapangan kerja dan pemberian layanan dasar; (b) kebutuhan untuk mendasarkan dukungan pada analisis menyeluruh dan bersama tentang dinamika konflik, kerapuhan dan faktor-faktor ketahanan untuk mengatasi akar penyebab konflik daripada gejalanya; (c) kebutuhan akan kepemilikan nasional dan (d) kemampuan para mitra untuk bersikap fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan di lapangan dan untuk bekerja sama. Komunikasi gabungan tahun 2014 pada pendekatan EU yang komprehensif terhadap konflik dan krisis eksternal merupakan usaha untuk menghadapi beberapa dari masalah-masalah ini.¹⁰

PENDEKATAN KOMPREHENSIF PADA KONFLIK DAN KRISIS EKSTERNAL

Pendekatan komprehensif yang dituangkan dalam komunikasi 2013 tersebut di atas berupaya untuk

meningkatkan pelaksanaan jaringan keamanan dan pembangunan sementara juga mencakup bidang-bidang lain seperti migrasi dan gender. Ini memberikan praktisi dengan prinsip-prinsip panduan untuk diterapkan dalam situasi konflik dan krisis. Ini bukan tentang 'apa yang harus dilakukan' melainkan 'bagaimana melakukannya'. Ini dibangun di atas sejumlah inisiatif sebelumnya seperti strategi Sahel dan Tanduk Afrika, yang bertujuan untuk membuat tindakan eksternal EU lebih koheren, lebih terlihat, dan lebih efektif dengan memobilisasi semua alat EU menuju tujuan bersama. Misalnya, strategi untuk pembangunan dan keamanan di Sahel, yang diadopsi pada 2011, menyerukan mobilisasi semua perangkat EU yang tersedia untuk memenuhi tujuan jangka panjang 'meningkatkan stabilitas politik, keamanan, pemerintahan yang baik, kohesi sosial dan ekonomi dan kesempatan pendidikan di negara bagian Sahel, sehingga membentuk kondisi untuk pembangunan berkelanjutan lokal dan nasional'.

Delapan elemen mendukung pendekatan komprehensif EU: (1) analisis bersama untuk membangun pemahaman bersama tentang tantangan yang dihadapi dalam konteks tertentu; (2) definisi visi strategis bersama yang menentukan arah keterlibatan EU; (3) fokus pada pencegahan untuk melestarikan kehidupan, untuk menghemat biaya dan untuk melindungi kepentingan EU; (4) mobilisasi kekuatan dan kapasitas EU yang berbeda; (5) komitmen jangka panjang dengan mempertimbangkan bahwa menangani kerapuhan dan membangun masyarakat yang tangguh membutuhkan waktu; (6) mengakui hubungan antara kebijakan internal dan eksternal dan tindakan di bidang-bidang seperti migrasi, perubahan iklim dan kejahatan terorganisir; (7) penggunaan delegasi EU yang lebih baik sebagai pemain sentral untuk melakukan dialog dan dukungan EU di negara-negara mitra; dan (8) perlunya bekerja dalam kemitraan, misalnya dengan PBB atau NATO.

PENERAPAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Penerapan pendekatan komprehensif seperti yang ditunjuk dalam kesimpulan Dewan pada Mei 2014,

¹⁰ JOIN(2013) 30 final 11 Desember 2013

merupakan tanggung jawab bersama dari institusi dan Negara Anggota EU. Rencana tindakan untuk mengedepankan prioritas tema dan geografis tertentu terkait dengan pendekatan komprehensif telah dipersiapkan untuk 2015 dan 2016-2017. Kedua rencana tindakan ini mencakup misalnya transisi dari misi CSDP ke instrumen EU lainnya, peluncuran global untuk sistem peringatan dini dan peningkatan staf delegasi EU yang dikhususkan pada migrasi, masalah keamanan dan pembentukan ulang sektor keamanan. Juga mencakup prioritas geografis seperti Ukraina, Afghanistan, Somalia dan Mali. Sebagai bagian dari fokusnya pada pencegahan dan analisis bersama, pendekatan komprehensif telah mengarahkan EU untuk memperkuat kapasitasnya untuk memahami kerapuhan dan mengantisipasi krisis dan konflik dengan mengembangkan sejumlah alat. Sistem peringatan dini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dari kemunculan atau peningkatan kekerasan dan konflik di seluruh berbagai indikator, terutama pada negara dan wilayah serta prioritas tematik di situ EU memiliki minat dan pengaruh tertentu. Latihan ini memicu peningkatan perhatian, pemantauan intensif, dan tindakan pencegahan yang tepat untuk negara, wilayah, dan area tematik terpilih di seluruh sistem EU.

Panduan tentang analisis konflik dan sensitivitas konflik juga telah dikeluarkan untuk memaksimalkan dampak tindakan EU dan untuk mengelola risiko intervensi dalam situasi yang pada dasarnya tidak stabil. Mengembangkan analisis bersama dengan menggunakan alat tersebut sangat penting karena hubungan antara keamanan dan pembangunan selalu spesifik konteks dan akan menentukan pilihan dan koordinasi intervensi yang paling tepat (lihat grafik di bawah)

TRANSISI DARI PENGELOLAAN KRISIS KE PEMBANGUNAN PERDAMAIAN

Strategi Global EU menekankan bahwa 'kebijakan perdamaian EU juga harus memastikan transisi yang lebih mulus dari manajemen krisis jangka pendek ke pembangunan perdamaian jangka panjang untuk menghindari kesenjangan di sepanjang siklus konflik'. Menghubungkan tanggapan krisis, seperti bantuan kemanusiaan dan CSDP, dengan tindakan jangka panjang dalam pembangunan perdamaian, pembangunan negara, ketahanan dan pemerintahan memang merupakan tantangan berulang untuk penerapan pendekatan komprehensif, meskipun Instru-



Komisi Eropa: Beroperasi dalam situasi konflik dan kerapuhan. Brussels 2014, h. 3

Intervensi luas

Catatan: CSDP = Kebijakan Umum Keamanan dan Pertahanan

LRRD = menghubungkan bantuan, rehabilitasi dan pembangunan

PEMBANGUNAN KAPASITAS DALAM DUKUNGAN KEAMANAN DAN PEMBANGUNAN

Paralel dengan komunikasi gabungan pada reformasi sektor keamanan, sebuah proposal legislatif untuk perubahan Instrumen berkontribusi untuk Kestabilan dan Perdamaian (IcSP) diajukan¹ pada Bulan Juli 2016. Proposal tersebut memperluas bantuan EU kepada pasukan militer negara-negara mitra, dalam keadaan luar biasa dan jelas, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan membantu negara-negara mitra mencegah dan mengelola krisis sendiri. Proposal tersebut menyoroti bahwa militer dapat memainkan peran penting dalam mencegah kekerasan dan dapat berkontribusi untuk menciptakan kondisi perdamaian. Proposal ini melanjutkan celah yang diidentifikasi dalam dukungan EU untuk kapasitas mitra di sektor keamanan yang difokuskan dalam komunikasi gabungan Pembangunan Kapasitas dalam mendukung Keamanan dan Pembangunan (CBSD) bulan April 2015². Bantuan yang diberikan di bawah proposal legislatif ini dapat mencakup pelatihan, pendampingan dan saran, serta penyediaan peralatan atau perbaikan infrastruktur dengan tujuan yang terkait dengan pembangunan dan keamanan manusia. Namun, itu tidak termasuk pengeluaran militer berulang dan pengadaan senjata dan amunisi.

1 COM(2016) 447 final 5 Juli 2016.

2 JOIN(2015) 17 final 28 April 2015.

men yang berkontribusi pada Stabilitas dan Perdamaian (IcSP) dapat digunakan untuk mempersiapkan landasan bagi bantuan yang lebih berkelanjutan dan berjangka lebih panjang yang diberikan oleh intervensi pembangunan EU. Komunikasi tentang pendekatan komprehensif menekankan bahwa program bantuan pembangunan harus fleksibel agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang mudah berubah di negara-negara rapuh. Meskipun periode pemrograman tujuh tahun untuk instrumen pembangunan sangat membantu negara-negara mitra untuk menentukan area di situ EU dapat mendukung mereka dan memiliki aliran pembangunan yang andal dan dapat diprediksi, biasanya sulit untuk menyesuaikan program dengan situasi konflik yang berkembang. Pembentukan

dana perwalian EU adalah respons yang paling berkembang sepenuhnya untuk tantangan ini, dan bekerja dengan memberikan bantuan pembangunan secara lebih fleksibel dengan prosedur yang lebih cepat dalam situasi krisis dan pasca-konflik. Tujuan dana perwalian darurat EU untuk Afrika, yang didirikan pada KTT Valletta pada November 2015, adalah untuk mendukung negara-negara mitra di Afrika Utara, Sahel dan Tanduk Afrika dengan proyek dan program pembangunan yang berfokus pada penanganan akar penyebab ketidakstabilan, ketidakamanan, pemindahan paksa dan konflik.

Misalnya, Jendela Sahel termasuk sebagai prioritas (a) memperkuat ketahanan masyarakat lokal untuk menghadapi tantangan lingkungan, sosial-ekonomi dan keamanan; (b) meningkatkan pengelolaan perbatasan, mempromosikan perdagangan transnasional dan jaringan kriminal; dan (c) mencegah radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Beberapa proyek telah dirancang berkat analisis dan pengetahuan gabungan dari Ditjen DEVCO di kantor pusatnya dan di delegasi EU serta misi CSDP yang beroperasi di area yang sama. Sebuah program untuk memperkuat keamanan di wilayah Mopti dan Gao di Mali dan untuk meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan (PARSEC Mopti-Gao) disusun dalam kerja sama yang erat dengan misi EUCAP dan EUTM.

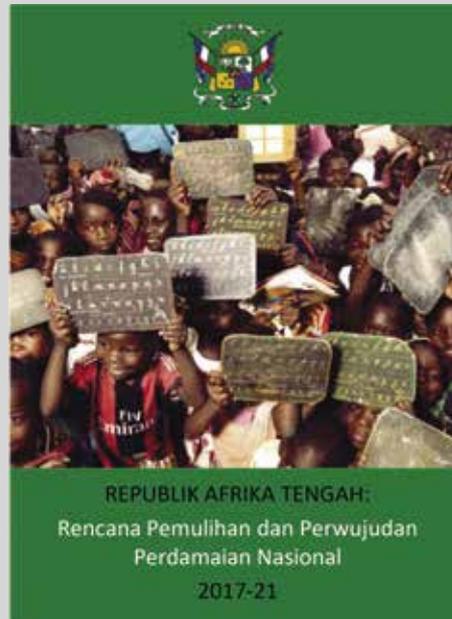
Ini memberikan ilustrasi konkret dari beberapa elemen pendekatan komprehensif terhadap konflik dan krisis, seperti halnya kerangka kebijakan Uni Eropa yang baru untuk reformasi sektor keamanan

KERANGKA KEBIJAKAN REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

Selama periode pemrograman saat ini (2014-2020), 15 negara memiliki komponen keamanan khusus sebagai bagian dari kerja sama mereka dengan Komisi Eropa. Kegiatan yang dibiayai dengan instrumen EU dalam reformasi sektor keamanan (RSK) termasuk, namun tidak terbatas pada, penegakan hukum, pengelolaan perbatasan, pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR), dan pengawasan sipil terhadap pasukan keamanan oleh parlemen dan organisasi masyarakat sipil. Komunikasi tentang reformasi sektor keamanan yang diadopsi pada Juli 2016 membawa semua aktor

PENDEKATAN KOMPREHENSIF DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH DAN PENDEKATAN EU UNTUK KERAPUHAN

Konferensi Republik Afrika Tengah yang dilaksanakan di Brussel pada November 2016. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dukungan dari komunitas internasional untuk membantu negara itu pulih dari periode ketidakstabilan yang lama setelah pemerintahnya digulingkan pada 2013. Sepanjang krisis, EU telah menggunakan segala cara yang tersedia untuk mendukung negara tersebut, termasuk melalui tiga misi CSDP dan sejumlah besar bantuan kemanusiaan. EU telah terlibat dalam dialog politik dengan pihak berwenang. Ini telah membentuk dana perwalian multi-donor 'Bêkou' untuk menghubungkan bantuan, rehabilitasi dan pembangunan, dan telah menyalurkan dana pembangunan untuk mendukung masyarakat sipil, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan. Juga telah mendukung proses pemilihan yang bebas dan adil untuk kembali ke tatanan konstitusional dan untuk melengkapi apa yang dianggapnya sebagai transisi politik yang sukses. Sementara 2 juta orang masih berisiko mengalami kerawanan pangan dan seperlima dari populasi tetap mengungsi, EU, PBB, dan Bank Dunia telah mendukung otoritas CAR dalam menyusun Rencana Pemulihan dan Pembangunan Perdamaian Nasional untuk 2017–2021. Rencana tersebut memprioritaskan kegiatan pembangunan khusus dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa penduduk serta keamanan, perdamaian dan rekonsiliasi. Kasus Republik Afrika Tengah menggambarkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin terjadi bila dan ketika ada perdamaian dan keamanan. Sebagai bagian dari penilaian, beberapa konsultasi dan survei telah dilakukan di negara tersebut untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang harapan dan prioritas penduduk. Keamanan dianggap sebagai perhatian dan bentuk utama, bersama dengan perdamaian dan rekonsiliasi, pilar pertama dari strategi tersebut.



dan instrumen EU di bawah satu kerangka kebijakan tunggal, dengan mempertimbangkan bahwa misi dan operasi CSDP, kerja sama pembangunan dan IcSP dapat digunakan untuk mengimplementasikan intervensi RSK. Oleh karena itu, para aktor EU perlu berbagi informasi tentang berbagai intervensi yang mereka jalankan di bidang ini baik dalam situasi pasca-konflik atau untuk mencegah krisis, dengan mencatat bahwa 'ketidakamanan dan ketidakstabilan sering ditimbulkan atau diperparah oleh kurangnya sistem keamanan yang efektif dan akuntabel'.

PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

Tujuan pertama dari dukungan Uni Eropa untuk RSK adalah untuk meningkatkan keamanan negara dan terutama keamanan individu. Dari perspektif keamanan manusia, kepercayaan antar populasi dan pelaksana keamanan serta kemampuan negara untuk memberikan keamanan merupakan kunci untuk legitimasi negara. Persepsi dari negara sebagian besar bergantung pada cara populasi dan pelaksana keamanan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan kedua adalah untuk mendukung sektor keamanan dan untuk memastikan para aktor keamanan bertanggung jawab dan bertindak



Angkatan Bersenjata Austria

CSDP dapat mengisi celah dalam langkah pendek, tapi di langkah panjang instrumen EU lainnya lah yang harus memimpin.

sesuai dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Dukungan akan diberikan untuk RSK sejalan dengan sejumlah prinsip utama, termasuk yang terkait dengan efektivitas pembangunan. Kepemilikan nasional dan kemampuan semua instrumen EU untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan di lapangan serta pentingnya melakukan dialog politik dan kebijakan secara teratur tentang keamanan adalah kuncinya. Mengelola risiko, termasuk risiko merugikan dan risiko reputasi, sangat penting ketika terlibat dalam RSK, dan memerlukan analisis menyeluruh tidak hanya dari sektor itu sendiri tetapi juga sistem tata kelola yang lebih luas.

KESIMPULAN

Pendekatan pembangunan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan dan penyediaan layanan sosial dasar telah menghasilkan hasil yang mengesankan di FCAS. Sebagai akibatnya, komunitas pembangunan telah dipaksa untuk mempertimbangkan kekhususan bekerja di negara-negara tersebut ke tingkat yang jauh lebih besar. Hal ini menjelaskan mengapa jaringan keamanan dan pembangunan sebagai bagian dari strategi

yang lebih luas terhadap pembangunan perdamaian dan pembangunan negara, telah memperoleh kepentingan yang berkembang di rangka kerja kebijakan EU. Pembuatan kebijakan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berkelanjutan, berdasarkan pengalaman lapangan dan pendekatan baru yang sedang diuji. Pengalaman masa lalu menunjukkan pengembangan jangka panjang dan perdamaian harus menjadi inti dari tanggapan EU dari hasil sebuah konflik atau krisis. Implementasi Strategi Global EU dan Konsensus Pembangunan Eropa yang direvisi, dalam konteks global yang menantang, pasti akan menjaga hubungan keamanan dan pembangunan menjadi pusat perhatian dalam waktu dekat.

KESEPAKATAN PADA UNI EROPA

Pasal 21: Organisasi akan berusaha mengembangkan hubungan dan membangun kemitraan dengan negara-negara ketiga, dan organisasi internasional, regional atau global yang memiliki prinsip [sama]. Organisasi akan mempromosikan solusi multilateral untuk masalah umum, khususnya dalam rangka kerja PBB.

6.5. DAMPAK POSITIF DARI PELATIHAN - DIMENSI KEBIJAKAN KEAMANAN

oleh Jochen Rehr

Prolog: *Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa adalah 'sekolah jaringan' yang terdiri dari 120 entitas nasional termasuk akademi diplomatik, universitas pertahanan nasional, perguruan tinggi kepolisian, dan LSM. Artikel di bawah ini didasarkan pada lingkungan pelatihan khusus tersebut, di situ audiens pelatihan terutama direkrut dari lembaga EU dan administrasi nasional, yaitu dari berbagai kementerian dan lembaga. Lingkungan pelatihan bersifat internasional dan mencakup peserta militer dan sipil, dengan fokus untuk memastikan keseimbangan gender dan regional di antara peserta pelatihan. Secara umum, ESDC memberikan pelatihan dan pendidikan untuk Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) Organisasi dalam konteks yang lebih luas dari Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) di tingkat Eropa.*

PENDAHULUAN

Asumsi umumnya adalah kata 'latihan' mengacu pada memperoleh dan menerapkan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Selain tujuan klasik dari pelatihan, namun, ada beberapa dimensi terkait yang memainkan peran penting, khususnya jika menyangkut latihan dalam level strategis.

Efek samping positif ini dapat dijabarkan sebagai 'dimensi kebijakan keamanan' pelatihan. Efek samping ini mencakup pembangunan institusi dan kapasitas manusia, memperkuat keragaman intelektual partisipan dan pembangunan rasa percaya diri - di antara yang lainnya. Sangatlah penting bagi perancang pelatihan harus waspada akan efek samping positif ini, guna memanfaatkannya dengan baik.

EFEK SAMPING POSITIF PELATIHAN

Efek samping positif pelatihan, dari perspektif pelatih dan peserta pelatihan, termasuk

- a) Pembangunan institusi
- b) Pembangunan kapasitas manusia
- c) Demokratisasi
- d) Keragaman intelektual
- e) Fokus regional
- f) Pengaturan agenda
- g) Pembangunan rasa percaya diri
- h) Jaringan

Daftar ini tidak diklaim lengkap, tetapi memberikan gambaran yang baik tentang potensi setiap kegiatan pelatihan. Adalah terserah perancang pelatihan untuk merefleksikan potensi itu dan direktur kursus untuk memastikan bahwa itu terpenuhi.



GRAFIK Jochen Rehr



Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa

Tanda jaringan yang baik selama pelatihan adalah ketika peserta mengenal rekan-rekan mereka di kementerian lain dan bahkan di kementerian negara mitra.

A). **Pembangunan institusi**

Saat kursus pelatihan disediakan di negara ketiga ('penyelenggara lokal'), organisasi yang bertanggung jawab biasanya bekerja dengan salah satu mitra jaringan ESDC reguler dari salah satu Negara Anggota EU. Seorang perwakilan dari Sekretariat ESDC juga membantu pengelola kursus dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Penyelenggara lokal diminta untuk mengidentifikasi titik kontak dengan koneksi ke kementerian inti lainnya guna menyederhanakan proses nominasi.

Dalam beberapa kasus, relasi kerja antar berbagai kementerian memberikan ruang untuk peningkatan. Aktivitas pelatihan dapat digunakan sebagai fasilitator guna membangun atau meningkatkan relasi tersebut. Persiapan kegiatan seperti itu juga dapat digunakan untuk memperkenalkan badan kerja permanen, mis. untuk menghadapi isu-isu Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama EU.

Selama kegiatan pelatihan dilangsungkan di bawah payung ESDC, penyelenggara lokal harus memastikan bahwa sejumlah petugas berpangkat tinggi harus hadir

dan terlihat. Proses ini, yang mencakup kabinet berbagai menteri, dapat digunakan lagi untuk menstimulasi relasi kerja di antara berbagai pelaksana, dan menciptakan sebuah jaringan, yang nantinya diharapkan tidak berakhir setelah acara pelatihan.

b) **Pembangunan kapasitas manusia**

Tentunya, kursus pelatihan itu sendiri berkontribusi terhadap penciptaan pribadi yang berpengetahuan di dalam negara terlibat (baik berpartisipasi dan mengelola). Kembali ke yang telah dikatakan dalam poin a), namun, personel lokal yang bertanggung jawab atas kursus haruslah tak hanya pengelola yang bagus, namun juga seorang fasilitator, mediator dan pengelola jaringan yang baik juga. Mereka harus dapat membuat keputusan di tengah manajemen, selagi mengemban hal yang lebih besar. Medan pelatihan tidak boleh digunakan untuk pertempuran wilayah nasional.

Personel yang ditunjuk untuk memberikan pelajaran atau berkontribusi dalam kegiatan pelatihan menghadapi tantangan yang sangat spesifik. Serupa dengan personel yang terlibat dalam mengelola acara,



Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa

Kebebasan berbicara dan kebebasan akademik merupakan landasan dari semua acara pelatihan dan edukasi yang berharga.

pengajar lokal yang diminta untuk memberikan kontribusi akan juga melakukannya untuk pertama kalinya dalam lingkungan internasional, dalam bahasa asing dan dengan topik yang bisa saja kontroversi dan menantang untuk dibahas.

Di luar elemen tersebut, gaya presentasi juga akan berbeda bergantung pada audiensnya. Mari gunakan beberapa stereotip untuk memperjelas maksudnya: misalkan audiens militer suka mengikuti presentasi PowerPoint, akademisi lebih suka mendengarkan dan menerima pidato yang terstruktur dengan baik; warga sipil, di sisi lain, cenderung menghargai campuran *slide*, bermain peran, dan elemen interaktif lainnya. Pada umumnya, peserta militer menunggu sampai ditanya, menyimpan pertanyaan sampai sesi tanya jawab dibuka, sedangkan warga sipil mencoba mengklarifikasi pertanyaan begitu muncul di benak. Pengajar bertugas untuk membuat semua orang senang ... dan menyampaikan pesan.

Tantangan-tantangan di atas memberi tekanan pada pengajar, baik karena merupakan pengalaman baru maupun karena mungkin ada banyak cara berbeda untuk menanganinya. Di dalam ESDC, aturan Chatham House umum digunakan, yang berarti bahwa 'informasi yang diungkapkan selama pertemuan dapat dilaporkan oleh mereka yang hadir, tetapi sumber informasi tersebut mungkin tidak diidentifikasi secara eksplisit atau implisit'. Di beberapa negara mungkin saja semua informasi yang diungkapkan harus disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi, yang memberikan tekanan tambahan pada pengajar, khususnya selama sesi tanya jawab.

ESDC telah membentuk sistem evaluasi yang berfungsi dengan baik, yang dapat digunakan untuk memberikan umpan balik pengajar tentang gaya presentasi pribadinya dan bagaimana persepsinya. Selain itu, Perguruan Tinggi menyelenggarakan seminar 'Train the Trainer' dalam rangka meningkatkan kinerja pengajar.



Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa

Langkah-langkah membangun kepercayaan diri dapat difasilitasi melalui permainan peran atau latihan interaktif lainnya.

C). Demokratisasi

Demokrasi dan nilai-nilainya adalah salah satu prioritas utama Uni Eropa dalam kebijakan lingkungannya: pemilihan umum yang bebas dan adil; akuntabilitas elit politik; kontribusi aktif masyarakat dalam debat politik; suatu pemerintahan berdasarkan supremasi hukum; dan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek.

Pelatihan dan pendidikan mempromosikan ide-ide ini dalam dua cara: di satu sisi, dengan membuat penyelenggara/pengajar (penyedia pelatihan) menyadari prinsip-prinsip ini; dan di sisi lain, dengan memberikan pelatihan bagi audiens (penerima pelatihan) yang akan dihadapkan dengan penilaian dan diskusi kritis.

Pendidikan (lebih dari pelatihan) harus fokus pada fakta dan angka – yaitu, pada transfer pengetahuan. Namun demikian, untuk kursus dan seminar yang lebih maju, peserta pelatihan harus diprovokasi untuk membuat penilaian kritis (pada diri sendiri). Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalami lingkungan debat dan diskusi yang sehat – dasar bagi wacana demokratis.

Pengajar, yang – pada umumnya – seminarnya harus disetujui oleh atasan, akan mendapatkan umpan balik langsung atas argumen mereka dalam periode tanya jawab, di situ mereka harus mempertahankan sudut pandang mereka. Peserta pelatihan diundang untuk mempertanyakan segala sesuatu, menantang argumen pengajar dan bahkan berperan sebagai advokat setan untuk merangsang pertukaran pandangan yang menggugah.

Tanggung jawab untuk upaya ini terletak pada moderator/fasilitator dari acara pelatihan dan pendidikan tertentu. Orang ini ditugaskan untuk menjaga agar pertanyaan tetap bergulir, mengintervensi ketika diskusi tidak berada dalam parameter yang diberikan (dalam hal konten dan kesopanan) dan menemukan cara untuk menghubungkan kontribusi dengan hasil pembelajaran keseluruhan dari acara secara keseluruhan.

d) Keragaman intelektual

Kebebasan berbicara dan akademik merupakan landasan dari semua event pelatihan dan edukasi yang berharga: dengarkan orang lain, mencoba memahami lawan dan buat poin-poin Anda jelas dan mudah dipahami; jangan memasukkan ke hati pernyataan orang lain, dan cobalah untuk tetap berpegang pada fakta yang ada.

Keragaman intelektual dapat menantang dan bahkan terkadang tidak dihargai di budaya demokrasi yang kurang berkembang. Ada juga perbedaan antar berbagai budaya, misal di beberapa negara Asia, ketidaktersetujuan publik tidak diperbolehkan; karenanya, kewaspadaan budaya juga harus diperhatikan saat membahas isu-isu ini.

Mempromosikan keragaman intelektual dan kebebasan akademik tidak selalu berarti bahwa semuanya harus diterima. Ada beberapa batasan yang tidak boleh dilewati, seperti pernyataan xenophobic atau pernyataan lain yang melanggar hak asasi manusia. Mantan Presiden dari Parlemen Eropa, Tn. Martin Schulz, memberikan contoh bagus dari tanggapan dari transgresi seperti itu pada Maret 2016, saat anggota sayap kanan Parlemen memprovokasi plenum dengan rasisme dan karenanya Tn. Schulz mengeluarkannya dari rapat. Pengukuran semacam ini tidak boleh digunakan secara berlebihan dalam acara pelatihan dan edukasi, tapi juga tidak boleh diabaikan.

Harap diingat dalam acara pelatihan dan edukasi, semua harus informatif, keragaman intelektual memiliki peran saat memanjat 'piramida pengetahuan'. Saat peserta pelatihan diminta untuk menerapkan, memahami dan menjelaskan kenapa dan bagaimana prosedur dan struktur sebagaimana adanya, mereka harus dihadapkan dengan berbagai pendekatan dan metode.



Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa

Selama event pelatihan dilangsungkan di bawah payung ESDC, penyelenggara lokal harus memastikan bahwa sejumlah petugas berpangkat tinggi harus hadir dan terlihat.

Keragaman intelektual akan membantu mereka untuk menemukan caranya sendiri. Menjadi kritis, mempertanyakan apa yang telah diajarkan kepada mereka dan mengembangkan pendekatan pemecahan masalah mereka sendiri terhadap tantangan adalah jenis pembelajaran terbaik, dan salah satu yang bahkan dapat menyebabkan perubahan sikap.

e) Fokus wilayah

Fokus wilayah- dalam kata lain, kepemilikan lokal - pelatihan dapat dilihat sebagai kunci kesuksesan. Sebuah acara pelatihan dan edukasi tidak boleh menjadi jalan satu arah: seorang peserta dari wilayah tertentu dapat memperkaya acara dengan membagikan pengalamannya, berkontribusi pada diskusi dan menyoroti hubungan yang sulit untuk diidentifikasi dari perspektif luar; sementara seorang pelatih dari wilayah tertentu juga menguntungkan bagi acara ter-

sebut, karena mereka bisa membawa perspektif wilayahnya untuk isu-isu tertentu. Perspektif ini sangatlah penting bagi birokrat EU yang dengan mudahnya dapat terjebak di gelembung Brussel, pakar eksternal kemudian dapat membantu untuk menjaga semuanya tetap sederhana dan mudah dipahami.

Fokus wilayah memastikan bahwa kedua sisi mempertimbangkan posisi satu sama lain, mendorong mereka untuk memikirkan satu sama lain dan kemudian membuka wawasan mereka. Pada akhir acara pelatihan semacam ini, pejabat EU diharapkan mengetahui lebih banyak tentang wilayah dan perwakilan wilayah mengetahui lebih banyak tentang UW: sebuah solusi klasik yang sama-sama menguntungkan.

f) Pengaturan agenda

Dengan melatih dan mendidik audiens tertentu, penyelenggara memiliki alat penting yang mereka

miliki: pengaturan agenda. Meskipun sebagian besar pelatihan EU/ESDC sudah distandarisasi dan diselaraskan, direktur kursus memiliki kekuatan untuk fokus pada topik tertentu dan membagi waktu yang tersedia sesuai dengan prioritasnya.

Pengaturan agenda merupakan keahlian yang sangat dikenal dari mantan Perwakilan Tinggi, Javier Solana. Pada tahun 2008, ia menulis publikasi berjudul 'Keamanan dan Perubahan Iklim'. Pada bulan-bulan berikutnya ia memasukkan topik ini dalam setiap pertemuan. Dengan melakukan itu, dia dengan lembut memaksa pihak lain untuk membaca publikasinya dan menemukan posisinya sendiri tentang masalah ini. Ini adalah contoh buku teks tentang bagaimana pengaturan agenda dapat digunakan.

Untuk acara pelatihan dan pendidikan, tema-tema utama sudah ditetapkan. Namun, biasanya ada sejumlah ruang untuk manuver, dan ini harus digunakan untuk menambahkan topik yang penting bagi organisasi atau audiens. Karena itu, pembuat agenda harus menyadari kekuatan mereka dan menggunakannya dengan bijak.

g) Pembangunan rasa percaya diri

Salah satu aspek utama dari acara pelatihan dan pendidikan di dalam Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa adalah membangun kepercayaan. Beberapa acara pelatihan melibatkan pihak-pihak yang bertikai yang duduk di ruangan yang sama. Jika pihak penyelenggara berhasil mempertemukan mereka, mendiskusikan masalah dan bahkan mungkin menemukan titik temu, maka acara tersebut bisa dikatakan sukses. Pelatihan dan pendidikan – transfer pengetahuan dan penguatan keterampilan – adalah vektor untuk rekayasa sosial dan jaringan.

Langkah-langkah membangun kepercayaan diri dapat difasilitasi melalui permainan peran atau latihan interaktif lainnya. Penting untuk memberikan lantai kepada penonton; mereka harus memimpin interaksi, diskusi, atau debat apa pun. Fasilitator topikal dapat berupa latihan yang berfokus pada analisis konflik, mediasi atau negosiasi. Semua fasilitator ini merangsang interaksi antara peserta dan memaksa mereka untuk berpikir dalam pola pikir orang lain.

h) Jaringan

Yang terakhir, jaringan antara peserta – tetapi juga antara dosen – sangat penting jika acara tersebut ingin memiliki dampak yang langgeng. Bertukar kartu nama, nomor telepon dan alamat email dapat mempermudah pekerjaan setelah acara selesai. Memiliki nomor telepon orang di negara lain, yang dapat diandalkan dan dapat dipanggil kapan saja, dapat membuat hidup lebih mudah, khususnya ketika seseorang sedang stres atau kurang kesadaran situasional.

Jaringan harus menyatukan alumni dari kursus pelatihan tertentu, menciptakan hubungan antara berbagai kementerian tetapi juga lintas batas. Tanda jaringan yang baik selama pelatihan adalah ketika peserta mengenal rekan-rekan mereka di kementerian lain dan bahkan di kementerian negara mitra.

Jika pelatihan dan pendidikan diadakan secara rutin, jaringan antara mahasiswa dan alumni akan tumbuh dari tahun ke tahun. Jaringan ini dapat menjadi dasar bagi kepercayaan dan kerja sama lebih lanjut, tetapi terutama untuk periode perdamaian yang diperpanjang di Eropa, yang kita semua harapkan.

KESIMPULAN

Pelatihan dan edukasi memiliki, selain dari perspektif pembelajaran, banyak efek positif lain yang harus diperhatikan dan digunakan kapan pun memungkinkan. Guna menggunakan dimensi kebijakan keamanan pelatihan, pelatih yang bertanggung jawab dan berpendidikan tinggi juga sangat penting. Saat pelatihan dikombinasikan dengan mandat politik, efek positif dari pelatihan dapat memimpin untuk menyelesaikan misi. Dan saat pelatihan memiliki potensi untuk membuat dunia menjadi lebih baik, mengapa tidak dilakukan?

7 PERKEMBANGAN KEMAMPUAN

7.1. PEMBANGUNAN KAPABILITAS SIPIL DAN MILITER

oleh Klaus Schadenbauer



Strategi Global untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa¹ (EUGS) menginisiasi sebuah ‘kebangkitan’ pengembangan kemampuan baik sipil dan militer di EU. Berdasarkan momentum politik substansial, dan dalam jangka waktu yang relatif pendek (2016-2019), berbagai rencana implementasi dan tindakan mengacu ke pengaktifasian ulang dari yang sudah ada, dan desain dari inisiasi baru, proses dan aktivitas yang ditujukan bersama pada peningkatan kuantitas dan kualitas dari kemampuan yang tersedia untuk Kebijakan Keamanan dan pertahanan Bersama (CSDP) dari Organisasi. Pembangunan ini sangat mungkin untuk berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, terutama setelah Komisi EU baru di bawah Presiden Ursula von der Leyen secara eksplisit mendeklarasikan ‘keamanan dan pertahanan; sebagai salah satu dari prioritas utama Komisi:

‘...Eropa juga membutuhkan kemampuan militer yang kredibel dan kami telah menyiapkan blok bangunan Organisasi Pertahanan Eropa. Ada cara Eropa untuk kebijakan luar negeri dan keamanan di situ kekuatan keras adalah alat yang penting – tetapi tidak pernah menjadi satu-satunya. Kekuatan keras selalu hadir dengan diplomasi dan pencegahan konflik; dengan pekerjaan rekonsiliasi dan rekonstruksi, yang merupakan sesuatu yang orang Eropa ketahui dengan baik, karena kita telah melalui ini, di sini di Eropa.’²

Dari sudut pandang pengembangan kemampuan, peristiwa paling luar biasa dalam hal ini adalah kesepakatan politik Level of Ambition (LoA) baru sebagai bagian dari kesimpulan Dewan dalam penerapan Strategi Global untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa (EUGS) di bidang Keamanan dan Perta-

1 Dinas Luar Negeri Eropa: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. Strategi Global untuk Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Uni Eropa. Juni 2016

2 Ursula von der Leyen, Keynote Speech at the World Economic Forum, Davos, 22 January 2020

3 Foreign Affairs Council conclusions, Brussels, 14 November 2016, (14149/16)

hanan³. Hal ini memungkinkan perencanaan kemampuan sipil dan militer untuk menginisiasi perencanaan umum terbaik mereka untuk memulai bekerja dari titik awal yang solid yang disetujui secara politik, yang merupakan sebuah prasyarat penting untuk kredibilitas dan penerimaan dari hasil oleh Negara Anggota. LoA ini pada dasarnya ditentukan berdasarkan ketiga prioritas EUGS: (A) menanggapi konflik dan krisis eksternal, (b) membangun kapasitas mitra, dan (c) melindungi Organisasi dan warganya⁴ yang memberikan klaster menyeluruh untuk semua aktivitas pengembangan kemampuan terkait saat ini. Sejak 2016, Dewan telah menetapkan prioritas dan menyediakan panduan baru tentang kerja sama pertahanan dan tentang menyesuaikan alat, struktur dan keuangan, termasuk dengan menarik potensi penuh dari Perjanjian Lisboa. Hal ini telah menyebabkan dalam beberapa tahun terakhir untuk peningkatan yang signifikan dalam kegiatan pengembangan kemampuan baik di Brussel dan di Negara-negara Anggota.

Civilian CSDP Compact⁵, CARD⁶, PESCO⁷ dan EDF⁸ adalah contoh inisiatif pengembangan kemampuan baru yang dibuat sejak 2016; Rencana Pembangunan Kapabilitas Sipil, Proses Tujuan Utama EU, dan Rencana Pembangunan Kapabilitas adalah contoh dari proses yang ada yang telah diaktifkan kembali dengan giat. Teks ini akan memberikan beberapa prinsip dasar dan menjelaskan bagaimana proses dan inisiatif ini bersama-sama mendorong pengembangan kemampuan sipil dan militer, sementara secara khusus menyoroti hubungan timbal balik dan sejumlah peluang dan tantangan.

PRINSIP UTAMA PEMBANGUNAN KAPABILITAS EU

Komitmen Uni Eropa yang paling terlihat untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Organisasi dan secara internasional adalah serangkaian misi dan ope-

ration CSDP yang dikerahkan di luar Organisasi. Misi di bawah CSDP dapat bersifat militer atau sipil, tergantung pada persyaratan aktual yang berasal dari fase, sifat dan intensitas konflik atau krisis yang akan ditangani dan tujuan yang disepakati secara politik untuk dicapai oleh kegiatan EU.

Tujuan dan satu-satunya *raison d'être* dari pengembangan kemampuan (baik di tingkat nasional dan multi-nasional) adalah untuk memiliki kuantitas dan kualitas yang tepat dari kemampuan (sipil dan militer) yang tersedia saat dibutuhkan. Dalam konteks CSDP EU ini berarti bahwa pada hari keputusan Dewan untuk meluncurkan operasi atau misi sipil atau militer CSDP EU, kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan mandat harus siap untuk ditempatkan. Ini berarti, misalnya, bahwa untuk misi penasihat sipil dan/atau militer di negara X 6.000 km dari Brussel, berfokus pada 'memberikan bimbingan dan nasihat kepada para pemimpin kunci senior dan otoritas militer untuk pengembangan atau transformasi organisasi/lembaga pertahanan dan keamanan',⁹ upaya pengembangan kemampuan seharusnya sudah mengarah (antara lain) ke 'Kapabilitas penasihat strategis' generik yang 1) bertindak atas dasar konseptual EU (doktrin & konsep), 2) diatur secara efisien dan dapat digunakan, secara logistik dipertahankan dan dikerahkan kembali sesuai dengan perjanjian keuangan, teknis dan hukum (organisasi) yang telah diatur sebelumnya, 3) telah dididik dan dilatih sesuai dengan itu baik secara nasional maupun di tingkat EU (pelatihan), 4) memiliki bahan dan peralatan yang diperlukan (kendaraan, perlindungan pribadi, peralatan IT, dll.) yang tersedia (materi), 5) tertanam dalam sistem komando dan kontrol fungsional, yang mencakup pengaturan dan sarana teknis dan prosedural yang diperlukan (kepemimpinan), 6) menyediakan staf yang memadai dan siap dalam hal kualitas dan kuantitas, termasuk rotasi yang diperlukan dari waktu ke waktu (personil), 7) dapat bertindak atas

4 Foreign Affairs Council conclusions, Brussels, 14 November 2016, (14149/16)

5 Kesimpulan Dewan dan Perwakilan Pemerintahan Negara Anggota, pada penetapan Perjanjian CSDP Sipil, 19 November 2018, (14305/18)

6 Tinjauan Tahunan Terkoordinasi tentang Pertahanan

7 Kerja sama Terstruktur Tetap

8 Dana Pertahanan Eropa

9 Kode dan Pernyataan Kapabilitas EU 2020 (EU CCS 2020), 21 April 2020, (7443/20)

Pendekatan koheren dari prioritas hingga dampak



dasar pengaturan infrastruktur yang diperlukan (fasilitas) dan, sebagai lintas kunci -referensi pemotongan, 8) secara teknis dan prosedural mampu beroperasi dalam semua area yang disebutkan di atas, dengan kemampuan CSDP lain yang relevan dari Negara Anggota dan dengan organisasi terkait lainnya serta pelaku EU dan non-EU (interoperabilitas).¹⁰

Contoh yang relatif sederhana dari kemampuan sipil atau militer menggambarkan bahwa **mengembangkan kemampuan bukanlah hitungan hari atau minggu, melainkan bulan atau, sebagian besar, tahun**, terutama sejak pedoman untuk doktrin pembangunan (misalnya mengembangkan dan menyetujui konsep tingkat EU sebagai serta menyelaraskan doktrin nasional), pelatihan (pelatihan & pendidikan tingkat nasional dan lanjutan tingkat nasional dan EU dan pelatihan khusus misi seperti keterampilan bahasa), materi (yang merupakan faktor serius terutama dalam pengembangan kemampuan militer), personel (menciptakan

dan mengelola kumpulan ahli yang memadai dan berkualitas sesuai) memerlukan upaya pengembangan yang cukup besar (sumber daya dan waktu) di tingkat Negara Anggota dan EU.

Singkatnya, perencanaan dan pengembangan kemampuan untuk manajemen krisis EU menghadapi satu tantangan besar: semuanya membutuhkan waktu. Untuk menghindari kondisi pengiriman personel dari Negara Anggota EU yang tidak dapat diterima dalam waktu singkat atau secara ad-hoc sebagai bagian dari kemampuan 'belum dikembangkan akhirnya' ke dalam lingkungan CSDP dengan kondisi keamanan dan keselamatan kritis, sangat penting untuk membedakan antara 'pembangkitan kekuatan' dan 'pengembangan kemampuan'.

Pembangkitan kekuatan adalah proses memilih dari 'kumpulan kekuatan/kemampuan' yang disiapkan, campuran kemampuan yang diperlukan untuk tugas-tugas CSDP tertentu. Pembentukan kekuatan

¹⁰ Contoh mengikuti pendekatan 'DOTMLPFI' yang umum disetujui. Sesuai dengan EUMC Glosarium akronim dan definisi (Brussels, 14 Februari 2019, EEAS(2019) 169), kapabilitas adalah kemampuan untuk melakukan tindakan untuk mencapai efek. Kapabilitas ditentukan oleh persyaratan minimum di sepanjang garis Pembangunan (DOTMLPFI). Garis perkembangan sebuah kapabilitas adalah: Doktrin dan Konsep, Organisasi, Pelatihan, Materi, Kepemimpinan, Personil, Fasilitas dan Interoperabilitas.

harus, dalam kasus terbaik, hanya memerlukan sejumlah pelatihan dan pendidikan pra-penempatan misi khusus. Pembangkit tenaga harus dikerahkan dalam konteks langsung atau jangka pendek (0-2 tahun) dan harus didasarkan pada dan saling terkait dengan proses pengembangan kemampuan yang mendasari dan disinkronkan.

Pembangunan kapabilitas itu sendiri terdiri dari fase 'perencanaan' *top-down* yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membentuk persyaratan masa depan dan fase 'pengembangan' *bottom-up* yang bertujuan untuk menghasilkan kemampuan yang dibutuhkan pada waktunya untuk membuat 'profil kekuatan/kemampuan' yang diperlukan. Untuk mengatasi tantangan waktu yang disebutkan di atas, baik fase 'perencanaan' dan 'pembangunan' harus melihat ke masa depan jangka menengah (2 hingga 15 tahun) dan bahkan jangka panjang (20 tahun), sejalan dengan perkiraan jangka waktu di mana setiap kemampuan spesifik dapat dikembangkan sepenuhnya. Bekerja berdasarkan perspektif masa depan jelas membutuhkan pandangan ke depan yang strategis dan kerangka kerja yang disepakati secara politis, karena pertanyaan kunci untuk pengembangan kemampuan bukanlah 'Apa yang kita butuhkan sekarang?', tetapi '**Apa yang harus kita kembangkan sekarang karena itu akan dibutuhkan di masa depan?**'.

TINGKAT AMBISI

Karena perspektif pandangan ke depan mereka, tolok ukur strategis utama untuk semua upaya perencanaan kemampuan, baik di EU atau di organisasi lain yang sebanding seperti NATO, dan apakah yang bersifat sipil atau militer, adalah **LoA yang disetujui secara politik**. Di EU, LoA berwawasan ke depan (atau 'tujuan utama' seperti yang sebelumnya disebut) telah secara eksplisit ada sejak Organisasi menyatakan

ambisi politiknya untuk menjadi pelaku CSDP yang otonom. Tonggak utama dalam fase awal adalah Deklarasi Petersberg 1992,¹¹ Tujuan Utama Helsinki 1999¹² dan prioritas Feira 2000,¹³ yang bersama-sama mendefinisikan ambisi ESDP/CSDP sipil dan militer yang holistik, berwawasan ke depan, politik sipil dan militer, yang telah memiliki berpengaruh pada pengembangan kemampuan EU hingga saat ini.

Tonggak penting lainnya, Perjanjian Lisboa, merangkum esensi dari dokumen-dokumen yang telah disepakati sebelumnya dalam beberapa paragraf kunci, sambil melangkah lebih jauh dalam bidang-bidang utama tertentu.¹⁴ Panduan politik dari Negara-negara Anggota ini memberikan CSDP Uni Eropa sejak awal dengan semua instrumen, proses dan struktur yang dibutuhkan, dalam bentuk pendekatan *top-down* yang koheren. EU memilih, setidaknya sejak Strategi Keamanan Eropa (ESS) 2003 dan seterusnya, pendekatan komprehensif ini sebagai 'jalan kemajuan' utama CSDP. Hal ini telah menyebabkan, hingga saat ini, pada pelaksanaan paralel dari upaya pengembangan kemampuan sipil dan militer baik di tingkat EU/supranasional dan Negara Anggota. EUGS adalah tonggak terbaru dalam mendefinisikan LoA EU. Rencana Pelaksanaan EUGS tentang Keamanan dan Pertahanan mendefinisikan tiga prioritas strategis sebagai pedoman dan prinsip-prinsip lintas sektoral dari LoA:

*'... , Dewan dengan ini menentukan tingkat ambisi yang menetapkan tujuan utama yang akan dicapai oleh EU dan Negara-negara Anggotanya untuk menerapkan EUGS di bidang keamanan dan pertahanan, termasuk melalui CSDP, dalam mendukung tiga prioritas strategis yang diidentifikasi dalam EUGS: (a) menanggapi konflik dan krisis eksternal, (b) membangun kapasitas mitra, dan (c) melindungi Serikat dan warganya. Dalam melakukan ini, EU akan mengejar pendekatan terpadu yang menghubungkan berbagai instrumen EU secara terkoordinasi, membangun Pendekatan Komprehensif EU dan mempromosikan kerja sama sipil-militer.'*¹⁵

11 Deklarasi Petersberg, Dewan Kementerian Uni Eropa Barat (WEU), Bonn, 19 Juni 1992

12 Kesimpulan Dewan Presidensi Eropa Helsinki, 11 Desember 1999

13 Kesimpulan Dewan Presidensi Eropa Santa Maria da Feira, 20 Juni 2000

14 terutama Pasal 42 dan 43 TEU

15 Kesimpulan Dewan Urusan Luar Negeri, Brussels, 14 November 2016, (14149/16)

16 Implementasi Rencana Keamanan dan Pertahanan, Brussels, 14 November 2016, (14392/16)

LoA CSDP ini adalah pendekatan sipil-militer bersama, karena mencerminkan secara dekat prinsip utama EUGS, **Pendekatan Terpadu untuk Konflik dan Krisis**. Pendekatan terpadu ini bertujuan untuk 'menghubungkan instrumen EU yang berbeda dengan cara yang terkoordinasi, membangun Pendekatan Komprehensif EU dan mempromosikan kerja sama sipil-militer.'¹⁶ EUGS dan kesimpulan Dewan masing-masing tentang implementasinya memberikan panduan dan arahan lebih lanjut mengenai implementasi dari tiga prioritas strategis:

“Menanggapi konflik dan krisis eksternal” membahas berbagai tugas CSDP di semua fase siklus konflik, dan memerlukan kemampuan untuk merespons dengan tindakan cepat dan tegas melalui seluruh spektrum tugas manajemen krisis yang tercakup dalam Pasal 43 TEU.

“Peningkatan kapasitas mitra” menekankan pada pelatihan, saran dan/atau pendampingan dalam sektor keamanan untuk berkontribusi pada ketahanan dan stabilisasi negara-negara mitra yang pulih dari, atau terancam oleh konflik atau ketidakstabilan, bersinergi dengan instrumen dan aktor EU lainnya, termasuk perhubungan keamanan dan pembangunan, bantuan untuk memperkuat ketahanan mitra dan melawan ancaman hibrida, keamanan siber dan keamanan perbatasan, promosi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, serta kepekaan gender, perlindungan warga sipil, dan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bagus.

“Melindungi Serikat dan warganya” berfokus pada tantangan dan ancaman eksternal yang berdampak pada keamanan Serikat dan warganya, di sepanjang hubungan keamanan internal/eksternal. Ini termasuk beberapa kegiatan yang diperkirakan hanya dilakukan dalam kerangka CSDP yang lebih luas atau lebih dari itu, seperti 'memperkuat perlindungan dan ketahanan jaringan dan infrastruktur penting Serikat', 'mencegah dan melawan terorisme dan radikalisme', 'memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang'. Prioritas ini secara eksplisit mengacu pada gotong royong

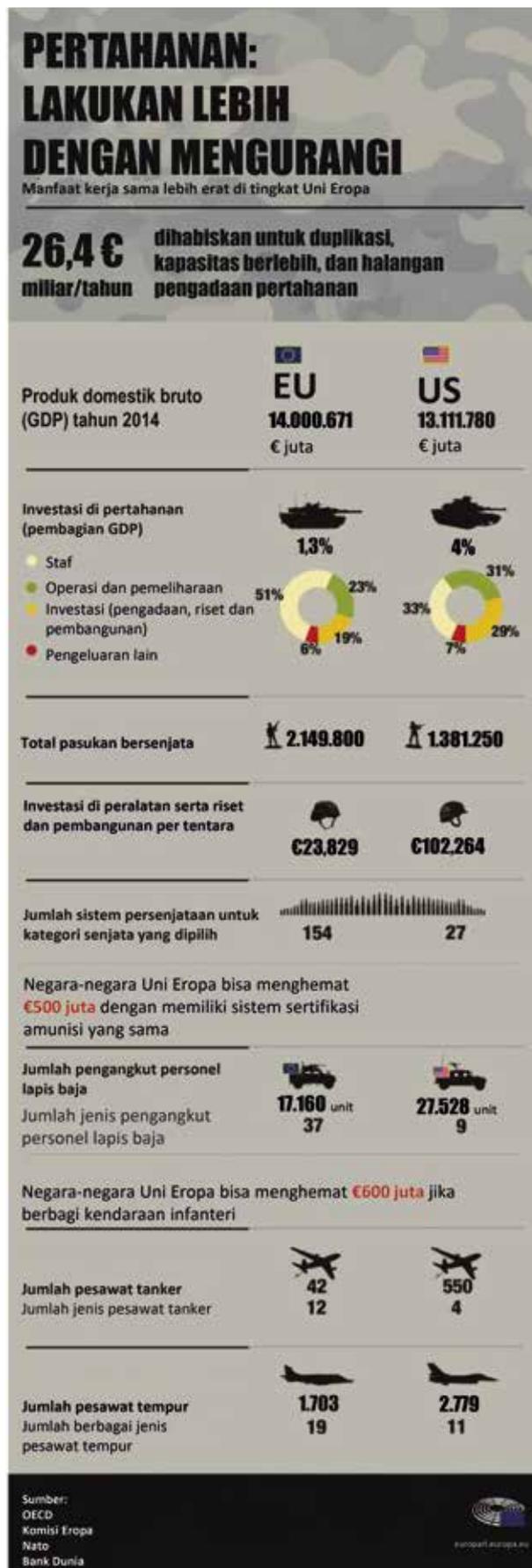
dan/atau solidaritas, sejalan dengan Pasal 42(7) TEU dan Pasal 222 TFEU dalam konteks ini juga. Dengan demikian, dengan adanya panduan politik masing-masing di masa depan, LoA Militer CSDP EU, yang saat ini (setidaknya dalam konteks militer) hampir secara eksklusif berfokus pada tindakan eksternal EU, di masa depan dapat berfokus pada tingkat yang jauh lebih tinggi pada aspek internal seperti internal -hubungan eksternal, kedaulatan digital, integritas teritorial, perlindungan infrastruktur vital EU dan meningkatkan ketahanan EU terhadap ancaman hibrida.

Daftar tugas yang luar biasa dan ambisius ini memberi para perencana kemampuan sipil dan militer EU serangkaian tugas strategis kualitatif yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh 'kelompok kekuatan/kemampuan' sipil CSDP EU di masa depan. Dimensi kuantitatif dan penjangkauan strategis yang diperlukan dapat diperoleh dari bagian penting lain dari panduan politik 2016, Lampiran yang mencakup '**jenis-jenis kemungkinan misi sipil dan operasi militer CSDP yang berasal dari tingkat ambisi EU**', yang mendefinisikan ambisi secara lebih rinci. Ini menyederhanakan, 'berdasarkan tujuan dan komitmen yang telah disepakati sebelumnya'¹⁷, untuk '**kemampuan sipil dan militer yang kredibel, dapat disebarkan, dapat dioperasikan, berkelanjutan dan multifungsi**' yang harus mampu melakukan '**tindakan cepat dan tegas dalam mendukung tingkat ambisi dan tiga prioritas strategis**, di seluruh spektrum tugas manajemen krisis yang tercakup dalam Pasal 43 TEU.'¹⁸ Terakhir, ambisi tersebut mencantumkan kemungkinan jenis misi sipil dan operasi militer CSDP di luar Organisasi, beberapa di antaranya dapat dilaksanakan secara bersamaan, bahwa Organisasi harus mampu mengeksekusi, termasuk dalam 'situasi dengan risiko keamanan yang lebih tinggi dan dengan infrastruktur lokal yang kurang berkembang'.

- Operasi manajemen krisis bersama dalam situasi risiko keamanan tinggi di kawasan sekitar EU;
- Operasi stabilisasi gabungan, termasuk operasi udara dan khusus;

17 Mencakup Sasaran Utama 2010, Sasaran Utama Sipil 2010 serta ambisi yang disetujui oleh Dewan Eropa pada Desember 2008.

18 Kesimpulan Dewan Urusan Luar Negeri, Brussels, 14 November 2016, (14149/16), Annex ke Annex



- Respon cepat sipil dan militer, termasuk operasi respons cepat militer antara lain menggunakan Grup Pertempuran EU secara keseluruhan atau dalam paket Pasukan yang disesuaikan dengan misi;
- Misi sipil substitusi/eksekutif;
- Operasi keamanan udara termasuk dukungan udara jarak dekat dan pengawasan udara;
- Keamanan maritim atau operasi pengawasan, termasuk jangka panjang di sekitar Eropa);
- Misi peningkatan kapasitas sipil dan reformasi sektor keamanan (pemantauan, pendampingan dan pemberian nasihat, pelatihan) antara lain tentang polisi, supremasi hukum, manajemen perbatasan, kontra-terorisme, ketahanan, respons terhadap ancaman hibrida, dan administrasi sipil serta misi pemantauan sipil;
- Peningkatan kapasitas militer melalui misi penasihat, pelatihan, dan pendampingan, termasuk perlindungan kekuatan yang kuat jika diperlukan, serta misi pemantauan/pengamatan militer.¹⁹

Mengingat krisis pandemi global 2020, perlu disebutkan bahwa ambisi 2016 ini secara eksplisit mencakup kemampuan EU untuk memberikan “bantuan dalam konteks respons global terhadap bencana alam dan **pandemi** di luar EU”²⁰. Pada prinsipnya, bimbingan dan arahan politik-strategis yang diberikan oleh Dewan pada tahun 2016 adalah titik awal bersama dan tolok ukur saat ini untuk perencanaan dan pengembangan kemampuan sipil dan militer Persatuan. Dalam pendekatan *top-down*, militer memecahkannya menjadi *Katalog Persyaratan 2017*, yang diperbarui pada 2019 (RC 2019). RC ini 'menerjemahkan' spektrum pedoman strategis kualitatif dan kuantitatif yang diberikan ke dalam serangkaian skenario ilustratif ditambah konkurensi yang bersama-sama mewakili berbagai tugas militer CSDP di masa depan. Dari sana, daftar rinci persyaratan kuantitatif dan kualitatif diturunkan. 'Paket Kekuatan Spektrum Penuh Organisasi' yang disepakati secara politis ini terdiri dari berbagai kemampuan militer di wilayah Laut, Udara, Darat,

¹⁹ Kesimpulan Dewan Urusan Luar Negeri, Brussels, 14 November 2016, (14149/16), Annex ke Annex

²⁰ Kesimpulan Dewan Urusan Luar Negeri, Brussels, 14 November 2016, (14149/16), Annex ke Annex

Luar Angkasa, Siber, dan Informasi, yang merupakan tolok ukur mencolok yang harus dicapai oleh Negara-negara Anggota, baik di segi kuantitas dan kualitas. Dalam pendekatan *top-down* yang serupa, pengembangan kemampuan sipil menilai pedoman strategis yang diberikan dan, berdasarkan analisis tambahan, merinci aspek-aspek kunci lebih lanjut menjadi 'konsep-mini' sehingga dapat menangkap berbagai kemampuan yang diperlukan dalam segi kuantitas dan kualitas ('Daftar Persyaratan'). Upaya-upaya ini akan memungkinkan pengembangan kemampuan sipil dan militer untuk menjawab pertanyaan awal yang memicu semua langkah selanjutnya: **"Apa yang dibutuhkan untuk CSDP sipil dan militer?"**.

PEMBANGUNAN KAPABILITAS SIPIL

LoA CSDP Uni Eropa adalah tolok ukur menyeluruh untuk semua upaya pengembangan kemampuan sipil dan militer Organisasi. Jelas bahwa bagian yang signifikan (jika bukan yang lebih besar) dari ambisi ini berkaitan dengan tugas-tugas manajemen krisis non-militer CSDP, terutama yang berkaitan dengan awal ('pencegahan konflik', 'ketahanan') dan pasca-krisis ('pengembangan kapasitas', 'stabilisasi') fase siklus konflik. Hal ini telah tercermin dalam **"Prioritas Feira"**²¹ Dewan Eropa 2000 dan dalam definisi berikutnya dari 'Tujuan Utama Sipil 2008' pada tahun 2004.²² Prioritas Feira berfokus pada 'aspek sipil dari manajemen krisis' dengan mendefinisikan empat bidang untuk upaya dan kemampuan terkait target pembangunan yang ingin dicapai oleh Negara Anggota. Keempat bidang tersebut meliputi **kepolisian, penguatan supremasi hukum, dan penguatan administrasi sipil dan perlindungan sipil**.

Meskipun diubah²³ dan diadopsi baru-baru ini, pada prinsipnya tetap berlaku, dan menggambarkan salah satu perbedaan utama antara pengembangan kemampuan sipil dan militer. Sementara perencanaan kemampuan militer berfokus hampir secara eksklusif pada satu instrumen kekuasaan, pengembangan kemampuan sipil menghadapi tantangan untuk mencakup berbagai instrumen yang saling terkait tetapi independen. Hal ini memerlukan tingkat koordinasi yang substansial, baik di tingkat nasional antara 'kementerian lini' dan layanan yang relevan (misalnya Luar Negeri, Dalam Negeri, Polisi, Penjaga Perbatasan, Kehakiman dan Dalam Negeri, Kerja Sama Pembangunan dan Bantuan Bencana), dan di tingkat EU, antara badan-badan EEAS dan Komisi yang relevan, badan-badan EU, dan pemain eksternal seperti PBB. Setelah periode kemajuan yang terbatas, pengembangan kemampuan sipil Uni Eropa, seperti mitra militernya, mengalami kebangkitan, berkat pendekatan baru terhadap CSDP sipil yang didirikan pada tahun 2017. Hal ini terutama menghasilkan **Rencana Pembangunan Kapabilitas Sipil**,²⁴ yang disebut **Pemadatan CSDP Sipil**²⁵ (CCC) dan **Rencana Aksi Gabungan**²⁶ dalam implementasinya, yang diadopsi oleh EEAS dan Komisi. Pemadatan CSDP Sipil didasarkan pada tiga komitmen utama ('CSDP sipil yang lebih mampu, lebih efektif, dan lebih bergabung')²⁷ dan mengadaptasi pendekatan terpadu EU yang telah direvitalisasi terhadap konflik krisis untuk mendorong koordinasi yang lebih erat antara para aktor EU yang relevan dan instrumen selama semua tahap konflik. Hal ini membutuhkan perluasan cakupan misi sipil dan dengan demikian meningkatkan kualitas dan kuantitas kemampuan sipil yang disediakan oleh Negara-negara Anggota dalam jangka menengah. Seperti halnya mitra militer, kemajuan harus diukur secara berkala dengan

21 http://www.europarl.europa.eu/summits/fei2_en.htm

22 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33239>

23 Mis, tanggung jawab utama untuk "perlindungan sipil" telah diemban oleh Komisi, masing-masing oleh Ditjen ECHO dalam kerangka 'Mekanisme Perlindungan Sipil Eropa', lihat: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

24 Rencana Pembangunan Kapabilitas Sipil, Brussels, 04 September 2018, EEAS(2018) 906

25 Kesimpulan Dewan dan Perwakilan Pemerintah Negara Anggota, pertemuan di dalam Dewan, tentang pembentukan Perjanjian CSDP Sipil, Brussels, 19 November 2018, (14305/18)

26 Rencana Tindakan Bersama Mengimplementasi Perjanjian CSDP Sipil, Brussels, 30 April 2019, (8962/19)

27 Kesimpulan Dewan dan Perwakilan Pemerintah Negara Anggota, pertemuan di dalam Dewan, tentang pembentukan Perjanjian CSDP Sipil, Brussels, 19 November 2018, (14305/18)

melakukan tinjauan yang melibatkan semua Negara Anggota. Di sini, perbedaan yang signifikan antara pengembangan kemampuan militer dan sipil EU menjadi jelas: Sementara Negara-negara Anggota sejauh ini dengan jelas membedakan antara pembangkitan kekuatan militer CSDP dan pengembangan kemampuan militer dan menolak untuk menghubungkan mereka secara langsung, dalam domain sipil tidak ada pembagian yang jelas dan keterkaitan tersebut secara terbuka ditangani. Secara proses direncanakan (tetapi belum disepakati), bahwa pengembangan kemampuan sipil dapat mengikuti pendekatan terstruktur yang terdiri dari empat langkah: penilaian kebutuhan kemampuan, daftar persyaratan ('Apa yang dibutuhkan?'), analisis kesenjangan ('Apa yang tersedia dan apa yang hilang?') dan tinjauan kemampuan tahunan untuk menentukan tindakan selanjutnya yang harus diambil. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan proses pengembangan kemampuan nasional, berdasarkan rencana implementasi nasional, sementara rencana aksi bersama di tingkat EU diharapkan dapat memberikan hasil yang nyata dalam jangka menengah (sudah). Prioritas Feira, dalam bentuk yang direvisi dan diperluas,²⁸ bersama dengan tiga komitmen utama Perjanjian CSDP Sipil, dapat memberikan fokus untuk semua upaya. Secara keseluruhan, ketika melihat portofolio misi dan operasi CSDP Uni Eropa saat ini dan yang diprediksi, berbagai instrumen CSDP sipil kemungkinan akan menjadi landasan yang lebih penting dari CSDP Organisasi. Kebangkitan instrumen dan prosedur saat ini mendorong Negara-negara Anggota untuk mencahkan peningkatan sumber daya untuk pengembangan kemampuan sipil yang lebih terstruktur, efektif dan terintegrasi, yang mampu memberikan LoA yang disepakati secara politik dalam jangka menengah sesuai dengan EUGS dan kesimpulan Dewan yang mencakup implementasinya

PEMBANGUNAN KAPABILITAS MILITER

Lanskap pengembangan kemampuan militer Organisasi saat ini secara langsung terkait dengan asal-usul Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) EU. Sejak awal, meskipun terutama selama dan setelah pengalaman politik pahit Perang Balkan pada 1990-an, Negara-negara Anggota EU telah mengakui bahwa CSDP EU yang kredibel hanya mungkin jika didukung oleh instrumen CSDP militer EU yang kredibel yang terdiri dari fleksibel, kemampuan dan kekuatan yang dapat digunakan, dapat dioperasikan, dan berkelanjutan. Sesuai dengan kesimpulan Dewan baru-baru ini²⁹, instrumen militer ini harus dikembangkan lebih lanjut dalam pendekatan bertahap yang bertujuan untuk mencapai 'LoA Militer CSDP Uni Eropa'. LoA ini adalah bagian dari LoA EU yang lebih luas tentang Keamanan dan Pertahanan³⁰, yang menggabungkan LoA CSDP Sipil dan ambisi yang lebih luas terkait pertahanan yang belum sepenuhnya ditentukan. LoA yang disetujui secara politik dan pencapaiannya secara alami merupakan fokus utama dari semua upaya pengembangan kemampuan militer EU, meskipun saat ini melibatkan serangkaian proses, inisiatif, dan aktor yang relevan di tingkat EU. Secara umum, proses dan inisiatif ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yang menerapkan perspektif 'perencanaan kapabilitas dari atas ke bawah' atau perspektif 'pengembangan kapabilitas dari bawah ke atas'.³¹

MEKANISME PEMBANGUNAN KAPABILITAS (CDM)

Mekanisme Pembangunan Kapabilitas (CDM), yang akhirnya didirikan pada tahun 2003, membentuk inti dari perencanaan kemampuan militer 'dari

28 Lihat Rencana Pembangunan Kapabilitas Sipil, Brussels, 04 September 2018, EEAS(2018) 906, Bab II.

29 Kesimpulan Dewan pada Keamanan dan Pertahanan dalam konteks Strategi Global EU, Brussels, 25 Juni 2018, (10246/18)

30 Laporan Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Komisi/Kepala Badan Pertahanan Eropa dalam interaksi, hubungan dan keterkaitan di antara Inisiatif pertahanan EU, Brussels, 29 May 2019, (9825/19)

31 Pertahanan EU: Proses Implementasi Buku Putih, Studi Parlemen Eropa, Desember 2018, (PE 603.871)

32 Nama, dari CDM dan Rencana Pembangunan Kapabilitas (CDP) menyesatkan, karena hanya terfokus pada pengembangan Kapabilitas Militer, dan tidak mencakup perspektif sipil.

atas ke bawah' EU.³² CDM terdiri dari **Proses Tujuan Utama EU** (HLGP). Proses ini didorong oleh Komite Militer EU (EUMC), dilakukan oleh Kelompok Kerja/Satuan Tugas Tujuan Utama EUMC (EUMCWG/HTF) dengan dukungan Staf Militer EU (EUMS) dan secara politik dikendalikan oleh Negara-Negara Anggota melalui Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa, meskipun sebagian besar melalui Komite Keamanan Politik (PSC). CDM dan Proses Tujuan Utama EU secara luas terdiri, seperti Proses Perencanaan Pertahanan NATO (NDPP) yang setara, dari beberapa langkah (atau 'sub-proses') yang dijalankan secara berkesinambungan, siklus dan sangat bergantung pada interaksi dekat yang permanen dan kerja sama antara tingkat politik-strategis, tingkat strategis militer dan, paling tidak, Negara-negara Anggota. Langkah yang paling penting adalah revisi politik berkala dari LoA, termasuk revisi rinci dari LoA CSDP Militer, yang memberikan panduan politik untuk 'penerjemahan' yang benar dari ambisi politik ke dalam daftar kuantitas dan kualifikasi Kapabilitas Militer dan Persyaratan Angkatan. Produk dari langkah ini adalah **Katalog Persyaratan** (RC), yang menjawab pertanyaan 'Apa yang dibutuhkan EU?' dan terdiri dari 'struktur kekuatan virtual' untuk Organisasi. Langkah selanjutnya berfokus pada pemantauan dan evaluasi kemajuan. Setiap dua tahun sekali (dalam sinkronisasi teknis penuh dengan masing-masing langkah NDPP), Negara Anggota menjawab 'Kuesioner Kapabilitas Militer Uni Eropa' (EUMCQ) dan dengan demikian memberikan gambaran terkini tentang profil kekuatan mereka ditambah proyeksi kemampuan yang diperkirakan untuk jangka menengah (+15 tahun). Meskipun kontribusi untuk **Katalog Angkatan** (FC) dua tahunan ini bersifat 'sukarela' dan 'tidak mengikat' (yang saat ini mencegah keterkaitan langsung Katalog dengan aktivitas pembangkitan gaya CSDP), FC memberikan gambaran yang semakin jelas tentang inventaris kemampuan / profil kekuatan saat ini dan yang direncanakan dari pasukan militer EU ('Apa yang kita miliki?'). Berdasarkan perbandingan dan analisis yang lebih dalam dari dua katalog, termasuk

analisis pelajaran yang diidentifikasi dari operasi dan misi militer CSDP yang sedang berlangsung, **Katalog Kemajuan** (PC) menyediakan tingkat politik, pertama dan terutama, dengan umpan balik dua tahunan tentang kondisi terkini. dan proyeksi kelayakan LoA Militer CSDP dan risiko operasional terkait. Kedua, berdasarkan kekurangan yang teridentifikasi, ia mendefinisikan apa yang disebut sebagai **Tujuan Kapabilitas Berdampak Tinggi jangka pendek dan menengah** (HICGs). HICG ini memberikan gambaran yang tepat tentang kemampuan militer yang perlu dikembangkan (dan disediakan) oleh Negara Anggota EU dalam jangka pendek (+ 6 tahun) dan menengah (+ 15 tahun) untuk mencapai LoA Militer CSDP yang disepakati secara politik, dengan mengisi celah di 'profil angkatan virtual' Serikat.

RENCANA PEMBANGUNAN KAPABILITAS (CDP)

Badan Pertahanan Eropa (EDA) didirikan pada tahun 2004 untuk mendorong pengembangan kemampuan militer yang hilang itu dan untuk mendukung penelitian, akuisisi, dan persenjataan yang diperlukan.³³ Perwakilan Tinggi Persatuan untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan adalah Kepala Badan dan Dewan Pengarah kementerian memutuskan semua hal strategis. Alat utama EDA adalah **Rencana Pembangunan Kapabilitas** (CDP), yang melengkapi Proses Tujuan Utama CDM/EU dari perspektif dari bawah ke atas. CDP dipasang pada tahun 2008 dan telah diperbarui secara berkala sejak saat itu. CDP secara teratur menerima dari EUMC, hasil dari siklus Proses Tujuan Utama EU terbaru, yang terdiri dari kekurangan kemampuan militer aktual dan pelajaran dari operasi dan misi militer CSDP, yang keduanya menghasilkan HICG jangka pendek dan menengah masing-masing. Selain itu, CDP mempertimbangkan program pengembangan kemampuan dan persenjataan nasional dan jangka menengah saat ini dan jangka menengah dari Negara-negara Anggota, yang menambahkan perspektif industri. Terakhir, CDP menggabungkan perspektif kemampuan militer masa depan jangka panjang dengan

33 TINDAKAN BERSAMA DEWAN, Brussels, 122 Juli 2004, (2004/551/CFSP)

memasukkan hasil berbagai penelitian. Hasil terbaru dari CDP adalah sebelas **Prioritas Pembangunan Kapabilitas Uni Eropa 2018**. Prioritas tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan apa yang perlu dikembangkan dalam upaya bersama oleh semua MS EU dengan dukungan inisiatif dan proses EU yang relevan. Prioritas pengembangan kemampuan EU mencakup semua HICG, yang terkait langsung dengan LoA. Apa yang disebut '**Kasus Konteks Strategis**'(KSS) telah dikembangkan untuk memfasilitasi pencapaian sebelas prioritas. Mereka memberikan pandangan yang komprehensif, termasuk perspektif industri dan 'Riset dan Teknologi', pada setiap prioritas dengan mendefinisikan peta jalan ('jalan pendekatan') dan menyoroti peluang kolaboratif. Secara keseluruhan, CDP, bersama dengan beberapa inisiatif EDA lainnya, seperti Kelompok Teknologi Kapabilitas EDA yang berpusat pada penelitian dan teknologi (R&T) dan Agenda Riset Strategis yang Menyeluruh, mendukung peran penting EDA saat ini sebagai 'forum pengembangan kemampuan' utama EU, yang menyediakan dialog terstruktur antara perspektif perencanaan kemampuan 'dari atas ke bawah' dan perspektif pengembangan kemampuan 'dari bawah ke atas', dan mencakup sudut pandang industri, R&T dan nasional.

Kesebelas Prioritas Pembangunan Kapabilitas saat ini menjadi tolok ukur utama untuk semua inisiatif pengembangan kemampuan EU. Ini mencakup tiga inisiatif yang berkembang pesat sejak 2016: **Tinjauan Terkoordinasi tentang Pertahanan (CARD)**, **Kerja sama Terstruktur Permanen (PESCO)**, dan **Dana Pertahanan Eropa(EDF)**.

TINJAUAN TAHUNAN TERKOORDINASI TENTANG PERTAHANAN (CARD)

CARD³⁴ memantau penerapan Prioritas Pembangunan Kapabilitas EU, mengembangkan **gambaran komprehensif tentang lanskap kemampuan Eropa**

dan mengidentifikasi peluang kolaboratif dalam pendekatan dari bawah ke atas. Serupa dengan Proses Tujuan Utama EU, CARD mengikuti ritme siklus berkelanjutan dalam dialog terstruktur terkait dengan Negara-negara Anggota. Laporan dua tahunan untuk para menteri adalah produk utama, yang memberikan umpan balik yang komprehensif dan berfungsi sebagai alat orientasi dan referensi utama bagi Negara-negara Anggota dalam semua hal yang terkait dengan pengembangan kemampuan. **Laporan CARD** pertama dirilis dan disepakati di tingkat Menteri pada November 2020. Laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang prioritas dan program perencanaan pertahanan, persenjataan dan kemampuan serta kekuatan dan profil operasional Negara-negara Anggota EU, dan juga termasuk NATO dan perspektif nasional serta tren jangka menengah utama. Secara rinci, laporan CARD menyampaikan gambaran komprehensif pertama dari lanskap pertahanan Eropa termasuk pengembangan kemampuan, upaya R&T, dimensi dukungan industri pertahanan dan aspek operasional. Laporan tersebut merekomendasikan kerja sama yang lebih erat dan integrasi negara-negara Anggota di bidang pengeluaran pertahanan, perencanaan pertahanan dan kerja sama pertahanan dan mengidentifikasi enam area fokus untuk pengembangan kemampuan masa depan serta tiga area prioritas untuk peluang kerja sama operasional untuk masa depan jangka pendek dan menengah. Secara keseluruhan, ini akan membantu politisi untuk mengambil keputusan yang diperlukan dan memberikan panduan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan Negara-negara Anggota dan Organisasi di masa depan.

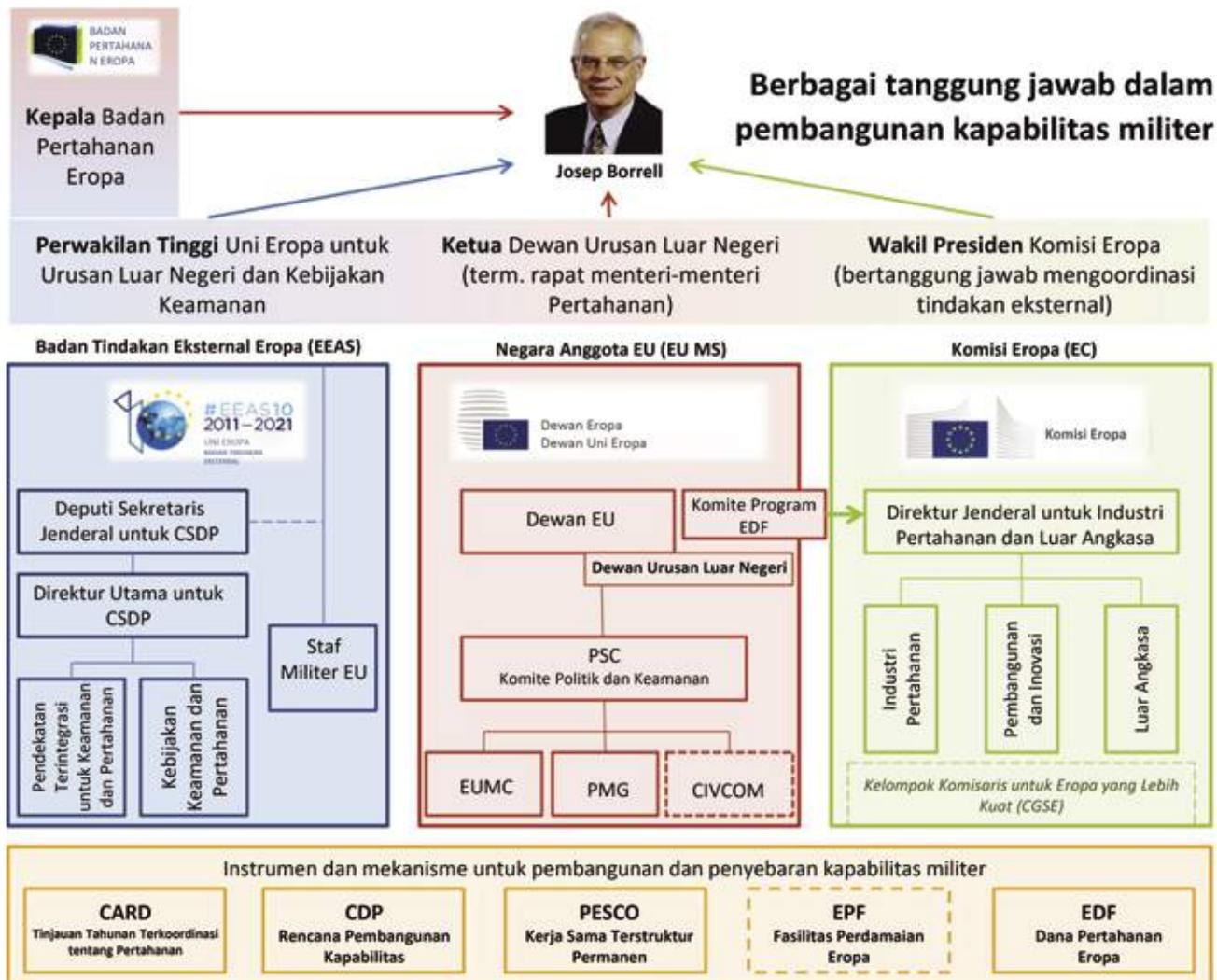
KERJA SAMA TERSTRUKTUR TETAP (PESCO)

PESCO³⁵ berfokus terutama untuk menghasilkan 'ketersediaan operasional, interoperabilitas, fleksibi-

³⁴ [https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-\(card\)](https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-(card))

³⁵ Kerja sama Terstruktur Permanen (PESCO) dan menentukan daftar Negara Anggota Berpartisipasi, Brussels, 8 Desember 2017, (14866/17)

³⁶ Laporan Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Komisi/Kepala Badan Pertahanan Eropa dalam interaksi, hubungan dan keterkaitan di antara Inisiatif pertahanan UE, Brussels, 29 May 2019, (9825/19)



Jochen Rehr

litas, dan kemampuan penyebaran pasukan untuk CSDP³⁶, yang sejak awal CSDP EU telah diidentifikasi sebagai prasyarat utama untuk pencapaian LoA Militer CSDP EU. Instrumen itu sendiri diperkenalkan dalam Perjanjian Lisboa, tetapi mengalami 'inisialisasi ulang' yang signifikan dari 2016. PESCO didasarkan pada **'komitmen yang lebih mengikat'** yang dalam jangka menengah dapat mengarah pada **integrasi kemampuan pertahanan**³⁷ yang nyata. Negara-negara Anggota yang berpartisipasi melakukan, antara lain, untuk secara teratur meningkatkan anggaran pertahanan secara riil, untuk meningkatkan pengeluaran

investasi pertahanan hingga 20%, dan penelitian dan teknologi pertahanan masing-masing menjadi 2%, dari total pengeluaran pertahanan dan, paling tidak, untuk menyediakan formasi, yang dapat dikerahkan secara strategis, untuk realisasi LoA EU, di samping potensi penyebaran EUBG. Akibatnya, PESCO berpotensi menjadi **alat utama untuk mengisi struktur kekuatan 'virtual' EU saat ini, selangkah demi selangkah, dengan membuat elemen dan kemampuan kekuatan yang benar-benar 'terhubung' tersedia bagi Serikat untuk menciptakan "Paket Angkatan Spektrum Penuh.** Rencana implementasi nasio-

37 Kerja sama Terstruktur Permanen (PESCO) dan menentukan daftar Negara Anggota Berpartisipasi, Brussels, 8 Desember 2017, (14866/17) dan Protocol 10 TEU

nal tunduk pada pengawasan reguler oleh sekretariat bersama PESCO dan sementara itu sekitar tiga lusin proyek PESCO dengan skala yang berbeda merupakan bagian dari portofolio. Proyek PESCO yang mendukung proyek di bawah **Program Pembangunan Industri Pertahanan Eropa (EDIDP)**³⁸ atau **Dana Pertahanan Eropa (EDF)**³⁹ akan mendapat manfaat dari peningkatan tingkat pendanaan, yang pada akhirnya membawa pemain baru ke bidang pengembangan kemampuan militer, Eropa Komisi (EC).

DANA PERTAHANAN EUROPA (EDF)

EDIDP dan penerusnya, EDF, keduanya berasal dari Komisi Juncker, ketika Komisi Eropa mengusulkan Rencana Aksi Pertahanan Eropa (EDAP) dengan Dana Pertahanan Eropa (EDF) yang disesuaikan dengan prioritas umum Eropa untuk mendukung pengembangan industri dan teknis di EU dengan fokus pada program-program terkait pertahanan multinasional. Hal ini sejalan dengan EUGS, yang menggaris-bawahi bahwa 'Negara Anggota memerlukan sarana teknologi dan industri untuk memperoleh dan mempertahankan kemampuan yang mendukung kemampuan mereka untuk bertindak secara mandiri.'⁴⁰ Pada tahun 2017, sebagai langkah persiapan, EDIDP dibuat dengan Dana EUR 500 juta akan digunakan pada 2019 dan 2020. Kerangka keuangan multi-tahunan (MFF) EU berikutnya, mulai tahun 2021, akan berisi bab tentang 'keamanan dan pertahanan', dan item 'pertahanan' akan mencakup subsidi yang signifikan untuk EDF selama 7 tahun ke depan (2021-2027). Selain itu, Komisi Von der Leyen melanjutkan jalur ini dan memusatkan tanggung jawab terkait dalam Direktorat Jenderal 'Industri Pertahanan dan Antariksa' (DG DEFIS) yang baru dibentuk. Ditjen DEFIS akan bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan **Dana Pertahanan Eropa**, melanjutkan pengem-

banagan **pasar peralatan pertahanan Eropa yang terbuka dan kompetitif** dan, paling tidak, meningkatkan **hubungan penting antara ruang angkasa dan pertahanan dan keamanan**.

Perkembangan baru ini bertujuan untuk **meningkatkan daya saing basis teknologi dan industri pertahanan Eropa (EDTIB)**, yang merupakan landasan penting dari kedaulatan strategis yang diperlukan untuk mencapai LoA yang disepakati secara politik. Setelah hampir dua dekade pengeluaran pertahanan secara signifikan menurun di Eropa, langkah-langkah sekarang harus diambil untuk menjaga tingkat minimum otonomi industri (pertahanan) sehingga basis teknologi dan industri memenuhi kebutuhan keamanan dan pertahanan Eropa. Inisiatif EC terutama terdiri dari dua jendela yang berbeda namun saling melengkapi: **jendela penelitian** untuk memberikan dukungan keuangan untuk penelitian pertahanan bersama, mis. melalui tindakan persiapan, dan **jendela kemampuan**, untuk mengubah hasil penelitian menjadi kemampuan dan mendukung akuisisi bersama produk pertahanan. EDIDP dan EDF keduanya saat ini mengikuti pendekatan dari bawah ke atas dengan meminta proposal tentang 'topik' tertentu yang menjadi kepentingan strategis EU; dalam konteks ini, dan ketika menyangkut penilaian proposal proyek, Prioritas Pembangunan Kapabilitas EU, termasuk Sasaran Kapabilitas Berdampak Tinggi, memainkan peran penting, selain pertimbangan kebijakan industri yang relevan.

KESIMPULAN DAN LANGKAH KE DEPAN

Titik awal dan tujuan bersama untuk semua upaya pengembangan kemampuan adalah **ambisi politik yang disepakati bersama** yang mendefinisikan **tujuan dan kepentingan bersama** dan menyepakati **persepsi bersama tentang dunia dan ancaman serta peluangnya**. Ambisi Organisasi ini tidak terdiri dari 27 ambisi

38 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en

39 https://ec.europa.eu/commission/news/european-defence-fund-2019-mar-19_en

40 Dinas Luar Negeri Eropa: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy. Juni 2016, hal 20

nasional individu, juga tidak berusaha untuk menegakkan satu perspektif supra-nasional. Masa depan pengembangan kemampuan EU sebaliknya mungkin terletak, menurut Perwakilan Tinggi yang baru, dengan cara secara bertahap 'berbagi' kedaulatan di bidang pengembangan kemampuan:

Proyek historis kami tidak –seperti yang sering dipercaya atau disajikan– bertujuan untuk menghapus kedaulatan negara-negara Eropa demi semacam negara super Eropa. Hal itu memiliki tujuan yang sangat tepat: untuk memungkinkan negara-negara Eropa melakukan secara kolektif apa yang tidak bisa lagi kita lakukan sendiri. Itulah yang Eropa sesungguhnya. Melakukan bersama apa yang tidak bisa lagi kita lakukan sendiri. Itu berarti berbagi kedaulatan, tetapi terkadang kedaulatan yang kurang formal yang Anda miliki, semakin otonom Anda untuk mengambil keputusan.⁴¹

Saat ini, diskusi politik yang sedang berlangsung tentang implementasi lebih lanjut dari EUGS ('kompas strategis') dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, sasaran, dan tantangan untuk Organisasi. Upaya ini didasarkan pada analisis ancaman 360 derajat tingkat Uni Eropa komprehensif pertama yang menangani berbagai ancaman dan tantangan dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Berdasarkan hal ini, diskusi politik akan membantu Negara-negara Anggota menyepakati arah bersama tentang keamanan dan pertahanan di tahun depan. Menyetujui bersama tentang 'apa yang tidak bisa lagi dilakukan sendiri' akan secara signifikan membantu **membentuk profil keamanan dan pertahanan Serikat** di masa depan dan selanjutnya menentukan **tujuan perencanaan yang lebih tepat dan lebih dapat diterima** untuk pengembang kemampuan sipil dan militer.

Pendekatan Terpadu sebagaimana dianjurkan oleh EUGS ('menghubungkan berbagai instrumen EU dengan cara yang terkoordinasi, membangun Pendekatan Komprehensif EU dan mempromosikan kerja sama sipil-militer') hanya dapat efektif di bidang CSDP di masa depan jika telah disiapkan secara koheren oleh perencanaan terpadu dan pengembangan kemampuan

dengan perspektif jangka menengah. Ini akan membutuhkan peningkatan dan **koherensi multi-dimensi antara proses dan inisiatif pengembangan kemampuan sipil dan militer**. Dalam hal ini, hasil yang menjanjikan dicapai pada tahun 2019 dengan 'revisi terpadu' pertama dari skenario 'stabilisasi dan pembangunan kapasitas' sipil-militer, dalam konteks revisi Katalog Persyaratan. Khususnya dengan melihat ancaman hibrida yang berkembang, kegiatan perencanaan kemampuan lebih lanjut harus semakin mengubah kerja sama sipil CSDP dari koeksistensi menjadi hubungan yang saling mendukung, untuk mencapai sinergi sipil CSDP tambahan. **Kapabilitas yang telah direncanakan dan dikembangkan bersama akan lebih mudah dan efisien digunakan dan digunakan bersama.**

Selain itu, koherensi antara aspek perencanaan dan pembangunan baik pembangunan kapabilitas sipil maupun militer harus ditingkatkan dengan membina dialog yang terstruktur antara perspektif pembangunan dari bawah ke atas dan perencanaan dari atas ke bawah. Memiliki **garis waktu yang sama, taksonomi dan prinsip-prinsip konseptual dan prosedural** adalah prasyarat utama untuk pelaksanaan yang efisien dari proses tingkat nasional dan Uni Eropa yang harmonis. Ini membutuhkan koherensi antara semua inisiatif dan proses EU yang relevan, dan kompatibilitas input dan output proses dengan semua proses pengembangan kemampuan yang relevan dari organisasi mitra, seperti NATO.

Selain itu, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapabilitas, hal ini memerlukan pandangan ke depan yang strategis dan format yang sesuai dan efisien untuk revisi berkala dan persetujuan LoA oleh tingkat politik. Menjawab pertanyaan '**Apa yang harus kita kembangkan sekarang karena akan dibutuhkan di masa depan?**' akan membutuhkan konsultasi dan koordinasi substansial dan upaya kohesi antara semua aktor yang terlibat. Keterlibatan maksimum dari kemampuan pandangan ke depan strategis EU yang ada dalam proses ini sangat penting.

Sejak dirilisnya EUGS, momentum politik yang signifikan telah mendorong pengembangan kemam-

41 Josep Borrell, idato di dialog Raisina 2020, New Delhi, 16 Januari 2020

puan sipil dan militer Uni Eropa. Akar penyebab utama dari 'kebangkitan' kegiatan ini untuk memperkuat CSDP EU terletak pada 'munculnya dan eskalasi konflik di sekitar Uni dan bertahannya ketidakstabilan serta ancaman dan tantangan transnasional'.⁴² Kegiatan pemindaian cakrawala saat ini tidak memprediksi perbaikan situasi ini sampai jangka menengah. Krisis COVID-19 dan dampak globalnya serta dampaknya terhadap Negara-negara Anggota EU dan semua warga negara Eropa menegaskan kembali perlunya pendekatan yang luas terhadap keamanan dan hubungan vital antara aspek keamanan dan pertahanan eksternal dan internal.

Pada akhirnya, semua inisiatif dan proses pengembangan kemampuan sipil dan militer Uni Eropa saat ini akan diukur berdasarkan **hasil** mereka, yang pada awalnya harus dicapai, paling lambat, dalam jangka waktu MFF berikutnya (hingga 2027) untuk memenuhi harapan publik Eropa. Kesimpulan ini akan diperpa-

rah oleh fakta bahwa karena tantangan ekonomi terkait COVID19 yang terbentang di depan, investasi publik di Negara-negara Anggota kemungkinan akan menghadapi kendala fiskal yang serius di tahun-tahun mendatang. Namun, hal ini memperkuat perlunya fokus dan prioritas yang jelas dalam perencanaan kemampuan sipil dan militer dan peningkatan efisiensi dengan kerja sama yang maksimal dalam pengembangan kemampuan. Pengukuran keberhasilan akan berfokus secara eksklusif pada inti pengembangan kemampuan, yang merupakan pertanyaan: **'Apakah kemampuan yang tepat telah dikembangkan dan apakah mereka siap untuk digunakan?'**. Hanya dengan mencapai ini Eropa akan dapat 'mempelajari bahasa kekuasaan'⁴³, yang dianggap perlu oleh Perwakilan Tinggi baru untuk menjaga pendekatan multilateralisme 'Eropa' dan untuk mengatasi tantangan masa depan bagi perdamaian, kebebasan dan kemakmuran.

42 Kesimpulan Dewan dan Perwakilan Pemerintah Negara Anggota, pertemuan di dalam Dewan, tentang pembentukan Perjanjian CSDP Sipil, Brussels, 19 November 2018, (14305/18), halaman 2

43 Josep Borrell, idato di dialog Raisina 2020, New Delhi, 16 Januari 2020

7.2. STUDI KASUS: PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN

oleh Luiza-Iulia Pufu

Dari krisis langsung hingga darurat dan kembali lagi – berurusan dengan krisis ekonomi dan keuangan, mengelola aliran migrasi tidak teratur atau untuk pertama kalinya menghadapi keputusan Negara Anggota untuk meninggalkan Uni – EU hampir tidak memiliki kesempatan untuk membahas secara mendalam dari isu-isu jangka panjang yang dipelopori lebih dari satu dekade lalu, dampak perubahan iklim terhadap keamanan.

PERSPEKTIF TERKAIT IKLIM

Apa yang dulu dilihat sebagai masalah generasi masa depan sekarang menjadi fenomena yang terlihat¹. Bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem telah berlipat ganda di seluruh dunia dan tidak terkecuali Eropa. Eropa Selatan dan Tengah sering menghadapi gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan, sementara banjir musim dingin semakin sering terjadi di Eropa Utara². Warga Eropa yang tinggal di daerah perkotaan lebih rentan terhadap risiko kesehatan, sementara biaya untuk masyarakat dan ekonomi meningkat sebagai akibat dari kerusakan iklim yang disebabkan oleh infrastruktur dan sektor seperti pertanian dan pariwisata. Peningkatan kesadaran akan dampak manusia terhadap lingkungan di antara warga negara Uni Eropa telah diterjemahkan ke dalam mobilisasi melalui platform melawan pemanasan global dan jumlah pemilih yang tinggi pada pemilihan EP Mei 2019,

di situ partai-partai Hijau mencatatkan keberhasilan yang tidak terduga. Meskipun banyak topik hangat lainnya menjadi berita, Eurobarometer menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah perhatian utama kedua di tingkat EU dan nasional, menyusul terorisme internasional³. Oleh karena itu, agar publik tetap terlibat dan mendukung isu-isu keamanan, isu keamanan juga perlu didekati dari perspektif terkait iklim. Pendekatan seperti itu masuk akal karena efek jangka panjang dari perubahan iklim adalah ancaman jangka panjang yang tidak terlihat dan lebih mengganggu daripada ancaman keamanan yang terbatas dan terisolasi.

Semua faktor di atas menyerukan tindakan baru di tingkat EU. Komisi baru telah menjadikan Kesepakatan Hijau Eropa sebagai prioritas pedoman politik utama, dengan tujuan menjadi benua netral-iklim pertama pada tahun 2050,⁴ Kesepakatan Hijau bertujuan untuk memperkenalkan langkah-langkah yang memungkinkan warga negara dan bisnis Uni Eropa memperoleh manfaat dari transisi hijau di semua sektor ekonomi, termasuk energi, industri, mobilitas dan keanekaragaman hayati.

PERUBAHAN IKLIM ADALAH PENGANDA ANCAMAN

Selain menempatkan transisi hijau ke ekonomi yang lebih kompetitif sebagai agenda utama, EU telah mena-

1 https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_transforming_climate_and_energy.pdf

2 https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6839

4 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf

rik perhatian pada kebutuhan untuk mengakui dampak buruk yang lebih luas dari perubahan iklim terhadap keamanan. Dalam hal risiko terkait iklim terhadap keamanan, Kesepakatan Hijau⁵ mencerminkan apa yang ditetapkan dalam Strategi Global EU 2016, menggambarkan perubahan iklim sebagai pengganda ancaman, sebuah fenomena yang meningkatkan risiko keamanan yang ada dan sumber ketidakstabilan, dan berkomitmen kepada EU untuk bekerja menuju peningkatan ketahanan lingkungan. Ini mengacu pada aksi iklim sebagai tujuan aksi eksternal EU, termasuk dalam konteks CSDP. Segera setelah mengambil posisinya, Perwakilan Tinggi EU, Josep Borrell, memperbarui ambisi EU untuk memimpin dalam perang melawan perubahan iklim, menyatakan bahwa aksi iklim adalah prioritas utama dalam aksi eksternal EU, bersama dengan kerja sama dengan negara-negara mitra⁶.

HUBUNGAN KEAMANAN IKLIM

Uni Eropa telah memiliki rekam jejak dalam menandai ancaman keamanan iklim, sebuah laporan tentang masalah tersebut telah dikeluarkan lebih dari satu dekade lalu oleh Perwakilan Tinggi Javier Solana⁷. Pada tahun 2016, Strategi Global EU (EUGS) memperkenalkan pendekatan terpadu untuk iklim dan keamanan, menyoroti hubungan antara risiko keamanan dan perubahan iklim, dan menyerukan pendekatan baru. Menerapkan EUGS secara langsung diterjemahkan ke dalam pembentukan Diplomasi Iklim EU, di situ Negara-negara Anggota dan lembaga-lembaga EU bersama-sama menentukan visi dan prioritas tindakan. Hal ini diartikulasikan dalam bentuk Rencana Aksi Diplomasi Iklim, yang terdiri dari 3 untaian utama:

- Untai 1: Advokasi perubahan iklim sebagai prioritas strategis dalam dialog diplomatik, diplomasi publik dan instrumen kebijakan eksternal.
- Untai 2: Mendukung tindakan pasca-Paris di daratan.
- Untai 3: Mengatasi hubungan antara perubahan iklim, sumber daya alam, kemakmuran, stabilitas, dan migrasi.

Baru-baru ini, hubungan keamanan iklim telah tercermin dalam Kesimpulan FAC tentang Diplomasi Iklim pada tahun 2019 dan 2020⁸. Untuk pertama kalinya, dalam Kesimpulannya tentang Keamanan dan Pertahanan dalam konteks Strategi Global EU Juni 2019⁹, Dewan mengakui relevansi perubahan iklim untuk misi dan operasi CSDP, termasuk dampaknya terhadap perencanaan dan pengembangan kemampuan militer dalam kaitannya dengan hubungan keamanan iklim.

Sementara dampak perubahan iklim terhadap keamanan telah menjadi sorotan dalam diskusi di tingkat EU, dimensi pertahanan agak diabaikan, meskipun secara langsung terkait dengan keamanan. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah spektrum luas strategi dan alat yang dimiliki EU, termasuk misi dan operasi CSDP, cukup atau memadai untuk mencegah dan mengatasi risiko keamanan iklim.

Sebuah laporan oleh Stockholm International Peace Research Institute¹⁰ menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh negara yang menampung personel operasi perdamaian paling multilateral pada tahun 2018 terletak di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Konflik yang didorong oleh perubahan iklim di berbagai wilayah termasuk konflik atas sumber daya, migrasi yang dipicu oleh lingkungan, dan ketegangan atas pasokan air dan energi¹¹. Semua ini kemungkinan akan mengarah pada peningkatan permintaan untuk penyebaran misi dan operasi CSDP yang mendesak. Skenario seperti itu, di situ misi dan operasi CSDP

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

6 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage%20/71305/new-eu-high-representative-josep-borrell-attends-climate-change-conference_ru

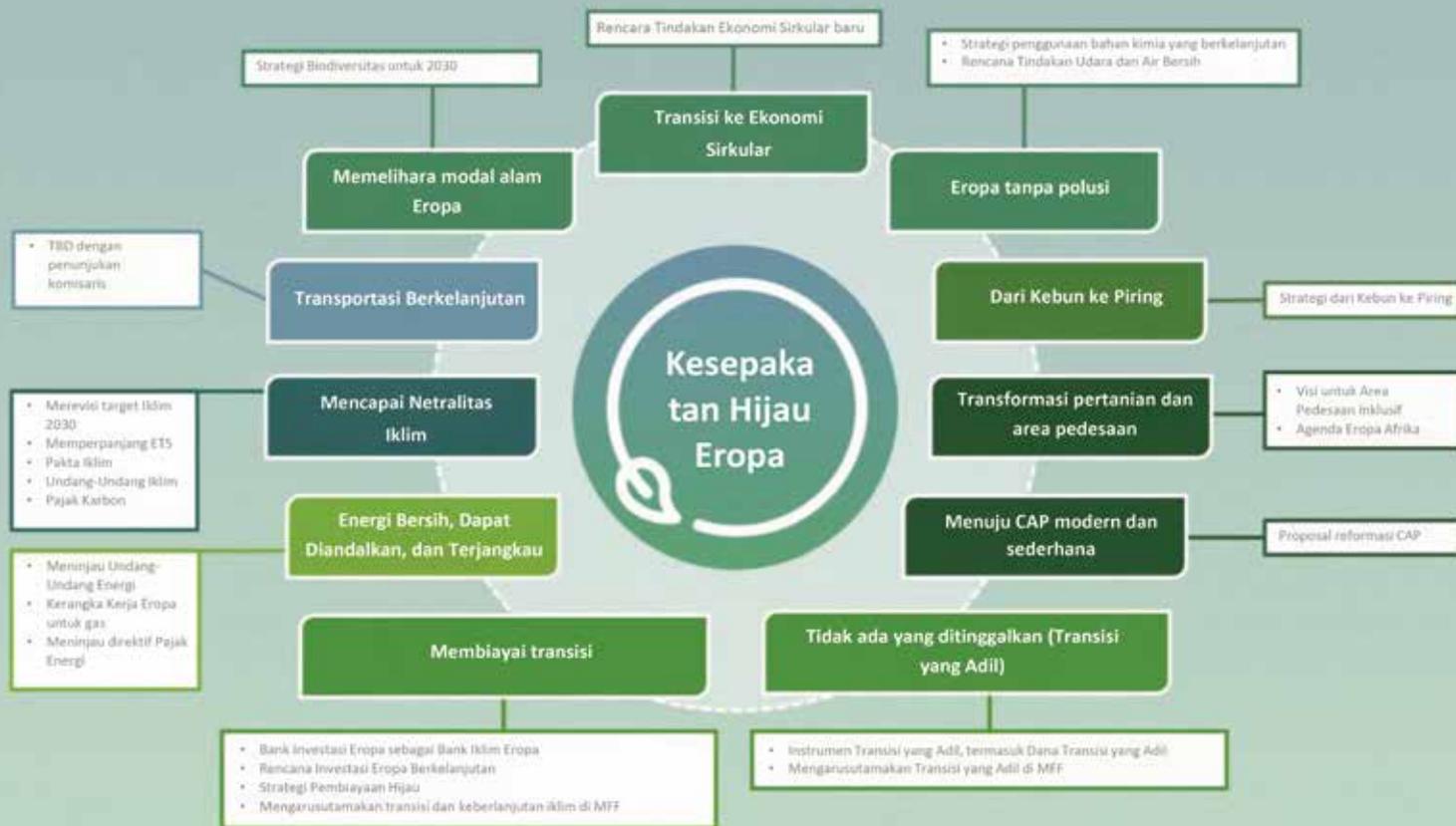
7 https://www.consilium.europa.eu/media/30862/en_clim_change_low.pdf

8 <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/01/20/climate-diplomacy-council-renews-the-eu-s-commitment-to-place-climate-action-at-the-centre-of-external-policy/>

9 <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/security-and-defence-council-adopts-conclusions/>

10 <https://www.sipri.org/publications/2019/sipri-policy-briefs/climate-change-peacebuilding-and-sustaining-peace>

11 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387.pdf



Uni Eropa

harus memberikan bantuan kemanusiaan atau mengatasi manajemen bencana, memerlukan pertimbangan lebih lanjut tentang peran misi dan operasi. Kursus-kursus pelatihan tentang aspek-aspek yang terkait dengan iklim dalam konteks pertahanan akan menjadi penting.

MENINGKATKAN EFISIENSI ENERGI

Berdasarkan tujuan Kesepakatan Hijau EU, misi dan operasi CSDP juga harus mengarah pada efisiensi energi dan berupaya mengurangi jejak karbon dan lingkungan mereka. Mengetahui bahwa energi adalah tulang punggung pertahanan dan manajemen krisis¹², mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mengidentifikasi sumber energi alternatif baru/terbarukan akan menantang prinsip 'misi-pertama'/efektivitas operasi dalam jangka pendek hingga menengah, sementara pada saat yang sama mengurangi biaya dan penurunan emisi dan ketergantungan pada sumber daya non-Uni Eropa.

Sejalan dengan Kesimpulan Dewan tentang Diplomasi Iklim¹³, untuk lebih mengintegrasikan tanggapan efektif terhadap risiko keamanan iklim di seluruh bidang kebijakan, penting untuk memperkuat hubungan antara peringatan dini dan tindakan dini. Hal ini dapat dicapai dengan lebih mengintegrasikan risiko terkait iklim ke dalam analisis konflik dan ke dalam instrumen peringatan dini dan pencegahan konflik.

PEMBANGUNAN KEMAMPUAN

Berkenaan dengan inisiatif EU di bidang pengembangan kemampuan, isu-isu terkait iklim dapat didiskusikan dalam proyek PESCO di masa depan. Tinjauan strategis PESCO pada tahun 2020 memberikan kesempatan untuk menilai upaya Negara-negara Anggota untuk mengatasi perubahan iklim dalam proyek-proyek yang ada. Dana Pertahanan Eropa juga dapat memberikan lebih banyak peluang untuk menga-

12 <https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/news/military-green-leaflet.pdf>

13 <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6125-2018-INIT/en/pdf>

Perubahan iklim dapat merusak perdamaian dan keamanan. Perubahan iklim memperparah tekanan keamanan yang ada dan membawa tantangan baru, juga berpotensi meningkatkan konflik kekerasan. Tanggung jawab operasional bidang pertahanan juga bisa bertambah apabila terjadi bencana besar akibat iklim.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.defensa.go.id/gsc

Mengurangi 'Jejak Sepatu' Karbon

Di bawah negara, pasukan dan peralatan adalah komponen utama jejak karbon. Mengurangi konsumsi bahan bakar akan mengurangi jejak karbon. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.



Lebih Banyak Kendaraan Hibrida. Kendaraan hibrida dapat mengurangi emisi karbon hingga 20-30%. Mengurangi konsumsi bahan bakar akan mengurangi jejak karbon.



Operasi Efisien. Operasi militer yang efisien dapat mengurangi jejak karbon. Mengurangi konsumsi bahan bakar akan mengurangi jejak karbon.



Dampak Perubahan Iklim Terkait Keamanan

Peningkatan Kebisingan dan Banjir Di Kawasan Perkotaan
Kawasan perkotaan dan air tawar, wilayah perbatasan perbatasan, hilangnya produktivitas dan lahan subur, perusakan infrastruktur, terancamnya mata pencaharian.

Peningkatan Suhu Daratan
Sementara hasil pertanian, penyebaran penyakit, kerusakan pangan, berkurangnya sumber air yang dapat dipertahankan, lebih banyak penyakit akibat suhu panas, perubahan potensi perikanan laut berisiko besar.



Masalah Geopolitik
Perubahan dampak yang tidak merata di negara-negara yang bergantung pada kondisi geografis dan faktor lainnya yang memengaruhi keamanan nasional dan manusia. Ancaman keamanan terkait iklim paling besar terdapat di negara-negara dengan pemerintahan yang lemah atau gagal dan/atau mengalami konflik.

Perubahan Suhu dan Di Yang Menegakkan
Akses ke sumber daya seperti energi di area tropis baru, kerawanan air tawar, perubahan geografis dan pemukiman baru lintas baru.

Kerangka Perumahan Laut dan Gelombang Besar
Mengurangi kerentanan di Zona Pantai Rendah, kerusakan infrastruktur, perubahan batas wilayah dan integrasi, perusakan penduduk, penyebaran penyakit, hilangnya lahan subur, perubahan sumber daya.

Caixa Hitam
Kerangka cuaca yang peening, perubahan perilaku, wilayah penyakit zoonosis/endemik, bencana alam.

Merespons Dampak Perubahan Iklim

Perubahan Mitigasi
Kerangka mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon.

Perubahan Mitigasi
Kerangka mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon.

Perubahan Mitigasi
Kerangka mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon.

Perubahan Mitigasi
Kerangka mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon.

Perubahan Mitigasi
Kerangka mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon.

Perubahan Mitigasi
Kerangka mitigasi sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon.

Strategi Ketahanan

Rencana Ketahanan
Melalui ada siklus pemantauan, dampak perubahan iklim terhadap operasi militer dapat tidak terakumulasi, risiko ketahanan dalam perencanaan dan respons penting dalam memantapkan, tanggap jawab pertahanan dan keamanan jangka panjang.

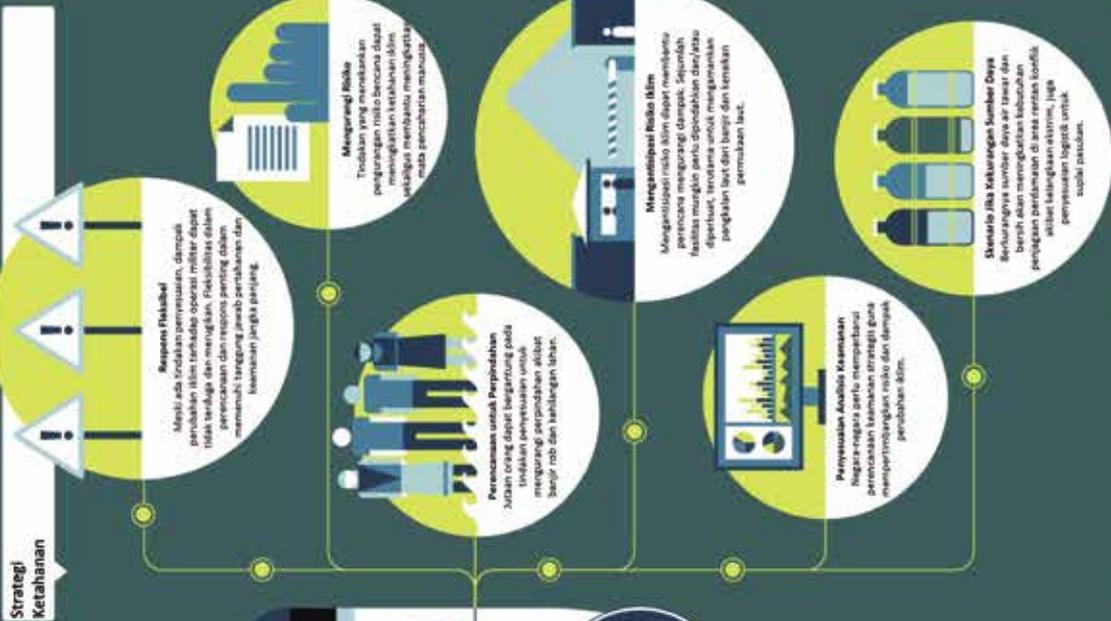
Mengurangi Risiko
Tindakan yang meredakan perubahan iklim dapat mengurangi risiko bencana dapat mengurangi ketahanan iklim. Mengurangi risiko bencana dapat mengurangi ketahanan iklim.

Mengurangi Risiko Iklim
Mengurangi risiko iklim dapat meredakan perencanaan mengurangi dampak. Sejumlah fasilitas militer perlu dipindahkan dan/atau dipertahankan, terutama untuk mengamankan pangkalan laut dan basis dan tentara permukaan laut.

Perencanaan untuk Perpaduan
Jalan yang dapat berintegrasi pada lingkungan perpaduan untuk mengurangi perpaduan akibat banjir rob dan kehilangan lahan.

Perencanaan untuk Perpaduan
Jalan yang dapat berintegrasi pada lingkungan perpaduan untuk mengurangi perpaduan akibat banjir rob dan kehilangan lahan.

Perencanaan untuk Perpaduan
Jalan yang dapat berintegrasi pada lingkungan perpaduan untuk mengurangi perpaduan akibat banjir rob dan kehilangan lahan.



tasi perubahan iklim di bidang pertahanan. Mengingat kondisi cuaca masa depan yang tidak dapat diprediksi, pertimbangan harus diberikan untuk menyesuaikan kemampuan EU.

Kerja sama internasional adalah kunci dalam menangani risiko terkait iklim secara lebih efektif. EU sudah memimpin dalam hal memenuhi tujuan perjanjian Paris, dengan harapan akan menjadi netral iklim pada tahun 2050. Pencapaian seperti itu akan memberi EU kesempatan untuk memajukan gagasan untuk memasukkan aspek pertahanan ke dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), instrumen utama dalam mencapai targetnya hingga saat ini.

Mempertimbangkan dampak perubahan iklim di Afrika dan Timur Tengah dan dimensi keamanannya, serta konsekuensi yang ditimbulkannya bagi EU, di situ migrasi tidak teratur merupakan masalah inti untuk Wilayah Selatan, sarana kerja sama yang luas harus segera ditinjau. .

Selanjutnya, EU harus menerjemahkan strateginya ke dalam tindakan, tugas yang kemungkinan besar akan menghadapi beberapa tantangan dalam hal kesepakatan di antara Negara-negara Anggota dan mengingat kompetensi terbatas EU di bidang keamanan dan pertahanan. Misalnya, menyetujui kerangka kerja mengenai NDC membutuhkan keputusan di tingkat tertinggi di Dewan Eropa¹⁴.

PERUBAHAN IKLIM DAN MILITER

Sementara ada penerimaan umum di antara komunitas militer bahwa perubahan iklim adalah pengganda ancaman dan harus diperhitungkan dalam skenario keamanan masa depan, dapat dikatakan – dengan beberapa tingkat pembenaran – bahwa pertimbangan keamanan iklim memiliki sedikit pengaruh langsung pada operasi militer kontemporer secara umum. , dan operasi dan misi militer CSDP pada khususnya. Namun, ada beberapa aspek penting yang harus disorot.

a) Meningkatkan Efektivitas Operasional & Mengurangi Jejak Karbon

¹⁴ https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en

¹⁵ EEAS 13758/12, 14 September 2012

'Konsep Militer Uni Eropa tentang Perlindungan Lingkungan dan Efisiensi Energi untuk operasi militer yang dipimpin EU'¹⁵ dimaksudkan untuk memfasilitasi pengurangan konsumsi energi operasi dan misi CSDP.

b) Membantu Membangun Ketahanan, Mendukung Adaptasi

Ketika mengembangkan risiko konflik dan opsi respons, pertimbangan yang lebih sistematis harus diberikan pada peran militer/pasukan keamanan negara tuan rumah, dan untuk mengidentifikasi kemungkinan bekerja dengan mereka untuk mendukung inisiatif memerangi perubahan iklim.

c) Dukungan Bantuan Kemanusiaan & Bantuan bencana

Bantuan Dukungan Kemanusiaan (SHA) adalah salah satu tugas yang tercantum dalam katalog tugas CSDP Lisboa, yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Kapabilitas (CDP). SHA adalah skenario skala kecil, termasuk tugas untuk Manajemen Penanggulangan Bencana dan Konsekuensi, dan mencakup operasi hingga setara brigade, termasuk kemampuan angkatan laut dan udara yang sesuai.

d) Keterlibatan Militer dalam Diplomasi Iklim

Dampak perubahan iklim sebagai pengganda ancaman akan semakin besar di masa depan, sehingga militer memiliki kepentingan pribadi yang kuat untuk mengadvokasi tindakan mitigasi yang mendesak sebagai bentuk akhir pencegahan konflik.

Namun, pada akhirnya, seberapa menarik dan sejalan dengan tujuan 'menghijaukan militer' Uni Eropa, sulit untuk membayangkan transisi penuh menuju misi dan operasi berorientasi ekologis yang terjadi dalam waktu dekat, terutama ketika lawan tidak menghadapi pembatasan penggunaan sumber energi primer yang berkelanjutan.

7.3. STUDI KASUS: DIGITALISASI PERTAHANAN

oleh Daniel Fiott¹

Setiap diskusi tentang digitalisasi pertahanan terhambat oleh ketidaktepatan istilah dan kata yang terkait. 'Cyber', 'the cloud', 'Internet of Things' (IoT), 'block chain', dan 'komputasi kuantum' banyak digunakan tetapi makna atau penerapannya yang sebenarnya bisa sangat kabur. Yang benar adalah bahwa kita mungkin tidak diperlengkapi secara intelektual untuk memahami seluk-beluk dan implikasi penuh dari digitalisasi, bahkan jika alasan ekonomi untuk digitalisasi jelas.

Faktanya, perkiraan menunjukkan bahwa digitalisasi produk dan layanan dapat menambah lebih dari €110 miliar untuk pendapatan industri di Eropa dalam jangka waktu yang relatif singkat yaitu lima tahun, dan dengan demikian mudah untuk melihat mengapa alasan ekonomi untuk digitalisasi yang lebih besar begitu kuat. Namun digitalisasi jelas bukan hanya tentang ekonomi dan konsekuensi geopolitik dari proliferasi teknologi digital menjadi andalan politik internasional saat ini. Asumsinya adalah bahwa persaingan untuk mengendalikan teknologi baru, dan kemauan untuk menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan dari negara lain, menggarisbawahi semakin pentingnya 'kekuatan digital'. Karena alasan inilah Komisi Eropa telah menyatakan bahwa sangat penting bagi EU untuk membangun 'kedaulatan teknologi' di bidang-bidang yang memiliki kepentingan strategis utama seperti pertahanan, luar angkasa, jaringan seluler (5G dan 6G) dan komputasi kuantum.

DIGITALISASI ANGKATAN BERSENJATA SANGAT PENTING

Apa arti digitalisasi untuk pertahanan mungkin bahkan lebih tidak jelas. Sementara proses telah dipercepat sejak tahun 1970-an, dan angkatan bersenjata tidak asing dengan kebutuhan untuk beradaptasi dan mengintegrasikan sistem dan proses informatika baru, modernisasi dan digitalisasi angkatan bersenjata Eropa sangat penting. Tanpa komando teknologi digital, Eropa bisa kehilangan pengaruh internasional dan otonomi politik. Dalam hal ini, fakta bahwa benua itu diproyeksikan perlu menghabiskan \$120-\$140 miliar untuk modernisasi dan digitalisasi angkatan bersenjata di tahun-tahun mendatang (atau \$20-\$30 miliar per tahun) merupakan tantangan yang menakutkan dan mendesak.

Memang, masalah ini menjadi fokus makalah makanan untuk pemikiran Mei 2019 yang diterbitkan oleh Finlandia, Estonia, Prancis, Jerman, dan Belanda. Negara-negara ini menyiratkan bahwa militer Eropa tidak dapat sepenuhnya berfungsi dalam lingkungan operasional yang padat informasi di situ para aktor yang dapat secara efektif memanfaatkan komputasi, Kecerdasan Buatan (AI), dan data cenderung memiliki keunggulan militer.²

Selain makalah pemikiran yang didukung negara anggota ini, Komisi Eropa merilis 'paket digital' yang telah lama ditunggu-tunggu pada 19 Februari 2020, merinci bagaimana Eropa dapat menuai manfaat AI, daya kom-

¹ Artikel ini didasarkan pada publikasi oleh Institut Studi Keamanan Uni Eropa Sumber artikel asli: <https://www.iss.europa.eu/content/digitalising-defence>

Di sana, Anda dapat menemukan bacaan dan referensi lebih lanjut tentang masalah ini.

² "Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan dalam Pertahanan", bahan makalah oleh Finlandia, Estonia, Prancis, Jerman dan Belanda, 17 Mei 2019.

putasi, dan ruang data sekaligus mengelola risiko teknologi tersebut Komunikasi tentang 'membentuk masa depan digital Eropa' dan 'strategi data Eropa', ditambah buku putih tentang AI, tidak benar-benar menyebutkan pertahanan.³ Namun, dengan rilis 10 Maret Strategi Industri EU yang baru, sinergi antara dan teknologi pertahanan akan dieksplorasi lebih lanjut.⁴ Meskipun Badan Pertahanan Eropa (EDA) telah mempelajari konsekuensi digitalisasi untuk pertahanan, pendekatan industri yang lebih luas oleh Komisi ini dapat dipahami mengingat relevansi digitalisasi yang lebih luas bagi masyarakat Eropa. Namun demikian, inisiatif ini menimbulkan dua pertanyaan yang saling terkait:

1. Bagaimana digitalisasi memengaruhi cara angkatan bersenjata Eropa berencana dan bertindak?
2. Apa yang harus dilakukan para perencana pertahanan di Eropa untuk mendapatkan manfaat dari digitalisasi sambil juga mengelola risiko yang tak terhindarkan?

KETIDAKTEPATAN DEFINISI

Diskusi tentang digitalisasi dapat dirusak oleh kurangnya kejelasan definisi. Pertama-tama kita harus membedakan antara digitalisasi dan digitalisasi.

Digitalisasi mengacu pada proses dasar untuk mengubah data dan informasi analog menjadi byte atau baris kode biner (misalnya, mengubah foto cetakan lama menjadi file JPEG). Digitalisasi memungkinkan komputer untuk memproses, berkomunikasi, dan menyimpan informasi secara lebih fleksibel dan efisien.

Digitalisasi, bagaimanapun, adalah istilah yang diberikan untuk kemajuan teknologi kolektif dalam daya komputasi, pengumpulan data, pemrosesan dan penyimpanan, dan jaringan antar perangkat komputer. Oleh karena itu, digitalisasi merupakan proses transformasi yang dapat mengubah cara hidup orang Eropa dan cara mereka merencanakan perang dan konflik di masa depan.

Angkatan bersenjata di Eropa lebih dari akrab dengan digitalisasi dan digitalisasi karena mereka telah lama menggunakan komputer untuk mengelola logistik dan persediaan pasokan, pembayaran upah dan pemeliharaan catatan personel. Intelijen militer juga telah lama mendapat keuntungan dari teknologi komputer, mis. Komputer deskripsi Enigma Turing dan Welchman pada tahun 1940-an, dan sejak tahun 1960-an tentara telah menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan matematis yang kompleks untuk akurasi artileri dan balistik. Dengan penemuan mikroprosesor pada 1970-an, militer mulai menggunakan komputer untuk komando dan kontrol (C2) dan intelijen, pengawasan dan pengintaian (ISR). Pada 1990-an, daya komputasi dan massa data yang meningkat pesat digunakan untuk meningkatkan komunikasi medan perang antara unit dan komando strategis dan untuk meningkatkan kemampuan serangan presisi, sebuah proses yang dikenal sebagai Revolusi Urusan Militer (RMA).

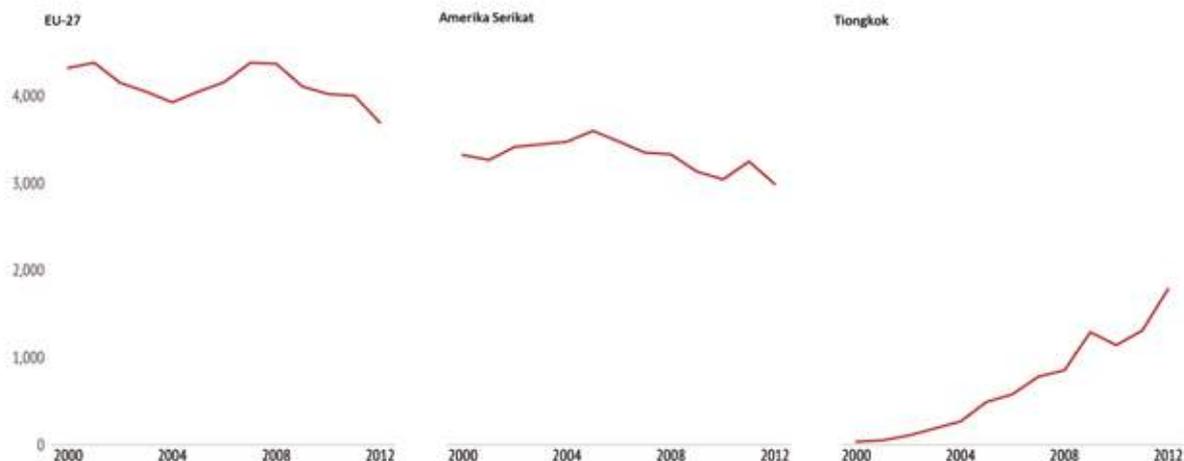
Komunikasi militer, sensor, logistik dan pemeliharaan dan C2 hampir sepenuhnya terkomputerisasi dan saling berhubungan saat ini, sehingga pertahanan dunia maya telah menjadi elemen penting untuk meningkatkan ketahanan digital angkatan bersenjata Eropa. Ketika peralatan militer, proses dan sistem informatika menjadi semakin terjalin, potensi serangan siber meningkat. Pengalaman seperti *worm* 'Conficker' yang menginfeksi sistem angkatan laut Prancis pada tahun 2009, dan yang menyebabkan pelarangan jet tempur Rafale, jelas perlu dihindari. Berdasarkan pengalaman tersebut, Prancis telah menjanjikan €1,6 miliar hingga 2025 untuk pertahanan sibernya, tetapi sejumlah negara anggota Uni Eropa lainnya dan sekutu NATO juga telah membuat Komando Siber Gabungan, yang diinvestasikan dalam penelitian pertahanan siber (misalnya Belanda sedang berinvestasi €6,5 juta per tahun) dan/atau telah mendirikan pusat pelatihan dan latihan dunia maya (misalnya Estonia mendirikan pusatnya pada April 2019).

3 Komisi Eropa, "Komunikasi tentang Membentuk Masa Depan Digital Eropa", COM(2020) 67 final, Brussels, 19 Februari 2020, hal. 5.

4 Komisi Eropa, "Buku Putih tentang Kecerdasan Buatan: A European Approach to Excellence and Trust", COM(2020) 65 final, Brussels, 19 Februari 2020, hlm. 6.

Paten yang Diberikan di Bidang ICT

Dikeluarkan oleh Kantor Paten Eropa, 2000-2012



Data: OECD, 2019

KERJA SAMA INTERNASIONAL SANGAT PENTING

Sebagian besar menteri militer dan pertahanan Eropa mengenali bahwa kerja sama internasional sangatlah penting untuk 'pertahanan digital' mereka. Di dalam NATO, negara-negara Eropa bekerja menuju Ikrar Pertahanan Siber yang disepakati pada Juli 2016 untuk meningkatkan kapasitas siber sekutu, dan aliansi tersebut telah membentuk Tim Reaksi Cepat Siber dan Pusat Operasi Ruang Siber. Di EU, saat ini ada empat proyek spesifik terkait siber di bawah Kerja sama Terstruktur Permanen (PESCO) dan Komisi Eropa akan menyediakan €17,7 juta untuk kesadaran situasi siber dan investasi kemampuan pertahanan di bawah Program Pembangunan Industri Pertahanan Eropa (EDIDP) pada tahun 2020. Sebagai bagian dari Kerangka Kerja Kebijakan Pertahanan Cyber (CDPF) dan Rencana Pembangunan Kapabilitas (CDP) Organisasi yang lebih luas, masalah terkait dunia maya dan digital ditangani, termasuk pengembangan kemampuan dunia maya, pelatihan dan latihan, perlindungan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP), sistem komunikasi dan informasi dan banyak lagi. Oleh karena itu, badan-badan

seperti Staf Militer EU (EUMS) sedang mengerjakan inisiatif seperti mengintegrasikan pelatihan pertahanan siber ke dalam proses sertifikasi Kelompok Pertempuran EU.⁵ Lebih jauh lagi, sejak Februari 2016 NATO dan EU telah menerapkan pengaturan teknis tentang pertahanan siber dengan untuk bertukar informasi tentang tanggapan darurat dunia maya.

Mengingat berbagai inisiatif yang sudah ada, orang mungkin dimaafkan untuk berpikir bahwa negara-negara dan lembaga-lembaga anggota EU telah merancang 'kode' yang diperlukan untuk membantu transisi angkatan bersenjata Eropa ke era digital. Namun, digitalisasi menghadirkan kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata dengan tantangan dan pertanyaan unik. Pertama, kemajuan dalam *cloud*, IoT, rantai blok, dan komputasi kuantum mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dan/atau tidak terduga untuk kinerja peralatan dan kemampuan militer, serta bagaimana perencana pertahanan merancang dan melakukan operasi. Kedua, penggunaan teknologi digital untuk pertahanan dapat mengandaikan perubahan dalam doktrin militer atau menantang cara hierarki militer dan birokrasi pertahanan secara tradisional berfungsi.

⁵ Dewan Uni Eropa, "Kerangka Kebijakan Pertahanan Siber Uni Eropa (Pembaruan 2018)", 14413/18, 19 November 2018, Brussels, hlm. 11.

Terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan pertahanan memproduksi solusi teknologi digital baru untuk peperangan, para perencana pertahanan tidak sepenuhnya yakin bagaimana – jika memang – digitalisasi akan mengubah karakter peperangan.

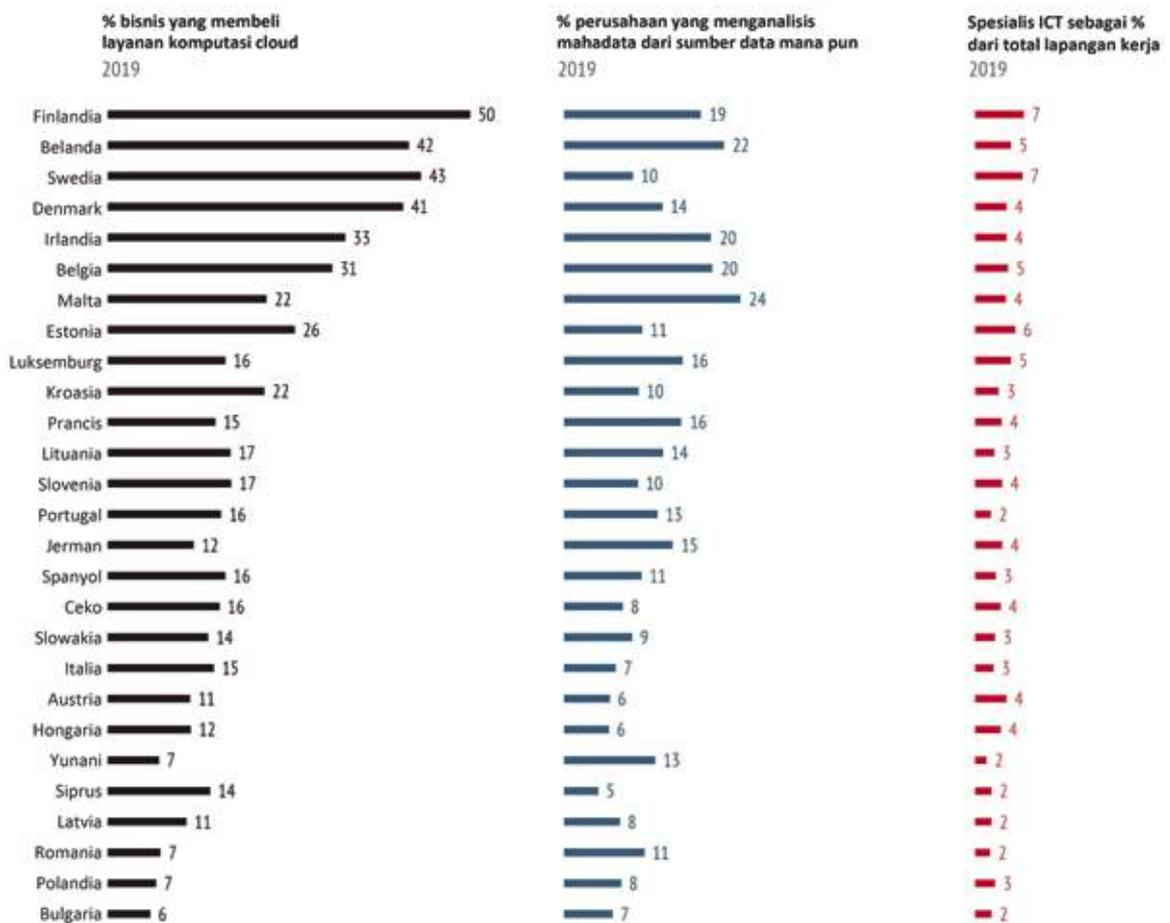
DIGITALISASI: TIDAK ADA PELURU PERAK UNTUK SETIAP MASALAH

Apakah teknologi dapat benar-benar mengubah karakter perang secara mendasar adalah perdebatan yang sudah mapan di kalangan ilmiah. Beberapa orang akan berpendapat bahwa daya komputasi, AI, dan

penggunaan data secara luas tidak banyak membantu secara mendasar mengatasi kepekaan politik yang terjadi melalui perdebatan terkait dengan pengembangan kemampuan, pembangkitan kekuatan, dan penggunaan kekuatan militer. Dalam hal ini, digitalisasi tidak boleh dilihat sebagai peluru perak untuk setiap masalah yang dihadapi militer Eropa, dan dimensi manusia akan diperlukan untuk bimbingan politik-strategis dan menjaga moral pasukan, antara lain. Tidak terlalu banyak berinvestasi dalam tren seputar teknologi telah menjadi andalan diskusi teoretis militer. Setelah kemenangan cepat AS atas militer Irak pada awal 1990-an, misalnya, para sarjana dan pembuat kebijakan memuji gagasan bahwa penguasaan teknologi dalam Sistem Pemosi-

Penyerapan digital di EU

Peringkat negara anggota di empat kategori terkait ITC



Data: Komisi Eropa - Papan Skor Digital, 2020: Eurostat, 2019 dan 2020

sian Global (GPS), komunikasi digital, peperangan elektronik, siluman, satelit, dan serangan presisi dapat memimpin untuk superioritas militer. Akan tetapi, menjadi jelas setelah intervensi AS di Afghanistan pada tahun 2001, bahwa teknologi hanya dapat membawa pasukan AS sejauh ini ketika strategi kontra-pemberontakan diperlukan sebagai gantinya.

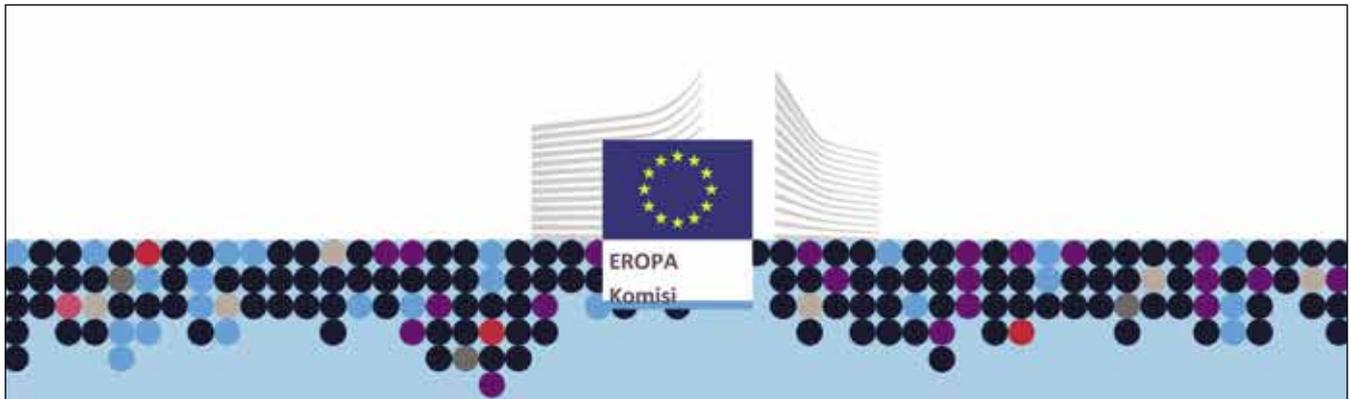
Berdasarkan pengalaman tersebut, ada ketakutan bahwa digitalisasi dapat digunakan sebagai 'plester lengket' teknologi untuk menangani masalah politik-strategis yang tidak dapat diselesaikan dalam peperangan. Manajemen data, contohnya. Militer Eropa telah menangani sejumlah besar data dan mereka memproses serta menggunakan data untuk logistik, pemeliharaan peralatan, kesehatan personel, manajemen biaya, dan menemukan keterampilan dan bakat tertentu (misalnya bahasa, pelatihan khusus). Namun, memiliki sumber data yang dapat diakses secara terpusat yang dapat digunakan dengan cepat oleh para pemimpin militer di semua cabang dan layanan merupakan suatu tantangan. Sementara kemajuan dalam AI disebut-sebut sebagai sarana untuk menangani manajemen data di militer secara lebih efektif, penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen data di militer masih tunduk pada persaingan antar-layanan, yaitu cabang mana pun yang memegang data yang memegang kekuasaan, dan komprehensif sistem manajemen data tidak menghilangkan kebutuhan akan kepemimpinan militer (misalnya haruskah lebih banyak sumber daya dialihkan ke batalion atau tentara yang berkinerja tinggi dibandingkan dengan yang berkinerja buruk?).

Mungkin salah satu contoh yang lebih jelas tentang bagaimana perilaku manusia dan digitalisasi berinteraksi dapat dilihat pada bagaimana personel militer menggunakan teknologi digital. Kenyataan hari ini adalah – sama seperti orang lain – personel angkatan bersenjata semakin banyak menggunakan aplikasi media sosial dan layanan lokasi geografis. Hal ini memiliki risiko. Data dan informasi yang dihasilkan oleh personel militer yang menggunakan teknologi digital dapat menimbulkan kerugian strategis. Layanan dan perangkat lokasi-geografis (misalnya jam tangan pintar) dapat memberikan

informasi kepada badan intelijen asing tentang di situ pasukan ditempatkan secara langsung. Selain itu, penggunaan media sosial untuk berbagi foto dengan anggota keluarga dalam fase pra-penempatan dapat digunakan oleh badan intelijen untuk memastikan apakah penyebaran baru (terutama yang rahasia) sedang dalam perjalanan. Selain itu, 'swafoto' personel di barak atau instalasi militer dapat secara tidak sengaja memasukkan informasi sensitif ke dalam domain publik (misalnya layar komputer di latar belakang). Tentu saja, kita dapat menyalahkan teknologi atas kerentanan seperti itu, tetapi pemahaman bahwa perilaku baru yang lebih sensitif terhadap risiko yang berpotensi ditimbulkan oleh teknologi digital perlu berakar di militer Eropa.

Terakhir, ada juga keterbatasan pada teknologi yang dipuji karena memiliki efek mengganggu pada pertahanan. Ambil komputasi kuantum, misalnya. Domain teknologi ini telah disebut-sebut sebagai langkah maju berikutnya dalam daya komputasi, dan beberapa penelitian mengklaim bahwa hal itu dapat merevolusi navigasi angkatan laut dengan mengganti GPS dengan jam atom⁶ atau sangat meningkatkan kemampuan kriptografi defensif/ofensif. Komputasi kuantum dipandang sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan komputasi klasik karena melanggar batasan pengodean linier. Bit dan byte dalam komputasi klasik hanya bisa menjadi 0 atau 1 pada satu waktu, tetapi qubit kuantum bisa menjadi 0 dan 1 pada saat yang sama. Ini secara teoritis dapat memungkinkan komputasi kuantum untuk membuat lebih banyak perhitungan. Meskipun perhitungannya diperdebatkan, Google berpendapat bahwa tugas yang membutuhkan waktu 200 detik untuk dilakukan oleh komputer 53-qubitnya akan membutuhkan superkomputer tercepat di dunia ('KTT' IBM) 10.000 tahun. Meskipun klaim ini, bagaimanapun, komputer kuantum membutuhkan perangkat pendingin tidak lebih kecil dari sebuah van dan sejumlah besar energi; apalagi, perhitungan kuantum dapat menghasilkan kesalahan pada perubahan suhu atau kondisi elektromagnetik sekecil apa pun. Ini bukanlah atribut yang cocok dengan lingkungan militer.

6 Lihat contoh, Ghaya Baily et al., "Metrologi Berbasis Quantum untuk Waktu, Navigasi, dan Analisis Spektrum RF", di Badan Pertahanan Eropa, Teknologi Quantum di Optronics: Prosiding Workshop Optronics, 2019: hlm. 60-65.



#DSM

Pasar Tunggal Digital

INISIATIF 'MENDIGITALISASI INDUSTRI EROPA'

LANSKAP BISNIS DI UNI EROPA

KEKUATAN EROPA:

Ekonomi yang berkembang dan beragam: 26 juta perusahaan aktif dengan sekitar 144 juta orang bekerja di ekonomi bisnis.

Bidang tradisional:



Industri manufaktur Eropa memiliki 2 juta perusahaan dan 33 juta pekerjaan.

Eropa memiliki pangsa pasar dunia sebesar 33% di bidang robotika, 30% di bidang sistem tertanam, 55% di bidang semikonduktor otomotif, 20% di bidang peralatan semikonduktor, dan 20% di bidang komponen fotonika.



Ekosistem regional UKM, pasar sedang, industri besar, dan riset yang kuat di semua bidang ekonomi.

TANTANGAN:

- Masih ada perbedaan besar di tingkat digitalisasi industri di semua bidang, Negara Anggota, dan wilayah.
- Hanya 1 dari 5 perusahaan di Uni Eropa yang memiliki digitalisasi tinggi.
- Sekitar 60% industri besar dan lebih dari 90% UKM merasa tertinggal dalam inovasi digital.
- Eropa tertinggal dalam hal platform online, industri Uni Eropa harus menjadi yang terdepan dalam platform industri digital.
- 90% pekerjaan di masa depan akan memerlukan tingkat keahlian digital, sementara 44% penduduk Eropa kurang memiliki keahlian digital dasar.

PELUANG:

Digitalisasi produk dan layanan dapat menambah lebih dari €110 miliar pendapatan tahunan untuk industri di Eropa hingga 2020.

APA YANG DILAKUKAN KOMISI EROPA?



Strategi Mendigitalisasi Industri Eropa (DEI) diluncurkan pada April 2016 untuk memperkuat daya saing Uni Eropa dalam bidang teknologi digital dan memastikan setiap bisnis di Eropa, apa pun bidangnya, di mana pun lokasinya, apa pun ukurannya, bisa mendapat manfaat dari inovasi digital.



Investasi Uni Eropa dalam digitalisasi industri dari 2016 hingga 2020: Hampir €5 miliar, diperkirakan Negara Anggota, wilayah, dan industri menambahkan €50 miliar lagi untuk investasi publik dan swasta.

GARIS TINDAKAN DAN PENCAPAIAN INISIATIF 'MENDIGITALISASI INDUSTRI EROPA':



PUSAT INOVASI DIGITAL:

Jaringan fasilitas penunjang Eropa tempat UKM dan pasar sedang menguji teknologi digital terbaru dan mendapatkan pelatihan, saran keuangan, intelijen pasar, dan jaringan untuk mengembangkan bisnis.

PENCAPAIAN:

- Memberikan € 500 juta pendanaan Uni Eropa untuk Pusat Inovasi Digital (2016-2020).
- Membangun jaringan pan-Eropa yang terdiri atas lebih dari 200 Pusat Inovasi Digital yang bekerja sama dengan Negara Anggota dan wilayah.
- Ikut mendanai ratusan eksperimen inovasi per tahun, yang setidaknya satu UKM dan satu Pusat Inovasi Digital menguji dan mengimplementasikan inovasi digital.
- Melatih 100 Pusat Inovasi Digital potensial di wilayah yang lamban dalam mengadopsi teknologi digital, dengan fokus ke wilayah Eropa Tengah dan Timur.
- Membangun pemahaman umum dengan Negara Anggota mengenai program investasi yang mendukung transformasi digital UKM.



PERATURAN KERANGKA KERJA YANG SESUAI DI ERA DIGITAL:

Menjelaskan dan menerapkan regulasi Uni Eropa guna memastikan industri dan ekonomi Uni Eropa dapat berjuang di Pasar Tunggal Digital.

PENCAPAIAN:

- Mengajukan tindakan keamanan siber, data nonpersonal yang mengalir bebas, dan platform online ke Dewan dan Parlemen Eropa.

PLATFORM EROPA UNTUK INISIATIF NASIONAL MENDIGITALISASI INDUSTRI:

Platform ini mengandalkan dan melengkapi inisiatif Negara Anggota untuk digitalisasi industri. Sejauh ini, 15 Negara Anggota Uni Eropa telah meluncurkan inisiatif nasional dan diharapkan akan ada lebih banyak pada tahun 2018.



PENCAPAIAN:

- Menyelaraskan strategi digitalisasi nasional dengan mengutamakan inisiatif Mendigitalisasi Industri Eropa.
- Jumlah minimum investasi dari Negara Anggota dan industri dalam digitalisasi semua bisnis, sejalan dengan target awalnya sebesar €50 miliar dan 2016 hingga 2020.



KEMITRAAN DAN PLATFORM INDUSTRI:

Mendukung kemitraan Publik-Swasta yang mengembangkan teknologi digital penting dan merangkainya untuk membangun platform industri generasi berikutnya.

PENCAPAIAN:

Menanamkan investasi Uni Eropa sebesar €3 miliar (2018-2020) untuk Kemitraan Publik-Swasta yang mendukung:

- 5G, IoT, Komputasi Berperforma Tinggi, komponen dan sistem elektronik dan fotonik, teknologi robotika dan data.
- Mengembangkan dan merintis platform industri digital skala besar untuk pabrik, rumah sakit, pertanian, gedung, kendaraan otonom, dll. "cerdas".



MENYIAPKAN PENDUDUK EROPA UNTUK MASA DEPAN DIGITAL:

Meningkatkan keahlian tenaga kerja dan merintis inisiatif di Uni Eropa untuk menunjukkan bagaimana sistem pendidikan dapat merespons kebutuhan digital penduduk Eropa.

PENCAPAIAN:

- Keahlian Digital dan Gabungan Pekerjaan serta Percobaan Latihan Peluang Digital menunjukkan bagaimana kesenjangan keahlian dapat ditangani.
- 15% investasi Uni Eropa di Pusat Inovasi Digital ditujukan untuk pengembangan dan pelatihan keahlian.

MENGELOLA RISIKO DIGITALISASI DALAM PERTAHANAN

Namun, militer Eropa tidak boleh merasa nyaman dengan ketidakpastian seputar perkembangan teknologi digital. Semakin militer Eropa menjadi tergantung pada teknologi digital, semakin mereka menjadi rentan terhadap risiko yang melekat dari konektivitas teknologi yang lebih besar. Pembangunan dan penerapan ini dalam pertahanan kemungkinan akan mengakibatkan musuh harus menemukan titik lemah baru dalam pertahanan digital Eropa (ini disebut 'paradoks kemampuan/kerentanan'⁷). Misalnya, melihat beberapa dekade ke depan penggunaan komputasi kuantum dapat memberikan Eropa keunggulan teknologi di bidang-bidang seperti kriptografi tetapi dapat mengakibatkan kerentanan tertentu. Meskipun komunikasi kuantum yang aman juga akan bergantung pada koordinasi organisasi berkualitas tinggi di dalam pemerintah, kemajuan dalam komunikasi kuantum sudah menjanjikan untuk sangat mengurangi risiko peretasan data karena kesulitan ekstrem yang terlibat dalam mengutak-atik qubit. Tentu saja, di masa depan juga dimungkinkan untuk memanipulasi qubit untuk meretas sistem digital tetapi asumsi saat ini adalah bahwa komputasi kuantum dapat merevolusi komunikasi dan kriptografi.

Di hadapannya, komputasi kuantum dapat menjadi keuntungan bagi dinas militer tetapi ada juga potensi risiko. Jika diasumsikan bahwa komunikasi kuantum akan sangat mengurangi risiko peretasan jarak jauh, maka infrastruktur fisik dapat menjadi lebih banyak sasaran bagi aktor militer – komunikasi kuantum masih akan bergantung pada infrastruktur fisik. 'Tautan kuantum' sudah dikembangkan hari ini dan Tiongkok telah membangun hubungan kuantum darat hampir 2.000 km antara Beijing dan Shanghai. Fitur era digital seperti itu mungkin masih ada beberapa dekade lagi untuk sebagian besar negara, tentu saja. Selain itu, perlindungan

infrastruktur kritis pada dasarnya membutuhkan kerja sama yang erat antara aktor militer dan badan sipil dan aktor swasta – sehingga solusi militer semata-mata untuk perlindungan infrastruktur kuantum Eropa tidak realistis. Namun demikian, kita harus bertanya apakah tautan kuantum masa depan yang sebanding di daratan Eropa akan dianggap sebagai target militer oleh musuh potensial, dan, jika demikian, kita harus memikirkan bagaimana kita akan melindungi mereka dan infrastruktur digital lainnya.

Meskipun contoh ini tidak masuk akal, ini menyoroti perlunya pembuat kebijakan dan perencana pertahanan Eropa untuk mengembangkan strategi Perlindungan Infrastruktur Kritis (CIP) yang efektif untuk menangani dikotomi palsu antara infrastruktur 'virtual' dan 'fisik'. Mengingat bahwa Komisi Eropa berencana untuk merilis proposal untuk langkah-langkah tambahan pada Arahan CIP (2008/114/EC) pada akhir tahun 2020, mungkin ada peluang bersama bagi pembuat kebijakan dan perencana pertahanan untuk lebih memahami aspek militer CIP, Terutama terkait infrastruktur digital. Para perencana pertahanan sudah memiliki pengalaman dengan CIP, seperti yang dapat dilihat dari strategi militer untuk melindungi jaringan kabel bawah laut global yang menopang Internet dan jaringan digital. Sementara kabel bawah laut serat optik telah ada sejak akhir 1980-an, para perencana pertahanan semakin menyadari bahwa jalur pasokan energi dan/atau kabel bawah laut yang rusak dapat mengganggu komunikasi militer, berpotensi melumpuhkan jaringan C2 dan sistem senjata strategis ditambah sistem peringatan dini.⁸ Uni Eropa sudah mengembangkan kemampuan untuk CIP maritim: misalnya, lima proyek maritim PESCO secara khusus menangani pengawasan dan perlindungan bawah laut.⁹

Di luar kebutuhan untuk mengamankan infrastruktur penting, angkatan bersenjata Eropa juga harus bersaing dengan konektivitas, kemacetan, dan

7 Jacquelyn Schneider, "Perang yang Diaktifkan secara Digital: The Capability-Vulnerability Paradox", Center for a New American Security report, Agustus 2016, hlm. 4.

8 Bryan Clark, "Kabel Bawah Laut dan Masa Depan Kompetisi Kapal Selam", Buletin Ilmuwan Atom, vol. 72, tidak. 4 (2016), hal. 235.

9 Termasuk: Maritime (semi) Autonomous Systems for Mine Countermeasures (MAS MCM), Harbour and Maritime Surveillance and Protection (HAMSPRO), Upgrade of Maritime Surveillance, Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package (DIVEPACK) dan Maritime Unmanned Anti-Submarine System (MUSAS).

serapan digital yang lebih besar. Teknologi digital berkembang biak dengan kecepatan yang semakin cepat. Jika, seperti yang diklaim oleh sebuah laporan, dibutuhkan 50 juta orang 75 tahun untuk menggunakan telepon tetapi hanya empat tahun untuk jumlah yang sama ini untuk menggunakan internet, maka risiko musuh akan mengalahkan militer Eropa untuk membuka cara-cara inovatif menggunakan teknologi digital berpotensi tinggi. Tentunya, pertahanan siber adalah satu cara untuk mengelola risiko yang terkait dengan proliferasi dan konektivitas teknologi digital, tapi solusi jangka panjang apa pun harus melampauinya. Orang dapat berargumen bahwa perencana pertahanan perlu memelihara sistem analog untuk memastikan kapasitas operasional minimum jika terjadi 'pemadaman' digital atau gangguan elektromagnetik. Sebagian besar komponen yang dapat digunakan untuk keperluan militer seperti microchip dan proses sudah memerlukan campuran analog-digital untuk sinyal dan komunikasi, dan pabrikan Eropa telah memproduksi jenis komponen ini dengan dukungan EU. Meskipun demikian, ada alasan kuat untuk menyusun skenario untuk menguji bagaimana militer Eropa dapat beroperasi dengan teknologi 'hanya analog' di teater yang dikompromikan secara digital.

PEKERJAAN SEDANG BERLANGSUNG

Dengan pembentukan Dana Pertahanan Eropa (EDF), dan bekerja menuju 'kompas strategis' pada tahun 2020, ada peluang untuk lebih memahami dan mengeksploitasi teknologi pengganggu yang relevan dengan pertahanan. Orang dapat berargumen bahwa EU sudah memiliki sistem ini dengan CDP dan perencanaan program kerja Komisi di bawah EDF, dan memang inisiatif ini telah menandai kebutuhan dan kekurangan di bidang-bidang seperti pertahanan dunia maya dan keunggulan informasi. Badan-badan seperti Badan Pertahanan Eropa (EDA) juga telah menginvestasikan waktu dalam studi eksplorasi tentang bagaimana Big Data dapat mpenge-

ruhi sektor pertahanan.¹⁰ Selain itu, Badan tersebut sedang mengembangkan Agenda Penelitian Strategis Menyeluruh (OSRA), yang dapat membantu menghubungkan Penelitian dengan lebih baik. dan Prioritas dan kepentingan Teknologi (R&T) negara-negara anggota dengan kemampuan berkemampuan digital yang dibutuhkan oleh EU. Pejabat komisi di Ditjen Industri dan Luar Angkasa Pertahanan (DG DEFIS) sedang mencari cara untuk mengoordinasikan investasi penelitian pertahanan dengan lebih baik dengan program penelitian sipil yang ada (Horizon Eropa). Komisi juga mengalokasikan €7,5 juta di bawah Tindakan Persiapan Penelitian Pertahanan (PADR) untuk teknologi baru seperti teknologi kuantum pada 2019.

Namun meskipun upaya tersebut penting, tidak ada strategi EU saat ini yang dirancang untuk memahami bagaimana angkatan bersenjata Eropa dapat menggunakan teknologi semacam itu atau bagaimana mereka akan melawan penggunaannya oleh musuh. Jadi, yang diperlukan bukanlah identifikasi sistemik dari kesenjangan kemampuan atau bidang teknologi yang mengganggu, dan lebih pada proses berbasis skenario berkelanjutan yang memungkinkan para perencana pertahanan untuk menilai manfaat dan risiko yang ditimbulkan oleh setiap teknologi atau sistem digital. Misalnya, kemajuan dalam pencetakan 3D, teknologi nano, dan sensor digital telah mengarah pada penciptaan sistem mikroelektromekanis (MEMS) – atau perangkat nirkabel mikroskopis yang dilengkapi dengan kamera dan sensor yang hanya berukuran sebutir pasir. Ketika dikerahkan dalam jumlah ratusan, partikel 'debu pintar' ini dapat digunakan untuk memberikan analisis tersembunyi dari suatu wilayah geografis. Banyak pembuat kebijakan dan perencana pertahanan di Eropa bahkan tidak akan tahu bahwa MEMS ada, apalagi memiliki tanggapan strategis tentang bagaimana teknologi semacam itu dapat digunakan atau bagaimana militer Eropa akan melawannya.

¹⁰ Badan Pertahanan Eropa, "Studi EDA Poin menuju Potensi Data Besar untuk Pertahanan", 18 Desember 2017.

Mendanai digitalisasi Eropa

Kerangka Kerja Keuangan Multitahunan, € miliar, 2021-2027.



Data: Komisi Eropa, 2018

* Untuk alokasi standarisasi, pasar tunggal, dan daya saing UKM
 ** Ini hanya mencakup alokasi untuk peralatan pengawasan pabean yang lebih baik

OTONOMI DIGITAL DAN KEDAULATAN TEKNOLOGI

Namun, para perencana pertahanan kemungkinan besar akan semakin bergantung pada solusi untuk 'otonomi digital' di luar domain militer. Pada kenyataannya, setiap perdebatan tentang digitalisasi pertahanan harus mencakup diskusi tentang bagaimana proses akuisisi pertahanan harus beradaptasi dengan digitalisasi. Memang ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah sistem yang didukung secara digital seperti senjata otonom suatu hari nanti dapat menggantikan platform tradisional seperti kapal selam, pesawat jet, atau kapal induk. Lebih lanjut, digitalisasi dalam pertahanan akan memerlukan diskusi sensitif tentang kedaulatan teknologi dan seberapa jauh militer Eropa harus bergantung pada penyedia swasta non-Uni Eropa untuk, katakanlah, komputasi awan. Perencana pertahanan Eropa perlu merenungkan apakah mengunggah data sensitif militer ke layanan cloud yang tidak aman adalah bijaksana, dan, sebagai strategi EU terbaru tentang status data, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa data tidak terakumulasi dalam konsentrasi besar oleh perusahaan tunggal mana pun karena dapat mempengaruhi persaingan dan keamanan pasar. Dalam hal ini, penting untuk mengetahui bahwa pada tahun 2019 perusahaan AS menguasai sekitar 70% dari pasar cloud global senilai \$96 miliar, dengan penyedia dari

Tiongkok mencapai 7%. 'Konsentrasi cloud' ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang hak penggunaan data dan, dalam kasus yang paling ekstrem, dapat mengurangi akses militer ke sumber informasi mereka sendiri.¹¹

Ini bukan untuk mengatakan bahwa angkatan bersenjata Eropa harus duduk dan menunggu industrialis mengembangkan layanan digital yang lebih aman, bahkan jika aktor sipil ini memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang 'kecanggihan' digital dan 'seni yang memungkinkan'. Misalnya, kemungkinan masalah standarisasi digital dan interoperabilitas data akan semakin membebani kemampuan angkatan bersenjata Eropa untuk dikerahkan bersama. Dilemanya tiga kali lipat.

- Pertama, pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data berbeda di antara berbagai cabang militer di sejumlah negara Eropa.
- Kedua, penggunaan dan pembagian data antara militer Eropa kurang dimanfaatkan atau bahkan tidak ada dalam banyak kasus.
- Ketiga, angkatan bersenjata Eropa tidak dapat bergantung pada akses yang dapat diandalkan ke sumber data yang dikembangkan di sektor sipil (misalnya, pikirkan kumpulan data yang dihasilkan oleh badan perbatasan, badan pembangunan, atau bahkan pasukan gendarmerie).

Meskipun kemampuan untuk memastikan interoperabilitas data akan bergantung pada solusi teknologi yang aman,

11 Komisi Eropa, "Komunikasi tentang Strategi Eropa untuk Data", COM(2020) 66 final, Brussels, 19 Februari 2020, hal. 8.

kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata Eropa harus merenungkan proses hukum, keamanan, dan kebijakan yang perlu mereka kembangkan untuk mengelola 'layanan cloud militer Eropa' di masa depan.

EROPA BERKEKUATAN DIGITAL?

Telah ditunjukkan bahwa kemajuan dalam teknologi digital seperti komputasi kuantum tidak sepenuhnya dipahami oleh sektor pertahanan, dan bahwa Eropa perlu bersikap realistis tentang bagaimana kemajuan teknologi ini dapat bermanfaat bagi keamanan dan pertahanan EU. Perencana dan pembuat kebijakan pertahanan Eropa harus mengakui bahwa teknologi digital akan menciptakan kerentanan dan peluang bagi angkatan bersenjata Eropa. Lembaga dan mekanisme EU dapat membantu transisi angkatan bersenjata Eropa ke digitalisasi, tetapi kenyataannya adalah bahwa birokrasi militer Eropa perlu berubah dari dalam dan teknologi digital hanya dapat melangkah sejauh ini dalam membantu masalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ada batasan untuk manfaat digitalisasi dalam pertahanan, bahkan jika kerentanan yang ditimbulkan oleh teknologi digital akan membutuhkan perencana pertahanan di tingkat nasional dan EU untuk mempertimbangkan apa lagi yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan ketahanan jaringan dan sistem komputer militer Eropa, serta sebagai infrastruktur digital Eropa secara lebih luas.

Namun, ada beberapa langkah langsung (jika sederhana) yang dapat diambil oleh EU. Pertama, sementara basis data statistik seperti Eurostat menghasilkan indikator data untuk digitalisasi dalam ekonomi EU yang lebih luas, saat ini tidak ada gambaran data konkret untuk digitalisasi angkatan bersenjata Eropa. Ini bukan panggilan untuk database yang dapat diakses publik, tetapi indikator digital dapat menjadi bagian dari fase pelaporan dari Tinjauan Tahunan Terkoordinasi tentang Pertahanan (CARD). Kedua, bahkan jika proyek 'awan militer digital Uni Eropa' akan menarik, tidak ada kebutuhan untuk proyek PESCO khusus pada teknologi digital karena banyak yang sudah menangani (jika kadang-kadang hanya secara tidak langsung) digitalisasi. Juga tidak perlu membuka 20 komitmen mengikat PESCO untuk memberi ruang bagi komitmen khusus pada digitalisasi pertahanan karena komitmen tertentu sudah memerlukan kesiapan operasio-

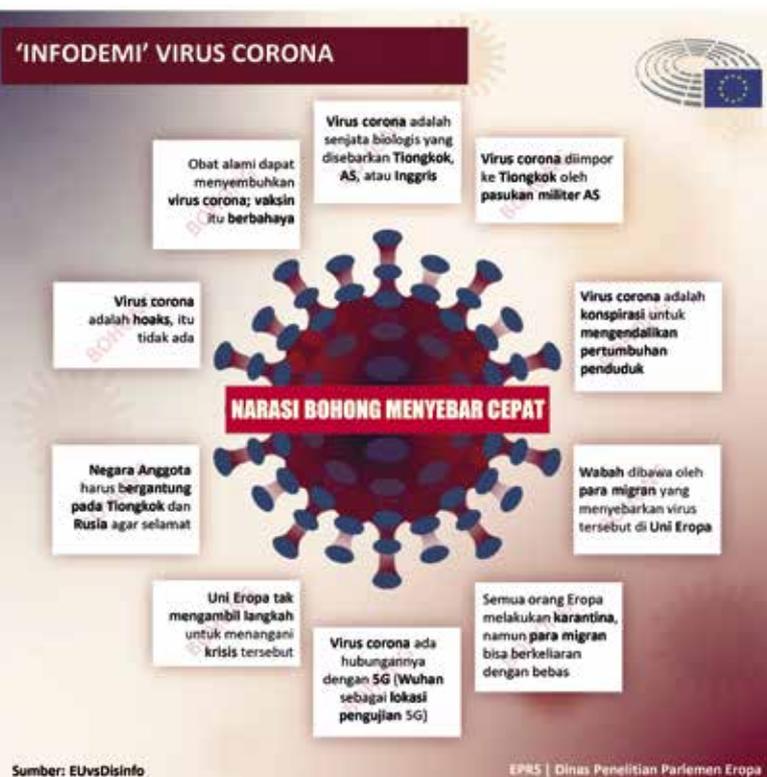
nal dan interoperabilitas. Alih-alih proyek dan komitmen, pelaporan tentang strategi dan inisiatif digitalisasi pertahanan nasional dalam Rencana Implementasi Nasional (NIP) PESCO, yang diajukan kementerian pertahanan setiap tahun untuk menunjukkan bagaimana mereka memenuhi komitmen yang mengikat, dapat didorong.

Komisi juga harus berperan dalam digitalisasi pertahanan Eropa. Langkah-langkah untuk mengurangi hambatan pertukaran data di seluruh Negara Anggota EU harus menguntungkan para perencana pertahanan, dan standarisasi digital yang ditingkatkan dapat membantu meningkatkan interoperabilitas digital militer Eropa. Namun, pada waktunya, penciptaan 'ruang data pertahanan Eropa bersama' dapat memanfaatkan inisiatif digital sipil Komisi yang lebih luas dan juga menangani kebutuhan khusus pertahanan. Memang, 'Strategi Eropa untuk data' 2020 menyinggung sembilan 'ruang data' sektoral untuk industri, Kesepakatan Hijau, mobilitas, kesehatan, keuangan, energi, pertanian, administrasi publik, dan keterampilan. 'Ruang data' ini seharusnya membuat pengelolaan dan pemanfaatan data lebih mudah di seluruh Pasar Tunggal sehingga tidak terlalu sulit untuk melihat relevansi ruang tersebut untuk pertahanan. Terlepas dari kekhususan pertahanan, 'ruang data pertahanan bersama' dapat dikembangkan untuk membantu mengurangi biaya pengadaan, peralatan, dan personel di seluruh EU, misalnya, dan ruang data lain dapat mendukung proses ini (misalnya, ruang data energi dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertahanan).

Jika angkatan bersenjata Eropa tidak ingin kehilangan kekuatan teknologi dari musuh, maka mereka harus tetap berada di depan kurva digital. Hari ini kita banyak mendengar tentang perlunya Eropa menjadi pemain geopolitik yang tidak hanya fasih berbahasa kekuasaan tetapi juga berdaulat secara teknologi. Namun kesenjangan antara retorika dan kenyataan terlalu besar. Eropa tidak dapat menjadi 'kekuatan digital' di belakang kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) pertahanan nasional atau Kerangka Kerja Keuangan Multi-tahunan (MFF), dan juga tidak dapat benar-benar berkembang jika sepenuhnya bergantung pada non-EU teknologi digital. Tanpa komitmen politik dan keuangan yang kuat untuk digitalisasi dan pertahanan, negara-negara anggota EU hanya bisa berharap untuk menjadi 'kurkaci digital'.

7.4. STUDI KASUS: DISINFORMASI

oleh Vicente Diaz de Villegas Roig



Kebenaran adalah korban pertama dalam konflik apapun. Tugas setiap masyarakat sipil adalah mengembangkan ketahanannya dan melindungi informasi sebagai kebaikan bersama. Jika Anda gagal mengambil tempat Anda di lingkungan informasi, orang lain akan melakukannya.

Selama Perang Dingin, potensi kehancuran bersama yang dijamin oleh konflik yang melibatkan senjata nuklir berfungsi sebagai pencegah di lingkungan fisik. Namun, kelahiran internet dan kebangkitan jaringan sosial berikutnya telah menyebabkan lingkungan informasi menjadi medan pertempuran. Instansi pemerintah, organisasi swasta dan kelompok penekan lainnya

berjuang 24/7 untuk mengendalikan narasi – pertempuran di situ kesenjangan teknologi tidak lagi menjadi faktor penentu.

Disinformasi diutamakan dalam krisis saat ini. Meskipun ini bukan fenomena baru, penggunaannya yang sistematis dan kemudahan penyebarannya berkat teknologi baru telah mengubahnya menjadi salah satu kendaraan utama untuk ancaman hibrida. Dalam hal ini, Kerangka Kerja Bersama untuk Melawan Ancaman Hibrida, yang diterbitkan oleh Uni Eropa pada tahun 2016, menyatakan bahwa *"kampanye disinformasi besar-besaran, menggunakan media sosial untuk mengontrol narasi politik atau untuk meradikalisasi, merekrut, dan mengarahkan aktor proksi dapat menjadi kendaraan untuk ancaman hibrida"*.

DISINFORMASI MENYEBABKAN KERAGUAN

Dalam pertempuran untuk narasi, disinformasi berusaha untuk menimbulkan keraguan tentang kebenaran fakta. Kebenaran dengan demikian direlatifkan oleh wacana publik yang direndahkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga yang mengatur masyarakat. Alat utama yang digunakan untuk mencapai efek ini bukanlah kebohongan yang terang-terangan, melainkan eksploitasi informasi yang diambil di luar konteks dan pesan yang lebih menarik emosi daripada alasan. Seorang individu yang ragu-ragu, tidak percaya dan secara permanen menjadi sasaran informasi yang berlebihan adalah berubah-ubah dalam pandangan mereka, yang memudahkan pendapat pasif mereka untuk berubah menjadi keyakinan aktif.

Menilai efektivitas disinformasi bukanlah tugas yang mudah. Pertanyaannya adalah: dapatkah disinformasi menciptakan opini baru, atau hanya memperkuat opini yang sudah ada? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan faktor kerentanan masyarakat, seperti adanya perpecahan eksternal dan internal, keberadaan minoritas, institusi yang rapuh, dan budaya media yang lemah. Media memainkan peran mendasar. Narasi yang disesuaikan (dalam beberapa kasus yang melibatkan penargetan mikro atau bahkan penargetan individual), campur tangan dalam proses demokrasi, pembocoran kepentingan diri sendiri, dan pemalsuan dokumen hanyalah beberapa contoh cara media dapat berkontribusi pada disinformasi.

MELEDAK DI JARINGAN SOSIAL

Mereka yang bertanggung jawab atas kampanye disinformasi telah menemukan di dunia maya tempat yang ideal untuk menyembunyikan jejak mereka. Dengan kata lain, sifat internet membuat sulit untuk meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka, setidaknya di bawah peraturan tradisional.

Sifat horizontal dari jejaring sosial memungkinkan setiap individu untuk menjadi jurnalis tanpa melalui filter editorial apa pun. Kejenuhan komunitas dan kehadiran peternakan troll (kelompok terorganisir orang yang membuat komentar provokatif untuk menciptakan kontroversi atau mengalihkan perhatian dari suatu topik) telah mengubah dinamika generasi dan penyebaran informasi. Sistem penyebaran semi otomatis dan otomatis juga ada sekarang, dalam bentuk bot (program komputer yang secara otomatis melakukan tugas berulang secara online) dan server zombie.

BAGAIMANA MEREKA MELAKUKANNYA?

Untuk meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna internet online, platform menggunakan algoritme penyesuaian yang mengisolasi pengguna di kotak suara ('filter bubble') dengan konten yang terkait dengan riwayat pencarian mereka, mengurangi akses mereka ke informasi yang bertentangan dengan

apa yang telah mereka baca. Komunitas troll melakukan pekerjaan serupa, menciptakan sejumlah besar identitas palsu ('boneka kaus kaki') yang semuanya menyampaikan ide yang sama dengan pesan serupa. Dalam banyak kasus, pesan ini didukung oleh konten palsu yang dibuat dengan alat pengeditan suara, foto, dan video yang semakin canggih.

Humor telah menjadi pusat perhatian dalam kampanye manipulasi informasi, dengan 'meme' – gambar yang dikombinasikan dengan sejumlah kecil teks yang menarik emosi pemirsa dan mudah disampaikan – terbukti menjadi alat yang sangat efektif.

Apa yang benar adalah benar jika semua orang mengatakannya. Pada tahun 2006, Cialdini menetapkan enam prinsip persuasi. Salah satunya – prinsip pembuktian sosial – menyatakan bahwa *'kita menentukan apa yang benar dengan mencari tahu apa yang orang lain anggap benar'*. Prinsip ini tentu berlaku di jejaring sosial, karena begitu informasi ada di radar kami, semakin banyak suka, semakin menarik. Anda juga dapat membeli suka di internet. Salah satu aktivitas utama komunitas troll adalah menambahkan komentar ke postingan satu sama lain untuk memberi kesan bahwa kebanyakan orang setuju dengan ide yang mereka promosikan.

Troll juga bertujuan untuk meningkatkan polarisasi sosial dengan berpartisipasi aktif dan mengambil kedua belah pihak dalam diskusi tentang isu-isu kontroversial seperti imigrasi atau ketegangan rasial. Dalam banyak kasus, situs dan profil aktif dibuat dari server yang sama dan digunakan untuk menghasilkan konten emosional untuk setiap posisi yang saling bertentangan, sehingga berupaya menabur perpecahan sosial yang lebih besar.

KEBOCORAN: DARI MANA PENDAPAT SAYA BERASAL?

Salah satu kendaraan penyebaran yang paling kuat adalah kebocoran informasi. Cara ini sangat efektif karena khalayak sasaran merasa informasi tersebut harus benar karena diperoleh langsung dari sumbernya. Namun, dalam banyak kasus, kebocoran adalah bagian dari kampanye disinformasi, karena penyebarannya bersifat mementingkan diri sendiri dan

Lima langkah untuk mengenali berita bohong

Media sosial dan alat personalisasinya memudahkan dan mempercepat penyebaran cerita bohong. Apa yang bisa dilakukan untuk mengenali dan melawan disinformasi palsu dan bohong?

2 Lihat penulisnya



Apakah orang itu benar-benar ada? Jurnalis terpandang selalu memiliki rekam jejak. Jika penulisnya saja memalsukan nama, yang lainnya juga kemungkinan palsu.

4 Pikirkan sebelum berbagi



Judul mungkin dibuat menarik agar menghasilkan klik. Itu juga bisa memutarbalikkan peristiwa nyata atau lama, atau bisa saja satir. Jika peristiwa itu nyata, media arus utama pasti meliputnya. Bandingkan dan ambil kesimpulan sendiri.

1 Lihat medianya



Apakah Anda mengetahuinya? Lihat bagian 'tentang'. Jika bahasanya terlalu dramatis, Anda harus curiga. Siapa di baliknya? Siapa yang mendanainya? Cek kembali apa yang dikatakan sumber (tepercaya) lainnya.

3 Lihat referensinya



Apakah penulis menggunakan sumber tepercaya (misalnya, outlet media yang sudah berdiri lama dan ternama)? Apakah ahli yang disebutkan benar-benar seorang ahli? Jika berita tersebut menggunakan sumber anonim (atau tanpa sumber), itu bisa saja palsu.

5 Bergabung dengan para penguji mitos



Terus ketahui trik terbaru yang digunakan para pembuat berita palsu.* Laporkan berita bohong. Sebarkan ilmunya.

* Misalnya, ikuti @EUvsDisinfo, @StopFakingNews, atau @DFRLab.

EPRS | Dinas Penelitian Parlemen Eropa

didekontekstualisasi, dan kebocoran tercemar – yang dengan sengaja mengubah cerita – juga ditambahkan, meskipun sering kali tidak diperhatikan.

BAGAIMANA UNI EROPA MELINDUNGI DIRINYA SENDIRI?

Intervensi dalam proses pemilu dapat menargetkan pemilih, melalui kampanye untuk mempengaruhi bagaimana mereka akan memilih, atau sistem elektronik, untuk memodifikasi database yang memberi makan sensus, untuk merusak penghitungan suara atau hanya untuk mencuri data. Kecurigaan belaka bahwa hasil pemungutan suara dapat dimanipulasi menghasilkan

perasaan tidak percaya pada pemilih yang dapat merusak legitimasi proses tersebut. Uni Eropa telah dipaksa untuk bertindak sehubungan dengan meningkatnya kasus campur tangan dalam proses pemilihan, khususnya referendum Brexit, pemilihan presiden AS dan pemilihan Prancis.

Strategi Global EU untuk 2016, tahun referendum Brexit, menetapkan serangkaian prioritas, yang terutama adalah keamanan EU terhadap ancaman saat ini. Untuk mengatasi ancaman tersebut, EU menghadirkan serangkaian peningkatan pada pertahanan, sibernetik, anti-teroris, energi, dan kemampuan komunikasi strategis EU. Yang terakhir, khususnya, harus mampu dengan cepat dan objektif membantah disinformasi, mempromosikan penelitian terbuka dan lingkungan



media baik di dalam maupun di luar Uni Eropa, dan mengembangkan kemampuan Organisasi untuk mengambil tindakan melalui jejaring sosial.

Rencana Aksi Uni Eropa melawan Disinformasi mendefinisikan disinformasi sebagai *'informasi yang benar-benar salah atau menyesatkan yang dibuat, disajikan, dan disebarluaskan untuk keuntungan ekonomi atau dengan sengaja menipu publik, dan yang dapat menyebabkan kerugian publik. Kerugian publik mencakup ancaman terhadap proses demokrasi serta barang publik seperti kesehatan warga Serikat, lingkungan atau keamanan. Disinformasi tidak termasuk kesalahan yang tidak disengaja, sindiran dan parodi, atau berita dan komentar partisan yang teridentifikasi dengan jelas.'*

Tanggapan terkoordinasi Serikat yang disajikan dalam rencana didasarkan pada empat pilar:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga Organisasi untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengekspos disinformasi

Hal ini diusulkan untuk dicapai dengan memperkuat tim komunikasi strategis Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Delegasi Serikat dan Sel Hybrid Fusion dengan staf khusus, layanan pemantauan, dan perangkat lunak analisis data besar.

2. Memperkuat respon terkoordinasi dan gabungan terhadap disinformasi

Rencana tersebut menyatakan bahwa reaksi cepat melalui komunikasi berbasis fakta dan efektif sangat penting untuk melawan dan mencegah disinformasi, termasuk dalam kasus disinformasi mengenai masalah dan kebijakan Serikat Pekerja. Oleh karena itu, pada Maret 2019, Sistem Peringatan Cepat didirikan di Brussel untuk memfasilitasi pembagian data antara Negara Anggota dan lembaga EU sehingga memungkinkan kesadaran situasional bersama. Hal ini pada gilirannya dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan tanggapan terkoordinasi, memastikan efisiensi waktu dan sumber daya.

3. Memobilisasi sektor swasta untuk mengatasi disinformasi

Sekitar 70% lalu lintas web melewati Google dan Facebook. Ini berarti bahwa sebagian besar situs web, termasuk situs berita, diakses melalui platform ini. Uni Eropa menyadari fakta ini dan, sekitar setahun sebelum pemilihan Parlemen Eropa, Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi diterbitkan. Facebook, Google, dan Twitter menandatangani kode ini, berjanji untuk mengembangkan, sebelum pemilihan Parlemen Eropa, kemampuan intelijen internal yang memungkinkan mereka mendeteksi, menganalisis, dan memblokir aktivitas jahat di layanan mereka. Komisi dan Grup Regulator Eropa untuk Layanan Media Audiovisual (ERGA) memantau setiap bulan tindakan yang diambil untuk menegakkan komitmen ini.

4. Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan ketahanan masyarakat

'Kesadaran publik yang lebih besar sangat penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh disinformasi. Titik awalnya adalah pemahaman yang lebih baik tentang sumber disinformasi dan niat, alat, dan tujuan di balik disinformasi, tetapi juga kerentanan kita sendiri.'

BAGAIMANA DENGAN PANDEMI VIRUS CORONA?

Banyaknya informasi – baik itu benar, sengaja menyesatkan atau hanya tidak akurat – tersedia ten-

tang COVID-19 mempersulit individu untuk mengidentifikasi sumber yang dapat dipercaya. 'Infodemik' ini, seperti yang telah dijuluki oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyebar secepat virus.

Asal usul virus corona tidak luput dari manipulasi. Salah satu teori paling umum yang beredar di web adalah bahwa virus itu adalah senjata biologis AS yang sengaja disebar untuk mengikuti perintah Trump untuk mengisolasi Tiongkok. Teori lain mengaitkannya dengan laboratorium Inggris yang diduga juga mera-

cuni pembangkang Rusia Sergei Skripal di Salisbury, sementara yang lain berpendapat bahwa mata-mata Tiongkok mencurinya dari laboratorium Kanada. Banyak lagi teori semacam itu akan menyusul.

Sehubungan dengan itu, resolusi Parlemen Eropa 17 April tentang pandemi COVID-19 mendesak Komisi Eropa untuk melawan upaya propaganda agresif yang memanfaatkan pandemi dengan tujuan melemahkan EU dan menabur ketidakpercayaan penduduk lokal terhadap Uni Eropa.

DI BALIK 'BERITA BOHONG'

10 JENIS BERITA MENYESATKAN

propaganda  dilakukan oleh pemerintah, korporasi, dan LSM untuk mengatur perilaku, nilai, dan pengetahuan menarik emosi bisa bermanfaat atau membahayakan	partisan  Ideologis dan mencakup penafsiran fakta namun dapat mengklaim netral mengutamakan fakta yang sesuai dengan narasi namun mengabaikan pihak lain bahasanya emosional dan menggembugebu	DAMPAK netral rendah menengah tinggi MOTIVASI uang politik/kekuasaan humor/candaan minat (salah)menginformasi
clickbait  judul menarik dan sensasional dibuat untuk mengalihkan perhatian sering menyesatkan dan isinya tidak mencerminkan judul menghasilkan pendapatan iklan	teori konspirasi  berupaya menjelaskan realitas rumit sederhana sebagai respons dari rasa takut atau ketidakpastian tidak dapat diuji dan bukti yang menyanggah konspirasi dianggap sebagai bukti konspirasi lebih jauh menolak para ahli dan otoritas	
konten bersponsor  (iklan yang dibuat seperti artikel) potensi konflik kepentingan untuk organisasi berita asli konsumen mungkin tidak mengenali konten sebagai iklan jika tidak dijelaskan	ilmu semu  pemasok greenwashing, obat ajaib, antivaksin, dan penyangkalan perubahan iklim salah mengartikan penelitian asli dengan klaim palsu yang lebih-lebihkan sering berlawanan dengan para ahli	
satir dan hoaks  komentar sosial atau humor kualitasnya beragam dan maksud sebenarnya mungkin tidak nampak dapat memperlakukan orang yang menganggap konten itu asli	informasi keliru  mencakup campuran konten faktual, palsu, atau setengah palsu bisa bermaksud memberi informasi, namun penulis tidak sadar bahwa kontennya bohong atribusi palsu, konten yang diubah, dan judul menyesatkan	
kesalahan  organisasi berita baru terkadang membuat kesalahan kesalahan dapat mencederai merek, menyinggung, atau berujung pada proses pengadilan organisasi terkemuka mengeluarkan pernyataan maaf	bohong  konten yang seluruhnya dikarang dan disebar untuk menyesatkan taktik pemasaran gerilya; bot, komentar, dan branding palsu terdorong pendapatan iklan, pengaruh politik, atau keduanya	

KETAHUI LEBIH JAUH...

atribusi palsu gambar, video, atau kutipan autentik diatribusikan ke peristiwa atau orang yang salah	menyesatkan konten tidak mencerminkan judul dan keterangan
bajakan situs web dan akun Twitter yang berpura-pura menjadi merek atau orang terkenal	konten yang diubah konten seperti statistik, grafik, foto, dan video telah dimodifikasi atau diubah

eavi
 LITERASI MEDIA untuk MASYARAKAT
 www.eavi.eu

Catatan: Dampak dan motivasi di atas tidak pasti dan sebaiknya hanya digunakan sebagai panduan diskusi



Menyusul adopsi resolusi ini, pada 30 April, Parlemen Eropa dan HR/VP Borrell memperdebatkan laporan terbaru oleh Perjanjian di Layanan Tindakan Eksternal Eropa tentang aktivitas disinformasi terkait pandemi COVID-19. Laporan tersebut mengungkapkan banyak fakta yang meresahkan, misalnya sejumlah besar kampanye disinformasi terkoordinasi untuk menyebarkan informasi kesehatan palsu di dan sekitar Eropa, dan teori konspirasi dan klaim bahwa sistem politik otoriter – bukan demokrasi – paling cocok untuk menangani krisis saat ini.

Setelah debat, Ketua Komite Urusan Luar Negeri David McAllister menyatakan bahwa, *“untuk melawan narasi negatif, sangat penting untuk berkomunikasi tentang dukungan keuangan, teknis dan medis EU dalam menanggapi pandemi, baik antara negara-negara EU dan mitra kami yang lain, di antaranya Tiongkok. Sebagian besar aksi solidaritas, oleh organisasi, profesional atau individu, terjadi jauh dari pandangan kamera dan wartawan. Tetapi juga tidak adil bagi semua petugas kesehatan, sukarelawan yang membantu sesama warga dan orang-orang yang mengatur pengangkutan peralatan penting untuk membiarkan kebohongan tentang kurangnya solidaritas Eropa menyebar tanpa secara efektif menantang mereka.*

SIAPA YANG MENYATAKAN KETIDAKBERPIHAKAN 'POLISI DIGITAL'?

Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi mendapat manfaat dari dorongan awal yang besar ketika platform jejaring sosial besar menerapkan alat pengaturan mandiri (terutama filter dan moderator) terhadap apa yang disebut aktivitas jahat. Namun, kedua alat tersebut dapat dimanipulasi, sehingga netralitasnya dipertanyakan dan kekuatannya untuk membentuk opini tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan di atas, harus diingat bahwa, dalam upaya mengidentifikasi manipulasi informasi, seseorang berisiko menciptakan 'kementerian kebenaran' yang, untuk memperkuat narasi politik tertentu, merusak salah satu dari pencapaian terbesar demokrasi: kebebasan.

INISIATIF LAINNYA

Pusat Keunggulan StratCom NATO di Riga memberikan analisis dan saran, mendukung pengembangan doktrin dan melakukan penelitian dan eksperimen untuk menemukan solusi praktis untuk masalah di bidang komunikasi strategis, termasuk disinformasi.

Ada juga organisasi swasta atau semi-swasta lainnya, seperti Lab Penelitian Forensik Digital (DFRLab) dan Bellingcat, yang menganalisis sumber terbuka dan jejaring sosial untuk mengidentifikasi dan mengungkap disinformasi.

Akhirnya, media arus utama tradisional – hadir sebagaimana adanya di web maupun di media cetak – dapat memainkan peran penting sebagai penjaga praktik jurnalistik yang sehat. Mereka adalah elemen kunci dalam mendeteksi dan melaporkan informasi yang dimanipulasi, dan mereka juga memiliki peran dalam mendidik masyarakat. Sudah ada beberapa media yang melakukan upaya khusus untuk mengungkap manipulasi informasi, seperti *Agence France Presse* dengan 'Fact Check', BBC dengan 'Reality Check' dan *Le Monde* dengan 'Decodex'.

Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari lingkungan di situ pemerintah, lembaga, jurnalis, dan organisasi khusus berkolaborasi berdasarkan pemahaman yang sama tentang dinamika disinformasi.

#EUvsDisinfo

RENCANA TINDAKAN MELAWAN DISINFORMASI

MEMAHAMI ANCAMAN DAN MEMPERCEPAT RESPONS EROPA

Disinformasi adalah tantangan yang berkembang, yang berpotensi tinggi memberi dampak buruk terhadap proses demokrasi dan debat sosial. Efek merugikannya yang makin meningkat di tengah masyarakat Uni Eropa membutuhkan pendekatan terkoordinasi, tergabung, dan berkelanjutan untuk melawannya secara keseluruhan.

83% PENDUDUK EROPA BERPIKIR BAHWA BERITA BOHONG MENGANCAM DEMOKRASI*

73% PENGGUNA INTERNET MENGKHAWATIRKAN SOAL DISINFORMASI DI MASA PRAPEMILU *

RENCANA TINDAKAN MELAWAN DISINFORMASI

Kumpulan tindakan yang bertujuan membangun kapabilitas dan memperkuat kerja sama antara Negara Anggota dan institusi Uni Eropa guna menangani disinformasi secara proaktif

TINGKATKAN DETEKSI, ANALISIS, DAN PAPARAN DISINFORMASI

- Investasi di alat digital, keahlian analisis data, dan staf ahli di lingkungan institusi Uni Eropa dan Negara Anggota
- Evaluasi jangkauan dan dampak disinformasi

KERJA SAMA YANG LEBIH KUAT DAN RESPONS GABUNGAN TERHADAP DISINFORMASI

- Siapkan Sistem Siaga Cepat untuk memperingatkan adanya kampanye disinformasi secara real time
- Negara Anggota menetapkan titik kontak nasional untuk disinformasi dan untuk bertukar informasi terkait

KERAHKAN SEKTOR SWASTA UNTUK MENANGGULANGI DISINFORMASI

- Penerapan Undang-Undang Uni Eropa untuk praktik disinformasi
- Perusahaan online besar seperti Google, Facebook, Twitter, dan Mozilla telah setuju
- Pelaporan rutin mulai Januari 2019 dan kemungkinan tindakan regulasi apabila hasilnya tidak memuaskan

TINGKATKAN KESADARAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT

- Kampanye yang ditargetkan di Eropa dan luar Eropa
- Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengenali dan mengungkap disinformasi
- Mendukung media independen dan pengecek fakta



*Sumber: Flash Eurobarometer 464 (Berita bohong dan disinformasi online) dan Special Eurobarometer 477 (Demokrasi dan pemilu)

DAFTAR PENULIS

Luís Amorim saat ini diperbantukan untuk Sekretariat Jenderal Dewan EU (GSC) sebagai konsultan untuk 'Sel Koordinasi Presidensi PPUE2021' dari Kementerian Luar Negeri Portugal. Dia telah memegang beberapa jabatan di GSC, termasuk petugas pers mantan Perwakilan Tinggi Javier Solana, koordinator Bagian Penanggulangan Krisis Pusat Situasi EU (SITCEN) dan Kepala Unit Kebijakan Keamanan di Ditjen RELEX. Dia berpartisipasi dalam Kursus Tingkat Tinggi ESDC pertama di CSDP. Ia memiliki latar belakang akademis di bidang Sosiologi dan Pendidikan.

Sven Biscop mempelajari ilmu politik di Universitas Ghent dan memperoleh gelar PhD, dan saat ini bekerja sebagai Profesor di sana, mengajar kuliah tentang strategi dan kebijakan luar negeri Belgia dan Uni Eropa. Selain itu, beliau menjabat sebagai Direktur Eropa dalam Program Dunia di Institut Egmont–Royal untuk Hubungan Internasional di Brussel, sebuah wadah pemikir yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri Belgia. Pada tahun 2015, dalam rangka perayaan peringatan yang kesepuluh, beliau diangkat menjadi Anggota Kehormatan Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDC), sebuah lembaga EU tempat ia mengajar para diplomat, staf militer, dan pejabat dari semua Negara Anggota EU. Dia juga pernah menjadi pembicara reguler di Royal Military Academy di Brussels, di berbagai perguruan tinggi staf di Eropa dan Amerika, dan di People's University of China di Beijing, di sana dia menjabat sebagai Senior Research Associate. Dia juga Peneliti Senior di Institut Austria untuk Kebijakan Eropa dan Keamanan dan di Kolese Pertahanan Baltik. Dia mengetuai juri untuk Penghargaan PhD Strategi Global tahunan, yang diberikan oleh Egmont dan ESDC. Buku terbarunya adalah *European Strategy in the 21st Century* (Routledge, 2019). Sven dianugerahi salib Officer of the Order of the Crown (Officier de l'Ordre de la Couronne, Belgia, 2020) dan Grand Decoration of Honor (Grosses Ehrenzeichen für Verdienste, Austria, 2017). Sven tinggal di Brussel bersama suaminya Aberu, di tengah-tengah banyak buku, perlengkapan militer, dan chinoiserie. Sayangnya mereka terlalu sering bepergian untuk memelihara kucing.

Vicente Diaz de Villegas bekerja sebagai penasihat kabinet untuk Wakil Menteri Pertahanan Spanyol untuk Urusan Politik. Sebelumnya ia bekerja sebagai kepala area operasi informasi di Komando Operasi Gabungan Spanyol. Antara 2013 dan 2016, ia bertugas di Staf Militer Uni Eropa dan bertanggung jawab atas area Operasi Informasi dalam proses perencanaan strategis yang terkait dengan operasi dan misi militer CSDP. Selama awal kariernya, ia ditempatkan sebagai perwira infanteri di unit parasut, serangan udara, dan infanteri ringan. Letnan Kolonel Diaz de Villegas lulus dari Staf Umum Gabungan Spanyol dan memiliki latar belakang operasional dengan penempatan di SFOR, KFOR, Amber Fox, Irak Freedom dan Inherent Resolve.

Dirk Dubois lulus dari Akademi Militer Belgia dengan gelar master dalam ilmu sosial dan militer pada tahun 1985. Pada bagian awal karirnya, beliau menduduki beberapa pos operasional, termasuk di luar negeri, serta berbagai posisi sebagai staf. Dari 2007 hingga 2012 ia menjadi manajer pelatihan di ESDC, sebelum bergabung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Pertahanan Belgia. Pada 1 April 2015, ia diangkat sebagai Kepala ESDC. Pada Desember 2017, Negara-negara Anggota Uni Eropa memutuskan dengan konsensus untuk memperpanjang mandatnya hingga 2022.

Sorin Dumitru Ducaru telah menjadi Direktur Pusat Satelit Uni Eropa (SatCen) sejak Juni 2019. Dia sebelumnya memegang posisi Asisten Sekretaris Jenderal NATO, Kepala Divisi Tantangan Keamanan Muncul NATO, dan duta besar Rumania untuk NATO, Amerika Serikat dan PBB di New York. Ia juga menduduki berbagai posisi di Kementerian Luar Negeri Rumania (MFA) seperti: juru bicara MFA, direktur Kantor Menteri dan kepala Direktorat NATO dan Isu Strategis. Dia memegang gelar dalam Studi Elektronika & Komputer Terapan (BSc, Universitas Politeknik Bucharest), Ilmu Politik & Hubungan Internasional (MPhil, Universitas Amsterdam) dan Hubungan Ekonomi Internasional dan Manajemen Kelembagaan (PhD, Akademi Studi Ekonomi, Bucharest). Dia telah terlibat secara intens secara intelektual dan profesional dalam menjembatani kesenjangan teknologi-kebijakan dan dampak teknologi terhadap keamanan. Duta Besar Ducaru juga telah terlibat dalam kegiatan akademik dan ilmiah, sebagai rekan atau dosen tamu di Universitas Nasional untuk Studi Politik (Bucharest, Rumania), Kolese Pertahanan NATO (Roma, Italia), Sekolah Pemerintahan Kennedy, Universitas Harvard (Cambridge, AS), dan Universitas Leiden (Belanda). Dia adalah Ketua Kehormatan Dewan Ilmiah Pusat Strategi Baru (Bucharest), Anggota Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Anggota Dewan Penasihat Institut Masyarakat Digital (Berlin), anggota Pusat Keunggulan Keamanan Siber NATO (Tallin), Penasihat Khusus untuk Global Commission on the Stability of Cyberspace (The Hague), dan mantan Senior Fellow di Hudson Institute (Washington DC).

Daniel Fiott adalah Editor Keamanan dan Pertahanan di Institut Studi Keamanan Uni Eropa, posisi yang dipegangnya sejak 2016. Di EUISS, Fiott menganalisis kebijakan keamanan dan pertahanan EU. Ia juga seorang Profesor Tamu di Institut Studi Eropa di Free University of Brussels (VUB), dan Dosen Tamu di Sekolah Kajian Internasional Brussel, Universitas Kent, di sana ia mengajar keamanan Eropa. Sebelum bergabung dengan EUISS, Fiott memegang beberapa posisi thinktank dan dia juga Anggota dari Yayasan Penelitian–Flanders. Fiott meraih gelar dari University of Cambridge dan dianugerahi gelar PhD di Free University of Brussels.

Harald Gell lulus sebagai yang terbaik dari Akademi Militer Theresian sebagai Perwira Artileri. Setelah ditempatkan di Balkan dan Timur Tengah, ia menyelesaikan 3 gelar master di Austria dan Hongaria. Dia dianugerahi gelar PhD dalam Riset Keamanan oleh Universitas Sigmund Freud. Sebagai bagian dari proses habilitasi untuk penunjukan sebagai Associate Professor di Universitas Pertahanan di Brno, ia memberikan bukti bahwa pertukaran internasional berdampak positif pada kompetensi taruna. Sejak 2015 ia telah memimpin Kelompok Implementasi.

Crista Huisman adalah Kepala Sektor Manajemen Krisis Sipil (CSDP) di EEAS. Dalam posisi ini dia bertanggung jawab atas implementasi keseluruhan dari Perjanjian CSDP Sipil, termasuk memperkuat hubungan keamanan internal-eksternal (kerja sama CSDP-JHA) dan pengembangan kemampuan sipil. Sejak lulus sebagai sosiolog, Crista telah mengerjakan berbagai tugas di bidang manajemen krisis sipil, termasuk misi CSDP dan Kapabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Sipil (CPCC). Dia saat ini tinggal di Brussel bersama suami dan dua putrinya.

Arnold Kammel adalah Kepala Kabinet Kementerian Pertahanan Federal dan Direktur Kebijakan Pertahanan. Mantan jabatannya termasuk posisi kepemimpinan dalam administrasi nasional dan wadah pemikir. Dari 2015 hingga 2018, ia adalah Direktur Institut Austria untuk Kebijakan Eropa dan Keamanan (AIES), yang merupakan anggota jaringan ESDC. Dia memegang beberapa gelar akademik (D.Jur., MPhil, MA) dan menyelesaikan studinya di universitas Austria di Wina, Eisenstadt dan Graz serta

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Tn. Kammel merupakan dosen terkenal tentang integrasi Uni Eropa, hukum Uni Eropa, lembaga Uni Eropa dan kebijakan Eropa di universitas, akademi militer dan Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa. Penelitian dan publikasinya mencakup topik yang berkaitan dengan Uni Eropa, hubungan transatlantik, dan politik internasional.

Georg Klein adalah administrator politik di Sekretariat Jenderal Dewan Uni Eropa, di sana ia menangani masalah CSDP di Direktorat Jenderal Urusan Luar Negeri. Sebelum itu, ia bekerja di administrasi negara bagian Bavaria dan untuk Anggota Parlemen Jerman. Mr Klein belajar politik, sejarah dan hubungan internasional di University of Tübingen, SciencesPo di Paris dan di London School of Economics.

Tania Lañici adalah analis kebijakan keamanan dan pertahanan di Badan Penelitian Parlemen Eropa, lembaga pemikir internal Parlemen Eropa. Dalam peran ini, ia mendukung Anggota Parlemen Eropa dalam pekerjaan parlementer mereka dengan pengarahan dan analisis sambil secara teratur menulis publikasi. Tania juga melakukan PhD paruh waktu tentang kerja sama pertahanan transatlantik di Universitas Ghent dan di Sekolah Doktoral di CSDP di Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa. Dia juga seorang Rekan Transatlantik Denton dengan Pusat Analisis Kebijakan Eropa di Washington DC. Pada November 2020 ia ditunjuk sebagai salah satu Pemimpin Muda NATO2030 untuk membantu Sekretaris Jenderal Stoltenberg dalam proses refleksi strategis NATO2030.

Jérôme Legrand adalah analis kebijakan di Parlemen Eropa, yang menangani masalah keamanan dan pertahanan untuk komite SEDE, AFET, dan INGE. Dia sebelumnya bekerja di EEAS sebagai ketua alternatif dari COARM Working Party, yang bertanggung jawab atas masalah kontrol ekspor senjata, dan sebelumnya di Komisi Eropa (DG Enlargement dan DG External Relations). Tn. Legrand adalah mantan alumni ESDC dan telah berkontribusi pada kelompok kerja EP yang berurusan dengan pemikiran strategis dan pandangan ke depan, dengan fokus saat ini pada otonomi strategis.

Gustav Lindstrom adalah Direktur Institut Studi Keamanan Uni Eropa (EUISS), badan Uni Eropa yang menganalisis masalah kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai direktur, ia juga memimpin Dewan Kerja Sama Keamanan di Komite Asia-Pasifik-EU (CSCAP-EU). Dr Lindstrom meraih gelar doktor dalam analisis kebijakan dari RAND Graduate School dan MA dalam studi kebijakan internasional dari Stanford University.

Frédéric Maduraud adalah orang Prancis. Sejak 1 September 2020 menjabat sebagai Kepala Bagian Politik, Pers dan Informasi/Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Myanmar. Dari tahun 2016 hingga 2020 menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Kemitraan dan Perjanjian di Direktorat Kebijakan Keamanan dan Pertahanan EEAS. Ia memulai karirnya sebagai asisten Nn Nicole Fontaine, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Parlemen Eropa (1991-1993). Ia bergabung dengan Komisi Eropa pada tahun 1994, bertugas di DG CONNECT (1994–2006) dan DG RELEX, sebelum bergabung dengan Layanan Eropa (2011-2019). Selama karirnya ia telah berpartisipasi dalam berbagai negosiasi internasional, termasuk: Perjanjian Umum tentang Layanan Telekomunikasi Dasar di WTO (1994-1997), Konvensi UNESCO tentang Keanekaragaman Budaya (2005), akses Tiongkok dan Rusia ke WTO (1999). -2008), dan kemitraan pertahanan dan keamanan termasuk perjanjian partisipasi kerangka kerja dengan Yordania dan Vietnam (2018-2020). Dia adalah diplomat EU untuk Tiongkok sebagai Penasihat untuk Urusan Politik dan Keamanan (2009-2013), dan kemudian ditempatkan di Bangladesh sebagai Kepala Seksi Politik,

Perdagangan dan Pers/Wakil Kepala Delegasi (2013-2016). Dia memegang gelar master dalam Sejarah Hubungan Internasional, DESS di bidang ekonomi industri jaringan, dan diploma Studi Eropa Lanjutan dari College of Europe di Bruges. Dia telah menjadi Anggota Dewan Yayasan Jean Monnet untuk Eropa di Lausanne sejak 1987. Dia berbicara bahasa Inggris, Mandarin dan Jerman.

Fernando Moreno adalah seorang perwira tentara Spanyol (OF5) yang saat ini bertugas di cadangan. Fernando telah mengabdikan setengah dari kehidupannya untuk ESDP/CSDP dalam struktur nasional, Staf Militer Uni Eropa dan EEAS. Dia telah melakukan atau berkontribusi pada perencanaan di tingkat politik-strategis misi dan operasi CSDP (EUTM Somalia, ALTHEA, EUCAP Sahel Niger, EUAM Irak, EUAVSEC Sudan Selatan, EUAM Ukraina dan EUNAVFOR Sophia) dan tanggapan CSDP potensial lainnya dalam skenario krisis termasuk Tunisia, Burundi atau EVOLA. Baru-baru ini, di EEAS, ia telah berkontribusi pada pembentukan Fasilitas Perdamaian Eropa. Fernando sering menjadi pembicara dan fasilitator pada kursus dan kegiatan pelatihan CSDP dan merupakan Ketua Ikatan Alumni ESDC.

Diego de Ojeda García-Pardo adalah pejabat Komisi Eropa dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam hubungan internasional, dengan spesialisasi di CFSP/CSDP, Timur Tengah, Rusia, dan Komunikasi Publik. Sejak Januari 2013 Diego de Ojeda menjabat sebagai Wakil Tetap Komisi Eropa untuk Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa dan, sejak Oktober 2018, juga sebagai Kepala Unit di Sekretariat Jenderal Komisi Eropa untuk Koordinasi Implementasi Kebijakan Luar Negeri, Keamanan dan Pertahanan. Sebelumnya, ia adalah Direktur hubungan EU di Organisasi Negara-negara Ibero-Amerika (OEI) di Madrid (2012), Direktur Jenderal tangki aksi diplomasi publik yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Spanyol (Centro Sefarad-Israel) untuk mempromosikan hubungan antara Spanyol, Israel dan komunitas Yahudi di seluruh dunia (2008-11), penasihat Perdana Menteri Spanyol di Mediterania, Timur Tengah dan Asia (2004-08) dan Juru Bicara Christopher Patten, Komisararis Uni Eropa untuk Hubungan Eksternal (2002-08). Dia memiliki gelar MA dalam Hukum Uni Eropa dari Université Libre de Bruxelles, Diploma Pascasarjana Hukum Inggris dari University of Kent dan Gelar Hukum dari Universidad Complutense di Madrid, kota kelahirannya.

Luiza-Iulia Pufu adalah seorang diplomat Rumania dengan latar belakang Urusan Eropa. Pada 2019, selama Presidensi Rumania pertama di Dewan Uni Eropa, ia menjabat sebagai penasihat Menteri Urusan Uni Eropa Rumania. Dalam dua tahun terakhir dia telah berkontribusi sebagai ahli dalam kursus CSDP yang didedikasikan untuk negara-negara mitra EU di Balkan Barat dan Kemitraan Timur. Artikelnya mencakup pandangan pribadi dan tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri Rumania atau Kedutaan Besar Rumania di Spanyol, saat ini dia menjabat sebagai pejabat politik dan komunikasi di sana.

Sebastian Puig Soler telah menjadi perwira di Korps Pasokan dan Keuangan Angkatan Laut Spanyol sejak 1994. Dia saat ini bekerja sebagai analis masalah keuangan keamanan dan pertahanan Uni Eropa di Direktorat Jenderal Kebijakan Pertahanan Kementerian Pertahanan Spanyol, setelah enam tahun bertugas di luar negeri, pertama sebagai Kepala Urusan Keuangan di Kantor Atase Angkatan Laut Spanyol di Washington DC (2013-2016) dan kemudian sebagai Manajer Keuangan Staf Militer Uni Eropa (EUMS) di Brussel (2013 hingga 2019). Dalam kapasitas terakhir, ia terlibat aktif dalam pengembangan instrumen pendanaan Organisasi baru di bidang Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP), dan Fasilitas Perdamaian Eropa (EPF). Dia telah menjadi Staf Perwira di Angkatan Bersenjata Spanyol sejak 2011, meraih gelar MBA di bidang teknologi informasi dan ahli dalam pengadaan, manajemen keuangan, program internasional dan akuntansi analitis.

Jochen Rehr adalah perwakilan Austria dari Direktur Riset Nasional di Brussel. Sebelumnya, dia bekerja di Akademi Keamanan dan Pertahanan Eropa dan bertanggung jawab atas alat eLearning dan kursus kemitraan (terutama untuk Balkan Barat dan Kemitraan Timur). Dia adalah direktur kursus untuk lebih dari 130 kegiatan pelatihan ESDC, memimpin format Dewan Akademik Eksekutif tentang keamanan siber dan menyampaikan kuliah di berbagai kesempatan. Pada tahun 2001, ia direkrut untuk Kementerian Pertahanan dan menjadi Kepala Unit Kebijakan Pertahanan antara tahun 2008 dan 2012. Tn. Rehr secara aktif terlibat dalam Kepresidenan EU Austria pada tahun 2006 dan 2018. Dia memegang beberapa gelar akademik (D.Iur, MPhil, M.A.I.S.) dari universitas Austria di Wina dan Salzburg serta dari Akademi Diplomatik Wina. Selain fungsi sipilnya, Tn. Rehr adalah seorang perwira milisi di Angkatan Bersenjata Austria dan telah bertugas di misi di dalam dan luar negeri (misalnya KFOR). Penelitian dan publikasinya berfokus pada isu-isu Uni Eropa yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan.

Klaus Schadenbauer adalah seorang Kolonel Angkatan Bersenjata Austria. Selama 20 tahun terakhir ia telah menjabat sebagai perwira infanteri dan di berbagai posisi komando dan staf di Austria, Balkan, Asia Tengah dan Kaukasus. Dari 2016 hingga 2020 ia bekerja untuk Staf Militer Uni Eropa di Brussel di Direktorat Konsep dan Kapabilitas. Dia telah terlibat dalam semua proses dan inisiatif Pembangunan Kapabilitas EU yang relevan dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk CARD, PESCO, dan Proses Tujuan Utama EU. Sejak 2020 ia memimpin batalyon infanteri ringan ke-18 di Styria, Austria.

Jiří Šedivý telah menjadi Kepala Eksekutif Badan Pertahanan Eropa (EDA) sejak Mei 2020. Beliau diangkat oleh Dewan Pengarah pada 5 Maret 2020 setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan, Josep Borrell. Tn. Šedivý membawa sertanya pengalaman yang luas dalam domain pertahanan, setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Cheska (2006-2007), Wakil Menteri Pertahanan (2010-2012), Asisten Sekretaris Jenderal NATO untuk Kebijakan dan Perencanaan Pertahanan (2007-2010) dan Wakil Tetap Republik Cheska untuk NATO (2012-2019). Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Urusan Eropa Republik Cheska (2007) dan perwakilan khusus untuk ketahanan dan ancaman baru di Kementerian Luar Negeri Cheska (2019-2020). Tn. Šedivý memiliki latar belakang akademis yang menonjol. Dia adalah lulusan Universitas Charles (Praha), di sana dia memperoleh gelar PhD dalam ilmu politik, dan dari King's College (London), di sana dia memperoleh gelar MA dalam studi perang. Dari 2004 hingga 2006 ia adalah Profesor Studi Keamanan di Pusat Studi Keamanan Eropa George C. Marshall, memberi kuliah tentang topik-topik seperti transformasi sektor pertahanan, hubungan sipil-militer, dan pembuatan strategi nasional. Antara 1999 dan 2004, ia adalah Direktur Institut Hubungan Internasional di Praha, Asisten Profesor Hubungan Internasional di Universitas Charles, Praha, dan Profesor Keamanan Eropa di Universitas New York, Pusat Praha. Dia memainkan peran penting, sebagai seorang ahli, dalam akses Republik Cheska ke NATO. Selama periode inilah ia juga menjabat sebagai penasihat eksternal Presiden Václav Havel.

Alison Weston adalah Kepala Divisi Kemitraan dan Perjanjian di Layanan Tindakan Eksternal Eropa, mengawasi kemitraan di bidang keamanan dan pertahanan dengan organisasi internasional seperti PBB, NATO, Uni Afrika, dan negara-negara ketiga. Dengan pengalaman yang signifikan dalam struktur manajemen krisis sipil dan militer EU, dia telah terlibat dalam evolusi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama EU sejak tahap awal, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan banyak misi manajemen krisis sipil EU.

